

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2016**

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Peraturan Daerah	iii

LAMPIRAN**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan	I-17
1.5 Sistematika Penulisan	I-18

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi	
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-2
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana	II-23
2.1.3 Demografi	II-25
2.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat	
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-30
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-44
2.3 Aspek Pelayanan Umum	
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-54
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-68
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-80
2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	II-90
2.4 Aspek Daya Saing	
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-93
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur	II-95
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-98
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-102

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2011-2015	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III-4
3.1.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah	III-12
3.1.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	III-18
3.1.2 Neraca Daerah	III-19
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015	III-23
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-27
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-28
3.3 Kerangka Pendanaan	III-31
3.2.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat	III-31



3.2.2 Proyeksi Dana	III-32
3.2.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-35
3.2.3 Kebijakan Alokasi Anggaran	III-36

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-4
4.2 Isu Strategis	IV-16
4.2.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional	IV-17
4.2.2 Kajian Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung	IV-22
4.2.3 Kajian Pembangunan Daerah Lainnya	IV-23
4.2.4 Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah	IV-23
4.3 Penetapan Isu Strategis	IV-26

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Arahan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025	
5.2 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang	
5.2.1 Sasaran Pembangunan Lima Tahun Pertama	V-13
5.2.2 Sasaran Pembangunan Lima Tahun Kedua	V-15
5.2.3 Sasaran Pembangunan Lima Tahun Ketiga	V-18
5.2.4 Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keempat	V-20
5.3 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang	
5.3.1 RPJM Kesatu, Pembangunan Kerangka Dasar	V-23
5.3.2 RPJM Kedua, Pengembangan Kemajuan Daerah	V-24
5.3.3 RPJM Ketiga, Pemantapan Kemajuan Daerah	V-24
5.3.4 RPJM Keempat, Mempertahankan Momentum Kemajuan	V-25
5.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021	V-26
5.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021	V-30

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2 Kewilayahan Perencanaan Pembangunan	VI-2

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi	X-1
10.2 Kaidah Pelaksanaan	X-2

BAB XI. PENUTUP

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Seri E Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung 404);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016-2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kondisi umum daerah adalah gambaran daerah dari aspek geografi, demografi dan gambaran penting lainnya serta kinerja daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum konsultasi publik antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

11. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) periode.
18. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

20. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan peyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil sumber daya manusia), barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
28. Kegiatan prioritas adalah bagian yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
29. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dan untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

30. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
32. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keuara, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
33. Indikator kinerja daerah adalah tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
34. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
36. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*impact*) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya *outcome* dari program-program dalam suatu sasaran.
38. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
39. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Lampung Timur yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Lampung Timur dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi.

40. Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk menadani pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Peraturan Daerah tentang RPJMD berkedudukan sebagai berikut :

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD Tahun 2005-2025;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD adalah sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. penyusunan Renja PD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
 - a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan perencanaan penganggaran;
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat tentang kondisi Kabupaten Lampung Timur secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

**BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Memuat analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat penjelasan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH**

Memuat mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan urusan Pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab PD.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD
Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 September 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 02 September 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

ttd

PUJI RIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 15**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR PROVINSI LAMPUNG 06**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Bahwa Pemerintahan Negara dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk terwujudnya tujuan tersebut di atas, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah dengan mengisi, melaksanakan dan menyempurnakan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi sebagaimana yang diharapkan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan Guna memberikan jaminan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun suatu perencanaan untuk suatu periode tertentu.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu kesatuan/sinergis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Lebih lanjut, pada Pasal 264 ayat (1) mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan :

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

c. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan perencanaan penganggaran;
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD dan RKPD, serta perencanaan penganggaran;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pendekatan Politis, Teknokratis, Partisipatif, dan *Top-Down Bottom-Up*, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka RPJMD Kabupaten Lampung Timur mempunyai Visi: ***“Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat”***. Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lampung Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa salah satu tugas dari kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Disini terlihat betapa penting dan mendesaknya dilakukan penyusunan dan penetapan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di suatu daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dunia usaha, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat luas, maka dalam proses penyusunannya juga telah mencerminkan keterlibatan pihak-pihak terkait. Adapun asas dan tujuan perencanaan tersebut dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi/pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur masa bakti 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-585 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-586 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung, maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Gambar 1.1
Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Periode 2016-2021



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja



dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan RPJPD Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah visi daerah : *Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan*, yang terdiri atas 7 misi yang didalamnya memuat indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020), Tahap IV (2021-2025).

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

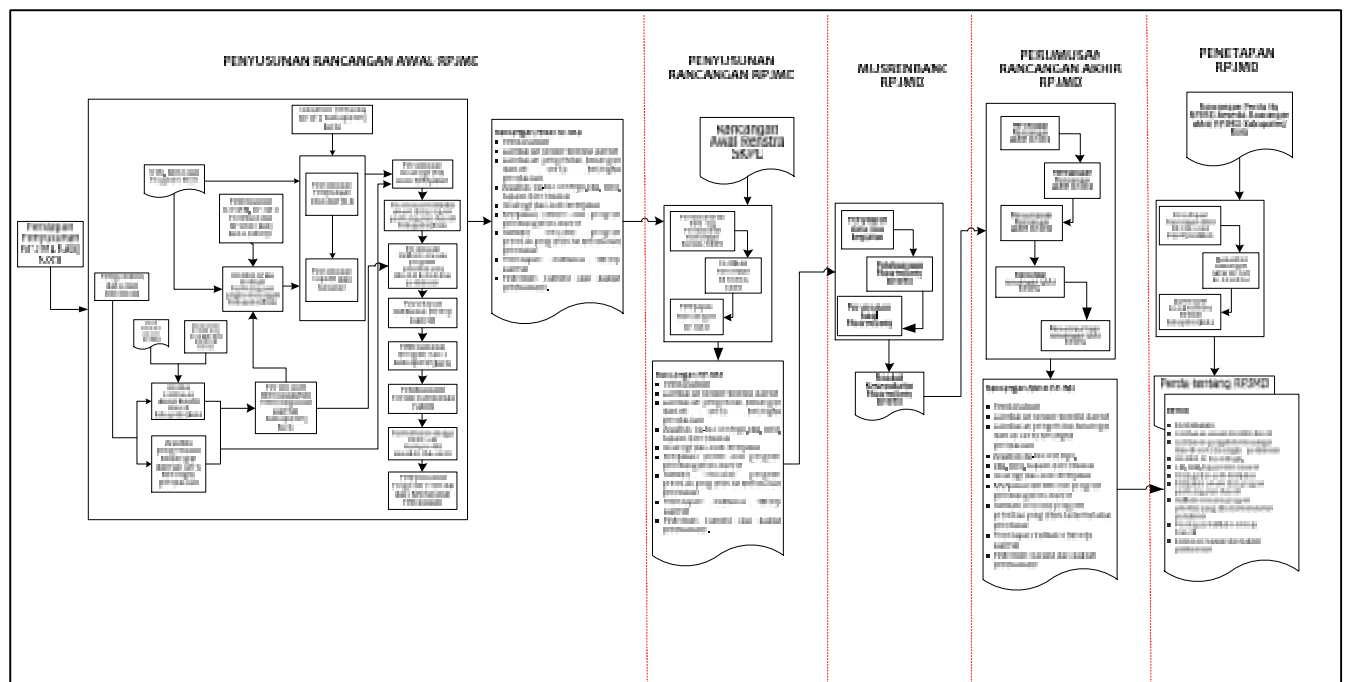
Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dengan tahun pertama perencanaan 2017, merupakan Tahap III (ketiga) RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah,

serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Politis, pendekatan ini bermaksud bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun dalam rancangan RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur ini adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjangkaran aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur





Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu :

- 1 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
- 2 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- 3 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 4 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
- 5 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 ini disusun dengan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);



17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04).

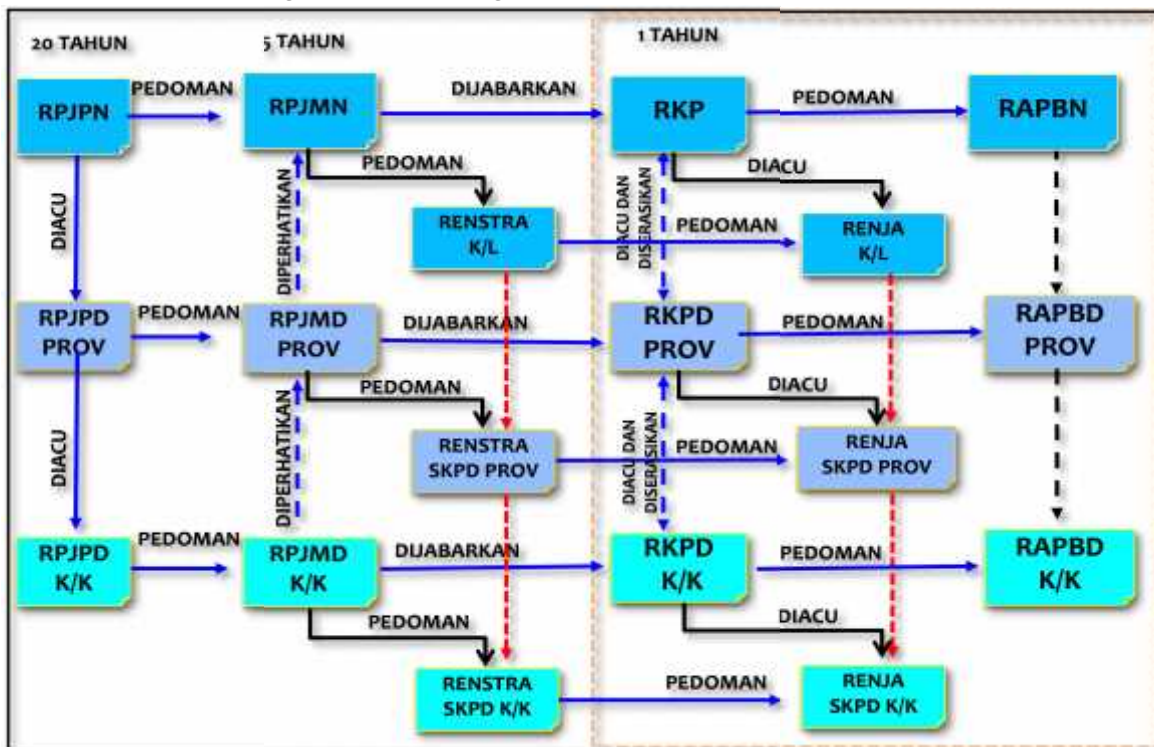
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014-2019. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJM Nasional

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dalam Buku III Agenda Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dimuat sasaran pengembangan Wilayah Sumatera pada Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 1 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Sumatera, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 10 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,3 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,13 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,10 73,69.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sumatera, maka akan dipercepat pembangunan 2 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada



- saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi.
4. Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran sedikitnya 1500 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 600 desa.
 5. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota/desa, diharapkan dapat diwujudkan 8 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
 7. Sasaran Otonomi Daerah adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% pada Tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 10 provinsi dan 23 kabupaten/kota di wilayah Sumatera; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 65% dan S2-S3 sebesar 10%; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sumatera sebesar 150 angkatan (dengan proyek awal Provinsi Lampung); (6) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (8) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 90%; (9) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Aceh dan Riau); (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; dan (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Riau).
 8. Sasaran Pengurangan Bencana adalah menurunnya indeks risiko bencana pada 5 PKN (Kota Medan, Kota Padang, Kota Lhokseumawe, Bandar Lampung, Jambi) dan 15 PKW (Kota Banda Aceh, Langkat, Deli Serdang, Karo, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Banyuasin, Lahat, Lampung Barat, Tanggamus, Sarolangun, Kerinci) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KAPET, KSN atau PKSN.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir Tahun 2019, pembangunan Wilayah Sumatera semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Sumatera terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 23,9 persen (2014) menjadi 25,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera.

2. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMD Provinsi Lampung

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, arah kebijakan umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan wilayah dan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengembangan wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi wilayah, tata ruang, kawasan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Perekonomian wilayah Provinsi Lampung dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat.

Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi. Revitalisasi pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi.

Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhan kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian hidup dan ketahanan air.

Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan.

2. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan social

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut diantaranya : Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera (IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Toll Bakauheni-Batas Sumatera Selatan; Pengembangan Bandara (Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot Subroto dan Astra Ksetra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui, Kuala Penet, dll); serta Jaringan Kereta Api.

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai *core* utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastruktur mikro meliputi antara lain : jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.

3. Pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasarana, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berskala internasional.

Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan penyediaan bahan makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik dan berbahaya seperti flu burung, flu babi, SARS, dan HIV/AIDS.



Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan efisiensi keuangan daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

2. Pengembangan sumber pendapatan baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur; pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

3. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2016-2021, juga berpedoman pada visi misi Kabupaten Lampung Timur serta arah pembangunannya. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-



Tahun 2005-2025 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Lampung Timur sejahtera, berketuhanan, dan berwawasan lingkungan, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Arah dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur sampai Tahun 2025 adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, arah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku, arah untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, arah untuk mewujudkan pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan, arah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum, arah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta mampu melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, dan arah untuk mengoptimalkan sumber daya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan jangka panjang tahap ketiga berdasarkan Perda RPJPD Kabupaten Lampung Timur ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dalam rangka mengembangkan kesejahteraan. Tahap ketiga dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada dua tahap sebelumnya. Dinamika sektor ekonomi pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak berskala daerah, namun juga nasional dan internasional. Ciri khas pada tahap ketiga ini adalah semakin dominannya peran IPTEKS dalam setiap pengambilan keputusan. Pengembangan IPTEKS diarahkan paa upaya optimalisasi potensi sumber daya. Berbagai kemajuan yang telah dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing, yang tercermin pada produk komoditas, infrastruktur, pendidikan, dan IPTEKS. Sedangkan pencapaian kesejahteraan tercermin pada indeks pembangunan manusia dan sosial kapital.

Tabel 1.1
Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2031

HIRARKI	PERKOTAAN	FUNGSI UTAMA
PKWp	Sukadana	Pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan
PKL	Way Jepara	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura
	Lab. Maringgai	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan
PKLp	Pekalongan	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan
	Sekampung Udik	Pusat perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman
	Bandar Sribhawono	
PPK	Jabung	Pusat pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung
	Purbolinggo	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi
	Marga Tiga	Pusat pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan
	Pasir Sakti	Pusat pertanian, permukiman dan pertambangan
	Sekampung	Pusat pertanian lahan basah dan permukiman
	Raman Utara	Pusat pertanian lahan basah, permukiman dan lindung
	Melinting	Pusat pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata
	Gunung Pelindung	Pusat pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung
	Marga Sekampung	Pusat pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung
	Batanghari	
	Metro Kibang	Pusat permukiman, dan perkebunan campur
	Batanghari Nuban	Pusat pertanian, dan permukiman
	Bumi Agung	
	Labuhan Ratu	Pusat pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, dan agrowisata
Mataram Baru	Pusat pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata	
PPL	Waway Karya	Pusat pertanian, peternakan, dan permukiman
	Braja Selehah	
	Way Bungur	



1.4. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.1.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra PD periode 2016-2021;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021.
5. Menetapkan indikator kinerja PD dan Indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur periode 2016-2021.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan



antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Lampung Timur secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab PD.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam Bab ini ditetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode



sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sehingga sejak Tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu *Bumei Tuwah Bepadan*, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

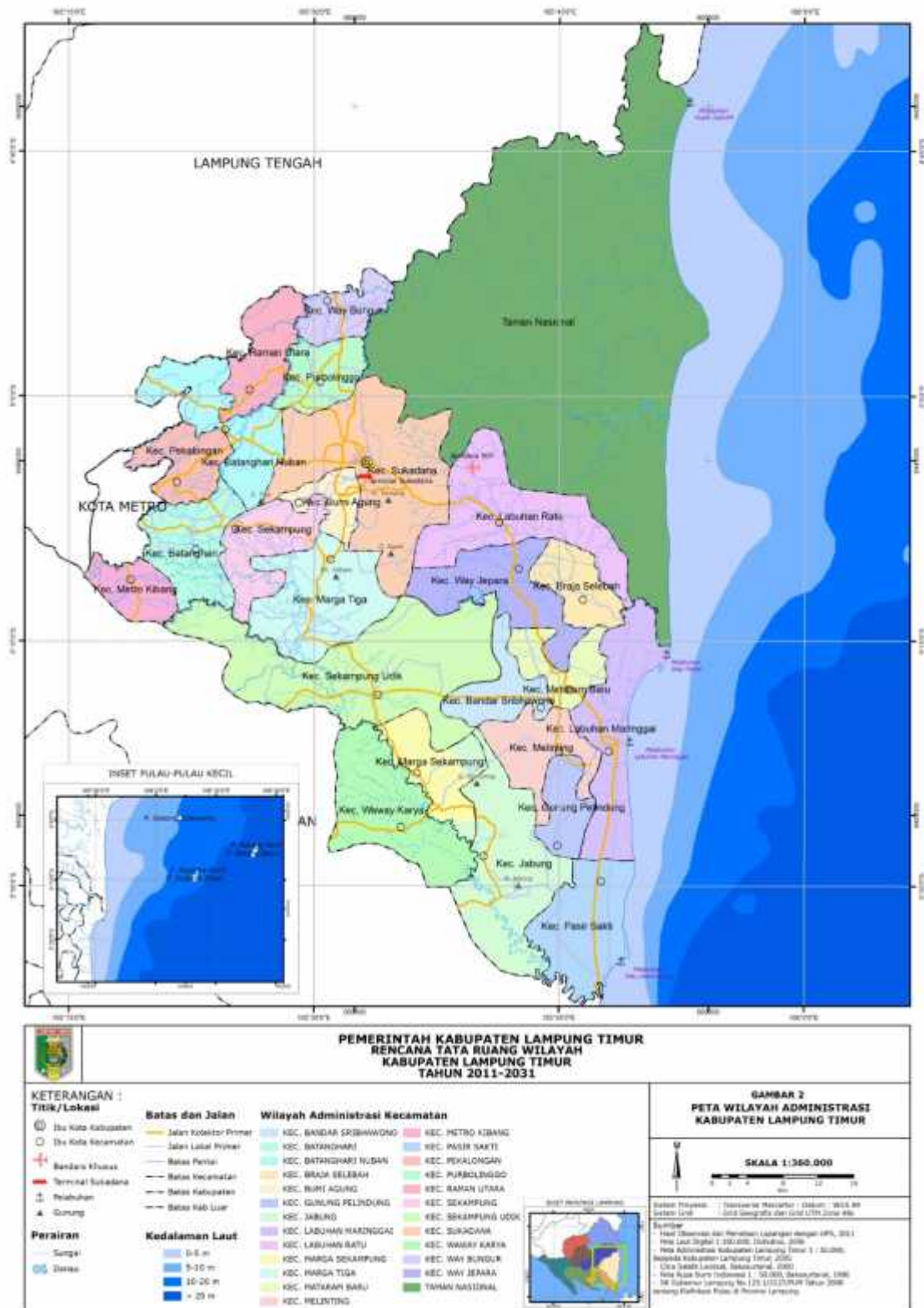
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Dari sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi : 105015' BT-106020'BT dan 4037'LS -5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut Provinsi Banten dan DKI Jakarta).
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur.



Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011 - 2031



Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur Dirinci per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Area (Ha)
			Desa	Kel.	
1	Metro Kibang	Margototo	7	-	7.677,83
2	Batanghari	Banar Joyo	17	-	14.887,95
3	Sekampung	Sumber Gede	17	-	14.834,39
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	-	25.072,94
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	-	33.912,45
6	Jabung	Negara Batin	15	-	26.784,54
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	-	19.393,83
8	Waway Karya	Sumberrejo	11	-	21.107,32
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	-	17.732,34
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	-	19.498,73
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	-	7.956,11
12	Bandar Sribhawono	Saribhawono	7	-	18.570,67
13	Melinting	Wana	6	-	13.929,74
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	-	7.852,25
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	-	22.926,92
16	Braja Selebih	Braja Hajosari	7	-	24.760,68
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	-	48.551,22
18	Sukadana	Sukadana	20	-	75.675,50
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	-	7.317,47
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	-	18.068,84
21	Pekalongan	Pekalongan	12	-	10.012,81
22	Raman Utara	Kota Raman	11	-	16.136,91
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	-	22.203,37
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	-	37.638,19
Jumlah			264	-	532.503,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Secara administratif wilayah perencanaan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

- Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur yang terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
- Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*), yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas, serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara, maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara, yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1. Iklim

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan



yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34^oC. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500mm.

Tabel 2.2
Data Banyaknya Curah Hujan Bulanan Di Beberapa Stasiun Lampung Timur Tahun 2014

Stasiun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Metro Kibang	20	16	16	11	10	9	6	6	2	9	21	25
Batanghari	16	12	9	6	8	6	5	1	0	10	14	21
Sekampung	16	12	9	7	7	4	4	0	0	9	6	17
Batanghari Nuban	27	20	16	16	12	13	5	0	0	12	11	10
Marga Tiga	16	12	9	7	7	3	4	1	0	9	7	17
Way Jepara	16	15	14	9	7	3	1	0	0	5	10	18
B. Sribhawono	11	15	7	6	3	7	2	0	0	5	6	15
Sukadana	18	11	11	9	8	8	3	0	0	11	9	23
Bumi Agung	16	11	6	11	5	6	3	0	0	9	11	10
Pekalongan	19	15	19	11	14	10	6	11	2	12	13	18
Raman Utara	16	14	13	10	7	6	4	0	0	11	9	18
Purbolinggo	14	13	21	7	5	5	5	1	0	8	6	19
Way Bungur	15	18	13	14	12	7	6	2	0	10	12	22
Rata-rata	17	14	13	10	8	7	4	2	0	9	10	18

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

2. Hidrologi

a. Sungai

Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih - Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar, yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Di Wilayah



Kabupaten Lampung Timur terdapat banyak aliran sungai yang bermuara di Way Sekampung. Aliran sungai tersebut antara lain Way Ngisen, Way Capang, Way Curup, Way Nibung, Way Buyut, Way Sipin, Way Bekarang, Way Kandis Besar, Way Ulan, Way Bakun, Way Rupuyuh, Way Samping, Way Kenali dan Way Galih. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 km.

Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai berkelok-kelok (*meandering*), dengan jumlah cabang sungai sebanyak 12 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memiliki lebar berkisar 50-60 meter, kedalaman bervariasi 3,2 - 4,5 meter, kecepatan aliran rata-rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 meter, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 1.285 meter.

b. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehah, dan Labuhan Ratu.

Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/ Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa.
- Adanya kawasan perikanan darat.

c. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.



Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selebah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung.

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

d. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumberdaya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunannya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batumannya kini mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8m-14m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7m-13m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak

berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal. Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m, dengan muka air tanah bebas (TKA/static water level) berkisar antara 0,2m-4m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pola penggunaan lahan seperti permukiman di perkotaan yang tidak memperhatikan arah gerakan air tanah dan jaraknya dalam penempatan *septictank*. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

3. Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter di atas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Braja Selehah, dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3- 8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar, dan kelas lereng berbukit (15-40%) yaitu seluas 16.039 hektar. Adapun data selengkapnya untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng di Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Kelerengan				Jumlah
		0-3 %	0-8 %	8-15 %	15-30 %	
1	Metro Kibang	-	987,17	6.690,83		7.678
2	Batanghari	1.459,82	8.297,18	5.131,00		14.888
3	Sekampung	1.410,08	4.443,04	8.980,88	-	14.834
4	Marga Tiga	1.677,69	8.946,66	13.638,79	809,86	25.073
5	Sekampung Udik	3.227,24	20.813,20	6.979,62	2.891,94	33.912
6	Jabung	13.422,29	10.506,23	2.779,30	77,18	26.785
7	Pasir Sakti	19.394,00	-	-	-	19.394
8	Waway Karya	5.004,34	12.916,44	3.186,22	-	21.107
9	Marga Sekampung	1.950,94	6.324,17	7.672,52	1.784,37	17.732
10	Labuhan Maringgai	15.376,42	1.055,45	1.783,33	1.283,80	19.499



No	Kecamatan	Kelerengan				Jumlah
		0-3 %	0-8 %	8-15 %	15-30 %	
11	Mataram Baru	4.139,34	1.947,73	1.835,46	33,47	7.956
12	Bandar Sribhawono	1.767,59	1.090,58	12.031,67	3.681,16	18.571
13	Melinting	1.681,87	1.065,54	9.740,65	1.441,94	13.930
14	Gunung Pelindung	3.430,54	585,86	3.835,60	-	7.852
15	Way Jepara	6.551,00	3.637,90	12.738,10	-	22.927
16	Braja Selebah	8.290,69	83,15	16.387,16	-	24.761
17	Labuhan Ratu	-	3.955,15	44.582,64	13,21	48.551
18	Sukadana	-	36.978,82	35.069,35	3.627,83	75.676
19	Bumi Agung	-	5.627,97	1.689,03	-	7.317
20	Batanghari Nuban	-	11.940,17	5.734,27	394,57	18.069
21	Pekalongan	-	6.917,30	3.095,70	-	10.013
22	Raman Utara	120,54	15.642,22	374,24	-	16.137
23	Purbolinggo	-	22.137,20	65,8	-	22.203
24	Way Bungur	7.722,59	13.335,99	16.579,42	-	37.638
	Jumlah	96.626,99	198.247,95	213.910,74	16.039,32	532.503

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

4. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan aluvium Kuartar. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang, dengan bukit bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuartar. Pada tabel berikut memperlihatkan susunan stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.4

Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Batuan Kwartar	
(Qal)	Alluvium : bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, dan lempung
(Qbs)	Basalt Sukadana basalt berongga
(Qak)	Pasir Kuarsa : pasir kuarsa halus
(Qs)	Endapan Rawa: pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa
Batuan Tersier	
(Qpt)	Formasi Terbanggi : batu pasir dengan sisipan batu lempung
(Qty)	Formasi Lampung : tuffa berbatu apung, tuffa riolitik

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan lithologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

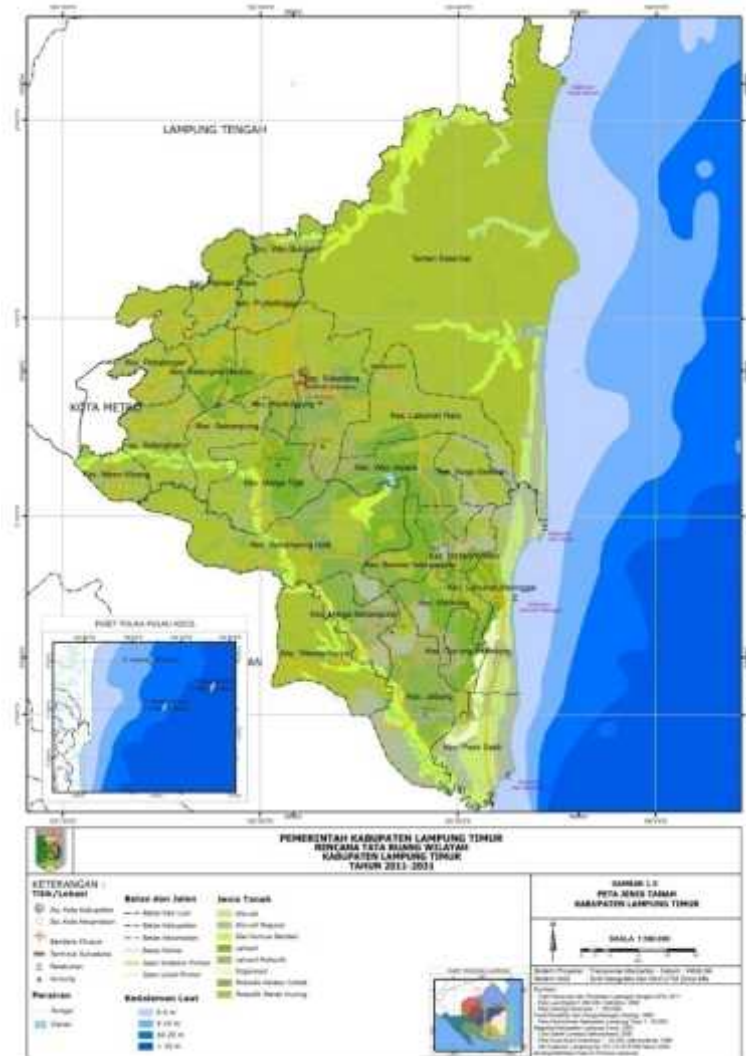
- Endapan Permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 hektar (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada didaerah pesisir dan muara sungai.



- b. Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 hektar (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada kecamatan Labuhan Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
- c. Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 hektar (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan, dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 hektar).

kekuningan, alluvial coklat kelabu dan latosol merah. Adapun peta sebaran jenis tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.3
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031

Klasifikasi kemampuan lahan (*land capability classification*) merupakan penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan pengelompokannya kedalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan secara lestari. Adapun kriteria klasifikasi kemampuan lahan sebagai berikut :

- Kelas 1 : Wilayah baik sekali, hampir tidak memiliki penghambat dalam pengelolaannya, dapat digunakan untuk segala macam aktivitas.
- Kelas 2 : Wilayah baik, ada sedikit penghambat, dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan khusus untuk budidaya pertanian perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- Kelas 3 : Wilayah sedang, beberapa hambatan perlu diatasi dalam usaha pertanian.



- Kelas 4 : Wilayah jelek, berbagai penghambat alam membatasi penggunaan lahan untuk pertanian biasa, baik untuk tanaman tahunan, hutan produksi, dan peternakan.
- Kelas 5 : Wilayah amat jelek, faktor-faktor alam tidak memungkinkan untuk suatu usaha pertanian, hanya baik untuk hutan lindung atau margasatwa.

Wilayah dengan nilai skor tinggi menunjukkan bahwa area tersebut memiliki keterbatasan atau faktor penghambat yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Untuk wilayah perkotaan diharapkan untuk memiliki nilai keterbatasan yang cukup kecil karena daya tampung aktivitasnya yang relative besar. Seperti pada kemampuan lahan kelas 1 (sangat baik) yang menunjukkan tingginya tingkat kesetabilan lereng, ketersediaan air yang banyak, tidak peka terhadap erosi, dan memiliki tingkat yang aman terhadap bencana alam lainnya.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat baik (kelas 1) seluas 88.308,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Batanghari, Braja Selebah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila diperuntukan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antara lain faktor kesetabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan.

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosifitasnya yang lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 hektar setara dengan 19,13% luas wilayah kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih dapat digunakan untuk menampung aktifitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya pertanian perlu adanya sedikit usaha untuk intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap aktifitas lainnya.

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) seluas 70.411,50 hektar (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, Pekalongan Purbolinggo, Waway Karya dan



Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi cenderung lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor pembatas tersebut diantaranya tingkat erosivitas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.

Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam diantaranya tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kesetabilan tanah mulai berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan permukiman atau aktifitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam kriteria ini adalah kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga Sekampung, Marga Tiga, Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 hektar atau 43,30% dari luas wilayah kabupaten.

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 41.375,76 hektar merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan dengan besarnya jumlah faktor penghambat sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai areal budidaya. Faktor penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relative curam dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai dikecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif adalah Taman Nasional Way Kambas.

6. Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. sistem pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem pusat kegiatan Kabupaten Lampung Timur meliputi:



- a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi atau PKWp, berada di Perkotaan Sukadana yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal atau PKL, meliputi :
 - Perkotaan Way Jepara yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura; dan
 - Perkotaan Labuhan Maringgai yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan.
- c. Pusat Kegiatan Lokal promosi atau PKLp, meliputi :
 - Perkotaan Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan;
 - Perkotaan Sekampung Udik yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman; dan
 - Perkotaan Bandar Sribhawono yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman.
- d. Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK meliputi
 - a. Perkotaan Jabung yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung;
 - b. Perkotaan Purbolinggo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi;
 - c. Perkotaan Marga Tiga yang berfungsi sebagai pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan;
 - d. Perkotaan Pasir Sakti yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman dan pertambangan;
 - e. Perkotaan Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah dan permukiman;
 - f. Perkotaan Raman Utara yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah, permukiman dan lindung;
 - g. Perkotaan Melinting yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata;
 - h. Perkotaan Gunung Pelindung yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung;
 - i. Perkotaan Marga Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung;



- j. Perkotaan Batanghari yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman, dan lindung;
 - k. Perkotaan Metro Kibang yang berfungsi sebagai permukiman, dan perkebunan campur;
 - l. Perkotaan Batanghari Nuban yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
 - m. Perkotaan Bumi Agung yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
 - n. Perkotaan Labuhan Ratu yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, agrowisata; dan
 - o. Perkotaan Mataram Baru yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata.
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan atau PPL, meliputi :
- a. PPL Waway Karya yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman;
 - b. PPL Braja Selehah yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman; dan
 - c. PPL Way Bungur yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman.

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang sebagai berikut :

- a. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan, yang meliputi :
 - pengembangan PKWp Sukadana,
 - Pengembangan PKL Perkotaan Way Jepara dan perkotaan Labuhan Maringgai,
 - Pengembangan PKLp Perkotaan Pekalongan, Perkotaan Sekampung Udik dan Perkotaan Bandar Sribhawono, Pengembangan PPK Perkotaan Jabung, Perkotaan Purbolinggo, Perkotaan Marga Tiga, Perkotaan Pasir Sakti, Perkotaan Sekampung, Perkotaan Raman Utara, Perkotaan Melinting, Perkotaan Gunung Pelindung, Perkotaan Marga Sekampung, Perkotaan Batanghari, Perkotaan Metro Kibang, Perkotaan Batanghari Nuban, Perkotaan Bumi Agung, Perkotaan Labuhan Ratu dan Perkotaan Mataram Baru.
 - Pengembangan PPL Perdesaan Waway Karya, Perdesaan Braja Selehah dan Perdesaan Way Bungur
- b. Perwujudan Sistem Prasarana Utama, yang meliputi :

1. Sistem Transportasi Darat;
 - jaringan jalan, yang meliputi jalan yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan; pengembangan jalan lokal tersebar di seluruh kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung dari tiap-tiap pusat kegiatan; dan pengembangan jalan lingkar kabupaten terdiri dari ruas jalan Bumi Tinggi-Pasar Sukadana-Muara Jaya; jalan kota Sukadana Mataram Marga-kantor pemda-Jalan Lintas Pantai Timur.
 - jaringan prasarana lalu lintas, yang meliputi pembangunan terminal Tipe B di Kecamatan Sukadana; pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Sekampung Udik; pengembangan terminal tipe C Mataram Baru sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan *Rest area* di Kecamatan Labuhan Ratu.
 - jaringan pelayanan lalu lintas, yang meliputi pengembangan trayek angkutan barang menghubungkan lintas pantai timur Sumatra- Jawa, mulai dari Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Way Bungur; pengembangan trayek yang menghubungkan antara Sumatera Selatan-Lampung Timur-Bandar Lampung; pengembangan trayek Tulang Bawang-Lampung Timur, Lampung Selatan-Lampung Timur, Kota Metro-Lampung Timur, Lampung Tengah-Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung-Lampung Timur; dan pengembangan trayek Kecamatan Pekalongan-Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara-Kecamatan Sukadana.
 2. Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian, yang meliputi pengembangan jalur Pringsewu-Rejosari-Tegineneng-Metro-Sukadana; dan pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sukadana.
 3. Sistem Jaringan Transportasi Laut, yang meliputi pengembangan pelabuhan pengumpan berada di Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet dan Pelabuhan Way Sekampung; dan pengembangan pelayanan dari Pelabuhan Labuhan Maringgai-Pelabuhan Tanjung Priok.
 4. Sistem Jaringan Transportasi Udara, yang meliputi peningkatan bandar udara khusus Nusantara Tropical Fruit, dan penyusunan rencana induk bandar udara.
- c. Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya, yang meliputi :
1. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan, yang meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah; jaringan pipa gas transmisi melalui Kecamatan Raman Utara-



Batanghari Nuban-Sukadana-Labuhan Ratu-Braja Selebih-Labuhan Maringgai; jaringan pipa gas distribusi melalui Kecamatan Labuhan Maringgai-Mataram Baru-Bandar Sribhawono-Sekampung Udik-Kota Bandar Lampung; pengembangan Gardu Induk (GI) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dengan besar tegangan 70-150 Kv (tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt); pengembangan Gardu Distribusi (GD) terdapat di Kecamatan Sukadana yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 70-150 KV tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt) menjadi tegangan rendah 380/220 V (tiga ratus delapan puluh per dua ratus dua puluh volt); pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari pembangkit menuju gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono melalui Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Bandar Sribhawono; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Metro melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Tiga, Sekampung, Batanghari; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Kecamatan Sukadana melalui Kecamatan Sribhawono, Mataram Baru, Way Jepara, Sukadana; dan pengembangan jaringan tegangan rendah, merupakan jaringan distribusi dari GD ke konsumen.

2. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, yang meliputi peningkatan jaringan telekomunikasi dengan sistem sambungan kabel di wilayah-wilayah yang belum terlayani; rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel khususnya di kawasan perkotaan; dan penataan dan efisiensi penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
3. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, yang meliputi pengembangan pengelolaan Sungai Way Sekampung sebagai sumber air baku untuk air bersih; pengembangan sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung, dan Danau Way Jepara; pengembangan sumber mata air dari Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana; peningkatan pelayanan air minum pada kecamatan-kecamatan yang sudah terlayani seperti Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Purbolinggo; peningkatan kualitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur; peningkatan kuantitas air bersih melalui pembuatan bangunan penangkap air dan sumur bor di kawasan-kawasan perkotaan; pengembangan PDAM Way Guruh sebagai



pengelola distribusi air minum; dan pembangunan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Sebah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.

4. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, yang meliputi
 - sistem persampahan, yang meliputi penyusunan rencana induk pengolahan persampahan; pengembangan optimalisasi TPA Regional di Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting; pengembangan TPS eksisting yang ada di Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Sribhawono, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Braja Sebah dan Kecamatan Labuhan Ratu; dan pengembangan sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Lampung Timur.
 - sistem air minum, yang meliputi peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan produksi air minum penduduk; pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana.; dan pengembangan distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama.
 - sistem pengelolaan air limbah, yang meliputi pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu di kawasan permukiman melalui sistem saluran tertutup; sosialisasi program pemanfaatan *septic tank* sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga; pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah tangga secara komunal di kawasan-kawasan tertentu; pembangunan IPLT pembuangan limbah industri di Kecamatan Sribhawono; dan pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) terdapat di kawasan industri.
 - sistem jaringan drainase, yang meliputi :
 - i. pengembangan jaringan drainase primer terdiri atas sungai dan anak sungai meliputi: Sungai Seputih, Sungai Wako, Sungai Kapuk, Sungai Kambas Jepara, Sungai Jepara, Sungai Nibung, dan Sungai Sekampung



- ii. normalisasi dan pengerukan secara berkala pada jaringan-jaringan yang mengalami sedimentasi;
 - iii. optimalisasi drainase dengan mengupayakan perlindungan daerah hulu;
 - iv. pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada di Kabupaten Lampung Timur;
 - v. pembangunan prasarana drainase pada kecamatan yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan perkantoran, pusat permukiman kota, pusat pendidikan dan pusat pengembangan permukiman desa; dan
 - vi. pembangunan prasarana drainase di kawasan yang rawan terjadi banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.
- jalur dan ruang evakuasi bencana, yang meliputi :
- i. pengembangan jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi rambu untuk arah evakuasi;
 - ii. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Bandar Sribowono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara;
 - iii. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti;
 - iv. pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan abrasi Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - v. pembangunan rambu-rambu/petunjuk arah evakuasi pada jalur evakuasi bencana; dan
 - vi. pengembangan sistem peringatan dini ketika terjadi bencana.

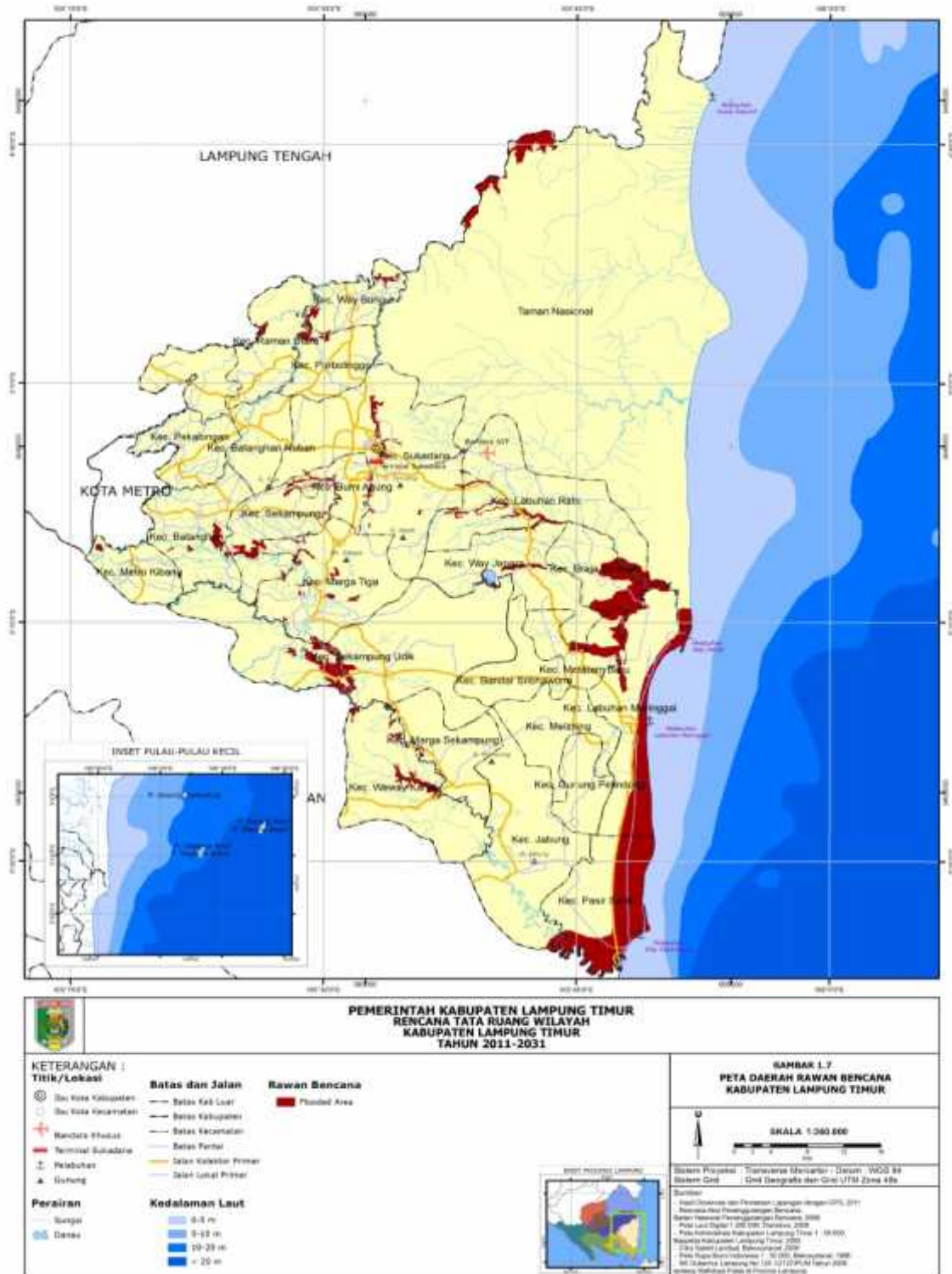
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang



disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang di sebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang di akibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut.

Gambar 2.4
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031

Jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur yaitu berupa banjir yang terjadi pada beberapa kecamatan di Lampung Timur. Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir yaitu Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, sekampung Udik, Sekampung, Batanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana, dan Bumi Agung. Terjadinya banjir disebabkan oleh meluapkannya air sungai hingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya.



2.1.3 Demografi

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia, selain jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya tidak merata. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama. Persebaran penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu Tahun 2010-2014 adalah sebesar 0,97. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan berimplikasi langsung pada meningkatnya tingkat kepadatan suatu wilayah. Kepadatan penduduk mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2010 – 2014

Kecamatan	Tahun					Laju Pertumb
	2010	2011	2012	2013	2014	
Metro Kibang	20.707	20.932	21.470	21.966	22.343	1,53
Batanghari	54.601	55.194	56.154	57.388	58.252	1,30
Sekampung	59.819	60.468	60.937	61.798	62.531	0,89
Marga Tiga	43.395	43.866	44.093	44.871	45.130	0,79
Sekampung Udik	68.044	68.783	68.382	70.662	71.465	0,99
Jabung	46.550	47.056	47.345	48.786	49.473	1,23
Pasir Sakti	34.410	34.783	35.015	35.934	36.307	1,08
Waway Karya	34.454	34.828	33.834	33.782	33.605	-0,50
Marga Sekampung	26.035	26.317	26.126	26.510	26.526	0,37
Labuhan Maringgai	65.750	66.463	66.096	68.499	69.682	1,17
Mataram Baru	26.672	26.962	27.202	27.667	27.935	0,93
Bandar Sribhawono	46.133	46.634	47.315	48.343	48.477	1,00
Melinting	24.630	24.897	24.836	25.252	25.409	0,62
Gunung Pelindung	21.052	21.281	21.157	21.373	21.443	0,37
Way Jepara	51.073	51.627	52.350	53.424	54.251	1,21
Braja Selebah	21.733	21.969	22.161	22.510	22.816	0,98
Labuhan Ratu	41.386	41.835	42.458	43.310	43.811	1,15
Sukadana	64.093	64.789	65.552	66.625	67.526	1,05
Bumi Agung	16.931	17.115	17.193	17.707	17.640	0,82
Batanghari Nuban	40.992	41.437	41.881	42.645	43.100	1,01
Pekalongan	45.209	45.700	46.379	47.270	48.026	1,22
Raman Utara	35.760	36.149	36.218	36.800	36.994	0,68
Purbolinggo	40.152	40.588	41.194	42.000	42.539	1,16
Way Bungur	22.058	22.298	22.655	23.155	23.439	1,22
Jumlah	951.639	961.971	968.003	988.277	998.720	0,97

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2014 adalah sebesar 998.720 jiwa dengan tingkat kepadatan 188 jiwa/km². Sebagai data pembandingan, berdasarkan



data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, pada Tahun 2014 jumlah penduduk Lampung Timur telah mencapai 1.105.990 jiwa.

Selanjutnya, berdasarkan data monografi penduduk di kecamatan Lampung Timur Tahun 2014, terdapat sebaran kepadatan penduduk yang beragam antar kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Kepadatan penduduknya berkisar 62–480 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pekalongan sebesar 480 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Way Bungur sebesar 62 jiwa/km².

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan	Luas (km ²)	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
Metro Kibang	76,78	270	273	280	286	291
Batanghari	148,88	367	371	377	385	391
Sekampung	148,34	403	408	411	417	422
Marga Tiga	250,73	173	175	176	179	180
Sekampung Udik	339,12	201	203	202	208	211
Jabung	267,85	174	176	177	182	185
Pasir Sakti	193,94	177	179	181	185	187
Waway Karya	211,07	163	165	160	160	159
Marga Sekampung	177,32	147	148	147	150	150
Labuhan Maringgai	194,99	337	341	339	351	357
Mataram Baru	79,56	335	339	342	348	351
Bandar Sribhawono	185,71	248	251	255	260	261
Melinting	139,3	177	179	178	181	182
Gunung Pelindung	78,52	268	271	269	272	273
Way Jepara	229,27	223	225	228	233	237
Braja Selehah	247,61	88	89	90	91	92
Labuhan Ratu	485,51	85	86	87	89	90
Sukadana	756,76	85	86	87	88	89
Bumi Agung	73,17	231	234	235	242	241
Batanghari Nuban	180,69	227	229	232	236	239
Pekalongan	100,13	452	456	463	472	480
Raman Utara	161,37	222	224	224	228	229
Purbolinggo	222,03	181	183	186	189	192
Way Bungur	376,38	59	59	60	62	62
Jumlah	5325,03	179	181	182	186	188

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

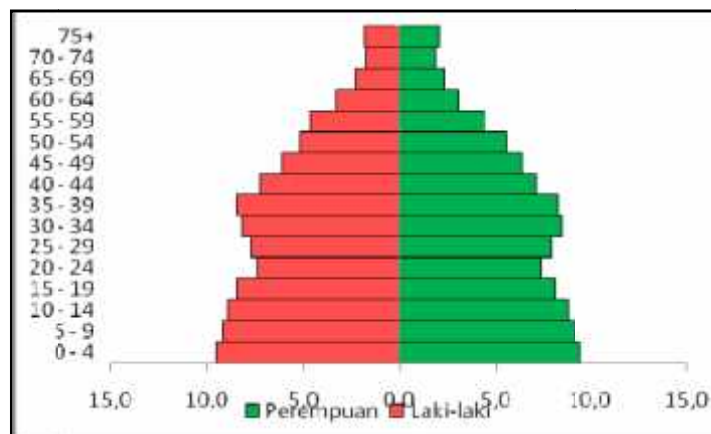
Penduduk menurut struktur usia pada dasarnya berhubungan dengan angkatan kerja. Komposisi penduduk usia produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Agar proses pembangunan berjalan lancar, kelompok penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebaiknya semakin mengecil bila dibandingkan dengan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Lampung Timur

Kelompok Umur	Tahun 2014		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
00 – 04	48.534	46.408	94.942
05 – 09	47.099	44.502	91.601
10 – 14	45.442	42.915	88.357
15 – 19	43.079	39.284	82.363
20 – 24	37.933	35.660	73.593
24 – 29	39.210	38.326	77.536
30 – 34	41.736	41.197	82.933
35 – 39	43.037	40.095	83.132
40 -44	36.760	34.631	71.391
45 – 49	31.442	30.972	62.414
50 – 54	26.421	27.009	53.430
55 – 59	23.496	21.625	45.121
60 – 64	16.905	14.834	31.739
65 – 69	11.446	11.217	22.663
70 – 74	8.996	8.924	17.920
75 +	9.543	10.042	19.585
Jumlah	505.978	482.299	998.270

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Berdasarkan tabel dan grafik di atas Kabupaten Lampung Timur terlihat bahwa penduduk Kabupaten Lampung Timur tergolong penduduk muda menuju "transisi". Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida kelompok umur 0-4, 5-9, dan 10-14 tahun yang sedikit lebih panjang dari kelompok umur lainnya. Golongan penduduk muda biasanya diperlihatkan dengan panjang batang piramida kelompok umur 0-4, 5-9, dan 10-14 tahun lebih panjang dari kelompok umur lainnya dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun ke atas yang cukup pendek. Selain itu juga terlihat bahwa persentase penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) lebih besar



dibandingkan kelompok umur tua (64 tahun ke atas) dan usia 0-14 tahun. Artinya, Kabupaten Lampung Timur mempunyai sumber daya manusia yang cukup potensial.

Kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sangat kondusif. Pada Tahun 2014 persentase jumlah pemeluk agama Islam sebesar 95,45%. Selanjutnya pemeluk agama Hindu sebanyak 1,23%; Kristen Protestan 1,92%; Kristen Katolik 0,91%, dan Budha 0,46%. Jumlah tempat peribadatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan secara kuantitas kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat kerukunan beragama cukup baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama. Terkait banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Banyaknya Tempat Peribadatan
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014

Kecamatan	Masjid	Gereja	Pura	Vihara
Metro Kibang	26	4	-	-
Batanghari	73	7	-	4
Sekampung	65	4	-	-
Marga Tiga	84	7	5	-
Sekampung Udik	76	25	16	2
Jabung	29	3	1	-
Pasir Sakti	57	12	3	3
Waway Karya	56	15	6	3
Marga Sekampung	34	2	2	-
Labuhan Maringgai	75	4	2	1
Mataram Baru	42	6	1	3
Bandar Sribhawono	37	7	-	3
Melinting	37	2	-	-
Gunung Pelindung	37	4	1	1
Way Jepara	103	10	3	-
Braja Selehah	34	4	6	-
Labuhan Ratu	70	6	4	1
Sukadana	90	2	2	-
Bumi Agung	29	3	1	-
Batanghari Nuban	71	4	1	-
Pekalongan	83	4	1	3
Raman Utara	63	3	13	-
Purbolinggo	66	1	-	-
Way Bungur	50	2	-	-
Jumlah	1.387	141	68	24

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

**2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat****2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi****1. Pertumbuhan PDRB**

Pada 2014, nilai tambah yang diukur melalui PDRB migas yang dihasilkan oleh perekonomian Lampung Timur adalah sebesar 29,24 triliun rupiah. Besaran nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,7 triliun rupiah dari Tahun 2010. Arah pergerakan yang sama juga terlihat pada nilai tambah yang diukur melalui PDRB non migas Kabupaten Lampung Timur. Nilai tambah yang dihasilkan adalah sebesar 20,97 triliun rupiah, lebih tinggi 7,1 triliun rupiah dibandingkan Tahun 2010.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

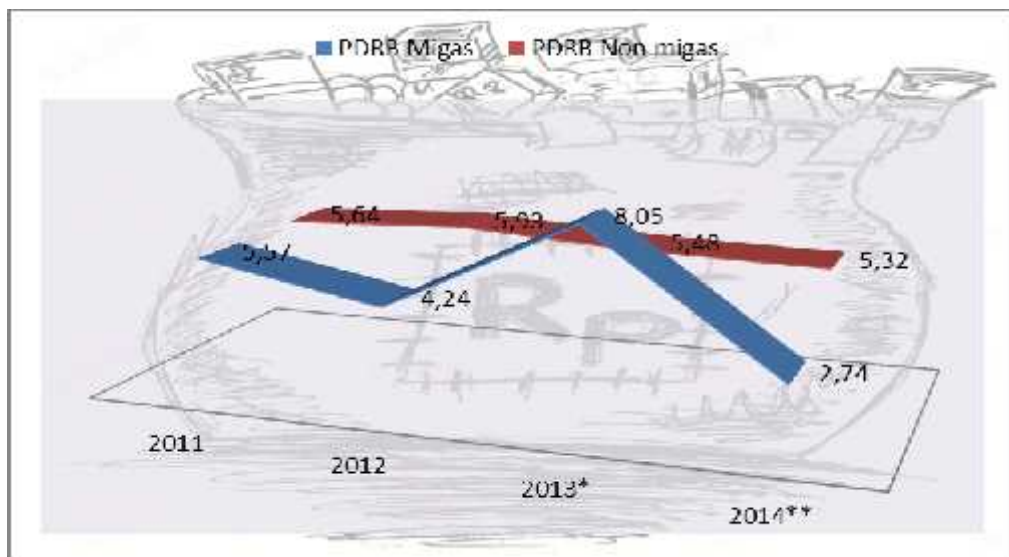
Lapangan Usaha/Industry	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and	7.160.297,4	8.105.836,3	8.705.698,7	9.345.734,3	10.415.162,5
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	5.737.732,4	6.534.517,8	7.009.639,5	7.524.746,2	8.313.598,4
a. Tanaman Pangan /Food Crops	3.207.707,1	3.677.077,8	3.894.939,4	4.149.459,0	4.470.467,6
b. Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	376.498,1	435.032,9	483.712,5	550.875,7	613.537,4
c. Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	1.172.452,9	1.331.384,2	1.403.166,9	1.501.410,1	1.714.086,7
d. Peternakan/Livestock	793.568,3	880.110,8	1.002.863,9	1.074.399,7	1.226.439,3
e. Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting	187.506,0	210.912,1	224.956,7	248.601,7	289.067,4
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	124.818,6	134.962,1	155.358,8	176.589,4	200.731,1
3 Perikanan/Fishery	1.297.746,4	1.436.356,4	1.540.700,4	1.644.398,6	1.900.833,0
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5.938.469,9	6.633.254,2	6.962.052,6	8.307.844,0	8.777.849,1
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum,	5.638.257,2	6.280.193,9	6.555.522,3	7.855.099,6	8.275.532,0
2 Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and	300.212,7	353.060,3	406.530,3	452.744,4	502.317,1
C Industri Pengolahan/Manufacturing	1.173.413,4	1.330.455,3	1.515.007,7	1.689.890,3	1.901.880,8
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	24.482,8	25.416,5	25.685,7	26.418,6	30.413,4
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and	10.000,1	10.767,3	11.649,9	12.490,4	15.039,8
F Konstruksi/Construction	984.716,4	1.071.401,6	1.165.125,5	1.222.044,0	1.454.690,1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and	1.451.125,0	1.622.028,6	1.753.952,9	1.918.548,1	2.070.592,6
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	294.442,4	315.323,6	347.196,1	405.684,8	491.530,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and	160.317,8	192.259,1	221.330,3	246.999,6	286.478,5
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	555.111,3	628.443,3	749.251,6	844.293,5	906.604,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	229.793,8	266.018,8	308.875,6	355.915,6	402.750,9
L Real Estat/Real Estate Activities	359.065,3	408.443,1	448.885,6	494.908,0	560.573,4
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	10.007,5	12.154,0	14.310,2	17.249,5	22.088,0
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social	490.795,3	523.475,4	617.136,1	704.754,0	825.246,3
P Jasa Pendidikan/Education	384.873,9	447.908,5	538.791,4	615.037,9	689.612,8
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social	108.389,2	122.173,0	134.325,2	150.322,0	174.473,1
R,S,T,U Jasa lainnya/Other Services Activities	160.811,6	176.275,7	185.466,0	197.774,1	224.129,1
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	19.496.113,2	21.891.634,2	23.704.741,2	26.555.908,6	29.249.114,3
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas/Gross Regional Domestic Product Non Petroleum and Gas Product	13.857.856,1	15.611.440,3	17.149.218,9	18.700.809,0	20.973.582,3
* Angka sementara/Preliminary Figures					
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures					

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Belum membaiknya perekonomian global serta melambatnya perekonomian nasional turut ambil dalam pelemahan ekonomi yang dialami Lampung Timur di Tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi atas PDRB Migas mencapai titik terendahnya dalam lima tahun terakhir. Di Tahun 2014 ekonomi Lampung Timur hanya tumbuh sebesar 2,74 persen, jauh dibawah pertumbuhan Tahun 2013 yang mampu tumbuh sebesar 8,05 persen. Rendahnya geliat perekonomian global berimbas pada terpuruknya produksi minyak bumi Lampung Timur, di tahun tersebut nilai tambah yang dihasilkan sub kategori minyak bumi turun sebesar 3,44 persen.

Disisi lain perekonomian Lampung Timur yang tercermin dari PDRB tanpa migas juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Dimana perekonomian Lampung Timur Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,32 persen, lebih rendah enam belas basis poin dari pertumbuhan 2013.

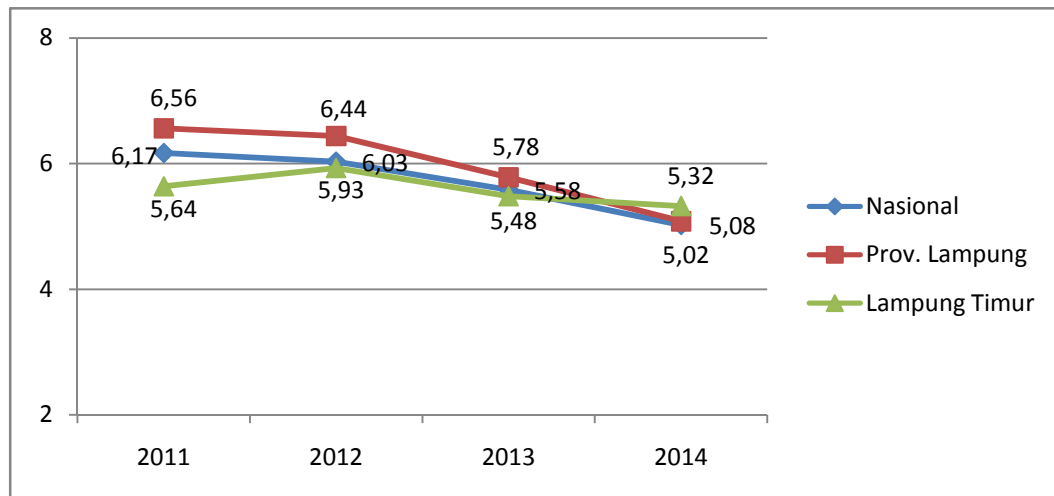
Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur Tahun 2011-2014 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Kurun waktu 2011-2013 kinerja perekonomian Lampung Timur memiliki laju pertumbuhan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung, namun pada Tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi Lampung Timur berada di atas laju pertumbuhan nasional yang sebesar 5,02 persen dan Provinsi Lampung yang sebesar 5,08 persen.

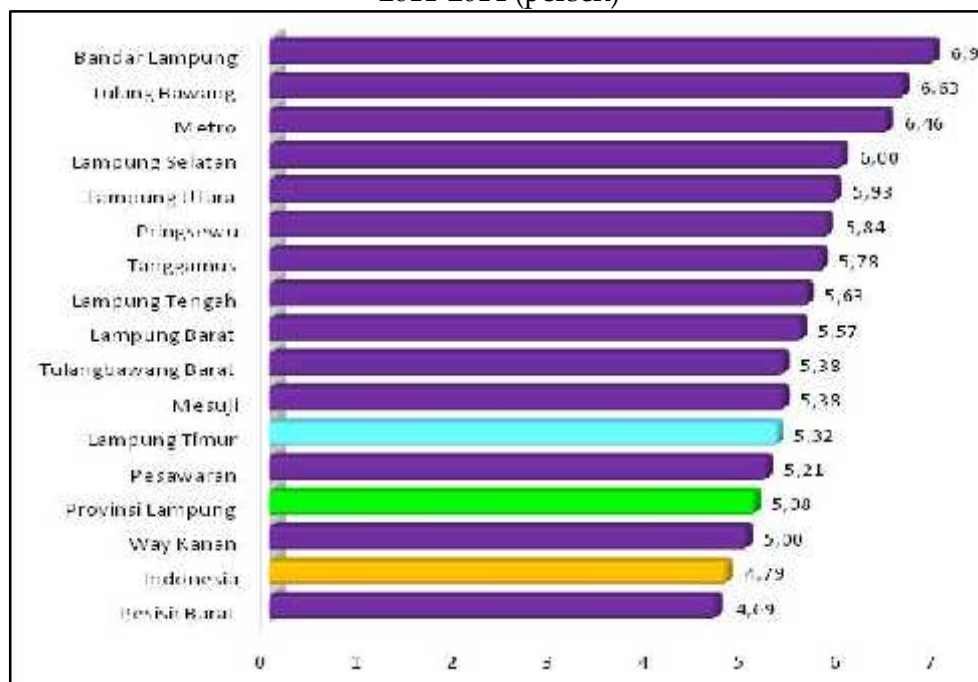
Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan Lampung Timur Tahun 2011-2014 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Jika dibandingkan menurut kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, laju pertumbuhan ekonomi Lampung Timur pada Tahun 2014 berada di posisi 12 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2014 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Dominasi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Lampung Timur masih cukup tinggi terutama dalam hal penciptaan pertumbuhan ekonomi. Kategori ini merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Tahun 2014. Peningkatan nilai tambah yang dihasilkan kategori ini mampu menumbuhkan ekonomi Lampung

Grafik 2.6
Pertumbuhan PDRB dengan Migas atas Dasar Harga Konstan 2010
per Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Di Tahun 2014, kategori jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tercepat dibandingkan kategori lainnya. Kategori tersebut mampu tumbuh sebesar 13,97 persen. Kategori lainnya yang mengalami pertumbuhan cukup cepat adalah kategori jasa pendidikan serta kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kedua kategori tersebut masing-masing tumbuh sebesar 9,11 persen dan 8,48 persen. Meskipun kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan sumbangan yang tertinggi terhadap pertumbuhan perekonomian Lampung Timur, namun kategori tersebut hanya tumbuh sebesar 4,16 persen.

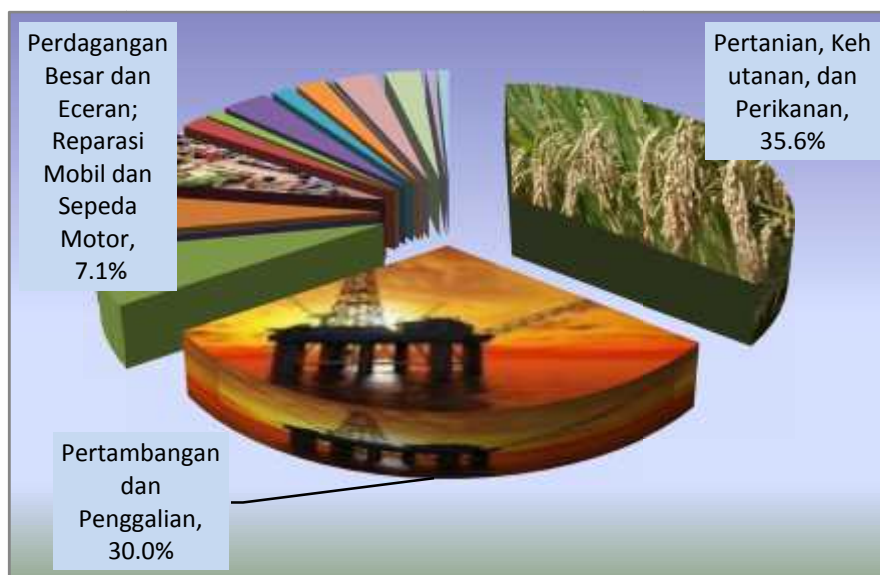
Pada periode 2010-2014, perekonomian Kabupaten Lampung Timur masih ditopang sektor primer, yakni kategori pertanian, kehutanan dan kelautan serta kategori pertambangan dan penggalian. Kedua kategori utama tersebut menyokong 65,62 persen dari total nilai tambah yang diciptakan di 2014. Besaran sumbangan tersebut sedikit mengalami penurunan dari tahun 2010, dimana pada masa tersebut kedua kategori utama ini menopang 67,19 persen total ekonomi.

Tabel 2.10
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2014 (persen)

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,73	37,03	36,73	35,19	35,61
B	Pertambangan dan Penggalian	30,46	30,30	29,37	31,28	30,01
C	Industri Pengolahan	6,02	6,08	6,39	6,36	6,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	5,05	4,89	4,92	4,60	4,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,44	7,41	7,40	7,22	7,08
H	Transportasi dan Pergudangan	1,51	1,44	1,46	1,53	1,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	0,88	0,93	0,93	0,98
J	Informasi dan Komunikasi	2,85	2,87	3,16	3,18	3,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,18	1,22	1,30	1,34	1,38
L	Real Estate	1,84	1,87	1,89	1,86	1,92
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,06	0,06	0,06	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,52	2,39	2,60	2,65	2,82
P	Jasa Pendidikan	1,97	2,05	2,27	2,32	2,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,56	0,57	0,57	0,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,82	0,81	0,78	0,74	0,77
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		71,08	71,31	72,35	70,42	71,71

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Grafik 2.7
Distribusi PDRB dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lampung Timur



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

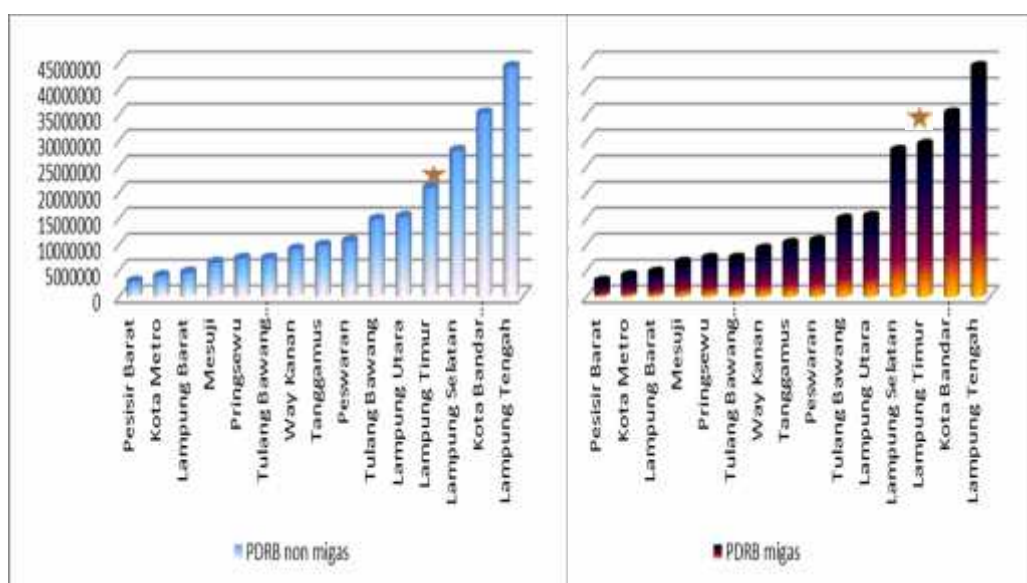
Sumbangan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap struktur perekonomian Lampung Timur mencapai 35,6 persen. Besarnya kontribusi kategori

tersebut terhadap PDRB dalam kurun waktu jangka pendek masih belum dapat digeser oleh kategori-kategori lainnya, mengingat masih banyaknya tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur yang menggantungkan hidupnya pada kategori ini. Pada Tahun 2014 terdapat sekitar 50,02 persen dari tenaga kerja Lampung Timur yang menggantungkan kehidupannya di kategori pertanian (Statda Lampung Timur 2014).

Kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan penyumbang nilai tambah terbesar ketiga pada perekonomian Lampung Timur. Selama periode 2010-2014 kategori tersebut menyokong sekitar tujuh persen terhadap total perekonomian dengan kecendrungan nilai yang menurun. Di Tahun 2010 sebesar 7,44 persen nilai tambah diperoleh dari pembentukan nilai tambah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, besaran sumbangsih kategori ini sedikit menurun menjadi 7,08 persen di Tahun 2014.

Informasi lainnya yang dapat kita lihat dari data PDRB menurut Lapangan Usaha adalah bagaimana peranan Kabupaten Lampung Timur dalam perkembangan perekonomian Provinsi Lampung. PDRB dengan migas Lampung Timur di Tahun 2014 berada di posisi ke tiga terbesar di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Di lain pihak PDRB tanpa migas Lampung Timur berada di posisi ke empat terbesar di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan. Besaran PDRB migas Lampung Timur di Tahun 2014 setara dengan 12,66 persen PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung.

Grafik 2.8
PDRB Tanpa Migas dan PDRB dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014



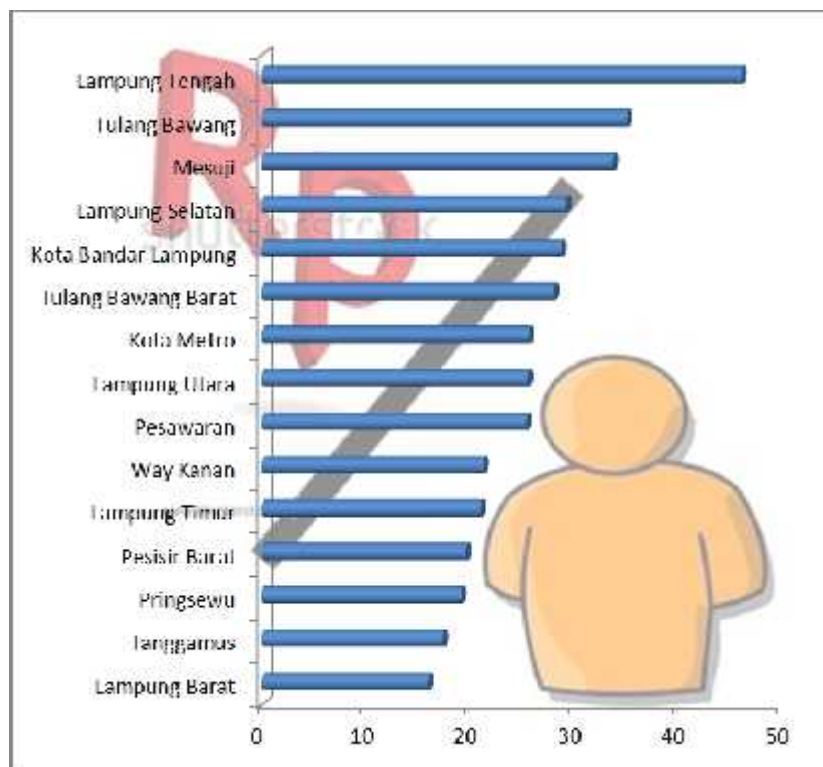
Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur, yang secara umum dicerminkan oleh PDRB non migas per kapita, berada pada peringkat ke sebelas di Provinsi

Lampung. Besaran PDRB non migas per kapita kabupaten ini bahkan lebih rendah dari pada Kabupaten Mesuji yang nilai tambah nya jauh di bawah Lampung Timur.

Meskipun PDRB non migas Kabupaten Lampung Timur tiga kali lipat dari Kabupaten Mesuji, namun jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur lebih tinggi lima kali lipatnya. Karena itulah tingkat kesejahteraan penduduk Lampung Timur yang dicerminkan oleh PDRB non migas per kapita lebih rendah dari Kabupaten Mesuji.

Grafik 2.9
PDRB Tanpa Migas per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014
(juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat, berhasil atau tidaknya pembangunan yang telah dilaksanakan secara umum. Angka inflasi yang mempunyai manfaat sebagai rambu-rambu untuk menjaga kesetabilan harga serta sebagai dasar bagi berbagai kebijakan yang akan ditetapkan. Pada tabel berikut ini memperlihatkan angka inflasi Kabupaten Lampung Timur dari Tahun 2010–2014. Angka inflasi Kabupaten Lampung Timur berfluktuasi sangat dipengaruhi oleh inflasi Bandar Lampung dan nasional. Pada Tahun 2015 nilai inflasi Kabupaten Lampung Timur 4,7% lebih rendah dibandingkan angka inflasi Tahun 2014 yang mencapai 7,46%.

Tabel 2.11
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Lampung Timur

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi	10,03	6,78	5,41	7,6	7,46	4,17

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

3. Kemiskinan

Pada periode 2005-2014 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, bahwa perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur cukup berfluktuatif, sedangkan Garis Kemiskinan (GK) di Lampung Timur pada periode yang sama dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, jumlah dan presentase penduduk miskin pada Tahun 2005-2007 terjadi kenaikan karena salah satunya adalah dampak dari tingginya kenaikan garis kemiskinan pada periode tersebut. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2005 sebesar 248,4 ribu jiwa naik menjadi 256,2 ribu jiwa pada Tahun 2006, dan naik lagi menjadi 261,9 ribu jiwa pada Tahun 2007.

Tabel 2.12
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Lampung Timur
Tahun 2005-2014

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk Miskin	248,4	256,2	261,9	228,37	206,28	200,4	189,46	182,21	172,21	170,73
Persentase Penduduk Miskin	26,2	27,63	27,21	23,35	20,86	21,06	19,66	18,59	17,38	17,05
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bln)	133,09	162,09	180,01	201,23	202,7	227,69	257,28	273,57	291,4	301,34

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Penurunan jumlah penduduk miskin dimulai pada Tahun 2008 sampai pada Tahun 2014. Penurunan yang cukup tinggi terjadi pada Tahun 2008, dimana sebelumnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur sebesar 261,9 ribu jiwa pada Tahun 2007 turun menjadi 228,4 ribu jiwa. Atau, dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 33,5 ribu jiwa atau sekitar 12,80 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin berlanjut pada Tahun 2009 sebesar 22,1 ribu jiwa (9,67 persen) dan pada Tahun 2010 secara nominal turun sebesar 5,9 ribu jiwa. Penurunan ini secara signifikan terus berlangsung hingga Tahun 2014, dimana secara nominal terjadi penurunan sebesar 1.480 jiwa dibandingkan Tahun 2013.



Tabel 2.13
Jumlah dan Presentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2013-2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (P ₀)	
	2013	2014	2013	2014
Lampung Barat	60.81	60.27	13.96	13.70
Tanggamus	85.64	85.02	15.24	14.95
Lampung Selatan	162.97	161.79	17.09	16.77
Lampung Timur	172.21	170.73	17.38	17.05
Lampung Tengah	162.81	161.55	13.37	13.13
Lampung Utara	142.01	140.73	23.67	23.32
Way Kanan	65.18	64.50	15.36	15.03
Tulang Bawang	33.72	36.83	8.04	8.66
Pesawaran	74.60	74.01	17.86	17.51
Pringsewu	37.31	37.77	9.81	9.83
Mesuji	11.23	12.79	5.81	6.57
Tulang Bawang Barat	16.43	18.73	6.31	7.12
Kota Bandar Lampung	102.75	102.27	10.85	10.60
Kota Metro	17.08	16.95	11.08	10.82

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Jika kita lihat Tabel di atas, terlihat bahwa meskipun secara persentase penduduk miskin Lampung Timur bukanlah yang tertinggi namun secara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur masih yang terbesar di antara Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

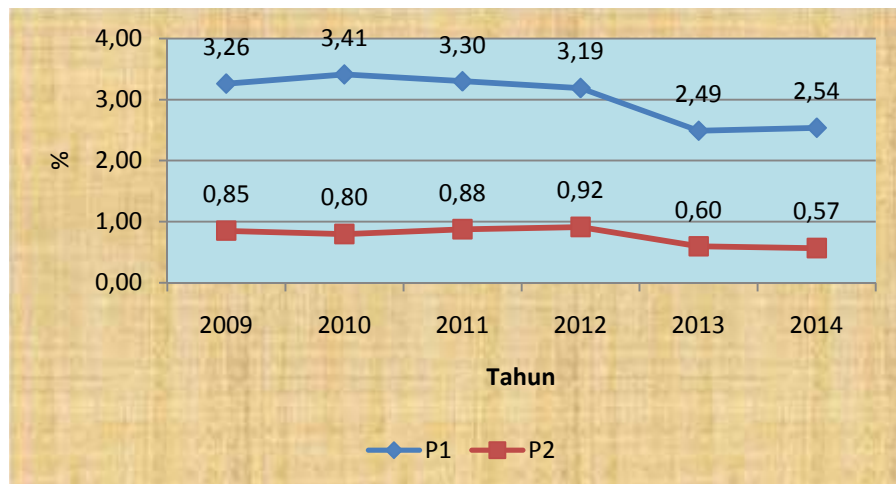
Tabel 2.14
Presentase Penduduk Miskin Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2007-2014

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lampung Timur	27,21	23,35	20,86	21,06	19,66	18,59	17,38	17,05
Provinsi Lampung	22,19	20,98	20,22	18,94	16,93	15,65	14,39	14,21
Nasional	16,58	15,42	14,15	13,33	12,49	11,66	11,47	11,25

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk miskin Lampung Timur masih di atas persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung dan nasional. Persentase penduduk miskin Lampung Timur sebesar 17,05 persen, masih di atas Provinsi Lampung yang sebesar 14,21 persen dan nasional sebesar 11,25 persen.

Grafik 2.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009-2014



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

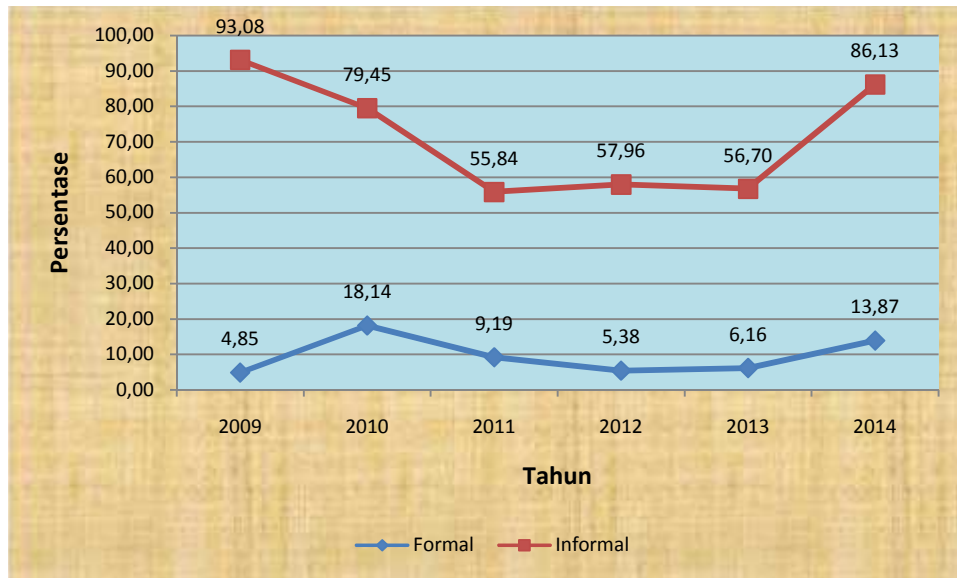
Garis kemiskinan yang tinggi (bila diikuti oleh pendapatan yang tinggi) akan menghasilkan jumlah dan presentase penduduk miskin yang tinggi pula. Sebaliknya, semakin terpenuhinya kecukupan asupan energi yang dikonsumsi penduduk (setara 2.100 kilo per kapita per hari) akan menurunkan harga kalori komoditi.

Seiring dengan dengan meningkatnya nilai IPM, tingkat kemiskinan berangsur-angsur turun. Selama Tahun 2011 hingga Tahun 2014 persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan, dari 19,66 persen turun menjadi 17,38 persen. Mereka ini adalah penduduk yang pengeluaran perkapita perbulan di bawah 291,41 ribu rupiah di Tahun 2014. Besaran itu setara dengan 2100 kilo kalori kebutuhan makanan ditambah kebutuhan minimum bukan makanan yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, raskin yang merupakan beras murah yang disediakan oleh Bulog/Dolog dan diperuntukkan khusus untuk rumah tangga miskin, raskin dapat diperoleh dengan cara membeli di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2014 persentase rumah tangga pembeli raskin di Kabupaten Lampung Timur lebih sedikit dibandingkan pada Tahun 2013. Tahun 2014 persentase rumah tangga pembeli raskin hanya sebesar 79,55 persen, sedangkan Tahun 2013 mencapai 77,74 persen rumah tangga. Jika dilihat dari wilayah, daerah perdesaan persentase rumah tangga pembeli raskinnya lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yaitu sebesar 80,88 persen di wilayah perdesaan sedangkan diperkotaan sebesar 67,29 persen.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Grafik 2.11
Persentase Penduduk Miskin yang Bekerja pada Status Formal dan Informal di
Lampung Timur, 2009-2014

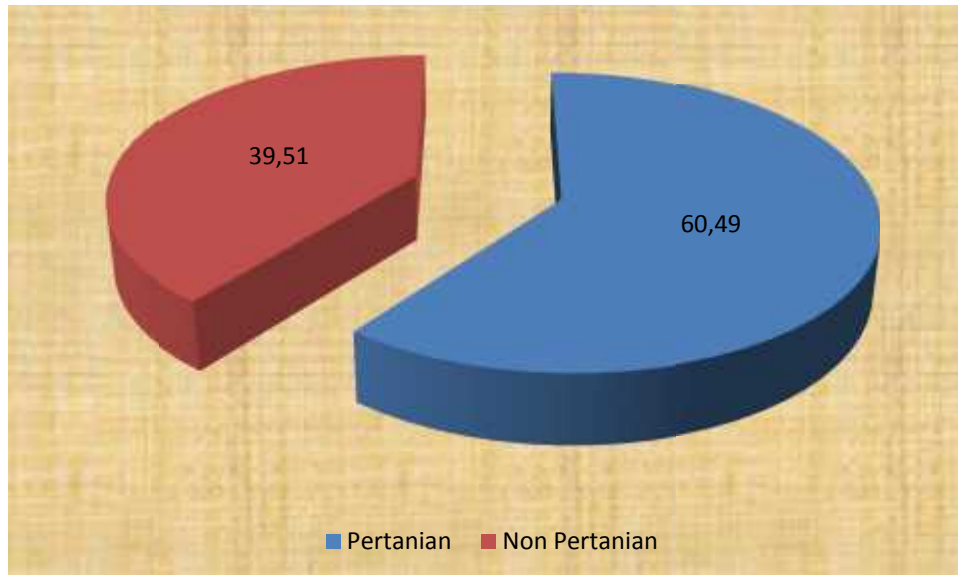


Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Lampung Timur yang bekerja di lapangan kerja informal yaitu dari 93,08 persen menjadi 57,96 persen di Tahun 2013. Namun pada Tahun 2014 persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal kembali meningkat secara signifikan menjadi 86,13 persen. Disisi lain tampak bahwa ada peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur yang bekerja di sektor formal yaitu dari 4,85 persen di Tahun 2009 menjadi 13,87 persen di Tahun 2014.

Meskipun secara umum terlihat bahwa ada penurunan pada persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal dalam kurun 2009-2014, dan ada kenaikan pada persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal namun penurunan penduduk miskin masih dirasa lambat. Jika melihat komposisi antara pekerja formal dan informal, maka tampak tidak adanya perbaikan yang berarti selama 5 tahun terakhir. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sedangkan yang tergolong sebagai pekerjaan informal adalah bagi penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian dan para pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Grafik 2.12
Persentase Penduduk Miskin yang Bekerja menurut Sektor di Kabupaten Lampung Timur, 2014



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang mencirikan penduduk miskin lainnya yaitu penduduk miskin yang bekerja menurut sektor. Pada Gambar di atas terlihat pada Tahun 2014 penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian sebesar 60,49 persen, sedangkan yang bekerja di sektor bukan pertanian sebesar 39,51 persen.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa (*literacy rate*). Kemampuan baca-tulis ini tercermin dari data angka melek huruf (AMH). Dalam hal ini, AMH merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin, atau huruf arab, atau huruf lainnya. Angka ini bermanfaat untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca dan menulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tinggi rendahnya AMH mencerminkan sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2014

Jenis Kelamin	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Laki-laki	96,71	97,58	97,21
Perempuan	90,61	92,67	92,86
Lampung Timur	93,74	95,16	95,07

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain harapan lama sekolah, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 mencapai 7,16 tahun. Angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,15 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur sudah menduduki kelas dua Sekolah Menengah Pertama . Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di kota Bandar Lampung (10,85 tahun), sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Mesuji (5,80 tahun).

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih banyak penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terlihat secara nyata hasilnya.

3. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Fokus kesejahteraan rakyat lainnya di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 2.16
APK dan APM SD,SLTP dan SLTA Kabupaten Lampung Timur 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
	%	%	%	%	%
Angka Partisipasi Kasar					
SD	108,1	100,4	109,6	110,6	112,91
SLTP	83,1	99,5	90,1	79,3	82,53
SLTA	61,3	60,5	53,8	68,5	68,56
PT	-	-	10,72	19,48	22,16
Angka Partisipasi Murni					
SD	94,9	90	93,2	98,4	98,81
SLTP	72,8	75,4	65,5	69,7	72
SLTA	46,1	47,6	42,8	51,1	54,29
PT	-	-	8,41	17,25	19,1

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa di Kabupaten Lampung Timur terdapat APK diatas 100%, yakni APK untuk tingkat SD/ sederajat. Hal ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Lampung Timur terdapat anak di atas 12 tahun tapi masih sekolah di SD/ sederajat. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk disuatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia lebih muda.



APM merupakan salah satu indikator proses pada bidang pendidikan, sedangkan salah satu indikator outputnya adalah tingkat pendidikan penduduk. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan atau ijazah tertinggi yang dimiliki memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Bila jenjang pendidikan SLP dan SLTA APM-nya makin meningkat maka dimasa berikutnya tingkat pendidikan penduduk akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya.

Terlihat bahwa dari Tahun 2010 sampai 2014 APM di Kabupaten Lampung Timur meningkat. Kenaikan APM pada semua tingkat pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lampung Timur mulai menyadari keinginan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendidikan yang relatif tinggi.

4. Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Penduduk

Kondisi yang kurang menggembirakan bagi kemajuan daerah di masa depan adalah dengan semakin menurunnya jumlah dan persentase lulusan pendidikan tinggi. Di Kabupaten Lampung Timur, mereka yang berhasil menamatkan perguruan tinggi berfluktuatif, di Tahun 2012 mencapai 2,5% turun menjadi 2,3% di Tahun 2013, dan kemudai naik menjadi 3,07% di Tahun 2014. Selama tiga tahun jumlah lulusan perguruan tinggi tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, padahal kelompok penduduk lulusan pendidikan tinggi inilah yang menjadi aset berharga bagi daerah dan diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam menggerakkan roda pembangunan.

Tabel 2.17

Penduduk Usia Lebih dari 10 Tahun Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2010-2014

Kelompok Penduduk	2010	2011	2012	2013	2014
	%	%	%	%	%
Tidak Punya	25,3	25	26,1	33,5	20,24
SD Sederajat	34,8	30,7	29,7	24,9	31,34
SLTP Sederajat	23,8	23,8	23,9	22,3	24,1
SLTA Sederajat	13,2	17,1	17,8	17	17,69
Perguruan Tinggi	2,9	3,5	2,5	2,3	3,07
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Indikator lain yang biasa digunakan dalam analisis pendidikan adalah indikator tingkat pendidikan penduduk yang menunjukkan persentase penduduk yang telah mencapai pendidikan yang seharusnya telah dilewati pada usia tertentu. Semakin tinggi indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan yang dimiliki oleh penduduk.

Belum tercapainya target dari program wajib belajar 9 tahun juga tercermin dari data persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada Tabel 3.5



tampak bahwa lebih dari 50 persen penduduk Lampung Timur tidak mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat menengah dan tinggi. Komposisi yang lebih tepat yaitu 23,80 persen penduduk belum tamat SD, dimana di dalamnya terdapat 3,58 persen penduduk yang belum/tidak pernah sekolah. Kemudian sebesar 20,22 persen penduduk tidak punya ijazah SD. Penduduk yang mampu menamatkan pendidikan hanya sampai tingkat SD jumlahnya sebesar 31,34 persen.

Sedangkan yang mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat menengah dan tinggi sebesar 24,10 persen untuk jenjang SLTP, 17,69 persen untuk jenjang SLTA dan 3,07 persen untuk jenjang di atas SLTA atau perguruan tinggi.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014

Jenis Kelamin	Ijazah yang Dimiliki					
	Tidak/belum pernah sekolah	Tdk Punya Ijazah SD	SD	SMP	SMA	PT
Laki-laki	1,82	19,79	31,74	23,86	19,71	3,09
Perempuan	5,44	20,67	30,92	24,34	15,58	3,05
Lampung Timur	3,58	20,22	31,34	24,10	17,69	3,07

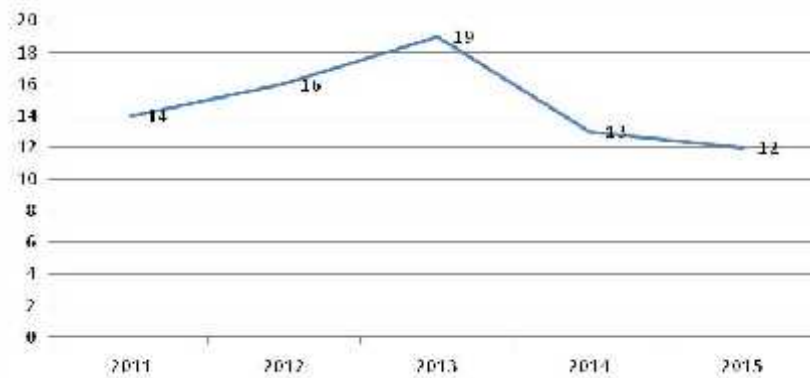
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda dalam setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi pendidikan yang didasarkan pada tingkat pendidikan yang ditamatkan, disparitas gendernya cukup kecil. Berbagai upaya untuk memacu perbaikan tingkat pendidikan penduduk harus terus ditingkatkan. Selain program wajib belajar 9 tahun yang harus terus digalakkan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan juga harus terus ditingkatkan, dan sasaran peningkatan kualitas pendidikan juga harus dipertajam. Selain itu, perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat guna percepatan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Timur di masa yang akan datang.

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dan indikator MDGs yaitu peningkatan kesehatan ibu. Terkait dengan kasus kematian ibu, pada Tahun 2015 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 12 kasus yang tersebar di beberapa wilayah kerja Puskesmas, dan 2 kasus kematian lintas batas. Perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada grafik berikut:

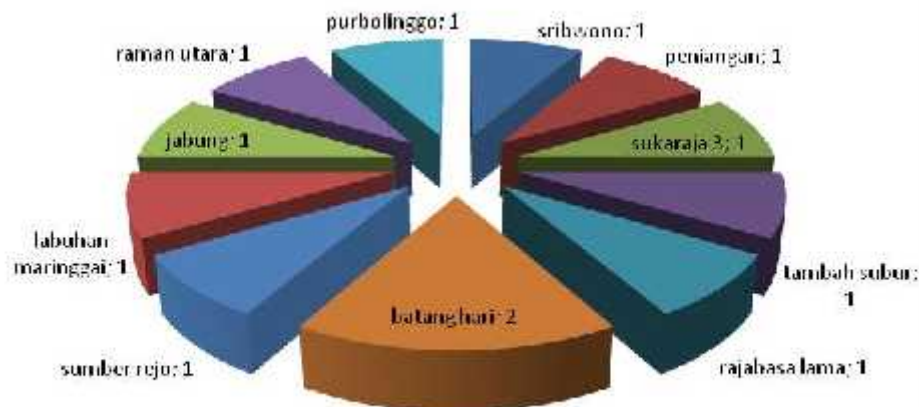
Grafik 2.13
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2015.



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2015

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah kasus kematian ibu fluktuatif, dan cenderung menurun 3 tahun terakhir. Jumlah kasus kematian ibu tahun 2014 (13 kasus) menurun bila dibandingkan tahun 2015 (12 kasus). Kasus kematian ibu tahun 2015 tersebut tersebar di beberapa Puskesmas, sebagai berikut:

Grafik 2.14
Kasus Kematian Ibu Menurut Lokasi di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015



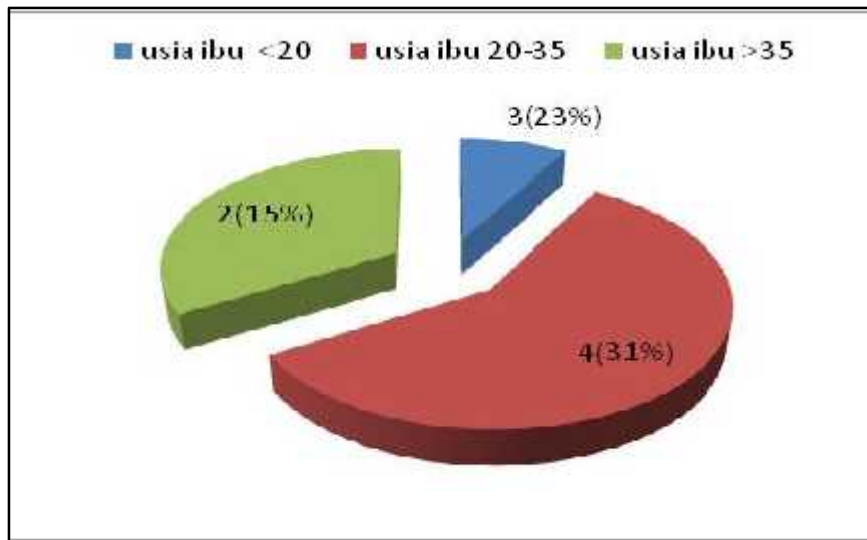
Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2015

Grafik di atas menunjukkan bahwa kejadian kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 menyebar di 11 Puskesmas dengan jumlah kematian terbanyak di Puskesmas Batanghari. Jika dilihat dari penyebab kematian ibu, penyebab kematian ibu di Lampung Timur Tahun 2015 mengalami perubahan. Pada penyebab langsung terdapat kematian ibu dengan sebab sepsis pada *post Sectio Caesaria* (SC) 2 kasus dimana pada tahun sebelumnya tidak ditemukan, kasus perdarahan 4 kasus, dengan rincian 2 kasus *atonia post SC*. dan *Hypertensi* dalam kehamilan 3 kasus. Sedangkan pada penyebab tidak langsung, pada Tahun 2015, kematian ibu disebabkan karena penyakit kronis terdapat 2 kasus. Hal ini menunjukkan upaya penanganan di fasilitas rujukan yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil penurunan kasus kematian ibu.

Berdasarkan umur ibu, kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung tidak sesuai dengan

teori yang berlaku yaitu *grande multipara* (kehamilan ke 5 atau lebih pada usia >35 th) merupakan resiko tinggi pada ibu hamil yang menyebabkan kematian ibu. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.15
Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Lampung Timur Menurut Umur di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015



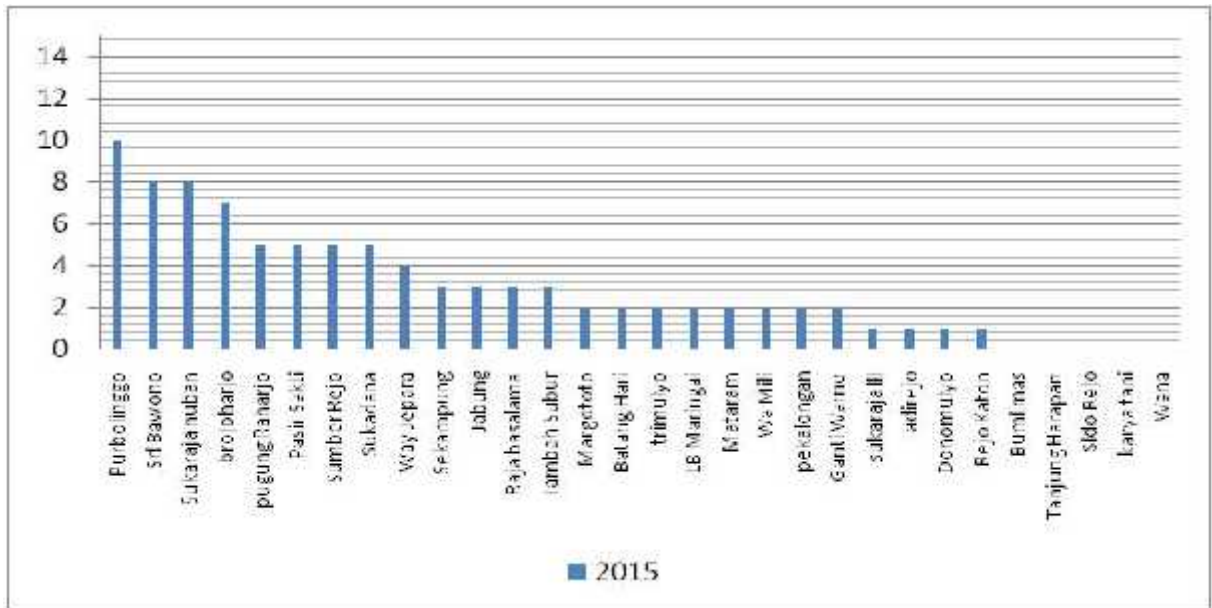
Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2015

Beberapa upaya untuk menurunkan kematian ibu dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2015. Salah satu kegiatan utamanya adalah AMP. Dari hasil Audit maternal yang dilakukan pada kasus kematian ibu seluruh kasus kematian ibu (100%) sudah dilakukan Audit Maternal yang meliputi OVM, RMM perantara dan RMM tempat kejadian, serta telah dilakukan pengkajian kasus oleh Tim Pengkaji Kabupaten (FPM,RPM) dan menghasilkan beberapa Rekomendasi AMP.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator ke lima dalam MDGs. Terkait dengan kasus kematian bayi, pada Tahun 2015 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 91 kasus kematian bayi (usia 0 sampai 12 bulan) yang tersebar di beberapa wilayah kerja puskesmas seperti pada grafik berikut:

Grafik 2.16
Kasus Kematian Bayi Menurut Lokasi di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015



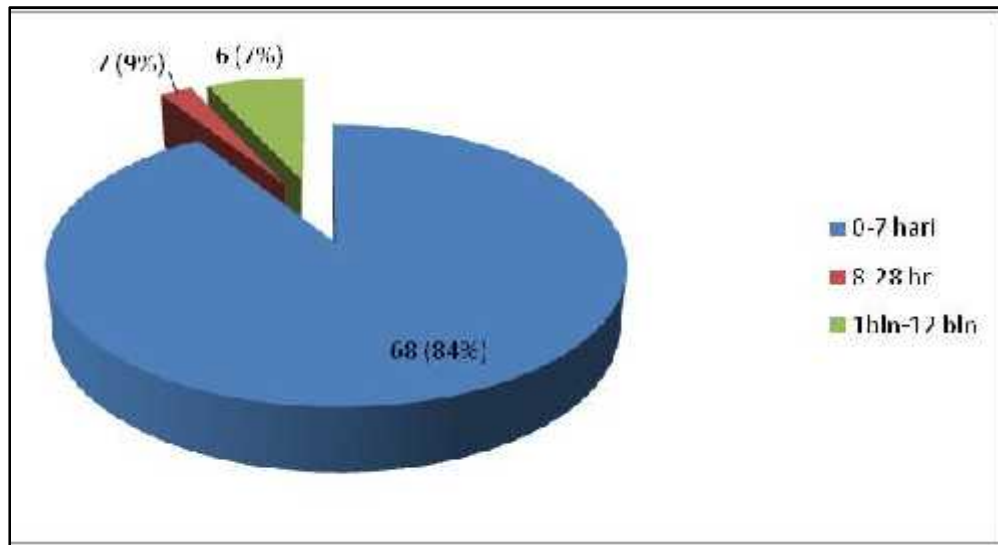
Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2015

Kasus kematian bayi terbanyak terdapat di wilayah kerja Puskesmas Purbolinggo hal ini disebabkan karena BBLR dan Asfiksia. Selanjutnya puskesmas dengan kasus kematian bayi terbanyak adalah puskesmas Sukaraja Nuban dan Sribawono. Pada kedua puskesmas ini juga terjadi peningkatan kasus kematian bayi jika dibandingkan dengan Tahun 2014 lalu. Hal ini menunjukkan ketidakberhasilan program kesehatan anak. Terjadi perbedaan penemuan kasus kematian bayi, pada beberapa Puskemas pada Tahun 2014 tidak terdapat kasus kematian bayi, tetapi Tahun 2015 terjadi kematian bayi meliputi Puskesmas (Trimulyo, Sukaraja III, Adirejo, Brojoharjosari, Pekalongan). Sedangkan Puskesmas Bumi Emas, Tanjung Harapan, Sidorejo, Karya Tani, Wana) menunjukkan keberhasilan program, dimana pada Tahun 2014 terdapat kasus kematian bayi dan pada Tahun 2015 tidak ditemukan kematian bayi.

Analisa kematian bayi selanjutnya dilakukan berdasarkan kelompok umur, hal ini diperlukan karena tindak lanjut untuk upaya penurunan kematian bayi akan berbeda pada masing masing kelompok umur. Karena itu terdapat 3 (tiga) kelompok umur pada kasus kematian bayi yaitu kematian perinatal (0-7 hari), kematian Neonatal (8-28 hr) dan kematian 1 bln - 12 bln. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 2.17

Kasus Kematian Bayi Menurut Umur Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2015

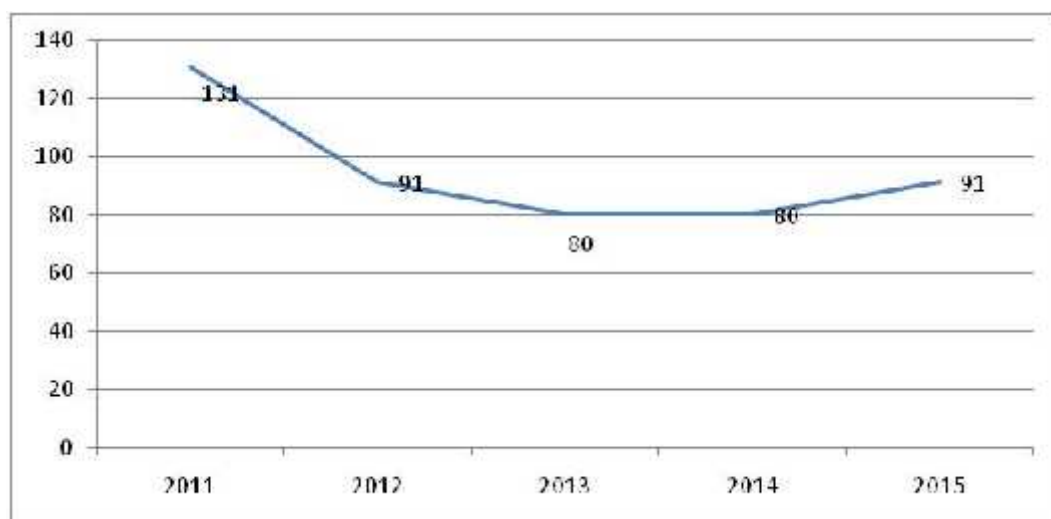
Dari Grafik di atas dapat diketahui kematian bayi sebagian besar terjadi pada perinatal (0-7 hr), hal sesuai dengan teori yang menyatakan kematian bayi $\frac{3}{4}$ bagian terjadi pada perinatal. Lebih lanjut lagi kasus kematian pada perinatal, neonatal dan bayi sebagian besar masih disebabkan oleh penyebab klasik yaitu BBLR dan Asfiksia.

Dari penyebab di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pada kasus BBLR sudah menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan dan asuhan pada Bayi BBLR, akan tetapi data menunjukkan penanganan pada kasus asfiksia/kompetensi petugas dalam penata laksanaan Asfiksia masih kurang, hal ini disebabkan karena sedikit sekali bidan desa yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan Asfiksia.

Tren kematian bayi (0 bln s/d 12 bulan) Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.18

Kasus Kematian Bayi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015

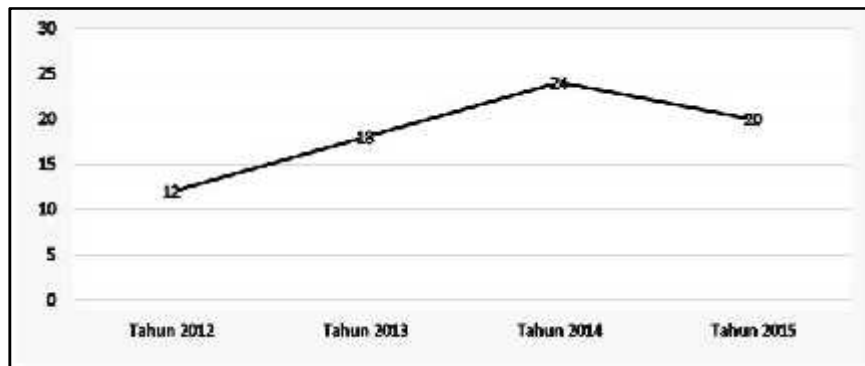


Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2015

3. Balita Gizi Buruk

Terkait dengan kejadian gizi buruk, dari hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan KMS di Posyandu dan Pelacakan Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur, pada Tahun 2012 terdapat 12 kasus gizi buruk. Tahun 2013 meningkat menjadi 18 kasus, Tahun 2014 kembali meningkat menjadi 24 kasus, dan pada Tahun 2015 turun menjadi 20 kasus.

Grafik 2.19
Kasus Gizi Buruk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2015



Sumber : Dinkes Kab. Lampung Timur, 2015

C. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

Ukuran umum yang digunakan untuk melihat keterlibatan penduduk kegiatan ekonomi adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif, karena itu angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Memerlihatkan bahwa TPAK Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 sebesar 67,8%. Artinya porsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di kabupaten ini sebesar 67,8%.

Tabel 2.19
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, 2010-2014

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
	%	%	%	%	%
· Tingkat partisipasi angkatan Kerja (TPAK)	67,7	68,4	67	64,1	67,8
· Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,3	4,2	2,9	5,6	5,0

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

D. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

Dilihat dari lapangan usaha atau lapangan pekerjaannya, seperti kebanyakan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur masih merupakan daerah agraris dimana sekitar 50,02 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor-sektor lain umumnya sangat sedikit menyerap tenaga kerja, dan beberapa sektor penting seperti perdagangan, jasa-jasa dan industri hanya mampu menyerap tenaga kerja masing-



masing sebesar 16,76 persen; 13,90 persen; dan 8,27 persen. Pada Tabel bila diamati lebih jauh menurut jenis kelamin pada sektor tertentu lebih banyak digeluti oleh perempuan atau sebaliknya. Umumnya sektor-sektor usaha yang membutuhkan tenaga fisik (*power*) akan lebih didominasi dengan kaum laki-laki ketimbang perempuan. Contohnya saja pada sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, serta angkutan dan komunikasi lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki sedangkan sektor perdagangan dan jasa berlaku sebaliknya. Pekerjaan yang sedikit banyak memerlukan ketelitian/kesabaran kebanyakan menggunakan tenaga perempuan.

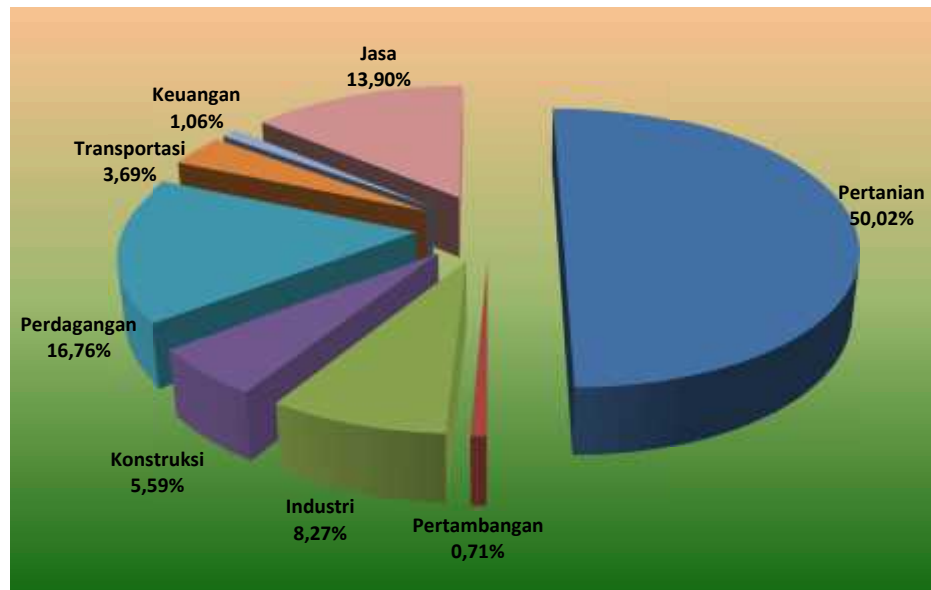
Pada di bawah ini terlihat bahwa di daerah pedesaan 53,29 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, sedangkan di perkotaan hanya 7,86 persen penduduk yang bekerja pada sektor yang sama. Di perkotaan tercatat sebanyak 67,47 persen dari seluruh penduduknya yang bekerja berkecimpung di sektor S, kemudian di sektor M sebesar 24,67 persen. Beberapa peneliti, antara lain Suhartaji (1978) menjelaskan perihal tingginya penyerapan tenaga kerja sektor S di wilayah perkotaan antara lain disebabkan banyaknya pekerja musiman terlibat dalam sektor informal di perkotaan karena kemudahan untuk keluar dan masuk tanpa ada prasyarat yang sulit.

Tabel 2.20
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2014

Lapangan Pekerjaan		Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
A	Pertanian	53.68	41.76	7.86	53.29	50.02
M	Pertambangan	0.84	0.42	0.00	0.77	0.71
	Industri	7.22	10.66	10.62	8.09	8.27
	Listrik & Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bangunan	7.86	0.48	14.05	4.94	5.59
	Total M	15.92	11.56	24.67	13.80	14.58
S	Perdagangan	10.34	31.24	27.66	15.91	16.76
	Angk & Kom	4.94	0.88	4.31	3.64	3.69
	Keuangan	1.05	1.07	1.81	1.00	1.06
	Jasa-jasa	14.07	13.49	33.69	12.36	13.90
	Total S	30.41	46.68	67.47	32.91	35.40
	Jumlah	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Sakernas Agustus 2014

Grafik 2.18
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan, Tahun 2014



Sumber : Sakernas Agustus 2014

Analisis ketenagakerjaan dapat juga dibedakan menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau ketrampilan tertentu atau sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik atau berpendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada Tabel di bawah ini memperlihatkan hubungan antara jenis kelamin dan daerah tempat tinggal dengan status pekerjaan utama penduduk yang bekerja di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan kategori tersebut maka pada lapangan usaha pertanian (*agriculture*) pada umumnya menunjukkan sektor yang banyak menyerap pekerja informal, terutama bagi tenaga kerja wanita dengan status sebagai pekerja keluarga. Sedangkan yang bekerja di sektor jasa (*services*) biasanya berstatus berusaha sendiri.

Tabel 2.21

Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2014

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Lampung Timur
Berusaha sendiri	19.16	18.47	17.91	19.03	18.95
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	28.87	14.38	10.97	25.46	24.42
Berusaha dibantu buruh tetap	2.50	1.44	3.13	2.10	2.17
Buruh/karyawan	16.11	16.97	43.71	14.25	16.37
Pekerja bebas di pertanian	11.05	6.15	0.67	10.23	9.54
Pekerja bebas di non pertanian	13.74	2.70	14.77	10.01	10.35
Pekerja tak dibayar	8.57	39.89	8.84	18.91	18.19
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

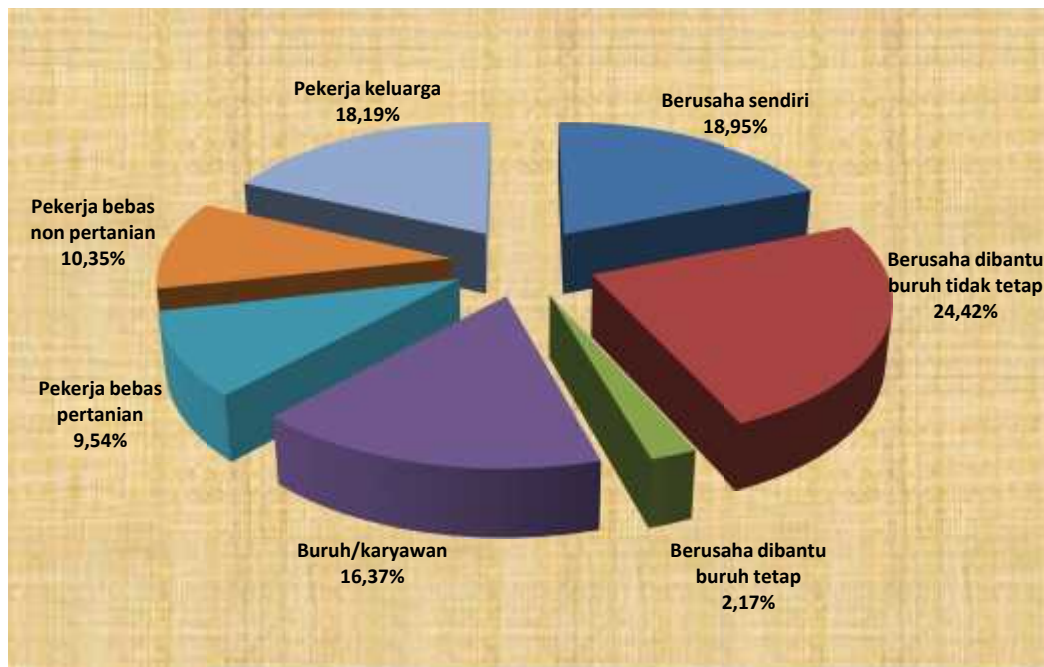
Sumber : Sakernas Agustus 2014

Dilihat dari status pekerjaannya (KILM 3), penduduk yang bekerja di Kabupaten Lampung Timur pada umumnya berstatus sebagai seseorang yang berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap (24,42 persen), atau berstatus berusaha sendiri (18,95 persen), dan berstatus sebagai pekerja keluarga (18,19 persen). Penduduk yang bekerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap atau pengusaha (*employer*) hanya sebesar 2,17 persen. Kondisi ini memperlihatkan masih tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal, yang umumnya tidak memerlukan pendidikan tinggi maupun keahlian khusus. Hal yang memprihatinkan adalah masih tingginya persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai pekerja tak dibayar, dimana proporsinya mencapai 39,89 persen.

Dilihat dari jenis kelamin, pekerja perempuan nampaknya lebih mendominasi pekerjaan di sektor informal, dan sebaliknya untuk pekerjaan di sektor formal lebih didominasi oleh pekerja laki-laki. Komposisi seperti ini masih mengundang keprihatinan kita karena secara tidak langsung kesenjangan gender masih cukup terlihat di dunia ketenagakerjaan kita. Persentase pekerja perempuan yang berstatus sebagai buruh/karyawan adalah 16,97. Untuk pekerja laki-laki, persentase terbesarnya adalah mereka yang berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap (28,87 persen), kemudian berikutnya yang berstatus berusaha sendiri (19,16 persen).

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, di daerah perkotaan 43,71 persen dari penduduk yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dan 17,91 persen berstatus berusaha sendiri. Keadaan yang berbeda terjadi di pedesaan 25,46 persen berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap. Hal ini berkaitan dengan dominannya sektor pertanian di pedesaan, dan pada umumnya pekerja tak dibayar banyak terserap di sektor ini.

Grafik 2.19
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Tahun 2014



Sumber : Sakernas Agustus 2014

Jika ditelaah lebih lanjut, didapatkan fakta bahwa terdapat kaitan antara jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan status pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebagian besar mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, sementara pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Lebih dari 87,38 persen penduduk berpendidikan diploma dan sarjana ke atas bekerja sebagai buruh/karyawan, sementara yang bekerja sebagai pekerja bebas dan pekerja tak dibayar dengan jenjang pendidikan yang sama jumlahnya tidak lebih dari 3,07 persen. Untuk mereka yang berpendidikan SLTA atau sederajat umumnya memiliki pekerjaan dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai, ditandai dengan besarnya yang mencapai 26,95 tahun. Untuk kelompok mereka yang berpendidikan maksimal lulus SD, umumnya memiliki pekerjaan yang lebih bersifat informal yang ditandai dengan statusnya sebagai berusaha sendiri, pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar (sifatnya sekedar membantu) atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar.



Tabel 2.22

Persentase Penduduk Kabupaten Lampung Timur yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2014

Status Pekerjaan Utama	Tdk/Blm Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	> SLTA
Berusaha sendiri	20.91	15.61	21.04	18.81	22.84	1.06
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	49.95	39.87	27.56	16.55	18.68	1.90
Berusaha dibantu buruh tetap	0.00	0.00	1.03	1.95	5.31	5.20
Buruh/karyawan	1.52	1.01	9.52	13.16	26.95	87.38
Pekerja bebas di pertanian	8.95	13.25	12.27	10.91	3.60	0.00
Pekerja bebas di non pertanian	0.00	7.83	11.92	15.01	8.36	1.39
Pekerja tak dibayar	18.67	22.43	16.66	23.62	14.25	3.07
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sakernas Agustus 2014

Hal ini menunjukkan adanya peran pendidikan dalam menentukan status pekerjaan utama. Sektor pekerjaan formal yang meliputi buruh dan berusaha dibantu buruh tetap merupakan sektor yang membutuhkan pendidikan, sementara sektor informal yang meliputi pekerja bebas, berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar dan pekerja keluarga tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi.

Persentase penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap hampir sama untuk setiap jenjang pendidikan. Bahkan untuk mereka yang berpendidikan tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah, persentasenya hanya 0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap tidak mempunyai kecenderungan pada tingkat pendidikan tertentu, padahal diharapkan penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dapat menciptakan lapangan usaha. Indikasi lain dari gejala tersebut adalah masih rendahnya jiwa *entrepreneur*/kemandirian penduduk. Perluasan lapangan usaha menjadi sulit untuk ditingkatkan karena pengusaha kecil/rakyat yang dibantu pekerja tetap sebagai tempat penyerapan tenaga kerja mempunyai derajat pendidikan yang rendah. Dalam pemilihan/penetapan suatu jenis pekerjaan, untuk pekerja perempuan tidak terlepas dari peran produktifnya, tanpa mempertimbangkan kemampuan perempuan itu sendiri. Dengan demikian sedikit sekali perempuan yang berkedudukan sebagai pengambil keputusan.

Tabel 2. 23
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Jenis
Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 2014

Jenis Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Lampung Timur
Tenaga Profesional	2.60	7.07	15.08	3.11	3.97
Tenaga Kepemimpinan I	0.28	0.00	0.37	0.18	0.19
Tenaga Pelaksana dan T	1.87	3.25	6.52	1.97	2.29
Tenaga Penjualan	9.25	29.86	25.28	14.83	15.58
Tenaga Usaha Jasa	5.89	3.64	7.81	5.00	5.20
Tenaga Usaha Pertanian	53.46	41.25	7.86	52.96	49.71
Tenaga Produksi, Operat	25.96	14.93	37.09	21.44	22.57
Lainnya	0.70	0.00	0.00	0.52	0.48
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Sakernas Agustus 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase terbesar jenis pekerjaan utama penduduk Kabupaten Lampung Timur tahun 2014 adalah sebagai tenaga usaha pertanian, yaitu 49,71 persen. Untuk pekerja tenaga usaha pertanian yang laki-laki berjumlah 53,46 persen sedangkan untuk perempuan berjumlah 41,25 persen. Hal ini sejalan dengan pola lapangan pekerjaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian di wilayah Lampung. Urutan terbesar kedua adalah sebagai tenaga produksi, operator dan pekerja kasar yaitu sebesar 22,57 persen. Persentase pekerja laki-laki sebagai tenaga produksi jumlahnya mencapai 25,96 persen. Angka ini lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga produksi yaitu sebesar 14,93 persen. Untuk daerah perkotaan persentase terbesar bekerja sebagai tenaga produksi, operator dan pekerja kasar yaitu sebesar 37,09 persen. Selanjutnya, urutan terbesar kedua bekerja sebagai tenaga penjualan yaitu sebesar 25,28 persen. Sedangkan untuk daerah pedesaan persentase terbesar bekerja sebagai tenaga pertanian yaitu 52,96 persen dan terbesar kedua bekerja sebagai tenaga produksi, operator dan pekerja kasar yaitu sebesar 21,44 persen. Di Lampung Timur, mereka yang bekerja sebagai tenaga kepemimpinan masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,19 persen. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,06 persen.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kabupaten Lampung Timur adalah daerah yang memiliki kebudayaan tinggi. Masyarakat adat Lampung Timur adalah beradat Pepadun, yang terkenal dengan istilah Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, sedangkan masyarakat adat Peminggir hanya di beberapa desa saja. Adat Pepadun mempergunakan garis keturunan patrilineal. Upacara adat umumnya dilakukan pada acara perkawinan, disamping kewajiban sesuai hukum Agama Islam. Prinsip dalam kehidupan sehari-hari



menunjukkan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat Lampung yang disimpulkan dalam 5 prinsip, yaitu: "*Pill Pasenggiri*" yang berarti perilaku dan bermoral tinggi; "*Sakai Sambayan*" mengandung makna tolong-menolong; "*Nemui Nyimah*" berarti ramah tamah terhadap semua pihak; "*Nengah Nyappur*" adalah bersikap terbuka, dan "*Bejuluk Beadek*" adalah gelar setelah menikah.

Dalam bidang kesenian Kabupaten Lampung Timur cukup berkembang, sampai Tahun 2014 tercatat sanggar kesenian 773 kelompok. Seperti diketahui banyak suku yang berkembang di Kabupaten Lampung Timur, dan masing-masing suku membawa budaya dan berkembang dengan baik. Beberapa sanggar kesenian yang berkembang antara lain Sanggar Kesenian Lampung, Reog, Kuda Lumpung, Orgen tunggal, Janger, Sintreng, Campur Sari, Karawitan, Wayang Kulit, Musik Islami, Orkes Gambus, Orkes Melayu, Band, Kesenian Padang, Kesenian Lampung dan sebagainya.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Upaya peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diharapkan akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Faktor-faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), ketersediaan sekolah yang dicerminkan nilai rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dan jumlah guru yang dicerminkan nilai rasio jumlah guru dan murid pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.24
 Persentase Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur
 Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2010 - 2014

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014
7 - 12	98,7	97	99,1	99,3	99,7
13 - 15	89,4	90,2	87,3	94,7	95,97
16 - 18	50	57,7	56,4	62,6	67,12
19 - 24	-	-	10,2	18,5	21,89

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Tabel di atas mencerminkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dan memperlihatkan rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lampung Timur. Dari kedua tabel tersebut menunjukkan angka yang ideal dan sangat berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dikemudian hari.



Tabel 2.25
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2012/2013 - 2013/2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun	
		2012/2013	2013/2014
1.	SD/MI		
a.	Jumlah sekolah	563	554
b.	Jumlah penduduk umur 7 - 12 tahun	107.061	115.750
c.	Rasio	1 : 190	1 : 208
2.	SMP/MTs		
a.	Jumlah sekolah	152	152
b.	Jumlah penduduk umur 13 - 15 tahun	54.576	38.584
c.	Rasio	1 : 359	1 : 254
3.	SMA/SMK/MA		
a.	Jumlah sekolah	93	75
b.	Jumlah penduduk umur 16 - 18 tahun	50.564	20.964
c.	Rasio	1 : 543	1 : 279

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Terkait dengan ketersediaan sekolah, kelas, guru dan murid dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.26
Banyaknya Sekolah dan Kelas
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013/2014

Jenis Sekolah	Sekolah	Kelas
TK Negeri	1	5
TK Swasta	455	879
SD Negeri	540	3.597
SD Swasta	19	120
SMP Negeri	60	734
SMP Swasta	95	534
SMA Negeri	20	198
SMA Swasta	24	139
SMK Negeri	7	51
SMK Swasta	49	243
Jumlah	1.270	6.500

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015



Tabel 2.27
Rasio Jumlah Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010/2011–2013/2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1.	SD/MI				
a.	Jumlah guru	6.519	7.213	6.298	6.298
b.	Jumlah murid	110.251	122.683	115.751	115.750
c.	Rasio	1 : 16,91	1 : 17,01	1 : 18,37	1 : 18,37
2.	SMP/MTs				
a.	Jumlah guru	2.353	4.542	3.396	3.396
b.	Jumlah murid	32.146	37.511	38.584	38.584
c.	Rasio	1 : 13,66	1 : 8,6	1 : 11,36	1 : 11,36
3.	SMA/SMK/MA				
a.	Jumlah guru	2.293	2.550	2.217	2.049
b.	Jumlah murid	19.620	25.054	21.063	20.964
c.	Rasio	1 : 8,56	1 : 9,83	1 : 9,50	1 : 10,23

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Salah faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu ketersediaan sarana pendidikan khususnya ruang kelas belajar. Sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ruang kelas SD per kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Tabel 2.28
Kondisi Ruang Kelas SD per Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Bandar Sribhawono	162	78	21	23	40
Batanghari Nuban	186	104	31	28	23
Batanghari	284	125	43	66	50
Braja Selehah	92	47	13	17	15
Bumi Agung	82	25	17	40	-
Gunung Pelindung	83	45	-	22	16
Jabung	151	60	35	28	28
Labuhan Maringgai	169	99	58	11	1
Labuhan Ratu	129	86	18	-	25
Marga Tiga	172	94	29	25	24
Marga Sekampung	108	69	15	11	13
Mataram Baru	100	65	10	12	13
Melinting	100	44	15	30	11
Metro Kibang	143	87	12	9	35
Pasir Sakti	80	45	22	5	8
Pekalongan	242	117	35	28	62
Purbolinggo	229	117	41	28	43
Raman Utara	220	98	13	40	69
Sekampung Udik	231	108	39	28	56
Sekampung	294	125	51	57	61
Sukadana	246	141	25	21	59
Waway Karya	121	57	19	18	27
Way Bungur	110	46	23	19	22
Way Jepara	212	101	35	42	34
JUMLAH	3.946	1.983	620	608	735

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2015

Berdasarkan Tabel tersebut, yang dimaksud dengan rusak ringan adalah kerusakan ruang kelas dibawah 30%, rusak sedang adalah kerusakan ruang kelas antara 30-45%, dan rusak berat adalah kerusakan ruang kelas antara 45-65%.

Selanjutnya pada Tabel di bawah ini ditampilkan kondisi ruang kelas SMP per kecamatan Tahun 2015:



Tabel 2.29
Kondisi Ruang Kelas SMP per Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Ruang Kelas	KONDISI			
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
Bandar Sribhawono	94	88	3	3	-
Batanghari Nuban	54	46	2	6	-
Batanghari	60	42	7	9	2
Braja Selehah	29	23	1	1	4
Bumi Agung	36	9	-	1	-
Gunung Pelindung	19	15	4	-	-
Jabung	63	59	2	2	-
Labuhan Maringgai	66	37	6	19	9
Labuhan Ratu	63	35	2	8	5
Marga Tiga	54	45	6	3	-
Marga Sekampung	54	45	6	3	-
Mataram Baru	45	37	6	2	-
Melinting	22	14	2	3	3
Metro Kibang	36	27	4	5	-
Pasir Sakti	50	27	-	7	-
Pekalongan	59	52	7	2	3
Purbolinggo	45	24	12	9	-
Raman Utara	27	21	3	3	-
Sekampung Udik	120	106	6	8	-
Sekampung	114	63	21	14	6
Sukadana	80	76	1	3	-
Waway Karya	63	60	1	2	-
Way Bungur	27	18	2	7	-
Way Jepara	126	68	10	21	4
JUMLAH	1.406	1.037	114	141	36

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2015

Peningkatan pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari semakin tingginya angka/tingkat kelulusan, dimana tingkat kelulusan siswa mencapai 100% untuk seluruh jenjang pendidikan pada Tahun 2015.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kehidupan dan usia harapan hidup manusia, kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dan status kesehatan penduduk. Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dipercaya menjadi penyebab langsung maupun tak langsung keberhasilan bidang-bidang lain.

Status kesehatan penduduk antara lain dapat diukur dari angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Berdasarkan data Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014, angka kesakitan penduduk Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan dari 14,3% di Tahun 2013 menjadi 12,9% di Tahun 2014.

Sedangkan rata-rata lama sakit mengalami penurunan dari 5,68 hari di Tahun 2013 menjadi 5,59 hari di Tahun 2014. Kenyataan ini memberikan pengertian awal bahwa secara kuantitas jumlah penduduk yang sakit menurun dan jika dilihat dari sisi tingkat kesakitan termasuk kategori ringan.

Tabel 2.30

Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2011-2014

Tahun	Angka Kesakitan (%)	Rata-rata lama sakit (hari)
	2011	13,65
2012	14,45	5,66
2013	14,3	5,68
2014	12,9	5,59

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Gambaran tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengeluh sakit. Pada Tahun 2014 menyebutkan bahwa penduduk Kabupaten Lampung Timur yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 12,9% dengan rata-rata lama sakit 5,59 hari.

Pada Tahun 2014, penduduk laki-laki yang sakit dan berobat jalan dalam 1 bulan terakhir sebesar 43,93 persen, sedangkan penduduk perempuannya sebesar 56,47 persen. Penduduk laki-laki yang sakit dan berobat jalan dalam 6 bulan terakhir hanya 18,43 persen sedangkan penduduk perempuannya lebih tinggi, yaitu 23,22 persen. Penduduk laki-laki yang sakit dan menjalani rawat inap pada Tahun 2014 sebesar 1,56 persen, sedangkan penduduk perempuannya sebesar 2,43 persen. Fenomena ini menggambarkan bahwa penduduk perempuan lebih mempercayakan kesehatannya ke tenaga medis daripada penduduk laki-laki.

Tabel 2.31

Penduduk yang sakit dan berobat jalan dan rawat inap menurut jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
Berobat Jalan (1 Bulan terakhir)	43,93	56,47	50,02
Berobat Jalan (6 Bulan terakhir)	18,43	23,22	20,76
Rawat Inap (1 Tahun terakhir)	1,56	2,43	1,98

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Indikator lain yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Indikator ini sangat penting karena peristiwa kelahiran merupakan situasi yang rawan yakni mempunyai resiko kematian yang tinggi terutama bila penanganannya tidak dilakukan secara cermat. Persentase balita di Kabupaten Lampung Timur yang kelahirannya ditolong tenaga



kesehatan pada Tahun 2014 menunjukkan kenaikan dibandingkan Tahun 2012, yaitu 86,7% di Tahun 2012 menjadi 96,7% pada Tahun 2014.

Tabel 2.32
Persentase Penolong Kelahiran
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 - 2014

Penolong Kelahiran	2012	2013	2014
	%	%	%
Tenaga Medis	86,7	87,7	96,7
- Dokter	11	8,8	13,4
- Bidan	74,2	77,7	83,3
- Tenaga Kesehatan Lain	1,5	1,2	0
Tenaga Non Medis	13,3	12,3	3,3
- Dukun	13,3	11,9	2,6
- Famili	0	0,4	0,7
- Lainnya	0	0	0

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Selanjutnya, dari ketersediaan sarana prasarana kesehatan secara umum fasilitas sarana kesehatan belum memadai, namun demikian pada Tahun 2014 terdapat beberapa tempat pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dan Rumah Sakit Swasta (2 buah); Puskesmas (33 buah); Pustu (88 buah); Poskesdes (258 buah); Rumah bersalin (25 buah); Poliklinik (41 buah).

Tabel 2.33
Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014

Kecamatan	Jenis Sarana Kesehatan					
	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Rumah Bersalin	Poliklinik
Metro Kibang	-	1	2	7	-	-
Batanghari	-	2	5	17	-	1
Sekampung	-	2	4	17	2	2
Marga Tiga	-	2	4	13	2	2
Sekampung Udik	-	2	5	15	1	1
Jabung	-	2	3	11	-	1
Pasir Sakti	-	1	4	8	-	-
Waway Karya	-	1	3	11	-	-
Marga Sekampung	-	1	2	8	-	-
Labuhan Maringgai	-	2	5	11	2	1
Mataram Baru	-	1	2	7	1	3
Bandar Sribhawono	1	1	4	8	1	2
Melinting	-	1	3	6	-	-
Gunung Pelindung	-	1	2	5	-	1
Way Jepara	-	2	5	16	2	4
Braja Selehah	-	1	4	7	-	-
Labuhan Ratu	-	1	3	11	2	4
Sukadana	1	1	5	20	3	5
Bumi Agung	-	1	3	7	-	1



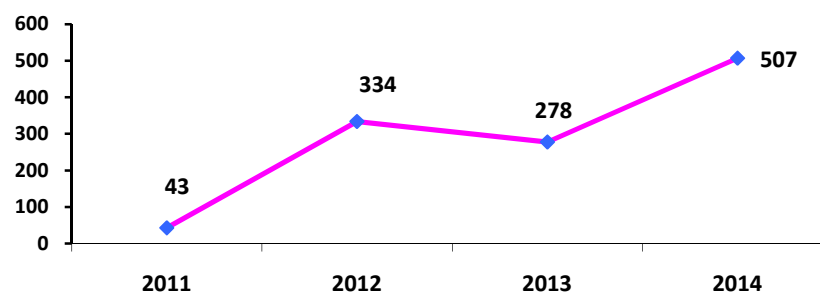
Kecamatan	Jenis Sarana Kesehatan					
	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Rumah Bersalin	Poliklinik
Batanghari Nuban	-	1	3	10	1	1
Pekalongan	-	2	5	11	-	4
Raman Utara	-	2	3	12	2	3
Purbolinggo	-	1	5	12	5	4
Way Bungur	-	1	4	8	1	1
Jumlah	2	33	88	258	25	41

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Pada Tahun 2014 tenaga medis yang melayani masyarakat adalah Dokter Spesialis Anak (1 orang), Dokter SPOG (2 orang), Dokter Anasthesi (1 orang), Dokter Umum (63 orang), Bidan (561 orang), Perawat Wanita (116 orang), Nutrision (14 orang), Kesehatan Masyarakat (22 orang), Sanitarian (20 orang), Analis Kesehatan (11 orang), dan Tenaga Farmasi (17 orang).

Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Tahun 2014 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 278 kasus menjadi 507 kasus. Perkembangan jumlah kasus DBD di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.20
Perkembangan Kasus DBD di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2014



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

Kasus DBD tersebut terkait dengan “Siklus Lima Tahunan” dimana pada kasus DBD menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Upaya yang dilakukan untuk menekan kasus DBD ini antara lain dengan meningkatkan sistem kewaspadaan dini, sosialisasi DBD secara terus menerus, penggerakan PSN dengan 3 M Plus secara serentak, abatisasi dan *fogging focus*.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Dalam kaitannya dengan sektor-sektor perekonomian, infrastruktur transportasi, khususnya jalan berperan sebagai perangsang tumbuhnya sektor-sektor perekonomian baru dan berkembangnya sektor-sektor perekonomian yang sudah ada.



Sebagai perangsang, infrastruktur transportasi dapat difungsikan secara aktif untuk menggerakkan perekonomian daerah yang didahului dengan pembangunan infrastruktur transportasi. Dengan adanya infrastruktur transportasi, kegiatan-kegiatan sektor ekonomi lainnya akan tumbuh dan berkembang (*trade follows the ship*).

Secara umum dari 107,66 kilometer jalan nasional yang ada di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan data pada Tahun 2014 telah mencapai 65 persen kondisi mantap. Sedangkan untuk jalan provinsi sebagian besar dalam kondisi tidak mantap atau tidak dapat melayani kendaraan dengan baik dan lancar. Lebih lanjut, terkait dengan kondisi jalan kewenangan kabupaten, berdasarkan data Tahun 2014, baru mencapai 42,58 persen berada dalam kondisi mantap. Dengan tidak seimbangnya antara peningkatan volume kendaraan serta disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diizinkan dengan pemeliharaan dan pembangunan jalan menyebabkan kondisi jalan kabupaten harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan dan merupakan langkah pembangunan strategis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru (baik secara langsung maupun tidak langsung). Pada sektor pertanian, pembangunan jalan memperlancar informasi produksi perdagangan dan kegiatan bisnis lainnya yang berguna bagi pelaku usaha disektor pertanian, dampak tersebut lebih tinggi dibanding dengan dampak pembangunan irigasi. Pembangunan jalan-jalan perdesaan juga merupakan faktor kunci dalam upaya pencapaian swasembada pangan dan pengurangan kemiskinan di tingkat daerah.

Berdasarkan status dan wewenang pembinaan jalan, sistem jaringan jalan di Kabupaten Lampung Timur dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jalan Negara/Nasional, yang termasuk Jalan Negara/Nasional di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 248/Kpts/M2015 tentang Jalan Nasional, adalah 107,66 km.
2. Jalan Provinsi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.a/III.09/HK/2016 adalah 134,930 km.
3. Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.69315/SK/2013 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, sampai dengan Tahun 2015 mencapai 1.884,17 km.
4. Jalan desa di Kabupaten Lampung Timur yang terdata adalah 4.088,47 km.

Tabel 2.34
Panjang Jalan Kabupaten dan Kondisi Permukaan Jalan
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Jenis Jalan	Panjang
Jalan Hotmix	818,89 km
Jalan Lapen	345,49 km
Jalan Batu/Onderlaagh	573,66 km
Jalan Tanah	146,13 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, 2015

Jaringan jalan berdasarkan fungsi dan peran jaringan jalan yang ada di Kabupaten Lampung Timur, adalah sebagai berikut:

1. Jalan Arteri Primer, jalan arteri primer ini membentang di sebelah Timur Provinsi Lampung, mulai dari Bakauheni - Ketapang - Sripindowo-Bunut-Labuhan.
2. Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas :
 - Labuhan Maringgai - Gunung Sugih Kecil - Jabung
 - Labuhan Maringgai - Wonoharjo - Wana - Simpang Sribawono
 - Sribawono - Taman Budaya - Pugung Raharjo - Tanjung Bintang
 - Sukadana - Nyampir - Negeri Jemanten - Gedong Wani - Pugung Raharjo - Bungkuk - Jabung - Asahan - Tanjung Sari
 - Sukadana - Nyampir - Donomulyo - Sekampung - Bumi harjo - Metro - Bandar Lampung
 - Sukadana - Rajabasa - Bumi Jawa - Pekalongan - Metro
3. Jalan lokal primer, jalan lokal primer ini tersebar di seluruh kabupaten.

Berdasarkan tiga klasifikasi di atas, status fungsi jaringan jalan di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa jalan negara di Kabupaten Lampung Timur merupakan jalan utama (arteri primer), dengan persentase sebesar 8,05%, hal ini sesuai dengan fungsinya untuk melayani pergerakan regional. Sedangkan jalan provinsi lebih didominasi oleh jalan kolektor primer, dengan persentase sebesar 12,22%. Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur lebih banyak menangani pembinaan jalan lokal karena sebagian besar jalan kabupaten merupakan jalan lokal (79,73%). Dari panjang jalan yang ada di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2015 kondisinya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.35
Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2015

Kondisi Jalan	Panjang (km)
Baik (kerusakan < 11%)	578,56 km
Sedang (kerusakan 11-16%)	222,95 km
Rusak Ringan (kerusakan 16-23%)	132,41 km
Rusak Berat (kerusakan >23%)	950,25 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, 2015

Untuk jalan desa, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015, panjangnya mencapai 4.088,47 km, dengan jenis jalan sebagai berikut :

Tabel 2.36
Panjang Jalan Desa dan Kondisi Permukaan Jalan
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Jenis Jalan	Panjang
Jalan Hotmix	133,49
Jalan Lopen	337,66
Jalan Batu/Onderlaagh	2.211,69
Jalan Tanah	1.405,63

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, 2015

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa jalan desa mayoritas masih berupa jalan batu/onderlaagh, yaitu sepanjang 2.211,69 km atau sekitar 54,10 persen dari total panjang jalan desa yang ada. Sedangkan untuk kondisi jalan desa, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Kondisi Jalan Desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Kondisi Jalan	Panjang (km)
Kondisi Baik (kerusakan < 11%)	199,48
Kondisi Sedang (kerusakan 11-16%)	58,21
Kondisi Rusak Ringan (kerusakan 16-23%)	103,86
Kondisi Rusak Berat (kerusakan >23%)	3726,92

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, 2015

Untuk jembatan, total jumlah jembatan/penyeberangan adalah sebanyak 281 unit dengan panjang 3.133,5 meter. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.38
Jenis dan Panjang Jembatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Jenis Jembatan	Jumlah	Panjang	%
Jembatan Rangka Baja	5	250,00	7,98
Jembatan Tipe Beton	270	2.553,50	81,49
Jembatan Gantung	3	292,00	9,32
Jembatan Kayu	3	38,00	1,21
Total	281	3.133,50	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, 2015

Terkait dengan pengairan/irigasi, panjang saluran irigasi di Lampung Timur : 95.138,8 meter dengan rincian 39.717 meter dalam kondisi talud, sedangkan 57.860 meter dalam kondisi tanah. Terdapat 52 Daerah Irigasi (D.I), yang operasional dan pemeliharaan dilaksanakan oleh 7 UPTD. Untuk luas total areal baku yang mampu dialiri oleh 52 D.I tersebut seluas 4.129,66 ha, namun luas areal yang berfungsi hanya mencakup 3.302,8 ha. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan permukiman

Selanjutnya di bidang penataan ruang, pada Tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031. Namun terkait dengan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan, hingga saat ini belum dapat ditetapkan. Selanjutnya guna menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional, akan dilakukan peninjauan kembali terhadap Perda RTRW Kabupaten Lampung Timur. Selain itu juga perlu disusun dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh guna menunjang proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, sumber penerangan dan fasilitas tempat buang air besar.

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut telah memiliki dinding, atap dan lantai. Disamping itu kualitas dari ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi penghuninya. Berdasarkan data



Susenas 2014, dapat diketahui persentase rumah tangga berdasarkan kualitas rumah tinggal yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.39

Persentase rumah tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, 2013-2014

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Lantai bukan tanah	97,82	92,12	93,13	91,55	93,46	91,60
Atap layak (atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dinding permanen	97,41	91,64	93,21	93,90	93,51	93,73
rata-rata luas lantai (m ²)	76,80	88,87	80,38	83,52	80,12	83,93

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Pemilihan jenis lantai dan dinding rumah oleh rumah tangga biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Semakin baik jenis lantai dan dinding rumah yang digunakan mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi dan derajat kesehatannya lebih baik. Pada Tahun 2014 rumah yang memiliki lantai bukan tanah, yaitu 91,60% turun dari 93,46% di Tahun 2013, sementara rumah tangga yang menggunakan dinding tembok ditahun 2013 mencapai 93,51 persen sedangkan Tahun 2014 meningkat menjadi 93,73 persen. Selain itu, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Timur adalah sebanyak 52.800 unit. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan dari rumah tinggal tersebut. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri.

Sumber hidup utama kehidupan makhluk hidup adalah air. Dalam semua aktivitasnya, manusia membutuhkan air baik untuk minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Dewasa ini, masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya penyediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan air minum.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Keberadaan fasilitas air minum di Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sudah relatif baik karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki fasilitas air minum. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air minum pada Tahun 2013 adalah 0,19 persen dan menurun menjadi

0,00 persen pada Tahun 2014. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri pada tahun 2013 sebesar 66,89 persen dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi 69,80 persen.

Grafik 2.21

Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Air Minum di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2014



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Jenis air minum yang dianggap higienis atau air bersih yang aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan adalah jenis air kemasan, air ledeng, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada Tahun 2014 sebesar 74,86 persen dan angka ini sedikit menunjukkan penurunan jika dibandingkan Tahun 2013 sebesar 77,08 persen. Dengan demikian, masih ada rumah tangga yang tidak menggunakan fasilitas air bersih, yaitu 25,14 persen. Sebagian besar rumah tangga yang belum menggunakan sumber air minum yang bersih tersebut masih menggunakan air yang berasal dari air sumur tak terlindung, mata air tak terlindung dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Tabel 2.40

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Tahun 2013-2014

Tahun	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Ledeng Meteran	Ledeng Eceran	Sumu Bor/Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Hujan
2013	1,23	2,96	1,17	0,10	10,90	60,32	22,06	0,40	0,00	0,87
2014	1,08	1,88	1,08	0,55	11,28	58,19	23,78	0,80	1,00	0,35

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Selain penggunaan air minum ledeng dan air kemasan, ketersediaan air minum bersih yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) lebih dari 10 meter menentukan tingkat kenyamanan dari rumah tinggal. Pada Tahun 2014, rumah tangga yang menggunakan air minum bersih di Kabupaten Lampung Timur mencapai 62,05 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum bersih di daerah perkotaan jauh lebih tinggi



dibandingkan daerah perdesaan, yaitu sebesar 67,44 persen di perkotaan dan 61,62 persen di perdesaan pada Tahun 2014.

Kondisi perumahan yang higienis secara langsung juga menggambarkan kondisi kesehatan penghuninya. Perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan juga dapat tercermin dari sanitasi rumah yang baik yang salah satunya dapat dilihat dari keberadaan fasilitas buang air besar. Fasilitas buang air yang dianggap baik adalah jika fasilitas yang digunakan masuk dalam kategori digunakan sendiri atau bersama, dan jenis pembuangan akhirnya adalah tangki septik.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan.

Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri. Sebagian rumah tangga yang ada di Kabupaten Lampung Timur memiliki fasilitas tempat buang air besar yang baik. Pada Tahun 2014 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri di Kabupaten Lampung Timur adalah 87,01 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, ternyata rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan rumah tangga di perdesaan (masing-masing 90,40 persen dan 86,73 persen). Sedangkan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar di Kabupaten Lampung Timur adalah 1,24. Pada Tahun 2014, rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama dan umum masing-masing sebesar 11,06 persen dan 0,70 persen.

Tabel 2.41
Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2014

Daerah Tempat Tinggal	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
Perkotaan	90,40	9,60	0,00	0,00
Perdesaan	86,73	11,18	0,75	1,34
Lampung Timur	87,01	11,06	0,70	1,24

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas kloset berupa leher angsa pada Tahun 2014 sebesar 70,80 persen dan yang tidak memiliki menggunakan kloset/tidak pakai fasilitas tempat buang air besar besarnya mencapai 0,13 persen. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa perilaku hidup sehat di Kabupaten Lampung Timur tetap masih memerlukan peningkatan.

Tabel 2.42
Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kloset yang Digunakan Tahun 2014

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kloset			
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/Cubluk	Tidak Pakai
Perkotaan	82,28	1,43	16,29	0,00
Perdesaan	69,85	5,62	24,39	0,14
Lampung Timur	70,80	5,30	23,77	0,13

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Kenyamanan tinggal di suatu rumah dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas pokok di rumah tersebut. Salah satu fasilitas pokok rumah adalah sumber penerangan. Proporsi atau persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik makin menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu daerah. Namun sumber penerangan listrik sangat bergantung dari ketersediaan fasilitas di daerah. Mengingat jangkauan listrik yang sangat terbatas, maka tidak semua rumah tangga memperoleh fasilitas tersebut.

Menurut data Susenas 2011- 2013, persentase penggunaan sumber penerangan listrik (PLN dan Non PLN) oleh rumah tangga terus mengalami peningkatan sejak 3 Tahun terakhir yakni mencapai 99,1 persen artinya penggunaan listrik oleh masyarakat semakin banyak sehingga kenyamanan tinggal disuatu rumah semakin bisa terpenuhi. Seiring naiknya penggunaan sumber penerangan listrik, maka semakin menurun pula penggunaan pelita/setir/obor dari 5,5 persen di Tahun 2011 menjadi 0,8 persen di Tahun 2014.

Tabel 2.43
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2011 - 2014

Sumber Penerangan	2011	2012	2013	2014
	%	%	%	%
PLN	92,5	94,9	98,7	99
Non PLN	1,7	0,9	0,6	0,1
Petromak/ Aladin	0,1	0	0	0
Pelita/ Setir/ Obor	5,5	3	0,5	0,8
Lainnya	0,2	1,2	0,2	0,1
Total	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi kehidupan setiap manusia. Fungsi air bersih dalam rumah tangga adalah untuk minum, mandi dan cuci. Penggunaan air bersih dapat diperoleh dari berbagai sumber air seperti ledeng, pompa, sumur, mata air dan lainnya.

Tabel 2.44
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2011-2014

Sumber Air Minum	2011	2012	2013	2014
	%	%	%	%
Ledeng	1,9	1,4	1,3	1,6
Sumur terlindung	58,2	57,6	60,3	58,2
Sumur tak terlindung	24,7	24,8	22,1	23,8
Pompa/sumur bor	11,6	11,8	10,9	11,3
Air Dalam Kemasan	1,6	0,8	1,2	3
Lainnya	2	3,5	4,2	2,1

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Berdasarkan Tabel di atas, rumah tangga yang memiliki fasilitas air bersih yang bersumber dari sumur dan mata air terlindung pada Tahun 2014 mencapai 59,8%, turun dibandingkan Tahun 2013. Sementara rumah tangga yang memiliki fasilitas air bersih yang bersumber dari sumur dan mata air tak terlindung 23,8%. Sebagian kecil rumah tangga atau sekitar 11,3% menggunakan pompa, 3% menggunakan air dalam kemasan, dan lainnya sebagai sumber air minum yakni sebesar 2,1%.

Sumber air bersih bagi penduduk Lampung Timur, menurut sumber air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk ada lima, yaitu: sumur pompa, sumur gali, mata air, air sungai, dan PDAM Way Guruh. Sumber air yang dipergunakan adalah air bawah tanah (ABT), air tanah dalam (ATD), dan pengolahan air sungai. Penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Timur yang dikelola oleh PDAM Way Guruh tersebar di 14 unit pengelolaan dengan jumlah pelanggan sebanyak 2.726. Jumlah pelanggan dan banyaknya air bersih yang disalurkan di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.45
Jumlah Pelanggan dan Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan
di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2011 - 2014

Kecamatan	Jumlah Pelanggan				Air yang disalurkan (m3)			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Sekampung udik	97	94	90	90	16.449	9.980	8.083	28.356
Labuhan maringgai	93	93	0	184	5.324	787	0	31368
Bandar Sri Bhawono	2.603	2.646	2.636	2.539	461.250	460.232	452.093	591.354
Way jepara	84	0	0	0	978	0	0	
Sukadana	132	132	0	0	8.698	1.493	0	0
Jumlah	3.009	2.965	2.726	2.813	492.699	472.492	460.176	651.078

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

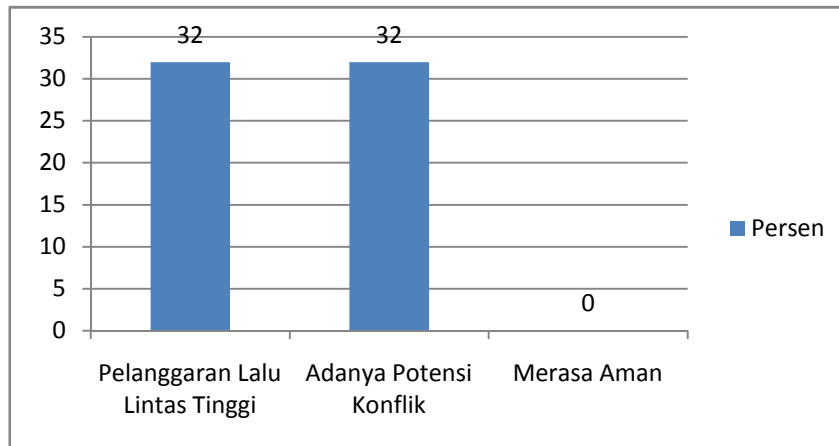
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui pembentukan anggota linmas di setiap desa, pembinaan dan pemberdayaan tokoh masyarakat melalui forum kebangsaan, fasilitasi forum kerukunan antar umat beragama, fasilitasi forum Forkopimcam, dan pembinaan terhadap ormas yang dilakukan setiap Tahunnya.

Berdasarkan hasil survey harapan masyarakat pada Tahun 2015, kinerja pemerintah daerah khususnya dalam aspek hukum dan keamanan dinilai masyarakat Lampung Timur sebagai yang terendah dibandingkan aspek lain yang dinilai, karena masih dianggap terlalu banyak masalah dalam bidang hukum dan keamanan. Tidak ada responden yang merasa aman dari sasaran kriminalitas di Lampung Timur. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

Grafik 2.22

Persepsi Masyarakat yang Menyatakan Merasa Aman, Merasa Ada Konflik, dan Merasa Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Tinggi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Selanjutnya, dalam bidang politik daerah, pada Tahun 2015 angka partisipasi politik masyarakat Lampung Timur dalam Pilkada mencapai 60,89 persen. Ini merupakan partisipasi terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pilkada.

Di bidang penanggulangan bencana khususnya kebakaran, saat ini jumlah personil pemadam kebakaran yang bersertifikat adalah 40 orang, dengan didukung oleh 2 unit kendaraan damkar yang melayani seluruh kecamatan dan desa. Kejadian kebakaran yang melanda permukiman pada Tahun 2015 tercatat 14 kali, kebakaran hutan 2 kali, kebakaran lahan gambut/perkebunan 13 kali, kebakaran pabrik/industri 2 kali, dengan *response time rate* (tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran) mencapai 3 jam. *Response time rate* yang masih tinggi tersebut diakibatkan dr keterbatasan personil, sarana dan prasarana, serta wilayah Kabupaten Lampung Timur yg luas, sehingga waktu tempuh ke lokasi kebakaran cukup memakan waktu.

6. Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib didukung oleh pemerintah daerah. Lembaga kesejahteraan sosial hingga Tahun 2014 berjumlah 53 unit. Sedangkan terkait dengan wanita rawan sosial ekonomi, berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur, pada Tahun 2014 tercatat berjumlah sekitar 5.517 orang. Dan untuk



keluarga fakir miskin berjumlah 63.026 KK. Berbagai upaya dan kebijakan dalam urusan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kurun waktu 2011-2015, yang meliputi program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; program pembinaan anak terlantar, program pembinaan penyandang cacat dan trauma, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi berkaitan dengan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam rangka memperoleh pendapatan, yang secara langsung berhubungan dengan daya beli untuk dapat hidup layak. Sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tenaga kerja dituntut memiliki kualitas tertentu untuk menjamin pekerja mendapatkan perlindungan dan penghasilan yang memadai untuk dapat hidup layak. Batasan umur untuk penduduk usia kerja berbeda-beda, ada yang menggunakan usia 10 Tahun keatas, 15 Tahun keatas, dan 15-64 Tahun. Dalam penulisan ini digunakan batasan 15 Tahun ke atas. Pemilihan ini didasarkan pada kebijakan *Internasional Labour Organization (ILO)* dalam menentukan batasan usia kerja dan kondisi empiris yang ada.

Di Kabupaten Lampung Timur, penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2012, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lampung Timur adalah 696.055 jiwa dan pada Tahun 2014 sudah mencapai 701.995 jiwa. Artinya dalam kurun waktu hampir tiga Tahun terjadi kenaikan sebesar 0,85 persen untuk jumlah penduduk usia kerja. Pada Tahun 2012 terdapat sekitar 696.055 ribu penduduk usia kerja dimana sekitar 67,03 persen merupakan angkatan kerja dan 32,97 persen lainnya adalah bukan angkatan kerja. Pada Tahun 2013 sekitar 64,15 persen diantaranya merupakan angkatan kerja dan 35,85 persen lainnya adalah bukan angkatan kerja. Dan pada Tahun 2014 terdapat 701.995 ribu penduduk usia kerja dimana 67,80 persen diantara termasuk angkatan kerja dan sisanya sebesar 32,20 persen termasuk kelompok bukan angkatan kerja.

Tabel 2.46
 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Karakteristik, Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 2014

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Lampung Timur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	354.498	347.497	52.221	649.774	701995
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Angkatan Kerja	323.146	152.781	34.801	441.126	475.927
	(91,16)	(43,97)	(66,64)	(67,89)	(67,80)
Bukan Angkatan Kerja	31.352	194.716	17.420	208.648	226.068
	(8,84)	(56,03)	(33,36)	(32,11)	(32,20)
TPAK	91,16	43,97	66,64	67,89	67,80

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Secara umum terjadi kenaikan jumlah penduduk usia kerja, namun tidak sama halnya dengan jumlah angkatan kerja yang secara persentase mengalami penurunan. Artinya dalam kurun waktu tiga Tahun terakhir ada pergeseran aktivitas terbanyak yang dilakukan oleh penduduk usia 15 Tahun keatas, misalnya melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga atau bahkan kegiatan lainnya.

Tabel 2.47
 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan yang Terbanyak Dilakukan, Tahun 2012-2014

Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			Jumlah Penduduk 15+	
	Bekerja	Pengangguran	Total	Sekolah	Mengurus ruta	Lainnya		Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012	97.15	2.85	67.03	20.56	64.87	14.57	32.97	100.00
2013	94.38	5.62	64.15	14.65	69.16	16.18	35.85	100.00
2014	95.00	5.00	67.80	10.80	65.64	23.56	32.20	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Idealnya, sejalan dengan bertambahnya penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja yang meliputi penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga bertambah. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2014 mencapai angka lebih kurang 475.927 jiwa atau sekitar 67,80 persen dari keseluruhan jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas. Angka ini meningkat sekitar 5,99 persen dibandingkan dengan keadaan pada Tahun 2013.

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa persentase angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi dari persentase angkatan kerja perempuan. Persentase angkatan kerja laki-laki ini pada Tahun 2014 tercatat sebesar 91,16 persen dari seluruh penduduk usia kerja laki-laki, sedangkan angkatan kerja perempuan tercatat hanya sebesar 43,97 persen dari seluruh penduduk usia kerja perempuan (berumur 15 Tahun keatas). Fenomena lain yang terlihat dari Tabel 2. di atas adalah relatif lebih besarnya persentase angkatan kerja di



daerah pedesaan dibandingkan persentase di daerah perkotaan. Persentase angkatan kerja di daerah pedesaan tercatat sebesar 67,89 persen, sedangkan angkatan kerja di daerah perkotaan tercatat sebesar 66,64 persen.

Dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi tidak semua angkatan kerja terlibat di dalamnya. Hanya angkatan kerja yang bekerja saja terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan sebagian dari bagian ini termasuk dalam sedang mencari pekerjaan. Untuk mengetahui perubahan komposisi angkatan kerja pada setiap saat dapat digunakan ukuran tingkat partisipasi angkatan kerja. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) biasanya dipengaruhi oleh keadaan sosial-ekonomi, budaya, demografi serta keadaan daerah. Dengan komposisi jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja seperti yang digambarkan terdahulu, maka secara umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 67,80 persen. Angka ini mengandung pengertian dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 68 orang diantaranya adalah angkatan kerja (mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan).

Tabel 2.48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Timur menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012-2014

Tahun	Jenis Kelamin		Lampung Timur	Selisih TPAK
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	84,81	48,36	67,03	36,45
2013	83,89	43,36	64,15	40,53
2014	91,16	43,97	67,80	47,19

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Jika dilihat menurut jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK pada perempuan yang berusia 15 Tahun keatas. Pola ini berlaku setiap Tahunnya. Partisipasi perempuan umumnya lebih rendah, hal ini tidak semata-mata dikarenakan peran gandanya dalam kehidupan rumah tangga namun juga terletak pada komitmen kaum perempuan dalam rangka keikutsertaannya pada dunia angkatan kerja selama hidupnya. Dalam beberapa Tahun terakhir ini memang terjadi fluktuasi jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Timur menunjukkan angka 67,80 persen, dimana pada Tahun sebelumnya sebesar 64,15 persen. Namun, yang menjadi perhatian bersama adalah apakah perubahan persentase angkatan kerja yang terjadi menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Di Tahun 2014 tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 91,16, angka ini meningkat jika dibandingkan Tahun

sebelumnya yaitu 83,89 persen. Sedangkan untuk perempuan sendiri persentase angkatan kerjanya pada Tahun 2014 mencapai 43,97 (setengah dari persentase laki-laki). Sama halnya dengan persentase partisipasi angkatan kerja laki-laki, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang mencapai 43,36 persen. Dari informasi tabel di atas terlihat bahwa selisih atau perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja antara penduduk laki-laki dan perempuan terbesar terjadi pada Tahun 2014 (mencapai 47,19).

Tabel 2.49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 19	53.52	25.02	39.18
20 - 24	96.20	33.73	66.09
25 - 29	94.45	30.68	62.26
30 - 34	100.00	41.27	70.81
35 - 39	100.00	56.13	78.66
40 - 44	99.42	50.91	76.13
45 - 49	100.00	63.56	82.92
50 - 54	96.44	64.33	79.02
55 - 59	99.44	54.01	78.26
60 +	81.23	35.30	57.80
Lampung Timur	91.16	43.97	67.80

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Bila ditinjau dari aspek sosial, maka pendidikan dapat digunakan sebagai indikator status sosial budaya, sedangkan dari aspek ekonomi dapat digunakan untuk mengetahui persediaan tenaga yang cukup baik kualitasnya untuk masa mendatang. Ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar pula kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan di Kabupaten Lampung Timur, hampir semuanya berlaku, sebab struktur lapangan kerja yang ada sekarang sudah mendukung sepenuhnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan mudah untuk melihat pola yang tegas hubungan antara pendidikan dengan tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi pada Tahun 2014 terdapat pada kelompok yang menamatkan pendidikan di atas SLTA (diploma dan universitas). Hal ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan masing-masing sebesar 96,19 persen dan 96,09 persen. Sedangkan tingkat partisipasi terendah adalah bagi mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah, yaitu sebesar 47,55 persen. Hal serupa juga terlihat di wilayah pedesaan dimana TPAK terendah adalah pada kelompok yang tidak/belum pernah sekolah (47,22 persen). Namun hal yang sedikit berbeda terjadi di wilayah perkotaan justru TPAK terendah terjadi pada kelompok mereka yang menamatkan pendidikan SLTP



(48,40 persen). Seiring dengan semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan terlihat bahwa TPAK di Lampung Timur juga semakin meningkat. Sedikit fenomena yang berbeda adalah TPAK bagi tamatan SLTP yang lebih kecil dari SD.

Perbedaan lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah perkotaan maupun pedesaan serta tingkat pendidikan yang dimiliki berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Lapangan pekerjaan formal yang mengelompok di perkotaan memberikan dorongan bagi penduduk pedesaan untuk meninggalkan desa dan kemudian pergi ke kota mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki terutama pada kelompok usia muda.

Tabel 2.50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2014

Pendidikan Tertinggi	Daerah Tempat Tinggal		Total
	Perkotaan	Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	64.90	47.22	47.55
Tidak/Belum Tamat SD	59.66	67.09	66.78
SD	65.95	71.94	71.72
SLTP	48.40	59.87	59.35
SLTA	62.84	75.07	73.30
> SLTA	96.19	96.09	96.13
Lampung Timur	66.64	67.89	67.80

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Sebagai akibat terbatasnya perluasan kesempatan kerja, maka tidak semua angkatan kerja mendapat pekerjaan. Penduduk yang belum mendapat pekerjaan digolongkan ke dalam penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran terbuka. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara umum angka pengangguran penduduk Kabupaten Lampung Timur menunjukkan angka yang fluktuatif khususnya dalam kurun waktu tiga Tahun terakhir. Dalam satu Tahun terakhir angka pengangguran yang menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,62 persen pada Tahun 2013 menjadi sekitar 5,00 persen pada Tahun 2014. Secara umum terlihat pergerakan angka pengangguran di Kabupaten Lampung Timur antara Tahun 2012 - 2014, pada dua Tahun awal mengalami kenaikan dan seTahun terakhir ini mengalami kenaikan. TPT yang cukup tinggi pada Tahun 2013 tersebut diduga kuat sebagai dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada 22 Juni 2013. Kebijakan ini menimbulkan efek domino pada semua sektor ekonomi, dan pada akhirnya menyebabkan peningkatan pengangguran. Pada tabel berikut juga dapat terlihat bahwa kelompok pengangguran ini didominasi oleh



kaum perempuan ketimbang laki-laki. Sedikit berbeda adalah yang terjadi pada Tahun 2013 dimana kala itu angka pengangguran laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Tabel 2.51
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur
menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012-2014

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Lampung Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	2.26	3.94	2.85
2013	5.83	5.20	5.62
2014	3,04	9,13	5,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Lampung Timur cenderung menurun. Jika di Tahun 2012 tingkat partisipasi berada di posisi 48,36 persen, Tahun 2013 turun ke posisi 43,36 persen, dan pada Tahun 2014 naik ke posisi 43,97 persen.

Dalam perkembangan daerah yang semakin kompleks saat ini, diketahui bahwa sarana bermain anak agar dapat menjadi media tumbuh dan berkembang secara layak masih dirasakan sangat minim. Selain itu, belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak khususnya perempuan seringkali terjadi di beberapa wilayah. Usaha nyata berupa tindak lanjut penanganan dan fasilitasi dari pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat perlu ditingkatkan. Berdasarkan data dari Polres Lampung Timur, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak berkecenderungan menurun, pada Tahun 2013 mencapai 14 kasus, Tahun 2014 11 kasus, dan Tahun 2015 mencapai 8 kasus.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan berbagai upaya di bidang ketahanan pangan diantaranya pembangunan lumbung pangan desa sebanyak 50 unit, pengembangan sistem tunda jual, pengadaan pengisian gudang pangan pemerintah, penganekaragaman pangan, dan pengembangan desa mandiri pangan.



Realisasi indeks pertanaman pada Tahun 2015 mencapai 140 persen dan indeks pertanaman total sebesar 123 persen. Indeks pertanaman adalah perbandingan luas tanam padi dan jenis tanaman lainnya dalam satu Tahun di suatu kabupaten terhadap total luas tanam padi kabupaten dalam satu Tahun.

Untuk luas penggunaan lahan (sawah irigasi dan non irigasi) mencapai 65.737 hektar, sedangkan untuk luas irigasi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 14/PRT/M/2015 adalah seluas 4.903 hektar.

Di sektor peternakan, populasi sapi di Kabupaten Lampung Timur mencapai 118.188 ekor, kerbau 2.430 ekor, unggas 5.819.582 ekor, dan babi 8.320 ekor.

4. Pertanahan

Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi pemberian izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

Untuk penyelesaian izin lokasi kurun waktu Tahun 2012-2014 telah mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan izin lokasi diselesaikan dengan secara keseluruhan.

Untuk pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, ada beberapa rencana pembangunan yang tidak dapat dilanjutkan dikarenakan proses pengadaan tanah tidak dapat diselesaikan.

Sedangkan terkait dengan penataan aset tanah milik pemda, hingga saat ini masih dilakukan penyelesaian proses administrasi pertanahan, sehingga diharapkan kedepan seluruh aset tanah milik pemda dapat bersertifikat secara keseluruhan.

5. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Timur perlu mendapat perhatian khusus. Jumlah volume timbunan sampah dalam satu hari mencapai 73 meter kubik. Tempat pembuangan akhir sampah terbangun pada Tahun 2014 yang berlokasi di Kecamatan Sukadana. Terkait dengan bank sampah, hingga saat ini Kabupaten Lampung Timur belum memiliki bank sampah.



Kurun waktu 2012-2016 beberapa sekolah di Kabupaten Lampung Timur berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Penghargaan adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya terkait dengan pencemaran lingkungan akibat pertambangan khususnya pasir di beberapa lokasi di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai, perlu segera dilakukan penanganan guna mengembalikan fungsi lingkungan hidup.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan jumlah penduduk mencapai 1,1 juta jiwa, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Tingkat kepemilikan Kartu tanda Penduduk (KTP) elektronik pada Tahun 2015 telah mencapai 75 persen. Untuk kepemilikan akte kelahiran, pada Tahun 2015 telah mencapai 75 persen.

Kabupaten Lampung Timur saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang merupakan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara online.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam rangka percepatan pembangunan desa, pada Tahun 2016 total bantuan keuangan kepada 264 desa melalui APBD telah mencapai 295,9 milyar.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kapasitas aparatur pedes, pembinaan dan fasilitasi keuangan desa. Pada Tahun 2015, jumlah BUMDES yang terbentuk sebanyak 11 unit, posyantek 2 unit, panjang jalan desa terbangun mencapai 54.002 km, dan seluruh desa telah memiliki dokrendes.



8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lampung Timur, pada Tahun 2010 rata-rata jumlah anak per keluarga mencapai 2,4 orang, dan pada Tahun 2014 menurun menjadi 2,3 orang.

Untuk jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu 2010 hingga 2013 berfluktuatif. Pada Tahun 2010 jumlah peserta KB aktif mencapai 133.000 PUS, pada Tahun 2011 133.097, pada Tahun 2012 135.638, dan pada Tahun 2013 136.139. lebih jelasnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.52
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif					
		IUD	MOP/MOW	Implant	Suntik	Pil	Kondom
2010	192.780	20.437	5.344	18.110	42.798	44.025	2.286
2011	194.467	22.387	5.346	17.904	42.950	41.927	2.583
2012	196.188	21.219	5.384	19.516	43.728	42.959	2.832
2013	200.168	21.770	5.069	21.219	43.648	41.690	2.743

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Selanjutnya, pada Tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2014, alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (62,1 persen) sedangkan tubektomi/MOW dan vasektomi/MOP merupakan alat yang paling sedikit digunakan (masing-masing sebesar 1,4 persen dan 0,4 persen). Suntik KB merupakan alat/cara yang dominan dipilih mengingat efektifitas dan praktisnya dalam pemakaian. Dibandingkan Tahun sebelumnya, penggunaan alat kontrasepsi mengalami pergeseran. Persentase penggunaan pil, IUD, susuk dan lainnya (kondom dan cara tradisional) sebagai pengatur kelahiran mengalami penurunan. Sementara persentase penggunaan suntik mengalami kenaikan dari 56,2 persen di Tahun 2013 menjadi 62,1 persen di Tahun 2014.

Tabel 2.53
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/cara KB menurut Jenis Alat/cara KB yang Digunakan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2014

Alat/Cara KB	2012	2013	2014
MOW	0,80	1,30	1,40
MOP	0,00	0,20	0,40
IUD	2,00	2,20	1,80
Suntik	62,20	56,20	62,10
Susuk	7,10	10,70	5,90
Pil	25,80	26,40	25,80
Lainnya	2,10	3,00	2,70

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Selanjutnya, Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa angka prevalensi kontrasepsi di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2013 angka prevalensi kontrasepsi sebesar 74,53 persen meningkat menjadi 74,81 persen pada Tahun 2014.

Tabel 2.54
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Partisipasi KB di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2014

Tahun	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan
2013	74,53	16,56	8,91
2014	74,81	16,21	8,98

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Terkait dengan data *Unmeet Need* Kabupaten Lampung Timur, kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 mencapai 21,99% dan pada Tahun 2015 turun menjadi 20,06. Secara lebih jelas disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.55
Unmeet Need Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013-2015

NO	TAHUN	UNMEET NEED (%)
1	2013	21,99
2	2014	21,14
3	2015	20,06

Sumber : BPPKB Kabupaten Lampung Timur, 2016

Lebih lanjut, untuk keluarga pra sejahtera pada Tahun 2010 mencapai 83.228 KK, 2011 83738 KK, 2012 71.406 KK, 2012 77452 KK, dan Tahun 2014 78.077 KK. Untuk Keluarga Sejahtera (KS) I pada Tahun 2010 mencapai 64.639 KK, 2012 66.052 KK, 2013 57.183 KK, 2013 67.718 KK, dan pada Tahun 2014 mencapai 68.969 KK. Untuk Keluarga Sejahtera (KS) II Tahun 2010 61.844 KK, 2012 65.460, 2012 62.941, 2013 72.526, dan 2014 73.261. untuk Keluarga Sejahtera (KS) III pada Tahun 2010 mencapai 44.680 KK, 2011 44.953 KK, 2012 43.076 KK, 2013 51.196 KK, dan pada Tahun 2014 mencapai 52.838 KK.

9. Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Jumlah kendaraan roda empat hasil uji menurut bulan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 terlihat pada Tabel di bawah ini:



Tabel 2.56
Jumlah Kendaraan Roda Empat Hasil Uji Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 (unit)

Uraian	Bulan										
	Jan	Feb	Mar	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah kendaraan yang diuji	546	450	492	525	569	414	600	646	463	467	326
Jumlah kendaraan yang diuji uji ganti stuk	222	181	172	178	197	137	206	225	151	146	142
jumlah kendaraan uji reguler	324	269	320	347	372	372	277	394	312	321	184
Total Jumlah	1092	900	984	1050	1138	923	1083	1265	926	934	652

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Selanjutnya terkait dengan pelabuhan laut, jumlah kunjungan kapal dan barang dimuat atau dibongkar di 4 pelabuhan laut di wilayah Kabupaten Lampung Timur disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Jumlah Kunjungan Kapal dan Barang Dimuat/DiBongkar di Beberapa Pelabuhan Laut Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 (unit)

Nama Pelabuhan Laut	Kunjungan Kapal		Barang Dimuat (kg)			Barang Dibongkar (kg)				
	Nelayan	Pel. Rakyat	Es Balok	Ikan Asin	Kayu Gencar	Ikan Segar	Es Balok	Ikan Asin	Kayu Bulat	Lainnya
Labuhan Meringgai	701	0	587.000	0	0	587.000	0	0	0	0
Way Penet	611	0	554.050	0	0	554.050	0	0	0	0
Kuala Seputih	262	0	0	67.000	16.283	0	0	0	0	0
Way Sekampung	297	0	87.500	0	0	100.000	22.000	0	0	0
Jumlah Total	2014	1.871	0	1.228.550	67.000	16.283	1.241.050	22.000	0	0
	2013	2.529	0	1.709.000	15.000	11.883	1.748.000	592.000	0	0
	2012	2.781	0	2.504.000	0	0	1.713.000	0	82.126	240
	2011	2.840	0	2.054.700	0	0	1.700.000	0	0	200

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

10. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan *website* milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah tersedia selama ini, yaitu www.lampungtimurkab.go.id yang memuat ragam informasi terkait Kabupaten Lampung Timur dapat secara mudah diakses.

Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga telah dilaksanakan oleh Pemkab Lampung Timur melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur).

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur, jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Timur hingga Tahun 2015 mencapai 559 unit koperasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2009-2015

Tahun	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
2009	193	201	394
2010	209	201	410
2011	247	201	448
2012	285	201	486
2013	306	201	507
2014	332	201	533
2015	342	217	559

Sumber : Dinkop & UMKM Kab. Lam Tim, 2016

12. Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu Tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2015

Jenis Invetasi	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)
PMA	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PMDN	155.300.018.192,00	56.788.800.000,00	95.972.000.000,00	3.699.955.297.304,00	1.652.737.728.459,00
JUMLAH	155.300.018.192,00	62.788.800.000,00	95.972.000.000,00	3.699.955.297.304,00	1.652.737.728.459,00

Sumber : BPTSPPM Kabupaten Lampung Timur, 2015

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih sangat dominan di Kabupaten Lampung Timur, bahkan kurun waktu tiga tahun terakhir, tidak ada investasi PMA yang masuk ke daerah. Dan jika kita cermati investasi di Tahun 2015 mengalami menurun, hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional, selain itu juga kemungkinan disebabkan dengan adanya agenda politik daerah (pilkada), sehingga ada kecenderungan investor melakukan *wait and see* dalam pelaksanaan investasi di daerah.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Selain itu kebutuhan akan sarana olahraga yang representatif seperti GOR dan Stadion Olah Raga merupakan suatu kebutuhan daerah.

14. Kebudayaan

Masyarakat Lampung Timur yang multi etnis tentu memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam. Sebagai wahan untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Lampung Timur secara berkala menyelenggarakan



festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya.

Festival seni dan budaya yang telah diselenggarakan meliputi Festival Tari Melinting, Festival Reog, Festival Balaganjur, Festival Kuda Lumping, dan Festival Way Kambas. Penyelenggaraan festival tersebut bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Timur.

15. Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kabupaten Lampung Timur selama satu Tahun baru mencapai 500 orang pada Tahun 2015. Sampai saat ini peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca di perpustakaan. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang relatif jauh dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan daerah. Selanjutnya, untuk jumlah perpustakaan desa, saat ini baru mencapai 70 unit dari 264 desa atau baru mencapai 26,5 persen.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Potensi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Lampung Timur terutama komoditi yang telah dikembangkan antara lain padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang hijau. Hingga saat ini industri pengolahan skala besar dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah tanaman hortikultura baru tersedia pabrik tapioka.

Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang ada hanya industri pengolahan skala rumah tangga. Pada Tahun 2015, Kabupaten Lampung Timur menghasilkan padi (sawah dan ladang) sebesar 670.649 ton dengan luas panen mencapai 115.942 ha (angka sementara). Luas panen, jumlah produksi dan produktivitas padi dan palawija di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada di bawah ini.



Tabel 2.60
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi dan Palawija
di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2012 - 2013

No	Jenis tanaman	2012			2013			2014			2015		
		Luas	Produktivitas	Produksi	Luas	Produktivitas	Produksi	Luas	Produktivitas	Produksi	Luas	Produktivitas	Produksi
		(Ha)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Ha)	(Kw/Ha)	(ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(ton)
1	Padi sawah	94.417	52,14	492.315	95.383	53,46	509.949	90.583	54.62	494.722	113.291	58.52	662.979
2	Padi ladang	5.826	29,89	17.411	5.319	30,58	16.264	3.944	31.16	12.288	2.651	28.93	76.70
	Padi (swh + Ldng)	100.243	50,85	509.726	100.702	52,25	526.213	94.527	53.64	507.010	115.942	57.84	670.649
3	Jagung	96.220	50,06	481.635	100.026	52,26	522.776	99.025	52.15	516.412	79.877	54.11	432.208
4	Kedelai	887	11,95	1.060	1.285	12,33	1.585	856	12.68	1.085	1.550	10.47	1.623
5	Kacang tanah	508	12,44	632	647	12,77	826	654	12.98	849	124	11.64	144
6	Ubi kayu	47.555	260,1	1.236.925	50.866	263,88	1.342.254	53.749	266.67	1.443.094	42.705	239.27	902.959
7	Ubi jalar	378	100,34	3.793	442	98,37	4.348	541	99.61	5.389	98	100.84	988
8	Kacang hijau	603	0	541	508	0	455	409	9.01	368	96	11.50	125

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015 dan Dinas Pertanian TPH, 2016

Produk tanaman pangan dari Kabupaten Lampung Timur yang telah menembus pasar regional maupun nasional adalah padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sementara komoditi lainnya hanya dikonsumsi oleh pasar lokal. Rantai pemasaran umumnya dari produsen (petani) ke pengepul (pengumpul), kemudian ke agen (pedagang besar), dan baru ke pasar domestik, regional, maupun nasional. Dengan rantai pemasaran seperti tersebut, para petani menerima margin keuntungan (*profit margin*) terkecil diantara pelaku lainnya. Rantai pemasaran seperti ini terjadi pada hampir semua komoditi di semua sektor di wilayah Kabupaten Lampung Timur khususnya dan Provinsi Lampung umumnya, oleh sebab itu diperlukan perbaikan rantai tataniaga sehingga petani selaku pelaku mendapatkan profit yang layak. Dengan gambaran kondisi tersebut, peluang investasi untuk budidaya berbagai komoditi tanaman pangan dan perdagangan masih terbuka lebar.

Pada awalnya Kabupaten Lampung Timur merupakan pasar dari produk sayur-sayuran, saat ini masyarakat mulai mengembangkan sayur-sayuran walaupun pada skala kecil. Komoditas seperti kacang panjang, cabe, tomat, terong, buncis, kangkung, dan bayam mulai banyak diusahakan. Pemasaran produk tersebut baru sebatas pasar lokal. Luas panen, produksi, dan produktivitas sayur-sayuran dan buah-buahan semusim Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.61
Luas panen, Produksi, dan produktivitas Sayur-sayuran dan Buah-buahan Semusim di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2014

No	Jenis Tanaman	2014		
		Luas lahan	Produktivitas	Produksi
		(Ha)	(Kw/Ha)	(Kwintal)
1	Bawang merah	1	33	33
2	Bawang daun	25	22,08	552
3	Petsai/Sawi	122	33,52	4.089
4	Kacang panjang	758	30,28	22.949
5	Cabe	681	49,57	33.754
6	Tomat	200	17,39	3.478
7	Terong	440	21,17	9.316
8	Buncis	116	94,19	10.926
9	Ketimun	306	35,71	10.926
10	Kangkung	204	53,56	10.926
11	Bayam	215	27,08	5.823
12	Semangka	564	171,23	96.576
13	Melon	11	75,27	828

Sumber : Dinas Pertanian TPH, 2016

2. Perkebunan dan Kehutanan

Sub sektor perkebunan, di Kabupaten Lampung Timur memiliki lahan potensi untuk perkebunan rakyat seluas 55.391,33 hektar. Beberapa komoditas unggulan, diantaranya Kakao, Kelapa Dalam, Lada, Kelapa Sawit, Karet, Kopi Robusta, dan sebagainya. Dalam kurun waktu 2009-2013, komoditas yang mengalami peningkatan jumlah produksi yang cukup signifikan yaitu kelapa dalam sebesar 36,88%, diikuti Komoditas Kakao sebesar 24,67%, dan Komoditas karet sebesar 16,79%. Peningkatan produksi ini terjadi karena perluasan areal tanam serta nilai jualnya yang semakin tinggi dibandingkan dengan jenis komoditas perkebunan lainnya.

Tabel 2.62
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010-2014

Uraian	Produksi (ton)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kakao	8.567,10	9.144,39	7.795,94	7.414,81	7.415,00	5.138,00
Kelapa	18.369,71	19.616,38	17.942,20	18.240,64	15.808,00	15.084,00
Kelapa Sawit	2.535,62	5.750,70	6.466,61	7.841,70	8.515,20	8.958,00
Lada	2.711,26	2.291,33	1.768,99	2.002,75	2.023,32	1.958,00

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan, 2016

Produk tanaman perkebunan dari Kabupaten Lampung Timur yang telah menembus pasar regional maupun nasional berupa kakao, karet, minyak sawit, kopi, lada, dan beberapa komoditas lain. Sampai saat ini belum ada industri yang berinvestasi dalam pengolahan hasil tanaman perkebunan, sehingga nilai tambah dari proses pengolahan hasil masih dinikmati oleh daerah lain. Dengan potensi lahan yang masih tersedia



untuk pengembangan tanaman perkebunan dan prospek pasar yang menjanjikan, peluang investasi untuk budidaya berbagai komoditas tanaman perkebunan dan perdagangan masih terbuka lebar. Disamping budidaya, peluang investasi juga terbuka untuk usaha pengolahan dan pemasaran.

Pada sub sektor kehutanan, Kabupaten Lampung Timur memiliki lima kawasan hutan, yaitu :

- a. Kawasan Gunung Balak, sebagai kawasan hutan lindung seluas 22.292,5 Ha;
- b. Kawasan Way Kambas, sebagai kawasan hutan suaka margasatwa seluas 125.621,3 Ha;
- c. Kawasan Muara Sekampung, sebagai kawasan hutan lindung seluas 1.488,36 Ha;
- d. Kawasan Way Kibang, sebagai hutan produksi seluas 6.538 Ha;
- e. Kawasan Gedung Wani, sebagai hutan produksi seluas 6.637 Ha.

Kabupaten Lampung Timur juga memiliki potensi penghasil kayu yang diusahakan rakyat. Jenis-jenis kayu jati, sengon, jabon, akasia, bayur, dan waru mulai banyak ditanam oleh masyarakat. Pada Tahun 2014, produksi kayu Kabupaten Lampung Timur tercatat kayu racak 2.941.330 m³; kayu akasia 216.940 m³; dan kayu jati 20.776.883 m³.

Peningkatan produksi sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi ancaman yang bersumber dari hewan liar, khususnya bagi wilayah yang berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas. Berdasarkan data WCS (*Wildlife Conservation Society*) Indonesia Program Way Kambas *Landscape*, kasus kejadian konflik manusia dan gajah berfluktuatif kurun waktu tiga Tahun terakhir. Pada Tahun 2013 dari 437 kasus potensial konflik terjadi 329 kasus kejadian konflik yang menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pada Tahun 2014 dari 275 kasus potensial konflik terjadi 236 kasus kejadian konflik yang menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dan pada Tahun 2015 dari 346 kasus potensial konflik terjadi 252 kasus kejadian konflik yang menimbulkan kerugian pada masyarakat. Kejadian konflik ini terjadi 25 desa penyangga Taman Nasional Way Kambas.

3. Peternakan

Dalam RTRW Nasional menyebutkan bahwa Provinsi Lampung, sebagai lumbung ternak nasional. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merasa perlu mendukung program dan kegiatan dalam mewujudkan keinginan tersebut. Dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013 jumlah ternak kambing terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.63
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2010 - 2014

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
	(Ekor)	(Ekor)	(Ekor)	(Ekor)	(Ekor)
2010	95.814	6.546	117.421	19.003	17.678
2011	152.710	6.493	127.989	20.719	18.931
2012	159.778	6.830	134.388	21.758	19.878
2013	103.992	3.727	136.774	21.835	8.528
2014	114.366	2.521	138.101	10.529	8.572

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2016

Saat ini permintaan pasar untuk sapi, baik pasar nasional maupun internasional belum mampu dipenuhi oleh peternak dari Kabupaten Lampung Timur maupun Provinsi Lampung. Disamping itu, belum adanya industri pengolahan ternak juga membuka peluang bagi investor untuk mendirikan pabrik pengolahan hasil peternakan. Perkembangan produksi daging dan telur Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.64
Perkembangan Produksi Hasil peternakan
Kabupaten Lampung Timur (kg)

Jenis Komoditas	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Daging	3.309	3.746.620	12.471.021	9.705.939	4.701.827
a. Sapi	2.914,00	2.135.730	9.002.521	5.273.370	1.544.848
b. Kerbau	168	176.320	343.097	667.624	5.250
c. Kambing	227	77.220	1.411.068	1.505.918	304.856
d. Unggas	N/A	1.357.350	1.714.335	2.259.027	2.846.873
2. Telur	662	0	7.021.265,67	12.384.808,00	12.146.674,00
a. Ayam Buras	369	N/A	1.585.140,00	1.451.023,00	1.445.059,00
b. Ayam Ras Petelur	283	N/A	5.435.946,00	10.610.516,00	10.085.523,00
c. Itik	10	N/A	179,67	323.269,00	223.710,00
d. Mentok	N/A	N/A	N/A	N/A	392.382

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2016

Peternakan unggas di Kabupaten Lampung Timur dilakukan oleh peternak rakyat skala kecil. Populasi unggas di Kabupaten Lampung Timur dari Tahun 2010 - 2014 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan permintaan atas kedua jenis unggas tersebut yang meningkat disertai keuntungan yang semakin besar. Perkembangan populasi unggas di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Perkembangan Populasi Unggas (ekor) Tahun 2010-2014

Tahun	Ayam buras	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik	Mentok
2010	2.451.115	1.937.700	963.816	59.058	N/A
2011	1.671.570	2.034.585	1.007.143	62.011	N/A
2012	1.755.148	2.136.314	1.057.500	65.111	N/A
2013	1.760.951	2.268.278	1.058.838	66.312	482.367
2014	1.762.237	2.722.300	952.850	66.312	114.984

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur, 2016

4. Perikanan dan Kelautan

Potensi sumber daya laut di Kabupaten Lampung Timur meliputi lahan seluas 108 km x 4 mil (1 mil = 1,852 km) = 800,084 km², terdiri dari budidaya perairan umum seluas 5.821,00 Ha (baru dimanfaatkan 862 hektar atau 14,81%) dan perairan payau/tambak seluas 5.122,5 hektar (baru dimanfaatkan 1.294,96 hektar atau 25,28%), serta perairan laut untuk perikanan tangkap seluas 29.674.000 hektar (baru dimanfaatkan 284.704 hektar atau 9,6%). Dengan potensi yang begitu besar, produksi ikan basah hasil tangkapan di perairan laut dan ikan basah hasil budidaya di perairan umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Menurut BPS Provinsi Lampung (2010), produksi perikanan Kabupaten Lampung Timur mencapai 49.781 ton atau 17,78 % produksi perikanan Provinsi Lampung, sehingga memiliki potensi sebagai daerah Minapolitan.

Tabel 2.66
Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Timur (ton)

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
A. Penangkapan					
1. Laut	38.495,20	37.520,70	38.206,30	39.364,20	39.413,60
2. Perairan					
a. Sungai	816,01	788,98	826,34	828,8	836,1
b. Rawa	269,23	84,92	106,6	108,7	133,1
c. Waduk	276,38	103,31	101,31	111,9	112
B. Budidaya					
1. Tambak	5.336,14	6.180,39	5.882,62	5.474,42	5.408,92
2. Kolam	5.621,52	6.381,81	6.890,26	5.832,31	57.855,55
3. Minapadi	9,35	12,22	0	6,4	0
4. Keramba	42,91	48,04	44,14	129,94	63,5
5. Jaring Apung	45,76	49,28	50,69	98,72	42,41
6. Laut	6.386,23	7.755,30	3.500,00	2.111,66	1.573,98

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur, 2016

Selain produksi perikanan tangkap dan budidaya di perairan laut dan perairan umum, terdapat juga potensi rumput laut, mutiara, serta perikanan budidaya air payau dan air tawar. Disamping kegiatan penangkapan dan budidaya, terbuka juga investasi industri modern pengolahan hasil perikanan yang hingga saat ini masih relatif sedikit di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.67
Banyaknya Armada dan Alat Tangkap Perikanan
Kabupaten Lampung Timur

Armada dan Alat Tangkap Perikanan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
A. ARMADA PERIKANAN LAUT					
1. KM 20 - 30 GT	0	0	10	10	10
2. KM 10 - 20 GT	44	44	54	54	54
3. KM 5 - 10 GT	421	420	434	434	434
4. KM 0 - 5 GT	1.241	1.246	1.160	1.160	1.160
5. Motor Tempel	458	458	466	466	466
6. Tanpa Motor	0	0	0	0	0
B. ARMADA DI PERAIRAN UMUM					
1. Sungai	357	609	580	580	580
2. Rawa	300	400	272	272	272
3. Waduk	200	250	250	250	250
C. ALAT TANGKAP					
1. Pukat kantong	699	731	654	652	652
2. Pukat Cincin	88	97	97	97	97
3. Jaring Insang	437	452	454	457	458
4. Perangkap	39	48	120	120	48
5. Jaring angkat	401	409	495	496	496
6. Pancing	232	236	236	236	236
7. Alat pengumpul	104	108	108	108	108
8. Lain-lain	88	87	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Perkembangan armada dan alat tangkap perikanan Kabupaten Lampung Timur dari Tahun 2010 - 2014 dari potensi yang telah diuraikan di atas jika dibandingkan fasilitas armada dan alat tangkap perikanan yang tersedia sangat kurang, sehingga terbuka potensi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengembangan komoditas perikanan.

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Potensi sektor energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Lampung Timur yang telah diketahui jumlah cadangannya antara lain adalah minyak dan gas bumi, pasir kuarsa, pasir bangunan, batu basalt, tanah lempung, dan air bersih/mineral. Potensi bahan tambang dan lokasi kecamatan di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.68
Potensi Bahan Tambang dan Lokasi Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014

No	Jenis Bahan Tambang	Lokasi Kecamatan	Cadangan (m3)
1	Pasir Kuarsa	Labuhan Maringgai	31.468.275
		Pasir Sakti	21.802.500
2	Batu Basalt	Sukadana	17.311.329
		Mataram Baru	731.025
		Way Jepara	9.046.435



3	Pasir Bangunan	Jabung Purbolinggo	1.154.250 219.308
4	Tanah lempung	Raman Utara Way Jepara	1.470.515 484.670

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

6. Industri dan Perdagangan

Jumlah industri pada Tahun 2010 mencapai 5.406 unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja 31.889 orang; nilai investasi Rp.122.758.306.000,- serta nilai produksi Rp. 2.215.659.132.000,- Pada Tahun 2014 angka tersebut meningkat menjadi 7236 unit usaha dengan rincian industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) dengan jumlah 5.357 unit; industri logam, mesin dan elektronik (ILME) dengan jumlah 145 unit; dan industri kimia dan aneka dengan jumlah 1.737 unit. Jumlah total tenaga kerja pada Tahun 2014 adalah 21.260 orang; nilai investasi Rp58.803.575.000,- serta nilai produksi mencapai Rp.1.286.698.085.000,- Pada Tahun 2014 perkembangan industri di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.69
Perkembangan Industri di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2010 – 2014

Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi
	(unit)	(orang)	(Rp.000)	(Rp.000)
Industri Hasil Pertanian & Kehutanan (IHPK)	5.357	21.260	58.803.575	1.286.698.085
Industri Logam, Mesin, dan Elektronika (ILME)	145	675	4.767.857	27.820.499
Industri Kimia dan Aneka (IKA)	1.737	11.811	95.357.147	2.163.043.806
Tahun 2014	7.239	33.746	158.928.579	3.477.562.390
2013	6.750	29.513	151.997.493	3.197.464.500
2012	6.294	26.380	146.551.888	2.916.497.639
2011	5.856	22.292	141.904.880	2.274.574.099
2010	5.406	31.889	122.758.306	2.215.659.132

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Industri yang berkembang di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar industri yang bergerak pada Industri Hasil Pertanian & Kehutanan (IHPK) mencapai 73,12%. Sesuai dengan potensi yang dimiliki serta arahan RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Kabupaten Lampung Timur, maka industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur adalah agroindustri antara lain terlihat pada tabel 2.43.

Tabel 2.70
Nama Perusahaan Agroindustri yang Berkembang
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014

	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja		
				L	P	Jumlah
1	PT. Sorini Agro Asia Coporindo, Tbk	Industri	Tambah Subur	179	13	192
2	PT. Austasia Stooock Food	Penggemukan Sapi	Jabung	212	18	230
3	Waterindek Tirta Lestari	-	Jabung	150	208	358
4	PT. NTF	Buah Pisang Segar	Labuhan Ratu	524	127	651



5	PT. Budi Acid Jaya	Tapioka	Labuhan Ratu	300	62	362
6	PT. Fermentech Indonesia	Bumbu Masak	Jl. Raya Sek. Udik	420	37	457
7	PT. Alfa Abadi Industri	Tapioka	Batanghari Nuban	233	4	237

Sumber : BPTSPPM, 2015

Tabel 2.71
Pasar yang Dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar
Kabupaten Lampung Timur

N	Nama Pasar	Fasilitas (Unit)					
		Ruko	Toko	Kios	Los	Tenda	Hamparan
1	Sukadana	48	158	10	78	-	57
2	Rajabasa Lama	-	208	-	80	-	-
3	Way Jepara	22	141	50	341	307	121
4	Labuhan Maringgai	-	40	66	60	-	90
5	Sekampung	28	272	16	80	67	87
6	Pekalongan	-	16	126	100	175	100
7	Raman Utara	-	56	180	38	-	13
8	Purbolinggo	-	90	307	88	119	32
Jumlah		98	981	755	865	668	500

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Berdasarkan data Tahun 2014, kondisi sarana perdagangan sudah cukup memadai dan daya beli masyarakat semakin meningkat. Pada Tahun 2014 terdapat 98 unit ruko, 981 unit toko, 755 kios, 865 unit los, 668 tenda dan 500 hamparan/lapak. Di samping itu, mulai banyak bermunculan fasilitas perdagangan yang dibangun masyarakat baik di desa maupun di ibu kota kecamatan. Diperkirakan jumlah fasilitas perdagangan yang dibangun masyarakat jumlahnya melampaui dari yang dikelola pemerintah.

Fasilitas perdagangan dan jasa dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Lampung Timur. Lembaga-lembaga perekonomian berupa bank dan koperasi telah banyak berdiri. Beberapa bank yang sudah beroperasi antara lain Bank Lampung, Bank Eka, BRI, dan Bank Danamon, BPR Syariah Lampung Timur dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan kondisi perekonomian daerah.

7. Pariwisata

Objek pariwisata Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi pasar yang cukup luas dan prospek pengembangannya masih sangat terbuka, diantaranya Taman Way Kambas memiliki karakteristik dengan kekayaan flora dan fauna, Taman Purbakala Pugung Raharjo, Danau Way Kawat, Desa Adat Wana, serta Cikal Bakal Wisata Agro, dan Peternakan. Nama objek wisata dan lokasi di Kabupaten Lampung Timur.

Potensi tersebut perlu didukung oleh berbagai usaha jasa dan produk wisata yang cukup baik seperti usaha perhotelan, biro perjalanan wisata, serta aneka souvenir

berupa tenun ikat, songket, sarung dan lain-lain. Pada Tahun 2013 banyaknya hotel dan jumlah kamar tidur di Lampung Timur terdapat 9 hotel dengan jumlah kamar tidur 121 kamar dan tempat tidur 169 unit. Sedangkan untuk angka kunjungan wisatawan pada Tahun 2013 mencapai 58.148 wisatawan (wisatawan mancanegara 390 dan wisatawan nusantara 57.758), pada Tahun 2014 menurun menjadi 47.814 wisatawan (wisatawan mancanegara 385 dan wisatawan nusantara 47.429) dan pada Tahun 2015 meningkat menjadi 63.530 wisatawan (wisatawan mancanegara 458 dan wisatawan nusantara 63.072).

Tabel 2.72
Nama Objek Wisata dan Lokasi di Kabupaten Lampung Timur

Obyek Wisata	Kategori	Lokasi Kecamatan
Taman Purbakala Pugung Rahardjo	Wisata Budaya	Kec. Sekampung Udik
Pantai Kerang Mas	Wisata Bahari	Labuhan Maringgai
Pasanggerahan Way Curup	Wisata Alam dan Tirta	Mataram Baru
Desa Tradisional Wana	Wisata Budaya	Melinting
Taman Nasional Way Kambas	Wisata Alam	Labuhan Ratu
Danau Beringin Indah	Wisata Tirta	Sukadana
Museum Budaya	Wisata Budaya	Sukadana
DAM Negara Batin	Wisata Tirta	Sukadana
Balai Benih Induk Agrowisata	Wisata Agro	Pekalongan
DAM Swadaya	Wisata Tirta	Pekalongan

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015.

8. Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil kinerja urusan. Lokasi trasnmigrasi selama ini sudah ditentukan oleh Pusat, guna mendukung pelaksanaan urusan transmigrasi tersebut diperlukan upaya fasilitasi dan monitoring terhadap transmigran serta sosialisasi terhadap calon transmigran di daerah.

2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan laporan hasil survey harapan masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015, bahwa masyarakat Lampung Timur merasa cukup puas terhadap kinerja pemerintah daerah dengan indeks kepuasan 6,1 dari nilai maksimum 10. Aspek pendidikan dinilai masyarakat Lampung Timur sebagai aspek yang paling memuaskan pelayanannya dibandingkan aspek lain. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan oleh pemerintah daerah, namun masyarakat Lampung Timur masih cukup



yakin bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur mampu mengatasinya dengan tingkat keyakinan 65 persen. Selanjutnya dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur, sehingga menjadikan periode 2016-2021 telah tersusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Kabupaten Lampung Timur juga sudah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015. Selama periode 2011-2015 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Lampung Timur dalam lima Tahun terakhir (2011-2015) juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplementasikan lebih lanjut di dalam RKPD Kabupaten Lampung Timur.

2. Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Timur masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas. Selain itu, hingga Tahun 2015 kontribusi pendapatan asli daerah dalam APBD baru mencapai di kisaran 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan daerah Lampung Timur masih relatif tinggi. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Sebaliknya, dengan semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Selanjutnya, tata kelola keuangan daerah Lampung Timur masih menyisakan kendala. Hal ini diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Timur yang masih ada di level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada kurun waktu 3 Tahun terakhir. Salah satu kendala Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah terkait pengelolaan aset daerah.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur, pemerintah daerah Lampung Timur telah melakukan berbagai upaya yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengembangan aparatur, dan peningkatan disiplin aparatur. Hingga Tahun 2015 jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencapai 10.235 aparatur. Dimana jumlah aparatur yang terbesar adalah pada Golongan III yaitu sebanyak 4.775 aparatur atau 46,65 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.73
Jumlah PNS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015

Golongan Ruang	Pangkat	2011	2012	2013	2014	2015
IV e	Pembina Utama	0	0	0	0	0
IV d	Pembina Utama Madya	1	1	1	1	1
IV c	Pembina Utama Muda	19	31	27	30	44
IV b	Pembina Tk. I	76	86	145	334	443
IV a	Pembina	3.890	3.972	3.950	3.679	3.388
III d	Penata Tk. I	1.542	1.446	1.368	1.394	1.486
III c	Penata	912	844	825	928	904
III b	Penata Muda Tk.I	905	1.107	1.174	1.173	1.299
III a	Penata Muda	1.311	1.165	1.099	916	1.086
II d	Pengatur Tk. I	272	238	241	267	264
II c	Pengatur	443	364	327	281	420
II b	Pengatur Muda Tk.I	691	616	449	424	344
II a	Pengatur Muda	584	434	308	216	490
I d	Juru Tk.I	18	14	13	11	11
I c	Juru	50	35	34	26	35
I b	Juru Muda Tk.I	13	11	11	10	8
I a	Juru Muda	32	14	9	7	12
Total		10.759	10.378	9.981	9.697	10.235

Sumber : BKDD Lam Tim, 2016

Jika kita lihat dari pendidikan yang ditamatkan, pada Tahun 2015 jumlah PNS yang berpendidikan Strata 1 (Sarjana) menempati jumlah terbanyak yaitu 4.825 aparatur atau mencapai 47,14 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.74
PNS Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011-2015

Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
S3	1	1	1	1	2
S2	108	149	173	204	241
S1	4.051	4.297	4.541	4.493	4.825
D4 (Akta IV)	0	0	0	90	103
D3 (Akta III)	870	815	758	711	765
D2 (Akta II)	3.178	2.902	2.558	2.362	2.171
D1 (Akta I)	227	173	142	136	134
SLTA	2.011	1.803	1.613	1.529	1.823
SLTP	172	145	121	104	101
SD	141	93	74	67	70
Total	10.759	10.378	9.981	9.697	10.235

Sumber : BKDD Lam Tim, 2016

Terkait dengan alih tugas/mutasi PNS periode Januari s/d Desember 2015, sebanyak 36 orang PNS alih tugas ke daerah lain, dan 43 orang PNS alih tugas ke Kabupaten



Lampung Timur. Sedangkan terkait dengan proses pensiun, selama periode Januari s/d Desember 2015 terdapat 193 orang PNS yang pensiun dengan perincian 1 orang dari jabatan struktural dan 192 orang dari jabatan fungsional.

Selanjutnya terkait dengan peningkatan/profesionalisme dan kompetensi PNS, pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi PNS, baik pendidikan formal, diklat struktural, diklat teknis, dan diklat fungsional. Untuk pendidikan formal, terdapat 2 (dua) orang PNS yang mendapat tugas belajar, yaitu tugas belajar spesialis THT dan bedah kepala leher, dan spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Untuk diklat struktural, sebanyak 20 orang PNS telah mengikuti Diklatpim Tingkat III, bekerjasama dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.

Disamping itu, dalam rangka peningkatan kompetensi PNS, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga telah menerbitkan izin belajar kepada 44 PNS struktural dan 87 PNS fungsional untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, terkait dengan penegakan disiplin pegawai, sepanjang Tahun 2015, telah diselesaikan kasus pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur adalah sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian hukuman berat (1 orang), hukuman sedang (2 orang) dan hukuman ringan (3 orang).

Sedangkan bagi PNS yang berprestasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2015 telah memberikan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 58 orang PNS yang telah mengabdikan selama lebih dari 30 Tahun, 30 orang PNS yang telah mengabdikan selama lebih dari 20 Tahun, dan 12 orang PNS yang telah mengabdikan selama lebih dari 10 Tahun. Pelaksanaan *rewards and punishment* bagi PNS tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2.4 Aspek Daya Saing

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian daerah Lampung Timur. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Tabel 2.75

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2010-2014 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi Rumah Tangga	11.036.425	12.644.013	14.370.309	16.004.839	17.674.602
Konsumsi LNPRT	230.436	258.166	275.490	306.660	361.769
Konsumsi Pemerintah	1.011.829	1.189.184	1.355.570	1.517.532	1.755.533
PMTB	5.152.467	6.089.730	6.988.611	7.484.539	8.146.613
Perubahan Inventori	220.050	221.914	142.970	172.369	142.400
Ekspor	11.463.541	13.238.205	14.613.535	16.955.940	16.014.380
Impor	9.618.634	11.749.578	14.041.744	15.885.970	14.846.183
Total PDRB	19.496.113	21.891.634	23.704.741	26.555.909	29.249.114

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015.

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2010–2014, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Ekspor juga mempunyai peran yang sangat besar, karena sekitar 50 hingga 60 persen produk Lampung Timur mampu diekspor keluar Kabupaten Lampung Timur; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang sangat besar, karena sekitar 50 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 26 hingga 29 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada kisaran 5 hingga 6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada Tahun 2010-2014 perdagangan antar daerah di luar Kabupaten Lampung Timur yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan antar daerah di luar Kabupaten Lampung Timur dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “surplus”.

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat setiap Tahunnya seiring dengan penambahan penduduk dan tingkat perekonomian daerah.

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Secara rata-rata dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Lampung Timur, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran 50-52 persen. Proporsi untuk makanan pada masing-masing Tahun mencapai 50,64 persen (2010), 51,68 persen (2011), 51,58 persen (2012), 52,57 persen (2013), dan 51,79 persen pada Tahun 2014.

Tabel 2.76
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2010-2014 (persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
Makanan, Minuman, dan Rokok	50,64	51,68	51,88	52,57	51,79
Pakaian dan Alas Kaki	6,59	6,31	6,22	6,04	6,00
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT	10,03	9,82	9,55	9,43	9,21
Kesehatan dan Pendidikan	11,81	11,84	12,32	12,11	11,83
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,71	14,91	14,73	14,38	15,89
Hotel dan Restoran	1,20	1,08	1,07	1,13	1,04
Lainnya	4,02	4,36	4,23	4,34	4,24
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguh pun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Hotel/Losmen

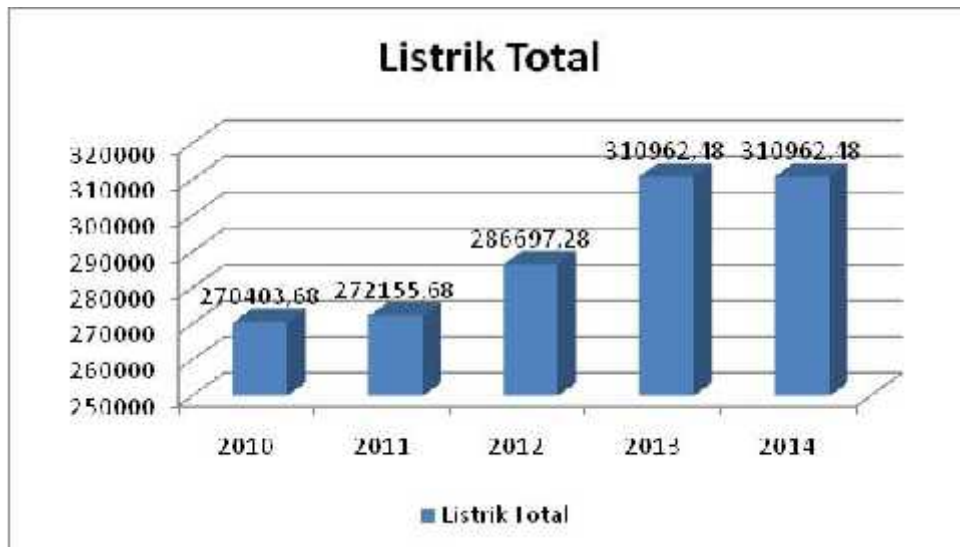
Di Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2014 terdapat 8 hotel dengan 118 kamar dan 169 tempat tidur. Hotel/losmen 1 berlokasi di Kecamatan Sekampung Udik, 3 di Kecamatan Pasir Sakti, 2 di Kecamatan Mataram Baru, 1 di Kecamatan Way Jepara dan 1 di Kecamatan Bandar Sribhawono. Dengan jumlah pengunjung sebanyak 4.336 orang pada Tahun 2014.

2. Jaringan Listrik

Untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini dipasok oleh pembangkit - pembangkit yang dikelola oleh PT. PLN Sektor Bandar Lampung sebesar 70 % dan sisanya dipasok oleh pembangkit listrik dari sistem Sumsel - Lampung sebesar 30 % dari total kebutuhan melalui sistem interkoneksi Sumsel - Lampung - Bengkulu.

Jika kita perhatikan bahwa kebutuhan listrik total mengalami kenaikan dari Tahun-ke Tahun (2010=2014) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2%. Adapun kebutuhan energi listrik daerah dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini:

Grafik 2.23
Penggunaan Listrik Total (MWH) Kabupaten Lampung Timur 2010-2014



Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur, 2015

Pada Tahun 2011 permintaan listrik mengalami kenaikan sebesar 0,3%, dan diikuti kenaikan Tahun berikutnya yaitu sebesar 2,6%. Kemudian pada Tahun 2013 permintaan listrik naik mencapai 4%, namun pada Tahun 2014 permintaan listrik tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan (tetap).

Jika dibagi ke setiap sektor, maka kebutuhan listrik memiliki komposisi rumah tangga sebesar 63,47%, industri 17,69%, dan komersial sebesar 18,83%, sehingga kebutuhan listrik di setiap sektor menjadi :

Tabel 2.77
Permintaan Listrik Per Sektor, 2010-2014

Tahun	Rumah Tangga	Growth (%)	Industri	Growth (%)	Komersial	Growth (%)
2010	171.625,22		47.834,41		50.917,01	
2011	172.737,21	0,32	48.144,34	0,32	51.246,91	0,32
2012	181.966,76	2,60	50.716,75	2,60	53.985,10	2,60
2013	197.367,89	4,06	55.009,26	4,06	58.554,23	4,60
2014	197.367,89	-	55.009,26	-	58.554,23	-

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur, 2015

3. Jaringan Telepon

Jaringan telepon belum menjangkau seluruh wilayah, namun jaringan telepon seluler sudah menjangkau ibukota kabupaten dan beberapa kecamatan. Pola jaringan yang ada mengikuti pola jaringan jalan. Berdasarkan Tabel 2.49, terlihat jika kapasitas saluran telepon yang tersedia belum maksimal termanfaatkan sehingga masih besar peluangnya untuk dimanfaatkan untuk menunjang kemajuan teknologi informasi Jaringan telepon yang ada masih dibawah pengawasan kantor Telkom cabang Metro. Untuk mengetahui tingkat layanan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur dapat di lihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.78
Jumlah Kapasitas Telepon dan Saluran tersambung Lokasi STO
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014

No .	Uraian (STO Lampung Timur)	Kapasitas Tersedia	Saluran dalam Layanan
1	Sukadana	500	440
2	Labuhan Maringgai	3.000	735
3	Way Jepara	2.500	2.320
	Total	6.000	3.495

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

4. Jaringan Pipa Gas Negara

PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) mengoperasikan jalur pipa distribusi gas sepanjang lebih dari 3.750 km, Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah yang ikut terlewati jalur pipa transmisi dan distribusi gas Sumatra Selatan - Jawa Barat. PT. PGN menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, serta rumah tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. Adapaun kebutuhan LPG total untuk sektor rumah tangga Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.79
Penggunaan LPG Sektor Rumah Tangga Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
LPG Rumah Tangga 3 Kg (MT)	37	379	3.879	10.257	13.881
Growth (%)		82,2	82,19	45,11	15,01

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur, 2015

5. Floating Storage Receiving Terminal (FSRU) Lampung

FSRU adalah tempat penyimpanan sementara LNG sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung. Lokasi FSRU Lampung berada di perairan Labuhan Maringgai. Keberadaan FSRU Lampung sangat strategis karena diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan energi gas bumi masyarakat di Lampung, Sumatera Selatan dan Jawa Bagian Barat (baik di sektor rumah tangga, komersil, industri, maupun listrik). Di sektor listrik, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga akan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan gas pembangkit listriknya, terutama untuk menopang pembangkit listrik saat beban puncak malam hari. Dengan meningkatnya kemampuan jumlah pasokan gas bumi ke wilayah Lampung dan Jabar, kebutuhan energi konsumen industri yang terus berkembang akan dapat terpenuhi. Penyaluran gas bumi ke sektor kelistrikan, industri, rumah tangga, komersial dan transportasi di Lampung merupakan upaya percepatan konversi bahan bakar minyak

(BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Optimalisasi pemanfaatan gas bumi berpotensi menghemat biaya bahan bakar yang mencapai sekitar Rp 900 miliar per tahun. Penghematan biaya bahan bakar bakal lebih besar seiring dengan peningkatan pemakaian gas bumi di Lampung. Keberadaan dan kestabilan pasokan gas, terutama menjadi pemicu pertumbuhan bisnis sektor industri, dan menumbuhkan kepercayaan investor lain terhadap kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi di sektor industri. Terus tumbuhnya sektor industri tentunya juga akan membuka berbagai kesempatan-kesempatan ekonomi di wilayah sekitarnya, baik itu kesempatan kerja maupun sektor usaha-usaha kecil dan menengah.

Keberadaan FSRU Lampung juga akan meningkatkan kehandalan pasokan gas PGN. Dengan adanya FSRU ini, sumber gas PGN yang disalurkan kepada konsumen tidak hanya bersumber dari lapangan gas di Sumatera, Jawa. PGN dapat mengandalkan sumber pasokan gas dari Kilang LNG yang berada di Indonesia Timur. Sehingga produk LNG dari Kilang dalam negeri tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik. PGN FSRU Lampung ini adalah bagian dari infrastruktur gas bumi terintegrasi di Lampung yang dibangun oleh PGN. Bagian lainnya adalah pipa distribusi sepanjang 100 kilometer dengan diameter 12 inci-16 inci.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

Perkembangan angka kriminalitas Kabupaten Lampung Timur menunjukkan peningkatan mulai dari Tahun 2012 hingga Tahun 2014. Bentuk-bentuk pencurian masih menjadi modus utama kejahatan di Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan konflik secara horizontal yang mencolok dengan skala meluas tidak pernah terjadi di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.80
Kondisi Kamtibmas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2014

Jenis Kasus	2011	2012	2013	2014
Pembunuhan	6	6	4	6
Penganiayaan berat	3	3	9	25
Penculikan	0	0	0	0
Pencurian dengan kekerasan	72	46	109	116
Pencurian berat	125	74	204	192
Pencurian kendaraan bermotor	28	28	82	39
Perkosaan	7	2	0	7
Pembakaran/kebakaran	5	1	0	0
Senjata api/bahan peledak	4	0	2	1
Pemerasan	4	0	0	6
Narkotika dan obat2an	20	0	0	3



Penyelundupan	0	0	0	0
Perjudian	15	6	24	46
Pencurian kayu	3	0	0	1
Kebakaran hutan	0	0	2	0
Uang palsu	0	0	0	1
Lain-lain	200	46	105	284
Jumlah	492	212	541	727

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Jika dilihat, berdasarkan data angka kriminalitas yang dilaporkan pada Tahun 2014, Kecamatan Sukadana merupakan kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi yaitu sebesar 100 kasus. Sedangkan kecamatan dengan kasus terendah adalah Kecamatan Metro Kibang dengan 2 kasus.

Tabel 2.81
Banyaknya Kejahatan Umum yang Dilaporkan per Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan
Metro Kibang	2
Batanghari	41
Sekampung	42
Marga Tiga	32
Sekampung Udik	37
Jabung	16
Waway Karya	16
Pasir Sakti	31
Marga Sekampung	16
Labuhan Meringgai	43
Gunung Pellindung	13
Melinting	10
Mataram Baru	22
Bandar Srihawono	27
Way Jepara	55
Braja Selebah	8
Labuhan Ratu	68
Sukadana	100
Bumi Agung	25
Batanghari Nuban	30
Pekalongan	36
Raman Utara	26
Purbolinggo	20
Way Bungur	11

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

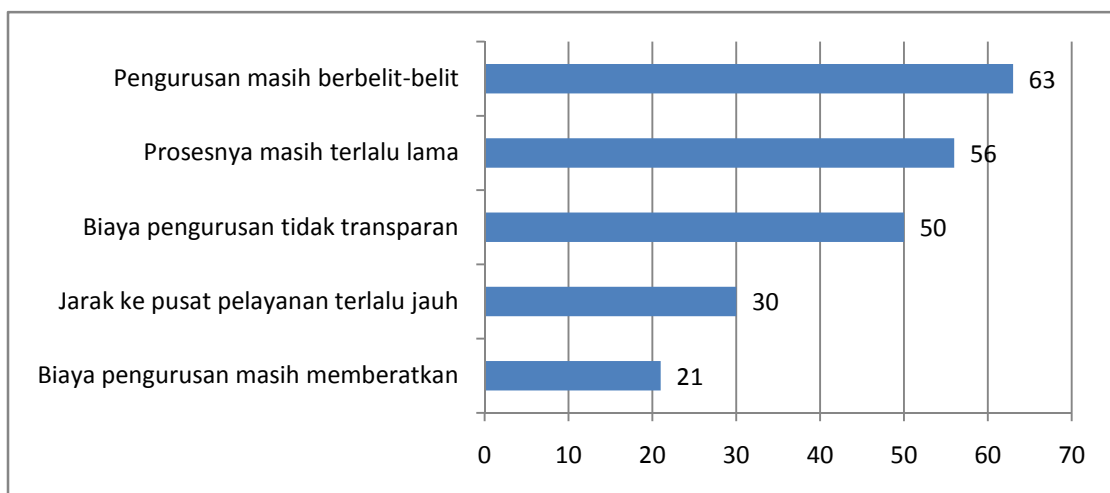
2. Lama Proses Perizinan

Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Tahun 2009, dan pada Tahun 2013 dinaikkan statusnya menjadi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah diatur standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola BPTSPPM yaitu paling lama 14 hari kerja.

Hingga kini kinerja pelayanan perizinan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan laporan hasil survey harapan masyarakat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015, persepsi masyarakat yang menyatakan puas terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Lampung Timur baru mencapai 53 persen.

Adapun persepsi masyarakat menyatakan ada lima permasalahan utama yang terkait dengan pelayanan perizinan, dimana dari 30 responden yang disurvei 63 persen menyatakan bahwa pengurusan perizinan usaha masih berbelit-belit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.24
Persepsi Masyarakat Menurut Jenis Permasalahan Izin Usaha Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Selain itu, belum seluruh pelayanan non perizinan yang dilayani oleh BPTSPPM, masih terdapat beberapa pelayanan khususnya non perizinan yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah secara langsung, dimana ada beberapa pelayanan yang belum memiliki standar waktu pelayanan. Kedepan perlu disusun SOP dan penetapan standar waktu pelayanan seluruh perizinan dan non perizinan daerah.

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis pendapatan daerah yang selama ini menjadi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Rincian realisasi penerimaan pajak daerah kurun waktu 2011-2014 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.82
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011-2015

Jenis Pajak	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak Hotel	25.275.450,00	39.933.900,00	35.355.900,00	40.239.400,00	76.479.000,00
Pajak Restoran	25.760.800,00	35.490.950,00	28.619.000,00	40.010.100,00	84.428.100,00
Pajak Hiburan	5.100.000,00	5.720.000,00	5.520.000,00	6.000.000,00	10.900.000,00
Pajak Reklame	80.909.993,50	133.800.193,80	130.615.599,05	168.681.318,00	264.092.463,00
Pajak Penerangan Jalan	9.093.187.863,00	10.239.994.143,00	11.650.722.074,00	13.049.403.250,00	14.733.821.810,00
Pajak Air Tanah		1.071.511.067,00	769.594.812,00	638.616.894,26	1.016.294.312,88
Pajak Sarang Burung Walet	-	0,00	0,00	0,00	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.733.245.893,00	2.595.445.069,00	767.333.772,00	10.093.500,00	9.315.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	192.350.582,50	171.838.130,00	10.425.996.521,56	8.891.118.691,00
Total	11.963.479.999,50	14.314.245.905,30	13.559.599.287,05	24.379.040.983,82	25.086.449.376,88

Sumber : LRA, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

Tabel 2.83
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011-2015

Jenis Retribusi	2015	SKPD
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.422.572.800,00	Dinas Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan	129.561.750,00	Dinas Pasar Pertamanan Kebersihan Kota
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.150.000,00	Dinas Perhubungan dan Kominfo
Retribusi Pelayanan Pasar	547.192.000,00	Dinas Pasar Pertamanan Kebersihan Kota
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	108.847.500,00	Dinas Perhubungan dan Kominfo
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	666.351.611,00	Dinas Perhubungan dan Kominfo
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	188.956.588,00	DPPKAD
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	294.620.500,00	Dinas Pasar Pertamanan Kebersihan Kota
Retribusi Terminal	19.500.000,00	Dinas Perhubungan dan Kominfo
Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.380.000,00	Dinas Perhubungan dan Kominfo
Retribusi Rumah Potong Hewan	23.700.000,00	Dinas Peternakan dan Keswan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	155.728.784,00	Dinas Pekerjaan Umum
Retribusi Izin Gangguan	779.163.280,00	BPTSPPM
Retribusi Izin Trayek	2.555.000,00	Dinas Perhubungan dan Kominfo
Total	4.429.279.813,00	

Sumber : LRA, 2015

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Lulusan Perguruan Tinggi

Rasio lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu Tahun 2012-2014 berfluktuatif. Tahun 2012 rasio lulusan perguruan tinggi sebesar 250, yang berarti terdapat 250 orang lulusan perguruan tinggi dari 10.000 penduduk Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2013 rasio turun menjadi 230, dan pada Tahun 2014 melonjak cukup tajam menjadi 710, yang artinya terdapat 710 orang lulusan perguruan tinggi dari 10.000 penduduk Kabupaten Lampung Timur. Kelompok penduduk lulusan pendidikan tinggi inilah yang menjadi aset berharga bagi daerah dan diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam menggerakkan roda pembangunan.

Tabel 2.84
Rasio Penduduk yang Memiliki Ijazah Perguruan Tinggi Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Rasio Lulusan PT	250	230	710

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2010-2014 menurut kelompok umur tersaji dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.85
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lampung Timur, 2010-2014

Tahun	Kelompok Umur			Rasio
	0-14	15-64	65+	Ketergantungan
	%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	28.3	65.8	6.0	52.0
2011	28.1	66.0	5.9	51.6
2012	27.9	66.1	5.9	51.2
2013	27.7	66.3	6.0	50.8
2014	27.5	66.5	6.0	50.5

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk pada kelompok umur muda lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2014 penduduk Lampung Timur tergolong struktur penduduk sedang atau muda "transisi" karena proporsi penduduk dibawah 15 Tahun masih tinggi, yakni mencapai 27,5 persen.



Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 Tahun) di suatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Semakin kecil persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut. Pada Tabel di atas terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk Lampung Timur Tahun 2014 adalah 50,5 persen yang berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk produktif, harus menanggung sekitar 51 orang penduduk tidak produktif.

3. Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Timur

Kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI). IPM atau HDI merupakan suatu ukuran yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Menurut UNDP IPM atau HDI dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

Pada Tahun 2014, IPM Kabupaten Lampung Timur (metode baru) sebesar 66.42 dan bila dibandingkan dengan nilai IPM dua Tahun sebelumnya (2012) yang nilainya tercatat sebesar 65.10 maka nilai tersebut memperlihatkan adanya peningkatan, meskipun sangat kecil. Peningkatan tersebut dicapai akibat adanya kenaikan dari nilai indeks, yaitu indeks kelangsungan hidup, indeks daya beli, dan indeks pengetahuan.

Tabel 2.86
Indeks Komponen IPM Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Daya Beli	IPM
2012	68.94	11.78	7.01	8,542	65.10
2013	69.01	12.26	7.15	8,756	66.07
2014	69.33	12.38	7.16	8,814	66.42

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan nilai IPM Kabupaten Lampung Timur dengan nilai IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, sekaligus memperlihatkan posisi Kabupaten Lampung Timur relatif terhadap seluruh kabupaten/kota lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kabupaten Lampung Timur menduduki peringkat keenam setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah. Peringkat IPM Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu tiga Tahun terakhir selalu sama yaitu peringkat lima, walaupun secara indeks menunjukkan trend meningkat setiap Tahunnya.

Tabel 2.87
Perbandingan Nilai dan Rangking IPM di Provinsi Lampung, 2012-2014

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Tanggamus	61.14	61.89	62.67	11	11	11
Lampung Selatan	62.68	63.35	63.75	9	9	9
Lampung Timur	65.10	66.07	66.42	5	5	5
Lampung Tengah	65.60	66.57	67.07	3	3	3
Lampung Utara	62.93	64.00	64.89	7	7	7
Way Kanan	62.79	63.92	64.32	8	8	8
Tulang Bawang	64.11	64.91	65.83	6	6	6
Pesawaran	59.98	60.94	61.70	13	13	13
Pringsewu	65.37	66.14	66.58	4	4	4
Mesuji	57.67	58.16	58.71	14	15	15
Tulang Bawang barat	60.77	61.46	62.46	12	12	12
Pesisir Barat	N/A	58.95	59.76	N/A	14	14
Bandar Lampung	72.88	73.93	74.34	1	2	2
Metro	72.86	74.27	74.98	2	1	1

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2015

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah Tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka ini sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*), namun karena data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia maka cara ini tidak dapat dilakukan. Dalam publikasi ini, perhitungan angka harapan hidup dilakukan dengan metode tidak langsung (*indirect method*). Komponen IPM meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli. Tabel berikut menguraikan lebih jauh tentang komponen Indeks Pembangunan Manusia tersebut.

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 adalah 69,01 naik menjadi 69,33 di Tahun 2014 dan menempati posisi ketiga terbesar di Provinsi Lampung setelah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Naiknya angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan kehidupan penduduk Kabupaten Lampung Timur juga menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.88
Komponen Indeks Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 2012 - 2014

Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama sekolah (tahun)		Rata-rata lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Lampung Barat	65.69	66.02	11.31	11.36	7.21	7.25	8,397	8,459
Tanggamus	66.79	67.12	11.29	11.49	6.35	6.63	7,835	7,88
Lampung Selatan	67.80	68.12	10.95	10.98	6.89	7.01	8,384	8,441
Lampung Timur	69.01	69.33	12.26	12.38	7.15	7.16	8,756	8,814
Lampung Tengah	68.59	68.91	11.89	12.16	7.04	7.06	9,895	9,935
Lampung Utara	67.68	68.02	12.04	12.38	7.42	7.69	7,513	7,567
Way Kanan	67.89	68.21	11.85	11.96	6.68	6.76	8,243	8,278
Tulang Bawang	68.64	68.94	10.76	11.11	6.84	7.10	9,751	9,796
Pesawaran	67.01	67.33	11.28	11.44	6.99	7.21	6,57	6,68
Pringsewu	67.69	68.01	12.27	12.47	7.51	7.53	8,934	8,992
Mesuji	66.70	67.05	10.25	10.34	5.65	5.80	6,706	6,764
Tulang Bawang Barat	68.66	68.98	11.01	11.29	6.48	6.81	7,045	7,137
Pesisir Barat	61.37	61.74	10.62	11.12	7.35	7.36	7,085	7,169
Kota Bandar Lampung	70.26	70.55	13.22	13.31	10.77	10.85	10,618	10,702
Kota Metro	70.68	70.98	13.85	14.25	10.47	10.54	10,494	10,606
LAMPUNG	69.55	69.66	11.90	12.24	7.32	7.48	8,415	8,476

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2014

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator di bidang pendidikan yang dapat memberikan gambaran tentang lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 sebesar 12,38 Tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak pada Tahun 2014 ini diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,38 Tahun. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur sudah cukup baik, yakni berada pada posisi keempat (setelah Metro, Bandar Lampung, dan Pringsewu). Namun jika ditelusuri lebih detail, peningkatan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur masih cukup rendah, yakni hanya 1,04 persen dari Tahun 2013 ke Tahun 2014.

C. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain harapan lama sekolah, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 Tahun keatas.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 mencapai 7,16 Tahun. Angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,15 Tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk



Kabupaten Lampung Timur sudah menduduki kelas dua Sekolah Menengah Pertama . Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di kota Bandar Lampung (10,85 Tahun), sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Mesuji (5,80 Tahun). Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih banyak penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terlihat secara nyata hasilnya.

C. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkatnya pendapatan seseorang, diharapkan peningkatan kemampuan daya beli. Akan tetapi bila dikaji lebih mendalam bahwa hubungan tersebut tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah daripada tingkat kenaikan harga secara umum. Paritas daya beli juga sangat ditentukan oleh lokasi tempat tinggal seseorang. Dengan demikian penduduk dengan pendapatan sama belum tentu mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggalnya berbeda. IPM Lampung Timur dilihat dari faktor pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa penduduk Lampung Timur melakukan pengeluaran sebesar 8,8 juta rupiah per kapita per Tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 8,4 juta rupiah per kapita per Tahun. Meskipun daya beli penduduk Lampung Timur lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Lampung dan berada di posisi keenam terbesar se-Provinsi Lampung, namun hal tersebut belum disertai dengan capaian yang sama dalam pengentasan kemiskinan. Pasalnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur terbesar se-Provinsi Lampung pada Tahun 2014. Terjadinya kontradiksi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pembangunan daerah. Masalah ketimpangan akan menjadi hambatan dalam upaya mempercepat pembangunan manusia. Sebesar apapun upaya yang dilakukan untuk menggenjot peningkatan daya beli penduduk, tidak akan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas manusia jikalau hal tersebut hanya dapat dinikmati sebagian kelompok saja.



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2011-2015

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah saat ini, tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana pembangunan masih tetap merupakan faktor yang sangat menentukan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Periode kinerja keuangan Kabupaten Lampung Timur disajikan untuk periode Tahun 2011-2015, namun untuk penyajian datanya diuraikan mulai Tahun 2010 sebagai data dasar atau kondisi eksisting periode Tahun 2016-2021, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2015.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kabupaten Lampung Timur terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

A. Komponen Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;



2. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

B. Komponen Belanja:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

C. Komponen Pembiayaan:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Ringkasan perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:



Tabel 3.1
Tren APBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2010-2015

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
PENDAPATAN	901.048.235.725,29	1.093.090.661.553,06	1.225.727.325.687,27	1.366.829.394.726,87	1.547.559.805.237,57	1.673.230.554.391,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.669.866.389,29	31.383.878.620,54	49.362.536.451,27	40.476.211.275,34	83.146.127.559,57	84.496.936.513,56
1 Hasil Pajak Daerah	9.497.200.916,61	11.963.479.999,50	14.314.245.905,30	13.559.599.287,05	24.379.040.983,82	25.086.449.376,88
2 Hasil Retribusi Daerah	4.000.851.325,00	9.688.579.007,00	20.243.246.961,00	4.542.174.618,00	5.618.163.729,00	4.429.279.813,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.081.836.711,30	1.359.157.591,00	1.481.725.835,00	1.971.382.892,02	1.947.448.210,03	2.184.386.127,55
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.089.977.436,38	8.372.662.023,04	13.323.317.749,97	20.403.054.478,27	51.201.474.636,72	52.796.821.196,13
DANA PERIMBANGAN	764.614.725.727,00	843.849.400.023,00	1.006.072.011.486,00	1.073.833.295.826,00	1.156.884.045.507,00	1.164.854.841.356,00
1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	144.600.259.727,00	159.452.412.023,00	168.846.324.486,00	151.312.920.826,00	150.380.012.507,00	91.635.128.356,00
2 Dana Alokasi Umum	543.770.666.000,00	637.511.863.000,00	763.748.797.000,00	860.136.385.000,00	940.041.243.000,00	974.792.193.000,00
3 Dana Alokasi Khusus	76.243.800.000,00	46.885.125.000,00	73.476.890.000,00	62.383.990.000,00	66.462.790.000,00	98.427.520.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.763.643.609,00	217.857.382.909,52	170.292.777.750,00	252.519.887.625,53	307.529.632.171,00	423.878.776.522,00
1 Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	803.070.000,00
2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah	17.636.198.000,00	33.376.262.149,52	31.080.704.750,00	37.616.612.127,33	60.035.523.771,00	63.010.001.522,00
3 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	98.127.445.609,00	184.481.120.760,00	134.926.995.000,00	214.682.623.471,00	247.494.108.400,00	360.065.705.000,00
4 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah	-	-	4.285.078.000,00	220.652.027,20	-	-
BELANJA	919.395.962.073,00	1.049.575.733.583,00	1.248.733.644.646,00	1.410.275.163.144,00	1.512.492.030.233,00	1.733.408.499.651,80
BELANJA TIDAK LANGSUNG	607.866.857.285,00	722.155.136.482,00	766.665.525.380,00	888.518.493.506,00	938.748.771.238,00	1.131.455.098.485,00
BELANJA LANGSUNG	311.529.104.788,00	327.420.597.101,00	482.068.119.266,00	521.756.669.638,00	573.743.258.995,00	601.953.401.166,80
SURPLUS (DEFISIT)	(18.347.726.347,71)	43.514.927.970,06	(23.006.318.958,73)	(43.445.768.417,13)	35.067.775.004,57	(60.177.945.260,24)
PEMBIAYAAN	108.662.315.642,31	89.564.589.294,60	131.079.876.149,66	105.073.557.190,93	60.529.369.396,00	99.446.937.920,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	110.662.315.642,31	90.314.589.294,60	135.083.353.149,66	108.073.557.190,93	61.637.579.546,00	98.436.116.904,00
1 SILPA Tahun Sebelumnya	102.693.920.155,31	90.314.589.294,60	135.083.353.149,66	108.073.557.190,93	61.637.579.546,00	98.436.116.904,00
2 Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3 Penerimaan Piutang Daerah	7.968.395.487,00	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	750.000.000,00	4.003.477.000,00	3.000.000.000,00	1.108.210.150,00	1.010.821.016,00
1 Penyertaan Modal (Investasi)	2.000.000.000,00	750.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2 Pembayaran Pokok Hutang	-	-	3.503.477.000,00	2.000.000.000,00	108.210.150,00	10.821.016,00
Pembiayaan Netto	90.314.589.294,60	133.079.517.264,66	108.073.557.190,93	61.627.788.773,80	95.597.144.400,57	39.268.992.659,76

Sumber : LRA dan Data diolah

Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

3.1.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

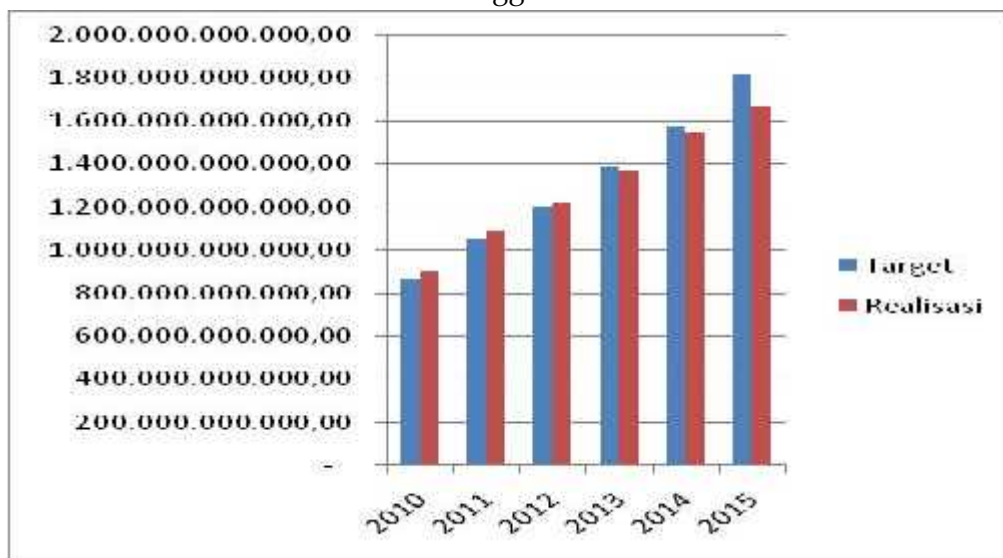
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 sampai dengan 2015 disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2010	866.647.961.042,00	901.048.235.725,29	103,97	34.400.274.683,29
2011	1.049.056.381.002,00	1.093.090.661.553,06	104,20	44.034.280.551,06
2012	1.206.400.225.474,76	1.225.727.325.687,27	101,60	19.327.100.212,51
2013	1.392.666.654.686,00	1.366.829.394.726,87	98,14	(25.837.259.959,13)
2014	1.580.550.053.808,20	1.547.559.805.237,57	97,91	(32.990.248.570,63)
2015	1.813.502.876.000,17	1.673.230.554.391,56	92,27	(140.272.321.608,61)
Rata-rata	1.318.137.358.668,85	1.301.247.662.886,94		

Sumber : LRA dan Data diolah

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2010-2015



Sumber : Data diolah

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata target pendapatan daerah sebesar Rp.1.318.137.358.668,85 dengan realisasi sebesar Rp.1.301.247.662.886,94. Berdasarkan pemerhatian terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun Anggaran 2010-2015 ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

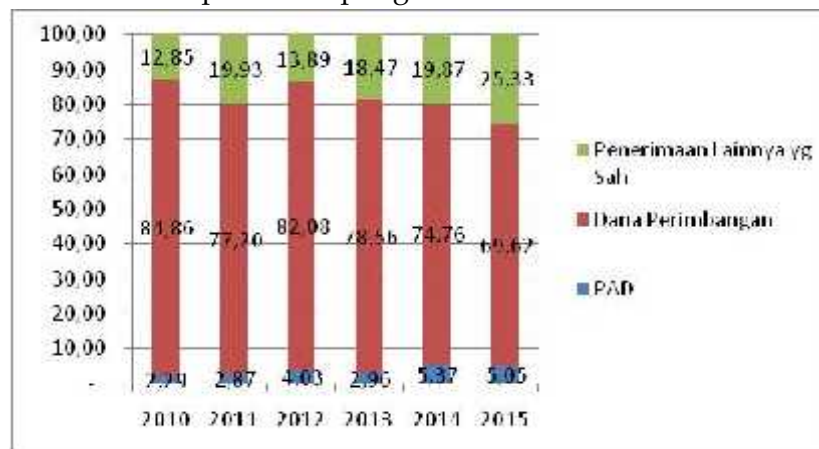
Tabel 3.3
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur T.A. 2010-2015

Jenis Pendapatan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	2,29	2,87	4,03	2,96	5,37	5,05
Dana Perimbangan	84,86	77,20	82,08	78,56	74,76	69,62
Penerimaan Lainnya yang Sah	12,85	19,93	13,89	18,47	19,87	25,33
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber : LRA dan Data diolah

Dari Tabel di atas terlihat bahwa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif rendah. Kontribusi PAD Kabupaten Lampung Timur terhadap total pendapatan pada Tahun 2015 baru mencapai 5,05%.

Grafik 3.2
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur T.A. 2010-2015



Sumber : Data diolah

Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan daerah Kabupaten Lampung Timur masih relatif tinggi. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Sebaliknya, dengan semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar.

Secara rinci, target dan realisasi pendapatan daerah periode Tahun Anggaran 2010-2015 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013, rata-rata target tahunan sebesar



Rp.49.943.831.308,67 realisasinya melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp.51.589.259.468,26 seperti disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	20.000.000.000,00	20.669.866.389,29	103,35	669.866.389,29
2011	20.000.000.000,00	31.383.878.620,54	156,92	11.383.878.620,54
2012	31.305.286.900,00	49.362.536.451,27	157,68	18.057.249.551,27
2013	51.111.316.050,00	40.476.211.275,34	79,19	(10.635.104.774,66)
2014	86.855.359.390,00	83.146.127.559,57	95,73	(3.709.231.830,43)
2015	90.391.025.512,00	84.496.936.513,56	93,48	(5.894.088.998,44)
Rata-rata	49.943.831.308,67	51.589.259.468,26		

Sumber : LRA dan Data diolah

Realisasi pajak daerah secara rata-rata melampaui dari target yang ditetapkan, dimana dari rata-rata pajak sebesar Rp.16.100.522.725,00 rata-rata realisasinya adalah Rp.16.466.669.411,53, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2010	7.524.775.000,00	9.497.200.916,61	126,21	1.972.425.916,61
2011	7.524.775.000,00	11.963.479.999,50	158,99	4.438.704.999,50
2012	10.976.845.450,00	14.314.245.905,30	130,40	3.337.400.455,30
2013	15.921.845.450,00	13.559.599.287,05	85,16	(2.362.246.162,95)
2014	27.447.895.450,00	24.379.040.983,82	88,82	(3.068.854.466,18)
2015	27.207.000.000,00	25.086.449.376,88	92,21	(2.120.550.623,12)
Rata-rata	16.100.522.725,00	16.466.669.411,53		

Sumber : LRA dan Data diolah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang berupa pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata target retribusi daerah sebesar Rp.5.374.900.241,17 dan realisasinya telah melampaui target yaitu sebesar Rp.8.087.049.242,17, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:



Tabel 3.6
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	4.771.054.325,00	4.000.851.325,00	83,86	(770.203.000,00)
2011	4.055.928.325,00	9.688.579.007,00	238,87	5.632.650.682,00
2012	6.178.441.450,00	20.243.246.961,00	327,64	14.064.805.511,00
2013	5.819.771.400,00	4.542.174.618,00	78,05	(1.277.596.782,00)
2014	6.205.782.500,00	5.618.163.729,00	90,53	(587.618.771,00)
2015	5.218.423.447,00	4.429.279.813,00	84,88	(789.143.634,00)
Rata-rata	5.374.900.241,17	8.087.049.242,17		

Sumber : LRA dan Data diolah

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah. selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata target hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp.1.983.333.333,33, dan realisasinya belum mencapai target sesuai yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.670.989.561,15, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	750.000.000,00	1.081.836.711,30	144,24	331.836.711,30
2011	750.000.000,00	1.359.157.591,00	181,22	609.157.591,00
2012	1.800.000.000,00	1.481.725.835,00	82,32	(318.274.165,00)
2013	2.800.000.000,00	1.971.382.892,02	70,41	(828.617.107,98)
2014	2.800.000.000,00	1.947.448.210,03	69,55	(852.551.789,97)
2015	3.000.000.000,00	2.184.386.127,55	72,81	(815.613.872,45)
Rata-rata	1.983.333.333,33	1.670.989.561,15		

Sumber : LRA dan Data diolah

Penerimaan lain-lain PAD yang sah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 rata-rata target penerimaan dari lain-lain PAD yang sah adalah sebesar Rp.26.485.075.009,17, dan realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.25.364.551.253,42 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	6.954.170.675,00	6.089.977.436,38	87,57	(864.193.238,62)
2011	7.669.296.675,00	8.372.662.023,04	109,17	703.365.348,04
2012	12.350.000.000,00	13.323.317.749,97	107,88	973.317.749,97
2013	26.569.699.200,00	20.403.054.478,27	76,79	(6.166.644.721,73)
2014	50.401.681.440,00	51.201.474.636,72	101,59	799.793.196,72
2015	54.965.602.065,00	52.796.821.196,13	96,05	(2.168.780.868,87)
Rata-rata	26.485.075.009,17	25.364.551.253,42		

Sumber : LRA dan Data diolah

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, rata-rata target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp.1.005.010.600.618,40. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, rata-rata Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp.1.001.684.719.987,50 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	725.828.864.242,00	764.614.725.727,00	105,34	38.785.861.485,00
2011	806.197.298.242,00	843.849.400.023,00	104,67	37.652.101.781,00
2012	991.074.577.067,00	1.006.072.011.486,00	101,51	14.997.434.419,00
2013	1.076.773.754.327,00	1.073.833.295.826,00	99,73	(2.940.458.501,00)
2014	1.182.519.223.647,20	1.156.884.045.507,00	97,83	(25.635.178.140,20)
2015	1.247.669.886.185,17	1.164.854.841.356,00	93,36	(82.815.044.829,17)
Rata-rata	1.005.010.600.618,40	1.001.684.719.987,50		

Sumber : LRA dan Data diolah

Secara keseluruhan, rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp.143.717.474.951,70 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp.144.371.176.320,83 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	105.814.398.242,00	144.600.259.727,00	136,65	38.785.861.485,00
2011	105.814.398.242,00	159.452.412.023,00	150,69	53.638.013.781,00
2012	153.848.890.067,00	168.846.324.486,00	109,75	14.997.434.419,00
2013	154.253.379.327,00	151.312.920.826,00	98,09	(2.940.458.501,00)
2014	176.015.190.647,00	150.380.012.507,00	85,44	(25.635.178.140,00)
2015	166.558.593.185,17	91.635.128.356,00	55,02	(74.923.464.829,17)
Rata-rata	143.717.474.951,70	144.371.176.320,83		

Sumber : LRA dan Data diolah

Rata-rata penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. 786.722.314.000,00 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp.786.666.857.833,33 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	543.770.666.000,00	543.770.666.000,00	100,00	-
2011	637.844.600.000,00	637.511.863.000,00	99,95	(332.737.000,00)
2012	763.748.797.000,00	763.748.797.000,00	100,00	-
2013	860.136.385.000,00	860.136.385.000,00	100,00	-
2014	940.041.243.000,00	940.041.243.000,00	100,00	-
2015	974.792.193.000,00	974.792.193.000,00	100,00	-
Rata-rata	786.722.314.000,00	786.666.857.833,33		

Sumber : LRA dan Data diolah

Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dimulai pada Tahun 2010, dengan rata-rata target dan realisasi penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp.74.570.811.666,67 dan Rp.70.646.685.833,33 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	76.243.800.000,00	76.243.800.000,00	100,00	-
2011	62.538.300.000,00	46.885.125.000,00	74,97	(15.653.175.000,00)
2012	73.476.890.000,00	73.476.890.000,00	100,00	-
2013	62.383.990.000,00	62.383.990.000,00	100,00	-
2014	66.462.790.000,00	66.462.790.000,00	100,00	-
2015	106.319.100.000,00	98.427.520.000,00	92,58	(7.891.580.000,00)
Rata-rata	74.570.811.666,67	70.646.685.833,33		

Sumber : LRA dan Data diolah

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara akumulasi tidak terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, ditargetkan rata-rata sebesar Rp.263.182.926.741,79 dengan realisasi sebesar Rp. 247.973.683.431,18

Tabel 3.12
Target dan Realisasi lain-Lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	120.819.096.800,00	115.763.643.609,00	95,82	(5.055.453.191,00)
2011	222.859.082.760,00	217.857.382.909,52	97,76	(5.001.699.850,48)
2012	184.020.361.507,76	170.292.777.750,00	92,54	(13.727.583.757,76)
2013	264.781.584.309,00	252.519.887.625,53	95,37	(12.261.696.683,47)
2014	311.175.470.771,00	307.529.632.171,00	98,83	(3.645.838.600,00)
2015	475.441.964.303,00	423.878.776.522,00	89,15	(51.563.187.781,00)
Rata-rata	263.182.926.741,79	247.973.683.431,18		

Sumber : LRA dan Data diolah

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.212.671.714.726,67 sedangkan realisasinya sebesar Rp.206.629.666.373,33 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	98.571.596.800,00	98.127.445.609,00	99,55	(444.151.191,00)
2011	200.611.582.760,00	184.481.120.760,00	91,96	(16.130.462.000,00)
2012	150.678.767.000,00	134.926.995.000,00	89,55	(15.751.772.000,00)
2013	214.962.689.800,00	214.682.623.471,00	99,87	(280.066.329,00)
2014	251.139.947.000,00	247.494.108.400,00	98,55	(3.645.838.600,00)
2015	360.065.705.000,00	360.065.705.000,00	100,00	-
Rata-rata	212.671.714.726,67	206.629.666.373,33		

Sumber : LRA dan Data diolah

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya rata-rata periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari target sebesar Rp.49.588.699.015,13 realisasinya mencapai Rp.40.459.217.053,31

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	22.247.500.000,00	17.636.198.000,00	79,27	(4.611.302.000,00)
2011	22.247.500.000,00	33.376.262.149,52	150,02	11.128.762.149,52
2012	29.056.516.507,76	31.080.704.750,00	106,97	2.024.188.242,24
2013	49.818.894.509,00	37.616.612.127,33	75,51	(12.202.282.381,67)
2014	60.035.523.771,00	60.035.523.771,00	100,00	-
2015	114.126.259.303,00	63.010.001.522,00	55,21	(51.116.257.781,00)
Rata-rata	49.588.699.015,13	40.459.217.053,31		

Sumber : LRA dan Data diolah

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota/lainnya periode Tahun Anggaran 2010-2015 hanya ditargetkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013 saja. Dengan rata-rata target sebesar Rp.901.146.005,44 dan realisasi Rp.750.955.004,53



Tabel 3.15
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov/Kab/Kota Lainnya Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	4.285.078.000,00	4.285.078.000,00	100,00	-
2013	220.652.027,20	220.652.027,20	100,00	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
Rata-rata	901.146.005,44	750.955.004,53		

Sumber : LRA dan Data diolah

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010-2015 sebesar 13,28 persen. Dana perimbangan, meskipun kontribusinya besar, tetapi rata-rata pertumbuhan pertahun adalah yang paling kecil, yaitu 8,95 persen, sedangkan PAD memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 13,28 persen.

Tabel 3.16
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2 Pertumbuhan
Pendapatan	901.048.235.725,29	1.093.090.661.553,06	1.225.727.325.687,27	1.392.666.654.686,00	1.580.550.053.808,20	1.673.230.554.391,56	13,28
Pendapatan Asli Daerah	20.669.866.389,29	31.383.878.620,54	49.362.536.451,27	40.476.211.275,34	83.131.971.570,03	84.496.936.513,56	39,63
Pajak Daerah	9.497.200.916,61	11.963.479.999,50	14.314.245.905,30	13.559.599.287,05	24.379.040.983,82	25.086.449.376,88	24,61
Retribusi Daerah	4.000.851.325,00	9.688.579.007,00	20.243.246.961,00	4.542.174.618,00	5.618.163.729,00	4.429.279.813,00	35,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.081.836.711,30	1.359.157.591,00	1.481.725.835,00	1.971.382.892,02	1.947.448.210,03	2.184.386.127,55	15,73
Lain-Lain PAD yang Sah	6.089.977.436,38	8.372.662.023,04	13.323.317.749,97	20.403.054.478,27	51.187.318.647,18	52.796.821.196,13	60,75
Dana Perimbangan	764.614.725.727,00	843.849.400.023,00	1.006.072.011.486,00	1.073.833.295.826,00	1.156.884.045.507,00	1.164.854.841.356,00	8,95
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	144.600.259.727,00	159.452.412.023,00	168.846.324.486,00	151.312.920.826,00	150.380.012.507,00	91.635.128.356,00	-6,78
DAU	543.770.666.000,00	637.511.863.000,00	763.748.797.000,00	860.136.385.000,00	940.041.243.000,00	974.792.193.000,00	12,53
DAK	76.243.800.000,00	46.885.125.000,00	73.476.890.000,00	62.383.990.000,00	66.462.790.000,00	98.427.520.000,00	11,55
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	115.763.643.609,00	217.857.382.909,52	170.292.777.750,00	252.519.887.625,53	310.556.537.171,00	423.878.776.522,00	34,82
Hibah						803.070.000,00	
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.636.198.000,00	33.376.262.149,52	31.080.704.750,00	37.616.612.127,33	60.035.523.771,00	63.010.001.522,00	33,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.127.445.609,00	184.481.120.760,00	134.926.995.000,00	214.682.623.471,00	250.521.013.400,00	360.065.705.000,00	36,13
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Lainnya	-	-	4.285.078.000,00	220.652.027,20	-	-	

Sumber : LRA dan Data diolah

3.1.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2015, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari rata-rata target belanja daerah

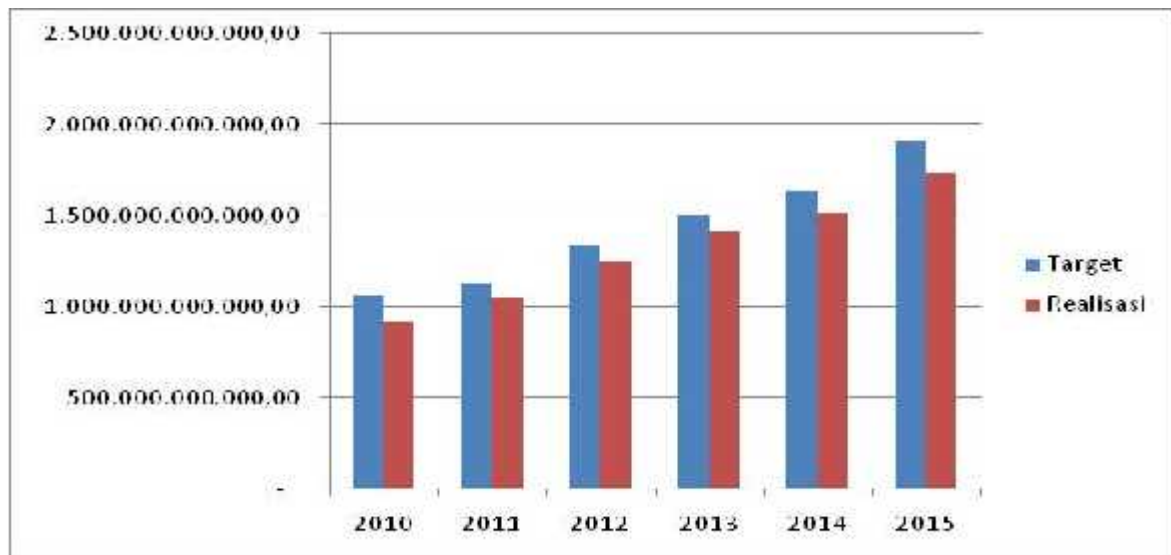
sebesar Rp.1.431.072.509.049,72 terealisasi sebesar Rp.1.312.313.505.555,13 secara lebih rinci disajikan pada Tabel dan Grafik berikut ini:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2010	1.067.224.594.006,00	919.395.962.073,00	86,15	(147.828.631.933,00)
2011	1.133.947.853.093,00	1.049.575.733.583,00	92,56	(84.372.119.510,00)
2012	1.336.470.034.739,42	1.248.733.644.646,00	93,44	(87.736.390.093,42)
2013	1.497.240.211.876,93	1.410.275.163.144,00	94,19	(86.965.048.732,93)
2014	1.640.450.412.414,00	1.512.492.030.233,00	92,20	(127.958.382.181,00)
2015	1.911.101.948.169,00	1.733.408.499.651,80	90,70	(177.693.448.517,20)
Rata-rata	1.431.072.509.049,72	1.312.313.505.555,13		

Sumber : LRA dan Data diolah

Grafik 3.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015



Sumber : Data diolah

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, dan (f) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terealisasi rata-rata sebesar Rp.842.568.313.729,33 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.902.479.722.428,38 sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:



Tabel 3.19
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	722.435.820.232,00	607.866.857.285,00	84,14	(114.568.962.947,00)
2011	702.639.749.193,00	722.155.136.482,00	102,78	19.515.387.289,00
2012	803.998.566.016,00	766.665.525.380,00	95,36	(37.333.040.636,00)
2013	926.132.952.914,93	888.518.493.506,00	95,94	(37.614.459.408,93)
2014	1.027.981.402.957,00	938.748.771.238,00	91,32	(89.232.631.719,00)
2015	1.231.689.843.257,37	1.131.455.098.485,00	91,86	(100.234.744.772,37)
Rata-rata	902.479.722.428,38	842.568.313.729,33		

Sumber : LRA dan Data diolah

Target Belanja Pegawai Kabupaten Lampung Timur selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 rata-rata sebesar Rp.771.860.347.117,95 dengan realisasi sebesar Rp.710.752.826.807,33 sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	601.801.217.082,00	504.642.072.128,00	83,86	(97.159.144.954,00)
2011	597.091.406.193,00	630.059.880.782,00	105,52	32.968.474.589,00
2012	790.282.882.775,42	683.802.507.835,00	86,53	(106.480.374.940,42)
2013	806.802.795.714,93	777.912.583.956,00	96,42	(28.890.211.758,93)
2014	878.312.123.257,00	798.684.384.013,00	90,93	(79.627.739.244,00)
2015	956.871.657.685,37	869.415.532.130,00	90,86	(87.456.125.555,37)
Rata-rata	771.860.347.117,95	710.752.826.807,33		

Sumber : LRA dan Data diolah

Rata-rata target Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp.285.302.107.431,00 dengan realisasi sebesar Rp.265.029.655.440,33

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Belanja Hibah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	36.902.760.000,00	29.306.744.409,00	79,42	(7.596.015.591,00)
2011	28.523.343.000,00	21.090.711.750,00	73,94	(7.432.631.250,00)
2012	13.000.861.000,00	8.465.066.000,00	65,11	(4.535.795.000,00)
2013	18.769.503.000,00	15.081.377.050,00	80,35	(3.688.125.950,00)
2014	20.013.580.000,00	14.151.876.000,00	70,71	(5.861.704.000,00)
2015	70.761.460.000,00	60.200.820.480,00	85,08	(10.560.639.520,00)
Rata-rata	31.328.584.500,00	24.716.099.281,50		

Sumber : LRA dan Data diolah



Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp.4.851.448.083,33 dari target sebesar Rp.3.847.611.204,17

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	15.221.743.500,00	12.757.545.000,00	83,81	(2.464.198.500,00)
2011	8.525.000.000,00	6.026.116.200,00	70,69	(2.498.883.800,00)
2012	-	-		-
2013	-	-		-
2014	5.261.945.000,00	4.202.006.025,00	79,86	(1.059.938.975,00)
2015	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
Rata-rata	4.851.448.083,33	3.847.611.204,17		

Sumber : LRA dan Data diolah

Target Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 Rp. 8.078.544.882,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.461.380.642,00, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Belanja Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa & Partai Politik Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	67.402.949.650,00	60.723.398.998,00	90,09	(6.679.550.652,00)
2011	67.000.000.000,00	64.859.184.000,00	96,80	(2.140.816.000,00)
2012	80.314.822.241,00	73.991.006.000,00	92,13	(6.323.816.241,00)
2013	98.940.654.200,00	95.345.054.000,00	96,37	(3.595.600.200,00)
2014	122.743.754.700,00	120.897.646.900,00	98,50	(1.846.107.800,00)
2015	200.713.725.572,00	200.713.610.700,00	100,00	(114.872,00)
Rata-rata	106.185.984.393,83	102.754.983.433,00		

Sumber : LRA dan Data diolah

2. Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp.528.592.786.621,27 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.469.745.191.825,80

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	344.788.773.774,00	311.529.104.788,00	90,35	(33.259.668.986,00)
2011	431.308.103.900,00	327.420.597.101,00	75,91	(103.887.506.799,00)
2012	532.471.468.723,00	482.068.119.266,00	90,53	(50.403.349.457,00)
2013	571.107.258.962,00	521.756.669.638,00	91,36	(49.350.589.324,00)
2014	612.469.009.457,00	573.743.258.995,00	93,68	(38.725.750.462,00)
2015	679.412.104.911,63	601.953.401.166,80	88,60	(77.458.703.744,83)
Rata-rata	528.592.786.621,27	469.745.191.825,80		

Sumber : LRA dan Data diolah

Rata-rata target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp.59.128.107.795,33 dengan realisasi sebesar Rp.53.797.124.461,67

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	38.753.616.000,00	34.743.025.317,00	89,65	(4.010.590.683,00)
2011	60.805.529.233,00	53.738.263.323,00	88,38	(7.067.265.910,00)
2012	61.443.584.000,00	55.354.344.000,00	90,09	(6.089.240.000,00)
2013	64.475.982.900,00	59.132.690.549,00	91,71	(5.343.292.351,00)
2014	62.945.328.260,00	58.469.739.064,00	92,89	(4.475.589.196,00)
2015	66.344.606.379,00	61.344.684.517,00	92,46	(4.999.921.862,00)
Rata-rata	59.128.107.795,33	53.797.124.461,67		

Sumber : LRA dan Data diolah

Rata-rata target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp.264.106.132.662,33 sedangkan realisasinya sebesar Rp.232.930.298.188,93

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	163.193.425.524,00	150.611.963.927,00	92,29	(12.581.461.597,00)
2011	217.324.015.534,00	176.362.794.722,00	81,15	(40.961.220.812,00)
2012	267.678.050.673,00	238.702.517.729,00	89,18	(28.975.532.944,00)
2013	268.975.629.562,00	245.653.501.400,00	91,33	(23.322.128.162,00)
2014	327.404.013.609,00	301.550.250.533,00	92,10	(25.853.763.076,00)
2015	340.061.661.072,00	284.700.760.822,59	83,72	(55.360.900.249,41)
Rata-rata	264.106.132.662,33	232.930.298.188,93		

Sumber : LRA dan Data diolah

Rata-rata Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terealisasi Rp.205.358.546.163,50 dari target sebesar Rp.183.017.752.508,54 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah /Berkurang
2010	142.841.732.250,00	126.174.115.544,00	88,33	(16.667.616.706,00)
2011	153.178.559.133,00	97.319.539.056,00	63,53	(55.859.020.077,00)
2012	203.349.834.050,00	188.011.257.537,00	92,46	(15.338.576.513,00)
2013	237.655.646.500,00	216.970.477.689,00	91,30	(20.685.168.811,00)
2014	222.119.667.588,00	213.723.169.398,00	96,22	(8.396.498.190,00)
2015	273.005.837.460,00	255.907.955.827,21	93,74	(17.097.881.632,79)
Rata-rata	205.358.546.163,50	183.017.752.508,54		

Sumber : LRA dan Data diolah

3.1.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2013 terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan. Rata-rata target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp.118.856.414.071,54 sedangkan realisasinya mencapai Rp.100.701.251.916,88 seperti disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	203.076.632.964,00	110.662.315.642,31	54,49	(92.414.317.321,69)
2011	106.671.095.051,00	90.314.589.294,60	84,67	(16.356.505.756,40)
2012	135.079.517.264,66	135.083.353.149,66	100,00	3.835.885,00
2013	108.073.557.190,93	108.073.557.190,93	100,00	-
2014	61.627.788.773,80	61.637.579.319,80	100,02	9.790.546,00
2015	98.609.893.184,83	98.436.116.904,00	99,82	(173.776.280,83)
Rata-rata	118.856.414.071,54	100.701.251.916,88		

Sumber : LRA dan Data diolah

Rata-rata realisasi SiLPA, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 Rp.99.373.186.040,08 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.29
Target dan Realisasi SiLPA
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010-2015

Tahun Anggaran	Estimasi	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	102.693.920.155,31	102.693.920.155,31	100,00	-
2011	106.671.095.051,00	90.314.589.294,60	84,67	(16.356.505.756,40)
2012	133.079.517.264,66	135.083.353.149,66	101,51	2.003.835.885,00
2013	108.073.557.190,93	108.073.557.190,93	100,00	-
2014	61.627.788.773,80	61.637.579.546,00	100,02	9.790.772,20
2015	98.609.893.184,83	98.436.116.904,00	99,82	(173.776.280,83)
Rata-rata	101.792.628.603,42	99.373.186.040,08		

Sumber : LRA dan Data diolah

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015, dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 3.34
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
ASET							
Aset Lancar							
Kas	91.372.766.683,60	135.640.481.032,66	108.091.484.109,93	61.731.291.773,80	98.708.011.503,83	37.420.896.214,76	(3,39)
Kas di Kas Daerah	88.374.509.221,60	133.420.650.751,66	103.596.725.709,93	58.368.618.164,64	92.277.790.937,83	25.208.796.812,85	(5,93)
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.947.217.089,00	1.662.702.398,00	4.473.713.200,00	2.694.640.810,00	2.291.363.395,00	2.567.063.467,00	16,56
Kas di Bendahara BLUD	-	-	-	564.532.799,16	2.821.208.870,00	1.894.293.682,00	183,44
Kas di Bendahara JKN	-	-	-	-	1.216.408.701,00	7.576.533.052,91	522,86
Kas di Bendahara Penerimaan	51.040.373,00	557.127.883,00	21.045.200,00	103.500.000,00	101.239.600,00	174.209.200,00	271,40
Piutang	14.920.733.380,91	14.878.677.391,33	28.966.411.166,33	38.684.360.674,50	48.470.231.971,00	23.564.395.829,49	20,37
Piutang pajak	2.263.532.133,00	1.496.996.199,00	1.538.300.709,00	1.371.613.173,50	1.187.724.812,00	2.209.937.213,32	6,14
Piutang Retribusi	-	-	-	110.236.173,00	-	-	-
Piutang Dana Bagi Hasil	12.657.201.247,91	13.381.681.192,33	27.428.110.457,33	37.202.511.328,00	47.282.507.159,00	-	14,68
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	21.354.458.616,17	-
Persediaan	9.365.252.830,00	9.561.575.473,00	11.367.697.931,00	6.857.291.226,71	9.368.411.587,75	8.691.663.688,05	2,14
Jumlah Aset Lancar	115.658.752.894,51	160.080.733.896,99	148.425.593.207,26	107.272.943.675,01	156.546.655.062,58	69.676.955.732,30	(1,23)
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Permanen							
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.499.588.824,03	10.791.480.877,65	13.510.747.585,07	13.383.748.471,21	15.128.335.035,71	16.114.198.943,61	9,32
Jumlah Investasi Jangka Panjang	10.499.588.824,03	10.791.480.877,65	13.510.747.585,07	13.383.748.471,21	15.128.335.035,71	16.114.198.943,61	9,32
ASET TETAP							
Tanah	242.450.481.200,00	242.450.481.200,00	242.450.481.200,00	126.838.507.884,00	126.838.507.884,00	130.472.609.194,90	(8,96)
Peralatan dan Mesin	161.481.388.060,25	173.340.953.203,25	245.140.725.576,27	378.484.350.117,97	420.246.171.101,97	423.146.402.356,91	22,98
Gedung dan Bangunan	598.828.001.713,00	625.152.378.643,00	660.102.765.672,00	486.651.470.022,83	518.186.983.594,23	557.505.156.631,50	(0,44)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	505.966.378.428,00	534.181.057.637,33	612.908.894.756,58	838.348.934.461,58	986.518.468.405,42	1.269.825.785.582,94	20,70
Aset Tetap Lainnya	27.572.195.511,00	33.228.933.399,00	51.689.683.921,89	87.294.546.136,61	109.754.729.754,61	67.514.840.595,11	26,44
Konstruksi dalam Pengerjaan	2.476.032.697,00	2.476.032.697,00	6.891.631.320,00	16.615.024.321,00	4.460.734.773,41	5.399.064.382,08	53,46
Akumulasi Penyusutan Aset	-	-	-	-	-	(1.232.237.600.736,07)	-
Jumlah Aset Tetap	1.538.774.477.609,25	1.610.829.836.779,58	1.819.184.182.446,74	1.934.232.832.943,99	2.166.005.595.513,64	1.221.626.258.007,37	(1,54)
ASET LAINNYA							
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-	-
Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
Aset tak Berwujud	-	-	-	-	-	286.830.000,00	-
Aset Lain-Lain	130.061.804.463,80	18.589.444.613,80	141.449.059.708,56	179.109.247.574,48	163.605.562.607,73	115.241.978.272,17	112,72
Jumlah Aset Lainnya	130.061.804.463,80	18.589.444.613,80	141.449.059.708,56	179.109.247.574,48	163.605.562.607,73	115.528.808.272,17	112,76
JUMLAH ASET	1.794.994.623.791,59	1.800.291.496.168,02	2.122.569.582.947,63	2.233.998.772.664,69	2.501.286.148.219,66	1.422.946.220.955,45	(1,54)
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.007.137.016,00	2.003.835.885,00	717.604,00	3.121.281,00	-	691.145.255,00	111,32
Utang Belanja	-	-	-	-	-	1.809.151.833,83	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	38.976.070.205,00	5.458.067.050,00	31.751.784.773,00	1.186.369.628,00	1.545.813.570,80	-	45,96
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	39.983.207.221,00	7.461.902.935,00	31.752.502.377,00	1.189.490.909,00	1.545.813.570,80	2.500.297.088,83	47,93
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
JUMLAH KEWAJIBAN	39.983.207.221,00	7.461.902.935,00	31.752.502.377,00	1.189.490.909,00	1.545.813.570,80	2.500.297.088,83	47,93
EKUITAS DANA							
EKUITAS DANA LANCAR							
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	90.314.589.294,60	133.079.517.264,66	108.069.721.305,93	61.627.791.773,80	98.606.771.903,83	-	(10,88)
Pendapatan yang Ditangguhkan	51.040.373,00	557.127.883,00	21.045.200,00	103.500.000,00	101.239.600,00	-	236,99
Cadangan Piutang	14.920.733.380,91	14.878.677.391,33	28.966.411.166,33	38.684.360.674,50	48.470.231.971,00	-	10,65
Cadangan Persediaan	9.365.252.830,00	9.561.575.473,00	11.367.697.931,00	6.857.291.226,71	9.368.411.587,75	-	(16,41)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(38.976.070.205,00)	(5.458.067.050,00)	(31.751.784.773,00)	(1.189.490.909,00)	(1.545.813.570,80)	-	45,89
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	75.675.545.673,51	152.618.830.961,99	116.673.090.830,26	106.083.452.766,01	155.000.841.491,78	-	3,03
EKUITAS DANA INVESTASI							
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	10.499.588.824,03	10.791.480.877,65	13.510.747.585,07	13.383.748.471,21	15.128.335.035,71	-	(11,99)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.538.774.477.609,25	1.610.829.836.779,58	1.819.184.182.446,74	1.934.232.832.943,99	2.166.005.595.513,64	-	(12,82)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	130.061.804.463,80	18.589.444.613,80	141.449.059.708,56	179.109.247.574,48	163.605.562.607,73	-	98,63
Jumlah ekuitas Dana Investasi	1.679.335.870.897,08	1.640.210.762.271,03	1.974.143.989.740,37	2.126.725.828.989,68	2.344.739.493.157,08	-	(12,80)
EKUITAS DANA CADANGAN							
JUMLAH EKUITAS DANA	1.755.011.416.570,59	1.792.829.593.233,02	2.090.817.080.570,63	2.232.809.281.755,69	2.499.740.334.648,86	1.420.445.923.866,37	(1,13)
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	1.794.994.623.791,59	1.800.291.496.168,02	2.122.569.582.947,63	2.233.998.772.664,69	2.501.286.148.219,66	1.422.946.220.955,20	(1,54)

Sumber : LRA dan Data diolah

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Tahun 2014, Kabupaten Lampung Timur memiliki aset senilai Rp.2,5 Trilyun, dengan tingkat pertumbuhan 8,85 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada Tahun 2014 mencapai Rp.2,166 trilyun dan rata-rata tumbuh 8,98 persen pertahun. Aset tetap ini meliputi 86,6 persen dari seluruh aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.



Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.2,5 Milyar. Dari Tahun 2010 hingga 2014, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah Tahun 2013 dan tertinggi Tahun 2010, karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 mencapai Rp.1,42 Trilyun, dan mengalami perlambatan dari 2010-2015 dengan rata-rata -1,13 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya, dan sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.35
Analisis Rasio Keuangan Daerah

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%	%
Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	289,27	2.145,31	467,45	9.018,39	10.127,14	2.786,75
Rasio Cepat (<i>quick ratio</i>)	265,85	2.017,17	431,64	8.441,90	9.521,09	2.439,12
Rasio total hutang terhadap total aset	2,23	0,41	1,50	0,05	0,06	0,18

Sumber : LRA dan Data diolah

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya



mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

Namun dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2011-2015 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Sedangkan untuk APBD Tahun 2015 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2009-2013 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2009-2013, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
 - b. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
 - c. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah.
 - d. Memantapkan kelembagaan.
 - e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
 - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
 - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
 - h. peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan



- i. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat daerah dan provinsi.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan.
 - a. Mengoptimalkan upaya instensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPh Pasal 21.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
 - c. Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD)

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Pengembangan usaha pertanian dengan wawasan bisnis yang menghasilkan nilai tambah dan daya saing, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan (irigasi, jalan usaha tani, lumbung, alat-alat pertanian dll), penyediaan benih/bibit unggul dan dukungan terhadap industri hilir hasil pertanian dan perikanan, pengawasan stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, serta pengembangan daerah-daerah sentra produksi unggulan;
2. Peningkatan dan pemeliharaan jalan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, dan prasarana dasar permukiman (drainase, persampahan, kelistrikan, dan jalan lingkungan), serta pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah;



3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan hingga jenjang pendidikan SLTA/kejuruan, pembangunan sekolah, ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas rusak, pemerataan distribusi guru, peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru, dan ketersediaan bahan ajar yang berkualitas, pengembangan saran dan prasarana, serta peningkatan pelayanan kesehatan, optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat, dan fasilitasi, pendampingan dan pengembangan kualitas para pencari kerja;
4. Peningkatan iklim investasi yang baik melalui peningkatan kerjasama perdagangan, penyiapan potensi sumber daya, sarana, dan prasarana, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan IPTEKS sistem produksi, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sentra-sentra industri potensial.
5. Peningkatan sinergi pembangunan perdesaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan penyandang kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
6. Peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi pelayanan publik, pemantapan pemahaman peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur daerah.
7. Peningkatan tata kehidupan sosial masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis melalui terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai perekat sosial, penerapan antisipasi dini dan penanganan konflik, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemahaman dan pengembangan apresiasi seni dan budaya daerah;
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penganggulangan bencana melalui pengendalian pencemaran lingkungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kapasitas adaptasi dampak perubahan iklim, antisipasi daerah rawan bencana, serta koordinasi dan kesiapan penanganan pasca bencana.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun. Tahun 2011, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 70,64 persen, turun menjadi 66,11 persen Tahun 2013, dan turun lagi menjadi 57,35 persen pada Tahun 2015. Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Lampung Timur masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kabupaten Lampung Timur digunakan untuk belanja pegawai. Perlu dipahami bahwa belanja pegawai sebagian besar untuk alokasi belanja aparatur bidang pendidikan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tabel 3.36
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
2011	741.995.324.731,00	1.050.325.733.583,00	70,64
2012	852.680.917.064,00	1.252.737.121.646,00	68,07
2013	934.305.084.481,00	1.413.275.163.144,00	66,11
2014	924.450.447.946,00	1.513.600.240.383,00	61,08
2015*	994.772.808.258,21	1.734.419.320.667,00	57,35

Sumber : LRA dan Data diolah

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data tersebut diatas diperoleh dari perhitungan tabel realisasi belanja pemenuhan aparatur di bawah ini:



Tabel 3.37
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG	629.334.880.782,00	683.802.507.835,00	777.912.583.956,00	798.684.384.013,00	869.415.532.130,00
Belanja gaji dan tunjangan	482.491.613.352,00	527.296.911.993,00	545.994.266.395,00	568.837.278.129,00	612.812.635.934,00
Belanja tambahan penghasilan	143.342.831.710,00	144.884.756.500,00	219.960.314.445,00	220.114.261.100,00	249.883.772.600,00
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.520.000.000,00	3.932.520.000,00	3.973.120.000,00	4.046.340.000,00	4.479.680.000,00
Biaya pemungutan pajak daerah	980.435.720,00	1.845.355.952,00	2.400.464.808,00	1.027.080.092,00	969.899.614,00
Insentif pemungutan pajak daerah	-	771.599.131,00	554.218.508,00	860.060.625,00	1.080.940.031,00
Insentif pemungutan retribusi daerah	-	210.364.259,00	251.699.800,00	123.364.067,00	188.603.951,00
Belanja penerimaan lainnya bagi pengelola keuangan daerah	-	4.861.000.000,00	4.778.500.000,00	3.676.000.000,00	-
BELANJA LANGSUNG	112.660.443.949,00	168.878.409.229,00	156.392.500.525,00	125.766.063.933,00	125.357.276.128,21
Belanja pegawai	32.393.292.355,00	42.028.433.000,00	44.274.655.549,00	44.293.392.300,00	46.820.166.517,00
Belanja honorarium PNS	26.692.277.600,00	35.519.120.500,00	40.545.414.349,00	40.576.395.700,00	39.800.710.350,00
Belanja uang lembur	2.152.589.020,00	2.952.412.500,00	2.565.631.200,00	2.509.326.600,00	2.630.340.500,00
Belanja tunjangan kesejahteraan	3.548.425.735,00	3.556.900.000,00	1.121.500.000,00	1.122.090.000,00	1.111.180.000,00
Belanja pegawai BLUD	-	-	42.110.000,00	85.580.000,00	3.277.935.667,00
Belanja barang dan jasa	60.398.330.886,00	72.773.156.832,00	64.415.230.431,00	53.715.490.756,00	59.828.929.494,00
Belanja premi asuransi	5.554.368.621,00	12.147.656.411,00	5.825.315.371,00	388.750.458,00	3.309.396.410,00
Belanja makanan dan minuman	11.085.749.355,00	14.067.206.320,00	14.256.696.500,00	14.568.797.313,00	15.053.395.852,00
Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.732.048.800,00	2.315.054.300,00	2.387.986.864,00	2.614.910.000,00	893.280.000,00
Belanja pakaian kerja	1.248.157.500,00	1.332.486.500,00	1.306.063.500,00	1.350.132.000,00	722.754.000,00
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.928.078.500,00	2.377.056.250,00	2.561.456.000,00	2.109.333.900,00	1.074.580.000,00
Belanja perjalanan dinas	34.273.127.610,00	35.065.159.851,00	33.324.786.696,00	26.723.730.942,00	30.889.291.232,00
Belanja beasiswa pendidikan PNS	277.500.000,00	808.250.000,00	373.250.000,00	339.587.500,00	369.760.000,00
Belanja kursus, pelatihan, bimtek PNS	4.209.300.500,00	4.660.287.200,00	4.065.675.500,00	5.620.248.643,00	7.516.472.000,00
Belanja pemulangan pegawai	90.000.000,00	-	314.000.000,00	-	-
Belanja Modal	19.868.820.708,00	54.076.819.397,00	47.702.614.545,00	27.757.180.877,00	18.708.180.117,21
Belanja modal pengadaan alat-alat berat	113.700.000,00	3.194.900.000,00	264.880.000,00	373.508.000,00	-
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	4.983.096.000,00	3.050.266.937,00	6.457.036.800,00	8.223.210.450,00	2.343.330.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor	95.700.000,00	-	90.120.000,00	82.500.000,00	3.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atas air bermotor	-	9.950.000,00	214.000.000,00	139.950.000,00	-
Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	13.450.000,00	135.445.000,00	12.059.000,00	187.558.000,00	143.200.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan kantor	640.878.800,00	352.811.700,00	325.146.000,00	420.447.000,00	654.065.787,00
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	419.945.350,00	853.278.000,00	1.570.862.390,00	1.424.806.000,00	884.058.181,00
Belanja modal pengadaan komputer	2.707.511.370,00	5.069.171.850,00	4.409.971.000,00	3.651.090.000,00	2.933.603.954,00
Belanja modal pengadaan meubeleur	1.136.551.380,00	3.864.280.250,00	3.466.028.000,00	3.253.077.600,00	3.712.501.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan dapur	1.190.671.400,00	197.428.000,00	238.384.800,00	196.028.000,00	209.565.000,00
Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	1.033.915.000,00	1.114.187.610,00	1.206.357.000,00	1.060.418.305,00	1.655.494.400,00
Belanja modal pengadaan alat-alat studio	481.366.000,00	838.570.750,00	1.093.999.000,00	887.322.000,00	540.525.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	126.642.000,00	215.296.500,00	123.728.250,00	76.795.002,00	106.345.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	4.700.000,00	69.089.000,00	91.045.000,00	109.545.000,00	6.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	6.505.384.788,00	2.425.905.900,00	2.297.520.005,00	182.500.000,00	5.401.686.795,21
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium	410.358.620,00	32.686.237.900,00	25.811.277.300,00	7.478.375.520,00	114.805.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan	4.950.000,00	-	30.200.000,00	10.050.000,00	-
TOTAL	741.995.324.731,00	852.680.917.064,00	934.305.084.481,00	924.450.447.946,00	994.772.808.258,21

Sumber : LRA dan Data diolah

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.38
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tahun Anggaran	Pendapatan	Belanja
	Realisasi	Realisasi
2010	901.048.235.725,29	919.395.962.073,00
2011	1.093.090.661.553,06	1.049.575.733.583,00
2012	1.225.727.325.687,27	1.248.733.644.646,00
2013	1.366.829.394.726,87	1.410.275.163.144,00
2014	1.550.572.554.248,03	1.512.492.030.233,00
2015	1.673.230.554.391,56	1.733.408.499.651,80
Jumlah	7.810.498.726.332,08	7.873.881.033.330,80

Sumber : LRA dan Data diolah

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan dari Tahun 2010 sampai dengan 2013 terus meningkat, walaupun dengan belanja yang mengalami peningkatan juga. Sebagai catatan pada Tahun 2010 dan 2015 realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Untuk mengetahui defisit riil Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.39
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Timur

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi	901.048.235.725,29	1.093.090.661.553,06	1.225.727.325.687,27	1.366.829.394.726,87	1.550.572.554.248,03	1.673.230.554.391,56
Belanja Daerah	919.395.962.073,00	1.049.575.733.583,00	1.248.733.644.646,00	1.410.275.163.144,00	1.512.492.030.233,00	1.733.408.499.651,80
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	750.000.000,00	4.003.477.000,00	3.000.000.000,00	1.108.210.150,00	1.010.821.016,00
Defisit Riil	(20.347.726.347,71)	42.764.927.970,06	(27.009.795.958,73)	(46.445.768.417,13)	36.972.313.865,03	(61.188.766.276,24)

Sumber : LRA dan Data diolah

Berdasarkan Tabel di atas selama kurun waktu 2010-2015, APBD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2011 dan 2014 mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. Namun demikian, pada Tahun 2010, 2012, 2013, dan 2015 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.



Tabel 3.40
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Uraian	Proporsi dari Defisit Riil					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	102.693.920.155,31	90.314.589.294,60	135.083.353.149,66	108.073.557.190,93	61.637.579.319,80	98.436.116.904,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber : LRA dan Data diolah

Tabel 3.40
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Realisasi Pendapatan Daerah	901.048.235.725,29	1.093.090.661.553,06	1.225.727.325.687,27	1.366.829.394.726,87	1.550.572.554.248,03	1.673.230.554.391,56
Dikurangi Realisasi :						
Belanja Daerah	919.395.962.073,00	1.049.575.733.583,00	1.248.733.644.646,00	1.410.275.163.144,00	1.512.492.030.233,00	1.733.408.499.651,80
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	750.000.000,00	4.003.477.000,00	3.000.000.000,00	1.108.210.150,00	1.010.821.016,00
Defisit Riil	(20.347.726.347,71)	42.764.927.970,06	(27.009.795.958,73)	(46.445.768.417,13)	36.972.313.865,03	(61.188.766.276,24)
Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan						
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	102.693.920.155,31	90.314.589.294,60	135.083.353.149,66	108.073.557.190,93	61.637.579.319,80	98.436.116.904,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
Total Realisasi Penerimaan	102.693.920.155,31	90.314.589.294,60	135.083.353.149,66	108.073.557.190,93	61.637.579.319,80	98.436.116.904,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	82.346.193.807,60	133.079.517.264,66	108.073.557.190,93	61.627.788.773,80	98.609.893.184,83	37.247.350.627,76

Sumber : LRA dan Data diolah

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2010-2015 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar, sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil.

Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Lampung Timur sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kabupaten Lampung Timur dapat diperkecil.



3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan daerah dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.40
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Uraian	Data Tahun Dasar (Rp.) 2016	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
			2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung	955.665.096.470,00		1.296.204.719.034,37	1.378.246.143.648,94	1.465.633.587.004,03	1.558.725.466.160,75	1.657.904.886.447,98
Belanja gaji dan tunjangan	632.078.206.299,00	6,19	632.078.206.299,00	671.182.690.708,55	712.706.433.820,10	756.799.106.771,27	803.619.640.333,37
Belanja tambahan penghasilan	316.660.469.000,00	5,00	332.493.492.450,00	349.118.167.072,50	366.574.075.426,13	384.902.779.197,43	404.147.918.157,30
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.565.500.000,00	6,00	4.839.430.000,00	5.129.795.800,00	5.437.583.548,00	5.763.838.560,88	6.109.668.874,53
Biaya pemungutan pajak daerah	1.000.000.000,00	3,00	1.030.000.000,00	1.060.900.000,00	1.092.727.000,00	1.125.508.810,00	1.159.274.074,30
Insentif pemungutan pajak daerah	1.100.000.000,00	3,00	1.133.000.000,00	1.166.990.000,00	1.201.999.700,00	1.238.059.691,00	1.275.201.481,73
Insentif pemungutan retribusi daerah	260.921.171,00	3,00	268.748.806,13	276.811.270,31	285.115.608,42	293.669.076,68	302.479.148,98
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	300.335.038.406,70	8,00	324.361.841.479,24	350.310.788.797,58	378.335.651.901,38	408.602.504.053,49	441.290.704.377,77
Belanja Langsung	55.993.734.950,00		59.924.495.396,50	64.131.528.974,26	68.634.286.792,45	73.453.592.736,92	78.611.740.684,41
Belanja Jasa Kantor	55.620.434.950,00	7,00	59.513.865.396,50	63.679.835.974,26	68.137.424.492,45	72.907.044.206,92	78.010.537.301,41
Belanja beasiswa pendidikan PNS	373.300.000,00	10,00	410.630.000,00	451.693.000,00	496.862.300,00	546.548.530,00	601.203.383,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	1.000.000.000,00	2,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00
TOTAL	1.012.658.831.420,00		1.357.129.214.430,87	1.443.377.672.623,19	1.535.287.873.796,48	1.633.219.458.897,67	1.737.577.835.132,39

Sumber : LRA dan Data diolah

3.3.2 Proyeksi Dana

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini memperhatikan pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dari Tahun 2010 sampai dengan 2015 serta berpedoman pada proyeksi pendapatan negara dan Provinsi Lampung. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.41
Proyeksi Pendapatan Daerah

URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	1.863.469.597,773	2.086.761.787.377,63	2.349.136.646.075,86	2.659.017.399.785,01	3.026.801.457.714,50	3.465.337.771.304,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.081.591.339,87	120.935.286.195,00	144.704.538.311,25	173.164.057.899,05	207.242.217.521,54	248.051.589.543,75
Pajak Daerah	30.103.739.252,26	36.124.487.102,71	43.349.384.523,25	52.019.261.427,90	62.423.113.713,48	74.907.736.456,17
Retribusi Daerah	5.093.671.784,95	5.857.722.552,69	6.736.380.935,60	7.746.838.075,94	8.908.863.787,33	10.245.193.355,43
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.527.994.867,31	2.925.654.017,18	3.385.865.825,49	3.918.469.962,92	4.534.853.901,99	5.248.196.389,65
Lain-Lain PAD yang Sah	63.356.185.435,36	76.027.422.522,43	91.232.907.026,91	109.479.488.432,30	131.375.386.118,75	157.650.463.342,51
DANA PERIMBANGAN	1.239.844.373.433,12	1.319.893.110.107,28	1.405.348.441.621,71	1.496.581.792.813,81	1.593.990.292.500,23	1.697.998.559.089,04
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	93.467.830.923,12	95.337.187.541,58	97.243.931.292,41	99.188.809.918,26	101.172.586.116,63	103.196.037.838,96
Dana Alokasi Umum	1.043.027.646.510,00	1.116.039.581.765,70	1.194.162.352.489,30	1.277.753.717.163,55	1.367.196.477.365,00	1.462.900.230.780,55
Dana Alokasi Khusus	103.348.896.000,00	108.516.340.800,00	113.942.157.840,00	119.639.265.732,00	125.621.229.018,60	131.902.290.469,53
LAIN-LAIN PENDAPATAN	522.543.633.000,30	645.933.391.075,35	799.083.666.142,90	989.271.549.072,14	1.225.568.947.692,73	1.519.287.622.671,35
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	72.461.501.750,30	83.330.727.012,85	95.830.336.064,77	110.204.886.474,49	126.735.619.445,66	145.745.962.362,51
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	450.082.131.250,00	562.602.664.062,50	703.253.330.078,13	879.066.662.597,66	1.098.833.328.247,07	1.373.541.660.308,84

Sumber : LRA dan Data diolah

Setelah dilakukan penyesuaian dengan APBD 2016, proyeksi pendapatan untuk Tahun 2017 menjadi sebesar Rp.2,176 Trilyun, dan diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan akan menjadi Rp.3,289 Trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Tabel 3.42
Proyeksi Pendapatan setelah disesuaikan dengan APBD T.A. 2016

URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	2.086.989.858.532,00	2.095.485.747.463,63	2.276.153.008.674,36	2.476.731.107.179,07	2.722.662.153.004,05	2.995.662.680.690,04
PENDAPATAN ASLI DAERAH	106.785.510.887,00	109.594.526.614,74	121.247.483.951,51	134.142.022.536,25	148.410.691.900,31	164.200.219.582,93
Pajak Daerah	28.650.104.897,00	29.223.106.994,94	32.145.417.694,43	35.359.959.463,88	38.895.955.410,27	42.785.550.951,29
Retribusi Daerah	7.777.662.997,00	7.933.216.256,94	8.726.537.882,63	9.599.191.670,90	10.559.110.837,99	11.615.021.921,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.027.191.993,00	3.087.735.832,86	3.396.509.416,15	3.736.160.357,76	4.109.776.393,54	4.520.754.032,89
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	67.330.551.000,00	69.350.467.530,00	76.979.018.958,30	85.446.711.043,71	94.845.849.258,52	105.278.892.676,96
DANA PERIMBANGAN	1.700.727.453.901,00	1.701.305.657.830,01	1.859.236.539.183,21	2.005.792.828.192,89	2.190.431.272.484,53	2.396.125.096.260,81
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	57.820.392.901,00	58.398.596.830,01	60.734.540.703,21	103.856.064.602,49	177.593.870.470,26	303.685.518.504,14
DAU	1.081.165.467.000,00	1.081.165.467.000,00	1.124.412.085.680,00	1.214.365.052.534,40	1.311.514.256.737,15	1.377.089.969.574,01
DAK	561.741.594.000,00	561.741.594.000,00	674.089.912.800,00	687.571.711.056,00	701.323.145.277,12	715.349.608.182,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN	279.476.893.744,00	284.585.563.018,88	295.668.985.539,64	336.796.256.449,93	383.820.188.619,21	435.337.364.846,30
Pendapatan Hibah	1.696.930.000,00	1.250.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.210.000.000,00	1.331.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	106.843.752.744,00	108.980.627.798,88	113.339.852.910,84	132.607.627.905,68	155.150.924.649,64	181.526.581.840,08
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	170.936.211.000,00	174.354.935.220,00	181.329.132.628,80	203.088.628.544,26	227.459.263.969,57	252.479.783.006,22

Sumber : LRA dan Data diolah

Grafik 3.4
Proyeksi Pendapatan Daerah



Sumber : LRA dan Data diolah

2. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama Tahun 2017-2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.43

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama setelah Disesuaikan dengan APBD Tahun Anggaran 2016

Uraian	Data Tahun Dasar (Rp.) 2016	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp.)				
			2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung	955.665.096.470,00		1.296.204.719.034,37	1.378.246.143.648,94	1.465.633.587.004,03	1.558.725.466.160,75	1.657.904.886.447,98
Belanja gaji dan tunjangan	632.078.206.299,00	6,19	632.078.206.299,00	671.182.690.708,55	712.706.433.820,10	756.799.106.771,27	803.619.640.333,37
Belanja tambahan penghasilan	316.660.469.000,00	5,00	332.493.492.450,00	349.118.167.072,50	366.574.075.426,13	384.902.779.197,43	404.147.918.157,30
Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.565.500.000,00	6,00	4.839.430.000,00	5.129.795.800,00	5.437.583.548,00	5.763.838.560,88	6.109.668.874,53
Biaya pemungutan pajak daerah	1.000.000.000,00	3,00	1.030.000.000,00	1.060.900.000,00	1.092.727.000,00	1.125.508.810,00	1.159.274.074,30
Insentif pemungutan pajak daerah	1.100.000.000,00	3,00	1.133.000.000,00	1.166.990.000,00	1.201.999.700,00	1.238.059.691,00	1.275.201.481,73
Insentif pemungutan retribusi daerah	260.921.171,00	3,00	268.748.806,13	276.811.270,31	285.115.608,42	293.669.076,68	302.479.148,98
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	300.335.038.406,70	8,00	324.361.841.479,24	350.310.788.797,58	378.335.651.901,38	408.602.504.053,49	441.290.704.377,77
Belanja Langsung	55.993.734.950,00		59.924.495.396,50	64.131.528.974,26	68.634.286.792,45	73.453.592.736,92	78.611.740.684,41
Belanja Jasa Kantor	55.620.434.950,00	7,00	59.513.865.396,50	63.679.835.974,26	68.137.424.492,45	72.907.044.206,92	78.010.537.301,41
Belanja beasiswa pendidikan PNS	373.300.000,00	10,00	410.630.000,00	451.693.000,00	496.862.300,00	546.548.530,00	601.203.383,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	1.000.000.000,00	2,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00
TOTAL	1.012.658.831.420,00		1.357.129.214.430,87	1.443.377.672.623,19	1.535.287.873.796,48	1.633.219.458.897,67	1.737.577.835.132,39

Sumber : Data diolah

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp.1,012 trilyun menjadi sebesar 1,296 trilyun pada Tahun 2021. Belanja Tidak Langsung sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.

Grafik 3.5
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama



Sumber : Data diolah

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 daya serap anggaran pada belanja langsung rata-rata hanya mampu menyerap 88,41% anggaran. Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya efisiensi, yaitu sebesar 11,59%. Beberapa data diantaranya adalah sebagai berikut :

- pada jenis belanja pegawai daya serap 90,86%
- pada jenis belanja barang dan jasa 88,30%
- pada jenis belanja modal 87,60%

berdasarkan data tersebut di atas SILPA akan terjadi dan diskenariokan sebesar 4% pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasikan di atas 4%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, selengkapny secara indikatif tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.44
 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur setelah disesuaikan dengan APBD T.A. 2016

Uraian	Proyeksi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	2.095.485.747.463,63	2.276.153.008.674,36	2.476.731.107.179,07	2.722.662.153.004,05	2.995.662.680.690,04
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	20.869.898.585,32	21.163.556.460,49	22.973.165.651,35	24.997.042.728,30	27.476.591.957,32
Total kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	2.116.355.646.048,95	2.297.316.565.134,85	2.499.704.272.830,42	2.747.659.195.732,35	3.023.139.272.647,36

Sumber : Data diolah

Grafik 3.5
 Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah



Sumber : Data diolah

3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam berbagai Kelompok Prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/ misi daerah.
- program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani



sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, hibah, bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berdasarkan hal tersebut, Alokasi dan Kerangka Pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.45
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2017-2021 setelah disesuaikan dengan APBD T.A. 2016

Jenis Dana	Alokasi										
	%	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
Prioritas I	55,55		1.357.129.214.430,87	54,46	1.443.377.672.623,19	53,30	1.535.287.873.796,48	51,70	1.633.219.458.897,67	50,11	1.737.577.835.132,39
Belanja Tidak Langsung		955.665.096.470,00	1.296.204.719.034,37		1.378.246.143.648,94		1.465.633.587.004,03		1.558.725.466.160,75		1.657.904.886.447,98
Belanja Langsung		55.993.734.950,00	59.924.495.396,50		64.131.528.974,26		68.634.286.792,45		73.453.592.736,92		78.611.740.684,41
Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.020.000.000,00		1.040.400.000,00		1.061.208.000,00
Prioritas II	28,35	559.755.920.345,91	692.574.048.268,11	28,01	742.249.360.863,81	27,51	792.534.504.849,90	27,19	858.964.329.834,89	27,00	935.981.481.428,88
Prioritas III	16,10	330.681.700.572,00	393.437.190.686,40	17,53	464.504.896.666,82	19,19	552.797.204.446,01	21,11	666.755.983.688,25	22,89	793.656.957.953,77
Belanja Hibah		30.756.250.000,00	33.831.875.000,00		36.876.743.750,00		44.252.092.500,00		61.952.929.500,00		74.343.515.400,00
Belanja Bantuan Sosial		2.052.250.000,00	2.257.475.000,00		2.483.222.500,00		2.731.544.750,00		3.004.699.225,00		3.305.169.147,50
Belanja Bantuan Keuangan		296.873.200.572,00	356.247.840.686,40		423.934.930.416,82		504.482.567.196,01		600.334.254.963,25		714.397.763.406,27
Belanja Tidak Terduga		1.000.000.000,00	1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		1.464.100.000,00		1.610.510.000,00
Total	100		2.443.140.453.385,38	100	2.650.131.930.153,82	100	2.880.619.583.092,39	100	3.158.939.772.420,81	100	3.467.216.274.515,05

Sumber : Data diolah



Tabel 3.46
 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur
 Tahun 2017-2021 setelah disesuaikan dengan APBD T.A. 2016

No	Uraian	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2.116.355.646.048,95	2.297.316.565.134,85	2.499.704.272.830,42	2.747.659.195.732,35	3.023.139.272.647,36
	PENDAPATAN	2.095.485.747.463,63	2.276.153.008.674,36	2.476.731.107.179,07	2.722.662.153.004,05	2.995.662.680.690,04
	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	20.869.898.585,32	21.163.556.460,49	22.973.165.651,35	24.997.042.728,30	27.476.591.957,32
B	BELANJA	2.115.355.646.048,95	2.296.316.565.134,85	2.498.684.272.830,42	2.746.618.795.732,36	3.022.078.064.647,36
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.362.848.319.435,40	1.489.935.550.247,86	1.637.515.297.240,24	1.814.221.708.217,83	2.007.534.185.318,98
	PRIORITAS I	636.917.636.299,00	676.312.486.508,55	718.144.017.368,10	762.562.945.332,15	809.729.309.207,91
	Belanja Gaji dan Tunjangan	632.078.206.299,00	671.182.690.708,55	712.706.433.820,10	756.799.106.771,27	803.619.640.333,37
	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.839.430.000,00	5.129.795.800,00	5.437.583.548,00	5.763.838.560,88	6.109.668.874,53
	PRIORITAS III	725.930.683.136,40	813.623.063.739,32	919.371.279.872,14	1.051.658.762.885,68	1.197.804.876.111,07
	Belanja tambahan penghasilan	332.493.492.450,00	349.118.167.072,50	366.574.075.426,13	384.902.779.197,43	404.147.918.157,30
	Belanja Hibah	33.831.875.000,00	36.876.743.750,00	44.252.092.500,00	61.952.929.500,00	74.343.515.400,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.257.475.000,00	2.483.222.500,00	2.731.544.750,00	3.004.699.225,00	3.305.169.147,50
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes	356.247.840.686,40	423.934.930.416,82	504.482.567.196,01	600.334.254.963,25	714.397.763.406,27
	Belanja Tidak Terduga	1.100.000.000,00	1.210.000.000,00	1.331.000.000,00	1.464.100.000,00	1.610.510.000,00
	BELANJA LANGSUNG	752.507.326.613,55	806.381.014.886,99	861.168.975.590,18	932.397.087.514,52	1.014.543.879.328,38
	PRIORITAS I	59.933.278.345,44	64.131.654.023,18	68.634.470.740,28	73.432.757.679,63	78.562.397.899,50
	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon, dan sejenisnya)	59.513.865.396,50	63.679.835.974,26	68.137.424.492,45	72.907.044.206,92	78.010.537.301,41
	Belanja beasiswa pendidikan PNS	419.412.948,94	451.818.048,92	497.046.247,83	525.713.472,71	551.860.598,09
	PRIORITAS II	692.574.048.268,11	742.249.360.863,81	792.534.504.849,90	858.964.329.834,89	935.981.481.428,88
	Program Pencapaian Visi dan Misi	692.574.048.268,11	742.249.360.863,81	792.534.504.849,90	858.964.329.834,89	935.981.481.428,88
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00
	PRIORITAS I	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00
	Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00
	Surplus/(Defisit) = A-(B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	Penerimaan Piutang	0	0	0	0	0
	SILPA					

Sumber : Data diolah

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD.

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.



RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan sasaran pembangunan jangka panjang daerah sebagai implementasi visi dan misi Kabupaten Lampung Timur yang disusun dalam 4 (empat) tahapan sesuai dengan periode dalam RPJMD.

Pada akhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2011-2015, upaya pembangunan daerah melalui prioritas-prioritas pembangunan telah menghasilkan berbagai capaian yang umumnya berada pada jalur yang diharapkan. Meskipun demikian, beberapa hal juga belum dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan dan memerlukan percepatan dalam memenuhi indikator kinerja yang ada.

1. Dalam melaksanakan Misi 1 dengan prioritas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, pemuda dan olah raga, dan pemberdayaan masyarakat telah dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,10 (2012) menjadi 66,42 (2014).
 - a. di bidang pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) telah dapat ditingkatkan dari 93,74% (2012) menjadi 95,07% (2014). Angka rata-rata lama sekolah berhasil melampaui target dari 7,01 tahun menjadi 7,16 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD melampaui target dari 102,21 menjadi 112,91; APK SLTP tercapai 82,53%; dan APK SLTA tercapai 68,56%; Angka Partisipasi Murni (APM) SD tercapai 98,81%; APM SLTP tercapai 72%; APM SLTA tercapai 54,29%.
 - b. di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 68,94 (2012) menjadi 69,33 pada Tahun 2014. Angka Kesakitan masyarakat dapat diturunkan 13,65% menjadi 12,9%. Rasio sarana kesehatan yang meningkat adalah Poskesdes dari 8,93 (2010) menjadi 26,11 (2014). Sedangkan rasio tenaga kesehatan pada periode 2010-2014 menunjukkan penurunan.
 - c. di bidang keluarga berencana, jumlah Keluarga Prasejahtera dapat diturunkan meskipun belum mencapai target, demikian juga dengan Keluarga Sejahtera I jumlahnya dapat diturunkan. Sementara jumlah Keluarga Sejahtera II dan III dapat ditingkatkan dengan capaian 99,47%.
 - d. di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) terjadi peningkatan dari 4,21% (2011) menjadi 5,00% (2014).
 - e. upaya penurunan angka ketergantungan penduduk yang tidak bekerja terhadap penduduk yang bekerja belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat ketergantungan penduduk yang tidak bekerja masih sekitar 50,5%, atau tercapai sekitar 98,62%.



2. Dalam melaksanakan Misi 2 dengan prioritas pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perdagangan, industri, UMKM, kepariwisataan, dan pertambangan, yaitu:
 - a. PDRB terjadi peningkatan rata-rata 5,18% pertahun dan melampaui target yaitu 100,2%. Laju pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan yaitu hanya tercapai sekitar 83,89%.
 - b. PDRB perkapita penduduk terdapat peningkatan rata-rata 11,52% pertahun dengan tingkat capaian 66,50%.
 - c. kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB melampaui target sebesar 114,23%;
 - d. di subsektor perkebunan hanya produksi kelapa sawit yang menunjukkan melampaui target sekitar 215,47%;
 - e. di subsektor peternakan produksi daging dan telur melampaui target;
 - f. kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tercapai 97,79%
 - g. kontribusi sektor pertambangan cenderung menurun sekitar 5,10 per tahun;
 - h. kunjungan wisatawan ke Lampung Timur menurun.
3. Dalam melaksanakan Misi 3, sasaran yang ingin dicapai adalah perkembangan ekspor non migas, peningkatan investasi, tingkat keamanan dan ketertiban, serta perkembangan agroindustri, dengan capaian sebagai berikut :
 - a. Jenis industri yang memiliki nilai produktivitas tertinggi peningkatannya adalah Industri Logam Mesin dan Elektronik (ILME) rata-rata sebesar 22,56% pertahun. Sedangkan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) rata-rata 17,53% pertahun dan Industri Kimia dan Aneka rata-rata 14,49% pertahun.
 - b. terjadi peningkatan investasi rata-rata 53,52% pertahun dan investasi di bidang industri agro rata-rata meningkat 9,20% pertahun.
 - c. Penurunan angka kriminalitas tidak mencapai target, pada Tahun 2012 angka kriminalitas sebanyak 212 kasus, pada Tahun Tahun 2013 meningkat menjadi 541 kasus dan pada Tahun 2014 kembali meningkat menjadi 727 kasus.
4. Dalam melaksanakan Misi 4, dengan prioritas meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan capaian sebagai berikut :
 - a. di bidang perencanaan pembangunan, seluruh dokumen perencanaan dapat disusun seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. di bidang keuangan daerah, pendapatan daerah meningkat rata-rata 14,60% per tahun. Pertumbuhan PAD meningkat rata-rata 39,63% pertahun lebih tinggi daripada sumber pendapatan daerah lainnya.
 - c. PNS yang tamat SD (golongan I) terus mengalami penurunan rata-rata sekitar 23%, demikian juga tingkat SLTP dan SLTA terus mengalami penurunan. Ini menunjukkan tren yang baik, sementara jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang



- ditamatkan seperti Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) terus meningkat rata-rata 6% dan 16%.
- d. dari berbagai jenjang pendidikan PNS Lampung Timur hingga tahun 2014 didominasi PNS dengan jenjang pendidikan S1/D4 sebesar 45,5%, D2 (Akta II) sebesar 25,63% dan SLTA sebanyak 16,16%.
5. Dalam melaksanakan Misi 5 di sektor kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan dan keagamaan:
- di bidang kesejahteraan sosial angka kemiskinan terjadi penurunan dari 19,66% (2011) menjadi 17,05% (2014);
 - tingkat partisipasi pilkada pada Tahun 2015 sebesar 60,89%.
6. Dalam melaksanakan Misi 6 di sektor infrastruktur, prasarana dan sarana, perhubungan, dan lingkungan hidup:
- jalan kewenangan kabupaten kurang mantap (tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 42,58%), tidak mencapai target yang ditetapkan.
 - Jumlah terminal yang berfungsi dengan baik 1, tidak mencapai target 2 terminal.
 - jumlah pengguna air bersih dari PDAM relatif tetap;
 - degradasi lahan khususnya eks lokasi pertambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah).

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan.

- Rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,16 tahun;
- Angka buta huruf masih cukup tinggi yaitu 4,93%;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan;
- Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan;
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun baru mencapai 99,7 persen;
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 13-15 tahun baru mencapai 95,97 persen.
- Rasio guru telah ideal, namun distribusi belum merata.

2. Kesehatan.

- ▮ Angka Harapan Hidup perlu terus ditingkatkan.
- ▮ Belum terakreditasinya pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit;



- Ñ Meningkatnya kasus kematian bayi yaitu 80 kasus pada Tahun 2013 menjadi 91 kasus (2015);
- Ñ Masih tingginya kasus kematian ibu (12 kasus) pada Tahun 2014;
- Ñ Prevalensi balita kurang gizi mencapai 18,8%;
- Ñ Rasio Puskesmas 3,4 per 100.000 penduduk
- Ñ Rasio dokter 8 per 100.000 penduduk;
- Ñ Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan baru mencapai 49%;
- Ñ Insiden rate kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk mencapai 26,4%;
- Ñ Perlu dilaksanakan penatalaksanaan kasus kronis filariasis;
- Ñ Perlu upaya dalam rangka menurunkan prevalensi hipertensi.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Ñ 146,13 km atau 7,76% jalan kabupaten dalam kondisi berupa jalan tanah;
- Ñ 573,66 km atau 30,45% jalan kabupaten dalam kondisi berupa jalan batu/onderlaagh.
- Ñ Kondisi mantap jalan kabupaten baru mencapai 42,58% atau sepanjang 801,51 km;
- Ñ Jalan kabupaten sepanjang 1.082,66 km dalam kondisi rusak sedang dan berat;
- Ñ 1.405,63 km jalan desa dalam kondisi berupa jalan tanah;
- Ñ 2.211,69 km jalan desa dalam kondisi berupa jalan batu/onderlaagh
- Ñ Drainase permukiman belum tersedia secara optimal;
- Ñ Trotoar kawasan perkotaan belum tersedia secara merata;
- Ñ Diperlukan pembangunan jembatan penghubung di beberapa lokasi;
- Ñ Perlu upaya meningkatkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Ñ Belum optimalnya infrastruktur bidang sanitasi bagi masyarakat;
- Ñ 8 desa di 5 kecamatan merupakan kawasan kumuh yang perlu penanganan;
- Ñ Belum optimalnya ketersediaan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lain sebagainya;
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan rata-rata luas lantai rumah tinggal.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Angka kriminalitas relatif tinggi dan berkencenderungan meningkat, dimana pada Tahun 2014 terjadi 727 kasus kriminalitas;
- Perlu upaya dalam meningkatkan cakupan penegakan perda dan perbup;
- Siskamling belum berjalan secara optimal di setiap tingkatan wilayah;

6. Sosial

- Penduduk miskin mencapai 170,73 ribu jiwa



- Kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
- Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Perlu upaya dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
- Perlu upaya dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka;
- Perlu upaya dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui penyediaan lembaga pelatihan tenaga kerja;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan di beberapa desa;
- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih belum optimal;

3. Pangan

- Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;

4. Pertanahan

- Pembangunan infrastruktur fisik seringkali terkendala dengan ketersediaan lahan;
- Tanah milik pemerintah daerah belum seluruhnya bersertifikat;
- Konflik di bidang pertanahan masih sering terjadi di masyarakat;

5. Lingkungan Hidup

- Ñ Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
- Ñ Ancaman terhadap degradasi lingkungan hidup akibat ketidakdisiplinan dalam pemanfaatan ruang;
- Ñ Peningkatan resiko bencana alam akibat ketidakdisiplinan pemanfaatan lahan;

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Penduduk yang memiliki KTP elektronik baru mencapai 75%;
- Penduduk yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 75%;
- Diperlukan pelayanan administrasi kartu identitas untuk anak;

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Badan usaha milik desa perlu ditingkatkan jumlahnya;
- Kompetensi kader posyandu perlu ditingkatkan.
- Aparatur desa belum maksimal dalam pemahaman dan implementasi UU Desa;
- Belum maksimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa, terutama dalam akuntabilitas dana desa;
- Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses dan memperluas ekonomi perdesaan;
- Belum seluruh desa menggunakan *e-budgeting*;

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Ñ Perlu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,97.
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan prevalensi pemakaian alat kontrasepsi;
- Ñ Perlu upaya dalam menurunkan angka *unmeet need*.

9. Perhubungan

- Ñ Jumlah kecelakaan lalu lintas akibat berbagai faktor relatif tinggi.
- Ñ Infrastruktur bidang transportasi belum tersedia secara berkualitas dan merata;

10. Komunikasi dan Informatika

- Ñ Publikasi terhadap capaian pembangunan daerah belum optimal;
- Ñ Perlu adanya sarana komunikasi radio milik pemerintah daerah;
- Ñ Pemanfaatan teknologi informasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal;

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Ñ Perlunya peningkatan jumlah koperasi aktif.
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan jumlah UMKM.

12. Penanaman Modal

- Ñ Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum optimal;
- Ñ Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- Peran serta pemuda dalam pembangunan perlu ditingkatkan;

- Pelatihan dan pembinaan terhadap pemuda guna menumbuhkan semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan perlu ditingkatkan;
- Kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani perlu ditingkatkan salah satunya melalui pemasyarakatan olahraga;
- Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda perlu digalakkan;
- Peningkatan prestasi di bidang olah raga;
- Pembangunan sarana/fasilitas olahraga skala daerah perlu segera dilaksanakan.

14. Kebudayaan

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya.

15. Perpustakaan

- Sarana dan prasarana perpustakaan daerah belum maksimal;
- Jumlah perpustakaan desa perlu ditingkatkan;
- Sarana dan prasarana perpustakaan desa belum maksimal;
- Budaya literasi masyarakat perlu ditingkatkan;
- Jumlah pengunjung perpustakaan daerah belum optimal;

16. Kearsipan

- Database informasi kearsipan belum optimal dilaksanakan;
- Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip daerah belum maksimal;
- Pengelolaan administrasi kearsipan PD belum optimal;



C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

- Perlu upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
- Perlu upaya dalam meningkatkan konsumsi ikan perkapita

2. Pariwisata

- Perlu upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- Kondisi jalan menuju destinasi wisata belum mantap;
- Ketersediaan sarana dan prasarana objek wisata belum maksimal;
- Promosi bidang kepariwisataan perlu ditingkatkan;

3. Pertanian

- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan produksi sektor peternakan
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan ketersediaan air dalam pengelolaan pertanian.
- Ñ Ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian tidak mencukupi;
- Ñ Kemandirian petani dalam penyediaan benih dan pupuk belum optimal;
- Ñ Lemahnya akses petani dan nelayan terhadap permodalan, teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- Ñ Pengembangan komoditas unggulan dan peremajaan tanaman tua;
- Ñ Pengendalian hama penyakit tanaman belum terpadu dan maksimal;
- Ñ Keterbatasan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian;
- Ñ Sarana dan prasarana aparatur bidang pertanian pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan penyuluhan belum maksimal;
- Ñ Ancaman gangguan hewan liar (gajah) khususnya di wilayah desa penyangga Taman Nasional Way Kambas.

4. Perdagangan

- Pengawasan kemetrologian perlu ditingkatkan;
- Upaya pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya perlu ditingkatkan.
- Pemberdayaan potensi pasar daerah perlu ditingkatkan;
- Pengawasan pupuk bersubsidi;
- Upaya penataan pasar daerah perlu dioptimalkan;
- Pengelolaan aset pasar perlu ditingkatkan;
- Retribusi pasar daerah belum optimal.

5. Perindustrian

- Pengembangan sentra-sentra industri potensial berbasis produk unggulan daerah perlu ditingkatkan;
- Pelayanan akses sarana informasi perindustrian perlu ditingkatkan;
- Pembinaan terhadap IKM dirasa masih kurang;
- Perlu ditingkatkan pelayanan fasilitasi HAKI kepada IKM;

6. Transmigrasi

- Fasilitasi terhadap calon transmigran perlu ditingkatkan;
- Upaya monitoring terhadap transmigran perlu ditingkatkan.

C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

- Target laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak tercapai;
- Belum optimalnya daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen IPM;
- Basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kurang tersedia;
- Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;
- Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
- Usulan prioritas masyarakat melalui musrenbang belum terakomodir secara optimal dalam dokumen perencanaan.

2. Keuangan

- Porsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur terhadap APBD masih di bawah 10%.
- Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi.
- Peningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- Sumber pembiayaan pembangunan relatif belum bervariasi;

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah;
- Kinerja aparatur perlu ditingkatkan.

4. Pemerintahan Umum

- Pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat.
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- Sistem remunerasi berbasis kinerja yang masih belum terimplementasi dengan baik;
- Desa dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
- Transparansi pengelolaan pemerintahan belum memadai;
- Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
- Jumlah SDM APIP yang bersertifikat perlu ditingkatkan;
- Tindaklanjut terhadap temuan BPK/BPKP/Irjen oleh PD perlu ditingkatkan;

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Lampung Timur.
2. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempengaruhi Kabupaten Lampung Timur.
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025.
 - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
 - Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini,

1. Kriteria-1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Kriteria-2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Kriteria-3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Kriteria-4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;



5. Kriteria-5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Kriteria-6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan daerah. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Lampung Timur.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMN menetapkan Visi Indonesia 2019, yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari ketujuh Misi tersebut, misi pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh bersinggungan dengan permasalahan riil di Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya, untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**.



1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada setiap agenda prioritas, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Lampung Timur, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2019.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka pelaksanaan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD).



Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan pertengahan Tahun 2013, telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM:

- 1) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- 2) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
- 4) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 5) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 6) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 7) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.
- 8) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9) Bidang Pekerjaan Umum.
- 10) Bidang Ketenagakerjaan.
- 11) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
- 12) Bidang Komunikasi dan Informasi.
- 13) Bidang Kesenian.
- 14) Bidang Penanaman Modal.
- 15) Bidang Perhubungan Daerah.

3. Sustainable Development Goals (SDG's)

Pengertian SDGs adalah singkatan dari *Sustainable Development Goals*, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Terdapat banyak tujuan dari konsep SDGs, namun ada tiga tujuan yang dapat dirangkum : *Pertama*, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. *Kedua*, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. *Ketiga*, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau *human development* yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau *environmental development* berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.



4. Proyek Strategis Nasional

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Jaksa Agung; Kapolri; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Presiden; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; para Gubernur; dan para Bupati/Wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

a. Pembangunan Bendungan Sukaraja III

Pembangunan bendungan Sukaraja III di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional pembangunan 13 bendungan baru sampai dengan Tahun 2019 dengan total daya tampung air mencapai 894,2 juta meter kubik.

Badan Bendungan Sukaraja III direncanakan berlokasi di Desa Negeri Jemanten dan Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dengan koordinat 4°37'00"-5°37'00" LS, 105°15'00"-106°20'00" BT. Pembangunan bendungan ini diperkirakan akan memiliki panjang kurang lebih 315, tinggi kurang lebih 24 meter (lebar puncak 7 meter), dengan luas daerah genangan kurang lebih 1.754 hektar.

Sedangkan daya tampung air diperkirakan kurang lebih 113.910.000 meter kubik. Peruntukkan utama bendungan adalah untuk pengairan, dengan lahan basah terdampak 202 hektar (Kecamatan Metro Kibang), 4.262 hektar (Kecamatan Batanghari), 3.789 hektar (Kecamatan Sekampung), dan 887 hektar (Kecamatan Marga Tiga).

Tahapan pembangunan Bendungan Sukaraja III telah dimulai pada Tahun 2003 yaitu studi identifikasi potensi oleh Konsultan Nippon Koei Co. Pada Tahun 2013 tahap *Feasibility Study* dan DED, dan pada Tahun 2016-2019 akan dilaksanakan pembebasan lahan. Diperkirakan pada Tahun 2017 akan dimulai pembangunan konstruksi, dengan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi diperkirakan paling sedikit 347 orang, Diperkirakan pada Tahun 2019 akan mulai beroperasi secara bertahap.

Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung, konstruksi Bendungan Sukaraja III terdiri dari tubuh bendungan/bangunan bendungan, bangunan pelimpah (*spillway*) corong dan berpintu, bangunan pengelak (*conduit*) dan bangunan pengambilan (*intake*).

Pembangunan bendungan ini tentu saja akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Dimana keberadaan bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pasokan irigasi



daerah yang dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian khususnya tanaman pangan, peningkatan pasokan air minum, sebagai tempat rekreasi, penghasil tenaga listrik, serta dapat meningkatkan aspek-aspek lingkungan tertentu.

b. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Tol Trans Sumatera terdiri dari 23 ruas yang melintasi 9 Provinsi di Sumatera. Pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp.360 triliun. Dari 23 ruas tersebut, 15 ruas koridor utama dan 8 ruas lainnya di koridor pendukung. Untuk tahap pertama, pemerintah menetapkan empat ruas, yaitu ruas Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Pekanbaru-Dumai. Beberapa alasan yang mendasari Pemerintah membangun proyek Jalan Trans Sumatera adalah:

- 1) Terbangunnya infrastruktur akan memberikan dampak pengganda atau *multiplier effect* pada daerah yang dibangun.
- 2) Tol Tans Sumatera diharapkan membangkitkan ekonomi Sumatera terutama dalam hal penyumbang PDB nasional.
- 3) Sebagai bagian mendukung terciptanya *Asian Highway Network* atau Jalan Asia yang telah disepakati pada forum United Nations di Shanghai, China.
- 4) Dalam beberapa tahun terakhir Sumatera mengalami pertumbuhan dalam kontribusinya sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar kedua setelah Jawa.
- 5) Sumatera memiliki peran regional dalam pembentukan PDB yang meningkat dari tahun ke tahun, di sisi lain justru Jawa mengalami penurunan dalam PDB Nasional.
- 6) Dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi regional, Sumatera mutlak memerlukan sarana pendukung berupa sarana transportasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya.
- 7) Dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sumatera diharapkan menjadi gerbang utama perekonomian Indonesia untuk pasar Afrika, Asia, Eropa, serta Australia.
- 8) Jalan Lintas Sumatera saat ini dalam kondisi parah dan mengkhawatirkan untuk moda transportasi darat lintas provinsi.
- 9) Moda transportasi darat masih menjadi pilihan utama untuk mendukung kegiatan perekonomian di Sumatera.
- 10) Merupakan sarana penghubung antar provinsi yang paling efektif dan terjangkau.

Untuk ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar direncanakan akan memiliki 6 gerbang tol dan 2 *barrier gate*, yaitu Bakauheni, Kalianda, Sidomulyo, Lematang, Jatimulyo, Gunung Sugih 1, Gunung Sugih 2, dan Bandar Jaya. Dengan adanya gerbang tol yang berbatasan dengan beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, perlu dipikirkan secara cermat bagaimana mengoptimalkan keuntungan pembangunan jalan

tol tersebut agar dapat dirasakan oleh Kabupaten Lampung Timur. Tidak harus berupa keuntungan langsung dari pembangunan jalan tolnya, namun memaksimalkan manfaat keberadaan jalan tol agar dapat memacu pembangunan dan investasi di sektor lain, yang kemudian memberikan manfaat besar bagi daerah.

4.2.2 Kajian Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019

Pemerintah Provinsi Lampung berkehendak menjadikan visi pembangunan daerah sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Provinsi Lampung dalam periode 2015-2019. Visi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 adalah "*Lampung Maju dan Sejahtera 2019*".

Untuk mewujudkan visi pembangunan RPJMD Provinsi Lampung tersebut, ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

4.2.3 Kajian Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah, maka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen rancangan RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 4.1
Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

Kota Metro	Keterkaitan	Kabupaten Lampung Tengah	Keterkaitan	Kabupaten Lampung Selatan	Keterkaitan
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang pendidikan dan kesehatan guna memacu peningkatan kualitas/aksesibilitas	Peningkatan ekonomi berbasis agribisnis dengan didukung industri	Perlu ditingkatkan kerjasama dalam hal distribusi dan pasokan bahan baku industri	Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera dan Terminal Agribisnis	Kerjasama dan pengembangan wilayah/kawasan/kecamatan yang berdekatan dengan pembangunan kawasan strategis



	pendidikan dan kesehatan Lampung Timur.		(industri berbahan baku karet dan kelapa sawit banyak berada di Lampung Tengah)		nasional dan daerah
Pengembangan literasi pangan (keamanan dan keragaman pangan).	Kota Metro dapat menjadi pangsa pasar potensial bagi produk pertanian dan perikanan Lampung Timur				

4.2.4 Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi pembangunan yang telah disusun merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh seluruh *stakeholders* sampai tahun 2025. Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi Kabupaten Lampung Timur menjadi visi bersama (*shared vision*). Berdasarkan potensi wilayah, tantangan yang dihadapi sampai tahun 2025, serta mengacu pada Visi Provinsi Lampung 2005-2025 dan Visi Nasional Tahun 2005-2025; maka Visi Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 adalah “*Lampung Timur Sejahtera Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan*”.

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang sebagai implementasi visi dan misi Kabupaten Lampung Timur disusun dalam 4 (empat) tahapan sesuai dengan periode dalam RPJMD. Misi dan sasaran pembangunan pada periode lima tahunan Tahap Ketiga adalah sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

- 1) Pembangunan wilayah berdasarkan Perda Tata Ruang.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
- 4) Perluasan pengembangan UMKM.
- 5) Optimalisasi berbagai sumber PAD.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata.
- 7) Perluasan jangkauan Jaminan Sosial Kemiskinan.
- 8) Perluasan jangkauan perlindungan wanita dan anak.
- 9) Perluasan pengembangan pemuda dan olahraga.
- 10) Perluasan kualitas permukiman.
- 11) Peningkatan kualitas produk pertanian
- 12) Perluasan dan peningkatan kualitas Program Pendanaan Agribisnis
- 13) Peningkatan kualitas infrastruktur pertanian
- 14) Peningkatan kualitas sentra perdagangan dan jasa
- 15) Peningkatan kualitas perkreditan rakyat
- 16) Peningkatan kualitas industri hasil pertanian



Misi II : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

- 1) Memantapkan kualitas Pemilukada.
- 2) Mengembangkan mekanisme pengawasan, enumerasi, *reward and punishment* yang terukur dan terbuka.
- 3) Mempertahankan kualitas kebijakan *good and clean government*, serta penggunaan mekanisme *fit and proper test* sebagai proses standar dalam penetapan dan pengangkatan pejabat publik.
- 4) Akselerasi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan.

Misi III : Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

- 1) Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur perhubungan darat, sungai, dan laut.
- 2) Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur sosial kemasyarakatan.
- 3) Peningkatan kualitas perumahan rakyat yang terjangkau.
- 4) Pengembangan sarana pelabuhan sungai dan laut.
- 5) Peningkatan kuantitas fasilitas komunikasi.
- 6) Peningkatan kuantitas fasilitas listrik untuk pengembangan listrik rumah tangga dan industri.
- 7) Peningkatan dan perluasan pelayanan sarana air bersih.

Misi IV : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

- 1) Pengembangan kawasan pembangunan sarana pendidikan.
- 2) Peningkatan kualitas sarana pendidikan yang direhabilitasi dan direkonstruksi.
- 3) Pengembangan pelatihan dan studi banding tenaga pengajar yang berkualitas.
- 4) Pengembangan hasil riset dan dari berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
- 5) Pengembangan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu.
- 6) Pengembangan derajat kesehatan masyarakat.

Misi V : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum

- 1) Penerapan secara konsisten peraturan daerah bidang pertanahan.
- 2) Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan kriminal masa depan, penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang.
- 3) Peningkatan kualitas masyarakat yang taat hukum.
- 4) Peningkatan kualitas konsistensi pelaksanaan regulasi yang dapat menciptakan pertumbuhan kegiatan investasi di Lampung Timur.



Misi VI : Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

- 1) Pengembangan kuantitas rehabilitasi sarana-sarana peibadatan umat beragama.
- 2) Pengembangan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
- 3) Pengembangan pembinaan karakter dan jati diri masyarakat.
- 4) Eksplorasi dan pengembangan berbagai ragam budaya dan seni daerah dari berbagai sub etnis.
- 5) Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
- 6) Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang multi etnis.

Misi VII : Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

- 1) Optimalisasi pengelolaan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang.
- 2) Melarang alih fungsi lahan, menjaga ketahanan air, ketahanan pangan, dan kondisi lingkungan hidup.
- 3) Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan berbagai kawasan lindung dan cagar budaya.
- 4) Mempertahankan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang berasal dari hasil hutan non kayu dan hutan kemasyarakatan.
- 5) Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber air dan sungai.
- 6) Peningkatan kualitas perekonomian kawasan pesisir.
- 7) Pemanfaatan dan optimalisasi informasi endapan geologi.

4.3 Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Lampung Timur dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Lampung Timur. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran PD selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan maka dapat diidentifikasi 6 (enam) isu strategis Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Infrastruktur;
2. Pertanian;
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Penanggulangan kemiskinan;

5. Sosial, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana;
8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi juga potensi sumber daya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan daerah.

1. **Infrastruktur**

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan daerah. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar penduduk juga semakin dekat dan membuka isolasi bagi masyarakat yang terbelakang.

Berdasarkan data pada Tahun 2015, jalan kabupaten sepanjang 146,13 km atau sekitar 7,7% masih berupa jalan tanah dan sepanjang 573,66 km atau 30,45% dalam kondisi jalan batu/onderlaagh. Terkait dengan kemantapan jalan kewenangan kabupaten, pada Tahun 2015 baru 42,58 persen yang berada dalam kondisi mantap dari 1.884,17 km jalan yang ada. Sekitar 57,42 persen atau sepanjang 1.082,66 km dalam kondisi rusak sedang maupun berat. Kondisi jalan kewenangan kabupaten yang rusak tersebut telah menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Lampung Timur dan sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan. Hal ini makin diperparah dengan masih belum mantapnya jalan kewenangan provinsi yang melintasi wilayah Kabupaten Lampung Timur. Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten perlu mendapat prioritas dari pemerintah daerah, begitu juga dengan akses jalan yang menuju destinasi wisata.

Peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan desa tersebut juga perlu dibarengi dengan terwujudnya sistem transportasi publik yang mantap dan merata. Sistem transportasi publik yang mantap dan merata, dengan dibarengi oleh ketersediaan



fasilitas lalu lintas dapat mendorong aksesibilitas antar wilayah dan distribusi barang/jasa.

Selanjutnya, di bidang permukiman, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur masih terdapat 8 desa di 5 kecamatan yang termasuk dalam daerah permukiman kumuh, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan wilayah permukiman kumuh dapat dilakukan melalui bantuan/fasilitasi perbaikan rumah, pembangunan sarana sanitasi dan lain sebagainya.

Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur permukiman melalui pembangunan penerangan jalan umum, pembangunan gedung/pos keamanan, dan pembangunan ruang terbuka hijau/zona kreatif warga di tiap kecamatan perlu dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kreativitas warga.

Upaya menjaga ketersediaan sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri juga perlu terus ditingkatkan, seperti peningkatan/pemeliharaan jaringan irigasi, penataan kawasan sempadan sungai dan penyediaan air baku permukiman.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur tersebut, harus tetap mentaati rencana tata ruang daerah yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam pengembangan wilayah, perlu ditetapkan rencana detail tata ruang wilayah perkotaan sesuai dengan amanat peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Sedangkan terkait dengan upaya pengembangan kawasan ibukota kabupaten serta wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu disusun dokumen pengembangan kawasan ibukota serta pengembangan wilayah khususnya yang berbatasan/berdekatan dengan rencana pengembangan kawasan strategis nasional (jalan tol), diharapkan dengan keberadaan jalan tol di Provinsi Lampung dapat memberikan manfaat bagi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur.

2. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran strategis dalam struktur pembangunan ekonomi daerah. Sektor pertanian merupakan penopang terbesar bagi perekonomian Lampung Timur, sebesar 35,61 persen PDRB kabupaten ini disumbang dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Pertumbuhan pada kategori pertanian memberikan sumbangan paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung Timur secara keseluruhan. Tingginya sumbangan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi dapat menjadikan sektor tersebut sebagai pemicu pertumbuhan di masa datang, artinya stimulus pada



sektor tersebut dapat memberikan peningkatan yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur. Disamping itu, peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah dapat juga sebagai penyerap tenaga kerja, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong Bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Timur perlu diarahkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan kemandirian petani menuju pertanian berkelanjutan.

Selanjutnya, juga perlu dilaksanakan upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah, melalui penganeekaragaman pangan serta pengendalian keamanan dan distribusi pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi daerah karena jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang cukup besar. Diharapkan kemandirian pangan yang menjadi upaya pemerintah daerah dapat terwujud dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Pembangunan di sektor pertanian perlu juga memperhatikan potensi ancaman yang bersumber dari hewan liar, khususnya wilayah yang berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas. Kurun waktu tiga tahun terakhir ditemukan berbagai kasus kejadian konflik manusia dan gajah, yang mengakibatkan kerugian bagi para petani akibat rusaknya lahan pertanian. Perlu upaya pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk mengantisipasi gangguan tersebut.

3. Pariwisata dan ekonomi kreatif

Berdasarkan data, jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2015 mencapai 71.453 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut diyakini masih dapat ditingkatkan, mengingat masih belum optimalnya pengelolaan sektor kepariwisataan maupun pengembangan ekonomi kreatif selama ini. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur, dengan berbagai destinasi wisata yang layak untuk dikembangkan dengan didukung sumber daya manusia yang potensial. Pengembangan sektor pariwisata dipastikan memiliki *multiplier effect* yang sangat luas, karena usaha-usaha di sektor pariwisata terkait langsung dengan banyak sektor lain yang mempengaruhi kehidupan ekonomi rakyat. Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan langkah efektif untuk menjadikan sektor pariwisata memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang meningkatkan jumlah negara yang mendapat fasilitas bebas visa, merupakan peluang dalam meningkatkan pariwisata daerah. Destinasi wisata yang



berdaya tarik tinggi yang dikelola secara profesional disertai dengan penyelenggaraan even kepariwisataan berskala nasional maupun regional yang dibarengi dengan promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, Pencanangan Tahun Kunjungan Kabupaten Lampung Timur (*Visit East Lampung Year*) juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Pengembangan potensi pariwisata daerah tersebut juga perlu disertai dengan pengembangan industri kreatif sehingga bisa maju dan tumbuh bersama saling mendukung. Dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), diharapkan Kabupaten Lampung Timur juga dapat menangkap peluang besar ini melalui berbagai upaya peningkatan potensi ekonomi berbasis produk unggulan daerah. Kekayaan alam, budaya dan manusia dapat menghasilkan potensi besar ketika digabungkan dengan kreativitas sehingga dapat memberikan sumbangsih tidak saja bagi perekonomian daerah, namun juga dalam penguatan citra dan identitas daerah. Pengembangan ekonomi kreatif maupun produk unggulan daerah perlu dibarengi dengan peningkatan peran koperasi dan UMKM, penciptaan iklim berusaha yang kondusif dan pemberian kemudahan investasi, serta peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi.

4. Penanggulangan kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 2009-2014 meskipun terus mengalami penurunan baik secara jumlah maupun persentase, namun berdasarkan data (2014) jumlah penduduk miskin di Lampung Timur (170,73 ribu jiwa) merupakan yang terbesar di Provinsi Lampung. Selama ini terlihat bahwa penanggulangan kemiskinan sering tidak tepat sasaran dikarenakan data penduduk miskin tidak akurat. Oleh karena itu diperlukan data/profil kemiskinan secara akurat (*by name by address*), sehingga penanganan terhadap masyarakat miskin dapat efektif dan tepat sasaran. Selain itu, perlu disusun strategi yang tepat guna penanggulangan kemiskinan daerah. Peningkatan wewenang dan kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlu didorong guna meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan bagi penduduk miskin, di samping mendorong pendapatan juga perlu dari sisi pengeluaran (pelayanan/bantuan bagi masyarakat miskin). Pelayanan kesehatan, pelayanan KB, serta penyaluran bantuan bagi rakyat miskin sangat perlu dilakukan guna mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin.



5. Sosial, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah daerah. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan bidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

Di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data, mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal. Berdasarkan kondisi tersebut peningkatan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kompetensi mutlak dilakukan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu ditingkatkan, disamping peningkatan terhadap pengawasan ketenagakerjaan terutama pengawasan terhadap perusahaan dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Selanjutnya, di sektor pemberdayaan masyarakat, sebagai salah satu tema sentral pembangunan daerah perlu diletakkan dan diorientasikan searah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan daerah. Paradigma pembangunan daerah yang lebih bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Aspek penting dalam program pemberdayaan adalah program yang disusun oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan keterlibatan masyarakat serta sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat khususnya desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan perdesaan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satunya dapat dilakukan dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan pengembangan wilayah desa, mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun



keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Pemberdayaan masyarakat, khususnya pemuda, juga perlu dilakukan guna meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah. pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui pembinaan terhadap pemuda penggerak desa maupun organisasi kepemudaan lainnya.

6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Berdasarkan data, kasus kriminalitas pada Tahun 2014 mencapai 727 kasus, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2013. Kasus pencurian dengan pemberatan merupakan kasus yang paling sering terjadi. Selain itu, belakangan ini terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang mulai muncul. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi daerah untuk mengatasinya. Perlu dilakukan berbagai langkah dalam upaya menurunkan angka kriminalitas. Kondisi keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas, yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas bagi masyarakat itu sendiri, oleh karena itu peningkatan sinergitas masyarakat dan aparat penegak hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perlu terus didorong salah satunya melalui siskamling dan pemberdayaan anggota linmas, anggota polisi pamong praja maupun polisi desa.

Selain itu juga perlu dilaksanakan forum dialog/diskusi di seluruh tingkatan wilayah guna menciptakan kewaspadaan dini serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di suatu wilayah. Penyelenggaraan forum dialog/diskusi masyarakat mutlak dilakukan melihat masyarakat Lampung Timur yang heterogen. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan kondusif dapat mendorong peningkatan daya saing daerah guna menarik investasi dan pengembangan berbagai potensi unggulan daerah.

7. Pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana;

Berdasarkan data, angka melek huruf di Kabupaten Lampung Timur baru mencapai 95,07 persen pada Tahun 2014. Dengan kata lain, masih terdapat 4,93 persen atau sekitar 49,2 ribu masyarakat di atas usia 15 tahun yang masih buta huruf. Selain itu, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Timur baru mencapai 7,16 tahun. Diperlukan upaya keras pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan angka melek huruf dan mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan.



Di bidang kesehatan, juga perlu ditingkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat secara bermutu, merata dan terjangkau. Ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat dengan didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai merupakan salah satu cara guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga berbagai target pelayanan kesehatan dapat tercapai.

Di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang mencapai 0,97, perlu terus dilakukan berbagai langkah guna peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana, mulai dari penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat di fasilitas kesehatan/balai KB, peningkatan peran kader bina keluarga maupun pembinaan terhadap sekolah. Pengendalian penduduk mutlak dilakukan melihat jumlah penduduk Lampung Timur yang mencapai satu juta jiwa di Tahun 2015. Penduduk yang memiliki kualitas tinggi tentu akan menjadi potensi dan modal dasar pembangunan daerah, namun sebaliknya penduduk dengan kualitas yang rendah tentu saja akan menjadi beban bagi pembangunan daerah.

8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Survey harapan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang dilakukan pada Tahun 2015 mendapatkan indeks kepuasan sebesar 6,1 dari nilai maksimum 10. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, namun masyarakat Lampung Timur masih cukup yakin bahwa pemerintah daerah mampu mengatasinya dengan tingkat keyakinan 65 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur, disamping perlu juga dilakukan penyebarluasan informasi kepada publik terkait dengan rencana dan capaian hasil pembangunan, sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat terus meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya, guna meningkatkan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara merata perlu diterapkan pendekatan kebijakan berbasis pengarusutamaan gender dan hak asasi manusia baik dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan.

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, dapat juga dikembangkan hubungan kerjasama antar pemerintah daerah maupun internasional melalui kerjasama di berbagai bidang/sektor yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu diupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan



cakupan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam dokumen perencanaan perlu terus ditingkatkan. Pendekatan *top-down meet bottom-up* dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting dilakukan guna diperoleh perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat

Di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, kurun waktu 4 tahun terakhir, berdasarkan opini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perlu komitmen dan upaya keras seluruh pihak terkait dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Arahan RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah.

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam persepektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (*human welfare*).

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu "*Lampung Timur Sejahtera Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan*". Penjelasan dari visi tersebut adalah :

1. Sejahtera

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dilihat dari perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan dan *civilization* (politik dan hukum) yang maju dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Kesejahteraan masyarakat umumnya ditandai dengan : jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi, serta memiliki kualitas pelayanan sosial baik.

Masyarakat sejahtera terjamin haknya dan memiliki kesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, memiliki kesetaraan gender, serta terlayani kebutuhan dasar yang lain. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non



pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan terhadap sumber dari luar negeri. Keswasembadaan dapat dicapai sejatinya dengan memanfaatkan keunggulan secara optimal. Swasembada harus menjadi fokus perhatian untuk mengurangi ketergantungan dan kerawanan serta menciptakan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Selain swasembada, kemakmuran akan terwujud ditentukan oleh kepastian hukum, etika politik luhur yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan ketertiban, budaya kerja keras masyarakat. Perekonomian di Lampung Timur didukung oleh sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis ekonomi yang merupakan sektor ekonomi unggulan di Lampung Timur adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata, yang tercermin dari tingkat partisipasi pendidikan, tingkat pendidikan terendah, dan jumlah tenaga ahli atau profesional yang dihasilkan. Tingkat kesehatan tinggi dan merata dilihat dari derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi. Masyarakat Lampung Timur yang sejahtera adalah masyarakat yang *civilized*, yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, bebas berpendapat, beretika, disiplin, tertib, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).

2. Berdaya Saing

Unsur kedua dalam Visi Lampung Timur adalah Berdaya Saing. Daya artinya “kemampuan, dan atau kekuatan”. Jadi berdaya saing adalah suatu kemampuan yang dimiliki berdasarkan kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Daya saing ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM, serta jajaran birokrasi yang visioner.

Infrastruktur yang baik akan memangkas biaya operasional usaha sehingga usaha menjadi lebih efisien dan kompetitif. Sedangkan pemanfaatan teknologi akan mempermudah proses produksi, sehingga akan mampu dihasilkan produk berkualitas baik dengan harga kompetitif, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh pasar. Sementara itu SDM akan sangat menentukan daya saing daerah melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas dengan *skill* tinggi. Sedangkan kualitas birokrasi visioner akan berindikasi pada kemampuan manajemen pemerintahan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan daerah yang baik akan mampu menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

3. Religius

Unsur ketiga yang terkandung dalam Visi Lampung Timur adalah Religius. Religius memiliki kata dasar religi, religi berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Dasar atau landasan kehidupan religius adalah iman dan takwa. Negara kesatuan yang berbentuk republik ini telah cukup dikenal sebagai masyarakat religius walaupun seiring itu moralnya masih perlu dibangun dalam kesadaran tinggi kaitannya sebagai makhluk beragama (*Human religious*). Sebab masih dijumpai kemerosotan moral dalam beberapa aspek kehidupan yang berakibat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam segala aspek kehidupan di Lampung Timur secara tegas berazaskan Pancasila terutama sila pertama yang merupakan soal terpenting dalam kehidupan manusia; yakni rasa Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai dari sila ini begitu jelas menggambarkan adanya hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan. Artinya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung Timur seyogyanya selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Inilah maksud dan kandungan dari sila pertama Pancasila yang secara verbal menerangkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung Timur itu pasti beragama dalam arti Berketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya segala tindakan-tindakan masyarakat Lampung Timur seyogyanya mengindahkan nilai etika religiusitas yang terkandung dalam agama masing-masing yang telah dijembatani oleh sila pertama itu, apakah masyarakat itu beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Aliran kepercayaan dan lain-lain karena semua agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan.

4. Berkelanjutan

Unsur keempat dari Visi Lampung Timur adalah Berkelanjutan. Berkelanjutan di sini dimaksudkan bahwa pembangunan Lampung Timur bersifat pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pada KTT Dunia tahun 2005 menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan



berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Tetapi perlu diingat bahwa konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya alam itu sendiri terbatas yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukannya pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan (2005-2025, sesuai dengan potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sert didukung oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen, maka misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan, sasaran pembangunan, dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan daerah dengan mengurangi kesenjangan sosial antarmasyarakat. Pengurangan kesenjangan sosial diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan distribusi pendapatan yang merata serta kesempatan kerja yang sama sehingga dapat mengurangi penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian akses yang adil kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan upaya membangun, mengembangkan dan memperkuat perekonomian Lampung Timur dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global.

Ekonomi berbasis agro terus dipertahankan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi yang berdaya saing.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

Misi ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang melalui transparansi pemerintahan yang didukung oleh akuntabilitas dan profesionalitas personil serta efisiensi dan efektifitas kelembagaan. Melalui dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang sinergis, terpadu, dan harmonis sehingga berdampak pada peningkatan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur secara otonom.



3. Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan prasarana dan sarana daerah melingkupi transportasi, pengairan, energi listrik, dan telekomunikasi. Perwujudan misi ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi upaya perwujudan daya saing Kabupaten Lampung Timur khususnya dan serta daya saing Provinsi Lampung dan nasional pada umumnya melalui pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

4. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

Misi ini adalah upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan pendidikan berkualitas disemua jalur, jenis, dan jenjang. Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEKS diprioritaskan pada semua sektor pembangunan. Pengembangan SDM berkualitas harus didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan keolahragaan.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang dimotori oleh aparat penegak hukum yang adil, bersih dan berwibawa serta didukung oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan misi ini akan memberikan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat dan sebagai bagian dari perwujudan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

6. Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Misi ini merupakan upaya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama disemua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan keagamaan secara luas untuk meningkatkan kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar budaya.

7. Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam (lahan, air, hutan, dan mineral) secara keberlanjutan sehingga seluruh aktivitas pembangunan tidak berdampak negatif pada kelestarian dan keasrian lingkungan hidup. Destruktivitas lingkungan pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas lingkungan yang tidak sehat dan dapat menurunkan daya dukung lingkungan yang menopang hajat hidup seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan misi ini akan sangat tergantung dari



komitmen politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang mengikat serta peranserta seluruh masyarakat yang ada sehingga keterpaduan seluruh sektor merupakan prasyarat bagi lingkungan yang asri dan lestari.

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 bertujuan mewujudkan masyarakat Lampung Timur sejahtera, berketuhanan, dan berwawasan lingkungan, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur sampai Tahun 2025 pada setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Arah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera

1. Menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan dasar penduduk, menciptakan penyebaran dan pemerataan penduduk ke berbagai sentra ekonomi, integrasi budaya dari berbagai suku, memfasilitasi pengembangan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (KPSAE), dan mencegah kerusakan lingkungan pendukung kehidupan.
2. Menyebarkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai di tingkat desa, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, mencegah penyebaran penyakit menular.
3. Penghapusan buta huruf; peningkatan kualitas, fasilitas, dan pelayanan pendidikan; meningkatkan pendidikan minimal penduduk sampai pada tingkat SLTA.
4. Menciptakan kesetaraan gender, pembinaan pendidikan anak sejak usia dini, peningkatan partisipasi pemuda dalam budaya, olahraga, politik, serta pelayanan dan perlindungan sosial.
5. Membangun ekonomi makro berbasis pertanian dan agribisnis dengan melibatkan aspek kerakyatan sebagai konsep dasar; serta mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor lain.
6. Mengkondisikan munculnya investasi langsung yang bertumpu pada kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat, melalui sistem dan pengaturan investasi yang kondusif dan menarik.
7. Mengembangkan sumber komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru untuk mendukung sumber pendapatan konvensional, sehingga secara bertahap mampu menciptakan kemandirian daerah.
8. Menekan angka kemiskinan, mengembangkan jaminan sosial untuk orang miskin, dan mengembangkan program pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif.
9. Mengembangkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama yang berbasis wisata alam, wisata agro, wisata budaya, dan wisata kuliner;



peningkatan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan; serta penerapan prinsip “*Nemui Nyimah*” dan “*Nengah Nyappur*” untuk pengembangan ekonomi di bidang kepariwisataan.

10. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian guna menjamin sektor pertanian sebagai komponen penyusun PDRB yang mantap, menjamin ketahanan pangan daerah, serta memasarkan produk pertanian ke luar daerah.
 11. Mengembangkan industri agribisnis skala kecil dan menengah yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; dengan mengembangkan dan menggunakan teknologi menengah dan teknologi tinggi.
- 2. Arah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku**
1. Mendorong dan menjaga partisipasi politik masyarakat, meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu melalui proses yang semakin dewasa, santun, elegan, serta penggunaan teknologi informasi.
 2. Menumbuhkembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta mendorong tumbuhnya LSM yang *self support* dan mandiri.
 3. Menyediakan Aparatur Pemerintah Daerah yang efisien, bersifat *entrepreneurship*, dinamis, tanggap terhadap situasi dan perkembangan lingkungan, mempunyai *skill* tinggi, didukung dengan peralatan berbasis teknologi informasi, terbebas dari konflik kepentingan dalam ranah politik, serta mempunyai mekanisme pengawasan, renumerasi, *reward and punishment* yang terukur dan terbuka.
 4. Menyusun kebijakan umum yang mengarah ke *good and clean goverment*, serta penggunaan mekanisme *fit and proper test* sebagai proses standar dalam penetapan dan pengangkatan pejabat publik.
 5. Mengembangkan administrasi pemerintahan secara proporsional sesuai dengan potensi, kemampuan wilayah, serta sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
- 3. Arah untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional**
1. Mengembangkan infrastruktur yang mampu tumbuh menjadi tulang punggung dan daya dorong bagi pembangunan sektor riil, sehingga dapat mendukung pengembangan ketahanan pangan daerah, pengembangan sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah secara keseluruhan.
 2. Menyediakan kebutuhan air untuk lahan pertanian melalui sistem pengelolaan dan distribusi yang efisien, menjaga kelestarian sumber air, serta melibatkan peran aktif masyarakat melalui konteks budaya.



3. Menyediakan pelayanan dan fasilitas jalan yang berkualitas serta membuka semua akses jalan sampai di tingkat pedesaan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
 4. Tersedianya perumahan bagi rakyat dengan lingkungan yang sehat dan tertata sesuai dengan tata ruang wilayah, mempergunakan bahan lokal, serta memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan fungsi perumahan dengan ekosistem, lingkungan hidup, budaya, dan seni.
 5. Menyediakan sarana dan prasara perhubungan darat yang menjangkau semua desa, serta tersedianya moda transportasi darat yang memungkinkan masyarakat memilih sesuai dengan kemampuan.
 6. Mengembangkan pelabuhan Labuhan Meringgai sebagai pelabuhan internasional, mengembangkan pelabuhan Way Penet, Kuala Seputih, dan Way Sekampung sebagai *feeder* dan pendukung.
 7. Mengembangkan sungai sebagai sarana angkutan sungai berteknologi masa depan, dan mengembangkan sungai sebagai sumber penyediaan air bersih, pariwisata, serta pemeliharaan ekosistem.
 8. Mengembangkan fasilitas komunikasi melalui jaringan kabel dan nirkabel yang mampu menjangkau seluruh desa; serta menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan sampai di tingkat kecamatan dan desa.
 9. Menyediakan listrik yang mampu menjangkau seluruh desa melalui pengelolaan yang efisien; untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik rumah tangga dan industri.
 10. Menyediakan air bersih dan sehat yang mampu menjangkau seluruh desa dengan pengelolaan yang efisien, menjaga kelestarian sumber air melalui pengelolaan sungai dengan bijaksana serta memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.
- 4. Arah untuk mewujudkan pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan**
1. Meningkatkan Kualitas tenaga kerja kompetitif dalam persaingan nasional dan global, serta hak memperoleh perlindungan dan tingkat kesejahteraan tinggi.
 2. Meningkatkan Kualitas SDM masyarakat Lampung Timurt, ditandai oleh IPM dan IPG yang tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata tinggi dan merata.
 3. Mengembangkan Budaya dan prestasi olahraga masyarakat Lampung Timur agar lebih meningkat meningkat.
 4. Meningkatkan Peran serta dan pengurusutamaan gender dalam pembangunan, baik kuantitas maupun kualitas.
 5. Memanfaatkan hasil riset dan pengembangan dari berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi, mengembangkan dan memodifikasi IPTEKS yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan melalui penyediaan anggaran yang memadai.



6. Mendorong dan mengembangkan Penguasaan IPTEKS semakin tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
 7. Meningkatkan dan mengembangkan Instrumen jaminan pangan untuk tiap rumah tangga yang aman dan kualitas gizi yang memadai.
 8. Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat rata-rata tinggi, ditandai oleh angka harapan hidup yang tinggi.
 9. Meningkatkan Instrumen jaminan kesehatan untuk keluarga miskin tersedia memadai.
- 5. Arah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum**
1. Mendorong pendewasaan cara berpikir masyarakat, serta mengelola pertanahan dengan baik, bijak, berkeadilan, serta mempunyai kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ekses di masa depan.
 2. Mengantisipasi perkembangan kriminal masa depan, dan mengimbangi arah dan kemajuan kejahatan melalui peningkatan kemampuan serta kapasitas kepolisian, baik secara individu maupun secara institusional.
 3. Mengantisipasi perkembangan dan penyebaran kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.
 4. Menghasilkan produk hukum yang mempunyai kepastian tetap dan dapat menjadi pegangan bagi semua *stakeholder* dalam kegiatan keseharian; akses dan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau; berkeadilan, serta *fair*.
- 6. Arah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta mampu melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.**
1. Membangun masyarakat yang bermoral tinggi, yang dicirikan oleh sifat dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, harmonis dan dinamis.
 2. Membina kehidupan keagamaan masyarakat yang kondusif untuk mengembangkan masyarakat yang mampu menatap masa depan dengan tetap berpegang pada masyarakat yang religius.
 3. Mengembangkan seni dengan mengadopsi dan mengadaptasi karya seni masa lalu untuk dapat dikembangkan menjadi karya seni berorientasi masa depan, dengan mengakomodasi berbagai jenis karya seni dari berbagai daerah, sehingga mewujudkan budaya Kabupaten Lampung Timur yang kreatif dan dinamis.
 4. Mengembangkan budaya daerah yang mampu mengadopsi dan mengadaptasi budaya masa lalu menjadi budaya berorientasi masa depan, dengan mengakomodasi berbagai jenis dan asal budaya daerah, guna mewujudkan budaya daerah yang dinamis, beragam, dan multi kultur, serta membangun ketahanan budaya daerah.



5. Melestarikan tradisi, tata nilai, dan seni daerah terinventarisasi sebagai cagar budaya daerah.
7. **Arah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasis pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.**
 1. Menciptakan kondisi kepemilikan dan status lahan yang jelas, penerapan *land reform*, penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang, menjamin keberlangsungan proses produksi, ketahanan air, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan hidup.
 2. Mengantisipasi perubahan iklim, mencegah alih fungsi lahan, menjaga ketahanan air dan ketahanan pangan, serta kondisi lingkungan hidup dan ekosistem secara keseluruhan.
 3. Pembentukan "*Green belt*" yang mampu menyangga kawasan Danau Way Jepara, sehingga terjadi keseimbangan dinamis antara aspek ekonomi dengan aspek lingkungan hidup.
 4. Implementasi secara konsisten regulasi tata ruang yang telah terbentuk melalui penciptaan mekanisme *reward and punishment*.
 5. Pengaturan agar tidak terjadi sentralisasi penguasaan lahan pada suatu pihak tertentu, namun terdistribusi melalui proses *land reform* yang lebih berkeadilan dan lebih mempunyai kepastian hukum.
 6. Mengelola, melindungi, dan melestarikan berbagai kawasan lindung untuk peresapan air; melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam; melestarikan kegiatan budidaya, serta memberikan perlindungan terhadap cagar budaya.
 7. Mempertahankan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang berasal dari hutan kemasyarakatan dan hasil hutan non kayu.
 8. Mempertahankan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai kawasan lindung, resapan air, taman keanekaragaman hayati, namun pada sisi lain juga berperan sebagai kawasan wisata alam.
 9. Menjaga tingkat sedimentasi Satuan Wilayah Sungai (SWS) mulai dari daerah hulu sampai hilir dengan mempertahankan fungsi hidroorologis kawasan hutan lindung; mengupayakan pengelolaan sungai secara optimal, serta meningkatkan peran sungai sebagai kawasan wisata.
 10. Tumbuh dan berkembangnya kawasan vegetasi mangrove di Pantai Timur sebagai "*green belt*" yang mampu berperan sebagai penyangga kawasan produksi belakangnya; menjaga keanekaragaman hayati, dan biota pantai; serta memberikan peran ekonomis bagi kehidupan masyarakat pesisir.
 11. Penggalan informasi akurat mengenai endapan geologi agar dapat dipetakan potensi dan kapasitas produksi setiap jenis endapan; serta mengelolanya dengan

bijaksana dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan ekosistem dan lingkungan hidup.

5.2 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ketiga

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang sebagai implementasi visi dan misi Kabupaten Lampung Timur disusun dalam 4 (empat) tahapan sesuai dengan periode dalam RPJMD, dimana RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan tahap 3 (tiga) RPJPD Kabupaten Lampung Timur. Sasaran pembangunan pada tahap ke-3 (ketiga) RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

- 1) Pembangunan wilayah berdasarkan Perda Tata Ruang.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
- 4) Perluasan pengembangan UMKM.
- 5) Optimalisasi berbagai sumber PAD.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata.
- 7) Perluasan jangkauan Jaminan Sosial Kemiskinan.
- 8) Perluasan jangkauan perlindungan wanita dan anak.
- 9) Perluasan pengembangan pemuda dan olahraga.
- 10) Perluasan kualitas permukiman.
- 11) Peningkatan kualitas produk pertanian
- 12) Perluasan dan peningkatan kualitas Program Pendanaan Agribisnis
- 13) Peningkatan kualitas infrastruktur pertanian
- 14) Peningkatan kualitas Terminal Agribisnis
- 15) Peningkatan kualitas sentra perdagangan dan jasa
- 16) Peningkatan kualitas perkreditan rakyat
- 17) Peningkatan kualitas industri hasil pertanian

Misi II : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

- 1) Memantapkan kualitas Pemilukada.
- 2) Meningkatkan kualitas Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri.
- 3) Mengembangkan mekanisme pengawasan, *enumerasi, reward and punishment* yang terukur dan terbuka.
- 4) Mempertahankan kualitas kebijakan *good and clean government*, serta penggunaan mekanisme *fit and proper test* sebagai proses standar dalam penetapan dan pengangkatan pejabat publik.
- 5) Akselerasi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan.



Misi III : Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

- 1) Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur perhubungan darat, sungai, dan laut.
- 2) Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur sosial kemasyarakatan.
- 3) Peningkatan kualitas perumahan rakyat yang terjangkau.
- 4) Pengembangan sarana pelabuhan sungai dan laut.
- 5) Peningkatan kuantitas fasilitas komunikasi.
- 6) Peningkatan kuantitas fasilitas listrik untuk pengembangan listrik rumah tangga dan industri.
- 7) Peningkatan dan perluasan pelayanan sarana air bersih.

Misi IV : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

- 1) Pengembangan kawasan pembangunan sarana pendidikan.
- 2) Peningkatan kualitas sarana pendidikan yang direhabilitasi dan direkonstruksi.
- 3) Pengembangan pelatihan dan studi banding tenaga pengajar yang berkualitas.
- 4) Pengembangan hasil riset dan dari berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
- 5) Pengembangan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu.
- 6) Pengembangan derajat kesehatan masyarakat.

Misi V : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum

- 1) Penerapan secara konsisten peraturan daerah bidang pertanahan.
- 2) Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan kriminal masa depan, penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang.
- 3) Peningkatan kualitas masyarakat yang taat hukum.
- 4) Peningkatan kualitas konsistensi pelaksanaan regulasi yang dapat menciptakan pertumbuhan kegiatan investasi di Lampung Timur.

Misi VI : Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

- 1) Pengembangan kuantitas rehabilitasi sarana-sarana peibadatan umat beragama.
- 2) Pengembangan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
- 3) Pengembangan pembinaan karakter dan jati diri masyarakat.
- 4) Eksplorasi dan pengembangan berbagai ragam budaya dan seni daerah dari berbagai sub etnis.
- 5) Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
- 6) Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang multi etnis.

**Misi VII : Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasis pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup**

- 1) Optimalisasi pengelolaan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang.
- 2) Melarang alih fungsi lahan, menjaga ketahanan air, ketahanan pangan, dan kondisi lingkungan hidup.
- 3) Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan berbagai kawasan lindung dan cagar budaya.
- 4) Mempertahankan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang berasal dari hasil hutan non kayu dan hutan kemasyarakatan.
- 5) Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber air dan sungai.
- 6) Peningkatan kualitas perekonomian kawasan pesisir.
- 7) Pemanfaatan dan optimalisasi informasi endapan geologi.

5.3 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ketiga, Pemantapan Kemajuan Daerah (2015-2020)

Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan Tahun 2025, diperlukan pentahapan dan prioritas yang dijadikan agenda dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD), yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan, oleh karenanya tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi berkelanjutan dari tahapan ke tahapan berikutnya.

Pembangunan jangka panjang tahap ketiga ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dalam rangka mengembangkan kesejahteraan. Tahap ketiga dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada dua tahap sebelumnya. Dinamika sektor ekonomi pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala daerah, namun juga nasional dan internasional.

Ciri khas pada tahap ketiga adalah semakin dominannya peran IPTEKS dalam setiap pengambilan keputusan. Pengembangan IPTEKS diarahkan pada upaya optimalisasi potensi sumber daya. Berbagai kemajuan yang telah dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing, yang tercermin pada produk komoditas, infrastruktur, pendidikan, dan IPTEKS. Sedangkan pencapaian kesejahteraan tercermin pada indeks pembangunan manusia dan sosial kapital.

5.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada



waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Lampung Timur. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*).

Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021, yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMPUNG TIMUR YANG AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS AGRIBISNIS/PERTANIAN BERKELANJUTAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Masyarakat Lampung Timur

Masyarakat Lampung Timur mempunyai konotasi warga masyarakat yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dengan semangat gotong royong dalam interaksinya.

Aman

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Rasa aman pada suatu daerah mempunyai konotasi suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Tidak mungkin masyarakat dikatakan sejahtera apabila didalam kehidupan sehari-hari selalu diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan akan kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta maupun kehormatan yang kesemuanya merupakan gangguan terhadap keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Sehingga daerah yang tenteram, tertib, dan teratur dapat diukur dengan tingkat kriminalitas yang semakin menurun seiring dengan peningkatan persepsi rasa aman masyarakat.



Daerah yang tenteram, tertib, dan teratur juga ditandai dengan cakupan penegakan perda dan peraturan bupati oleh unsur pemerintah daerah, dan rasio pos siskamling per jumlah desa. Dimana untuk mewujudkan daerah yang tenteram, tertib, dan teratur ini tidak terlepas dari adanya hukum yang ditegakkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Upaya untuk menciptakan dan meningkatkan keamanan ini tidak hanya diperankan oleh aparat penegak hukum saja tetapi juga oleh semua lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti siskamling.

Mandiri

Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang harapannya terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap daerah adalah menjadikan daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal.

Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber- sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Maka setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggerakkan segala kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan didaerah. Suatu daerah otonom akan mampu berotonomi apabila daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai porsi semakin kecil. Sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Oleh karena itu kemandirian daerah dapat dicerminkan dari adanya peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu kemandirian Kabupaten Lampung Timur juga dapat diukur dengan semakin meningkatnya jumlah desa mandiri di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Desa mandiri adalah desa yang aparatur dan masyarakatnya mampu mengatasi permasalahannya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan cara bergotong royong membangun rasa kebersamaan dan kepedulian.

Sejahtera

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.

Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia memiliki pengertian kondisi perilaku kehidupan masyarakat yang bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada teriptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Perlu ditekankan disini bahwa pembangunan daerah yang ingin diraih oleh Kabupaten Lampung Timur tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia. Berakhlak mulia dapat diukur salah satunya melalui meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk.

Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat

Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat memiliki pengertian bahwa peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai. Sedangkan berpihak kepada kepentingan rakyat mengandung pengertian

bahwa kebijakan yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan rakyat, dengan sebuah prinsip membangun dan melayani dan maju dalam segala bidang.

Visi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu Lampung Timur Sejahtera Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan.

Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial
	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya
	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>)

Misi Pertama : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial. Bermakna untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik dan menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik ekonomi, dan sosial.

Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.



Misi Ketiga : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi Keempat : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Bermakna dalam rangka mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Misi Kelima : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Misi Keenam : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.

Misi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 memiliki hubungan yang kuat dengan Misi Daerah dalam RPJPD. Apabila dalam RPJPD 2005-2025 terdiri dari 7 (tujuh) misi, maka dalam RPJMD 2016-2021 dipertajam menjadi 6 (enam) misi, sebagaimana dalam Tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Timur dengan

MISI RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016-2021		MISI RPJPD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2025	
Misi 3	: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Misi 1	: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur
Misi 6	: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>)	Misi 2	: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku
Misi 1	: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial	Misi 3	: Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional
Misi 5	: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya	Misi 4	: Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan



Misi 4	:	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Misi 5	:	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum.
Misi 2	:	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal	Misi 6	:	Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
Misi 4	:	Mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat			
Misi 5	:	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya			
Misi 3	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Misi 7	:	Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

5.5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, dan *money follow priority*, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan program-program prioritas daerah yang berorientasi pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan PD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 5.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Sumber : Kemendagri, 2016

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

- Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
- Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tabel 5.6
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Lampung Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial								
Menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas, manusiawi dan merata guna mendukung pembangunan daerah dan nasional	Terwujudnya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	43-45	45	53	59	65	73
	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman	persentase rumah tangga pengguna sumber air minum bersih (%)	65	77	78	80	82	85
		persentase rumah tangga berfasilitas tempat BAB (%)	98,78	98,80	98,85	98,90	99,00	99,30
		rata-rata luas lantai (m2)	83,90	83,90	83,95	83,95	83,95	84,00
	Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten	pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW dan RTBL (%)	45	50	50	60	60	80
	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lainnya	terpeliharanya kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap (%)	65	70	70	75	80	80
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal								
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis potensi unggulan daerah	meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	35,4-35,8	35,4-35,8	35,6-36,0	35,6-36,0	36,0-36,37	36,3-36,67
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	4,08	4,08	4,09	4,09	4,1	4,15
		Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	6,05	6,06	6,08	6,11	6,13	6,14
		kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	6,66	6,66	6,67	6,7	6,75	6,75
	terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	85,0-90,2	85,0-90,3	87,1-92,6	89,4-93,5	90,1-93,6	94,0-96,2
		konsumsi ikan perkapita (kg perkapita)	20,5-21	21,00	22,00	24,00	26,00	28,00
	meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB Lam Tim	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	6,42	6,5-6,7	6,7-7,2	7,1-7,6	7,8-8,8	8,8-10,7
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,07-8,10	8,0-8,27	8,0-8,3	8,2-8,67	8,4-8,81	8,5-8,89
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	1	1	1-2	1,5-2	1,5-2	2-2,5
	meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	Koperasi aktif (%)	60-62	62-63	64-65	65-66	66-67	67-70
		Jumlah UMKM (unit)	41.305	41.305	41.508	41.711	41.908	42.119
	meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	peningkatan jumlah proyek investasi (PMA dan PMDN) yang terealisasi (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
		laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku	3-4	3-4	4-5	4-5	5-6	5-6
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00	5,00	4,95	4,92	4,89	4,9
		Pertumbuhan PAD (%)	5-8	10	10	10	10	10
	berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun (orang)	80.000	100.000	250.000	300.000	400.000	500.000
		Kontribusi Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) terhadap PDRB	0,86	0,89	0,94	0,945	0,95	0,96
Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan								
Penanggulangan kemiskinan daerah	Menurunkan jumlah penduduk miskin kabupaten	Kemiskinan (%)	16,95-16,85	16,85-16,75	16,5-16,2	15,8-15,4	14,7-14,2	13,0-12,5
		Indeks Gini	0,4-0,45	0,39-0,43	0,39-0,43	0,38-0,42	0,38-0,42	0,37-0,41
Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan aparatur serta peningkatan ekonomi perdesaan	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kompetensi aparatur desa	jumlah BUMDES (unit)	2	5	5	7	10	12
		jumlah desa mandiri gotong royong (desa)	0	0	0	1	2	2
meningkatnya kesejahteraan, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	65-65	65-66	66-68	68-69	69-70	70-70,5
		Desa Ramah Anak (desa)	1	5	10	15	20	24
Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat yang berkualitas dan merata	meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial masyarakat	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	65	80	90	90	95	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Mewujudkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,8-67	67,8-68	68,4-69	68,5-69,6	68,7-70,2	70,0-71,6		
		Balai Latihan Kerja (BLK)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada		
Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan yang keagamaan dan toleran	meningkatkan kualitas kehidupan beragama	kejadian kasus SARA (kasus)	0	0	0	0	0	0		
		rasio rumah ibadah per satuan penduduk	0,002	0,002	0,0023	0,0023	0,0024	0,0024		
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA	Sungai yang memenuhi baku mutu level B (%)	30	30	40	50	60	65		
		cakupan penghijauan wilayah rawan logsor dan sumber mata air (%)	≥30	≥30	≥40	≥50	≥50	≥60		
Peningkatan kesiagaan dan antisipasi bencana	peningkatan pelayanan publik dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WKM) (jam)	3	3	3-2,5	2,5-2	2-1,5	≤1		
Misi 4 : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat										
Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	peningkatan peran serta masyarakat dalam penurunan angka kriminalitas	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk	0,72	0,72	0,70	0,60	0,55	0,45		
		Cakupan penegakan perda & perbup (%)	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50		
		Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	61,89	0	0	63,50	0	70,1		
Misi 5 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya										
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat secara merata	meningkatkan angka melek huruf mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	Angka Melek Huruf (%)		95,3	95,5	96	96,5	98		
		- APK PAUD		96,5-97	96,5-97	96,5-97,1	97-97,4	97-97,5		
		Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (%)		99,9	100	100	100	100		
		- APK SD/MI/Paket A		113	114	115	116	117		
		- APM SD/MI/Paket A		98,85	99	99,2	99,3	99,5		
		Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun (%)		96,5	97	97,5	98	98,5		
		- APK SMP/MTs/Paket B		85	88	92	95	97		
		- APM SMP/MTs/Paket B		73	74	75	76	77		
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		7,19	7,22	7,25	7,28	7,3		
		Sekolah SD dalam kondisi baik (%)		60	70	75	80	85		
		Sekolah SMP dalam kondisi baik (%)		60	70	75	80	85		
		Angka Kelulusan SD/MI		100	100	100	100	100		
		Angka Kelulusan SMP/MTs		100	100	100	100	100		
Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	meningkatkan pemberdayaan & peran pemuda dalam pembangunan meningkatkan prestasi dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	organisasi pemuda yang difasilitasi (%)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
		jumlah gedung olahraga (unit)		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00		
		jumlah atlet yang berprestasi di tingkat daerah/nasional (orang)		2,00	2,00	5,00	5,00	5,00		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Timur	meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	30	28	26	24	22	20		
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	329	299	269	239	209	179		
		Prevalensi Balita kurang gizi (%)	18	17,6	17,2	16,8	16,4	16		
		Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0		
		Puskesmas terakreditasi (%)	9,00	29,00	70,00	100,00	100,00	100,00		
		Rumah Sakit Terakreditasi (unit)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Rasio dokter per 100.000 penduduk	9	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00		
		Penemuan penderita baru (CNR) TB per 100.000 penduduk	105	120	130	130	140	150		
		Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat	100	100	100	100	100	100		
		Persentase penatalaksanaan kasus kronis Filariasis (%)	100	100	100	100	100	100		
		Prevalensi Hipertensi	24,77	24,28	23,79	23,38	23,10	22,80		
		meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi dan pemberdayaan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,4	69,5	69,75	70	70,25	70,34
				Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	52	55	56	56	56,5	57

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Insiden rate kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	< 51	< 49	< 46	< 44	< 41	<41
peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92
		Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (%)	68,44	68,80	68,80	69,20	69,60	69,60
		<i>Unmeet Need</i>	20,06	20,05	20,00	19,80	19,70	19,65
Misi 6 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)								
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pro rakyat	terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (Skala 1-10)	6,2	6,2	6,3	6,8	6,9-7,3	7,4-7,6
		Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14	14	12	10	7	7
	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, bahwa strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
<i>Misi 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial</i>			
<i>Tujuan : Menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas, manusiawi dan merata guna mendukung pembangunan daerah dan nasional</i>			
Terwujudnya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan yang mantap, berkualitas dan merata	meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program inspeksi jalan dan jembatan Program Pembangunan turap/talud/bronjong Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan
		pembangunan jalan dan jembatan baru wilayah terisolir/tertinggal	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
		pengembangan trotoar dan sistem drainase perkotaan	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	membangun sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	peningkatan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	menyediakan armada angkutan umum dan fasilitas kelengkapan jalan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
			Program peningkatan pelayanan angkutan
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman	membangun titik PJU di jalan kewenangan kabupaten	pembangunan pengembangan dan pemeliharaan PJU	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
	meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	pengembangan wilayah perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau	Program Pengembangan Perumahan
			Program perbaikan perumahan akibat bencana alam
			Program keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
			Program Pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	meningkatkan sarana dan prasarana areal pemakaman	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
	membangun sarana dan prasarana pos keamanan penegak hukum di seluruh wilayah kecamatan (makoramil/mapolsek/pos patroli keamanan, dll)	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan wilayah	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	mendorong pengelolaan sampah padat secara berkelanjutan	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
		peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Pasar dan TPA
			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
	mengembangkan dan memelihara sumber air baku	mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	Program kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten	meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	penyusunan instrumen perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
			Program Pemanfaatan Ruang
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lainnya	peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air	meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi lokal			

Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	revitalisasi dan percepatan peningkatan produksi pertanian dan perikanan	meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, dan kemandirian petani menuju pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
		meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
		meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat	mengembangkan keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan ketersediaan cadangan pangan, penanganan daerah rawan pangan dan akses pangan serta distribusi pangan	meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
			Program Distribusi dan Harga Pangan
			Program Mutu dan Keamanan Pangan
			Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektro perdagangan dan industri terhadap PDRB	mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat dan produk unggulan daerah	pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
		menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	pengawasan kemetrolagian dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien	meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
			Program Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
			Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Pasar
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
			Program Pembinaan Pedagang Pasar
meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	penumbuhan dan penguatan koperasi dan UMKM	meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program Peningkatan Industri Rumah tangga, Industri Kecil dan Menengah

meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	peningkatan daya saing investasi daerah	menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		optimalisasi kinerja pelayanan perizinan investasi	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah	mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat yang berakar pada alam dan budaya daerah	meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Program Pengembangan Nilai Budaya
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya
			Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
			Program Peningkatan Kualitas Penyajian Jenis Makanan dan Variasinya
Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Tujuan : Penanggulangan kemiskinan daerah			
Menurunkan jumlah penduduk miskin kabupaten	Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral	Program Pengembangan Data/Informasi
		meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Program Perencanaan Sosial Budaya
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		pelayanan/bantuan bagi masyarakat miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
			Program Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tujuan : Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan aparatur serta peningkatan ekonomi perdesaan			
peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kompetensi aparatur desa	peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan peningkatan kompetensi aparatur dan masyarakat desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Program Peningkatan Perempuan Pedesaan
			Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Desa
			Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa
Tujuan : Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat			
meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial masyarakat	memberikan pelayanan perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Perencanaan Sosial Budaya
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Program Pembinaan Anak Terlantar
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan
Tujuan : Mewujudkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			
meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkualitas dan merata	meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan	meningkatkan daya saing tenaga kerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Tujuan : Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan yang keagamaan dan toleran			
meningkatnya kualitas kehidupan beragama	meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	meningkatkan kualitas kerukunan hidup sesama	Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan
			Program pengembangan wawasan kebangsaan

			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tujuan : Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga			
meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran	menerapkan anggaran responsif gender	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
		meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Fasilitas Lembaga/Organisasi Kewanitaan
			Program Perencanaan Sosial Budaya
Tujuan : Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan			
penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA	pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Tujuan : Peningkatan kesiagaan dan antisipasi bencana			
peningkatan pelayanan publik dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana	peningkatan upaya kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bencana	kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Misi 4 : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			
Tujuan : Meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			

peningkatan peran serta masyarakat dalam penurunan angka kriminalitas	peningkatan upaya pencegahan tindak kriminal	peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program pengembangan wawasan kebangsaan
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
			Program pendidikan politik masyarakat
			Program Analisis Konflik
			Program Pemerintahan kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Program Perencanaan Kepamong Prajaan
			Program Kemitraan dengan Lembaga Penegak Hukum
Misi 5 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat secara merata			
meningkatnya angka melek huruf	perluasan pendidikan non formal	menurunkan persentase buta aksara melalui pendidikan non formal	Program Pendidikan Non Formal
mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau	peningkatan tata kelola pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik	peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Tujuan : Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga			
meningkatkan pemberdayaan & peran pemuda dalam pembangunan	meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	mewujudkan pemuda yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
			Program peningkatan peran serta kepemudaan
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
		meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
meningkatkan prestasi dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	perkuatan pembinaan atlet	terbinanya dan berkembangnya prestasi atlet	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
		terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
			Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Timur			
meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
		meningkatkan upaya kesehatan	Program upaya kesehatan masyarakat
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Program pengembangan lingkungan sehat
			program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
			Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
			program pengembangan sumber daya manusia kesehatan
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan
meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi dan pemberdayaan masyarakat	penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan melalui kampanye hidup sehat	meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		menjamin pembiayaan kesehatan	program pelayanan kesehatan penduduk miskin
			program jaminan kesehatan masyarakat
		meningkatkan kualifikasi rumah sakit daerah menjadi rujukan sesuai standar medik	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Tujuan : Peningkatan akses dan mutu pelayanan KB dan keluarga sejahtera			

pengendalian penduduk dan keluarga berencana	peningkatan jumlah akseptor KB	penguatan kelembagaan dan pemberdayaan program keluarga berencana	Program Keluarga Berencana
			Program Kesehatan Reproduksi
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
			Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
			Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu dan PAUD
			Program Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang Berbasis Masyarakat
Misi 6 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pro rakyat			
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	meningkatkan kualitas pelayanan publik	meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
			Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
			Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah
			Program Arsip Masuk Desa
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
			Program Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan
			Program Peningkatan Kapasitas Organisasi/Kelembagaan dan Tata Laksana
			Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Daerah

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru
	meningkatnya kinerja dan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	meningkatnya kinerja dan pelayanan tugas dan fungsi kepala daerah	terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah efektif, efisien dan akuntabel	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program pembangunan	membuka layanan partisipatif, aspiratif dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
			Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
			Program Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Pembangunan
			Program Peningkatan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika
	mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aspiratif dan responsif	Program Pengembangan Data/Informasi
			Program Kerjasama Pembangunan
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
			Program Perencanaan Sosial Budaya
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
	memantapkan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi bagi aparatur	peningkatan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi bagi aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
			Program Pendidikan Kedinasan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
	meningkatkan upaya kerjasama antar pihak terkait dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	pengembangan wilayah transmigrasi dan transmigrasi regional	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

			Program Transmigrasi Regional
meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	mewujudkan opini BPK : WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah & mewujudkan opini WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



6.2 Kewilayahan Perencanaan Pembangunan

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJMD Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 berpedoman pada rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung Kabupaten Lampung Timur terdiri atas:

a. hutan lindung yang meliputi :

- hutan lindung Gunung Balak Register 38 dengan luas kurang lebih 22.292,5 hektar yang terdapat di Kecamatan Way Jepara, Jabung, Bandar Sribhawono dan Sekampung Udik; dan
- hutan lindung Muara Sekampung Register 15 dengan luas kurang lebih 1.488,36 hektar yang terletak di Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Melinting.

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, yang meliputi:

- kawasan bergambut, dengan luas kurang lebih 11.068 hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Braja Selehah
 2. Kecamatan Labuhan Maringgai
 3. Kecamatan Labuhan Ratu
 4. Kecamatan Mataram Baru
 5. Kecamatan Way Bungur
 6. Kecamatan Way Jepara
- kawasan resapan air, dengan luas kurang lebih 39.144 hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Bandar Sribhawono
 2. Kecamatan Jabung
 3. Kecamatan Labuhan Maringgai
 4. Kecamatan Marga Sekampung
 5. Kecamatan Melinting
 6. Kecamatan Pasir Sakti
 7. Kecamatan Sekampung Udik



8. Kecamatan Way Jepara

c. kawasan perlindungan setempat, yang meliputi:

- kawasan sempadan pantai, yang terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti dengan luas kurang lebih 5.588 hektar;
- kawasan sempadan sungai, dengan luas kurang lebih 11.087 hektar terdapat di seluruh DAS, meliputi:
 1. Kecamatan Batanghari,
 2. Kecamatan Batanghari Nuban;
 3. Kecamatan Braja Selebah;
 4. Kecamatan Jabung;
 5. Kecamatan Labuhan Maringgai;
 6. Kecamatan Labuhan Ratu;
 7. Kecamatan Marga Sekampung;
 8. Kecamatan Marga Tiga;
 9. Kecamatan Metro Kibang;
 10. Kecamatan Pasir Sakti;
 11. Kecamatan Pekalongan;
 12. Kecamatan Purbolinggo;
 13. Kecamatan Raman Utara;
 14. Kecamatan Sekampung;
 15. Kecamatan Sekampung Udik;
 16. Kecamatan Sukadana;
 17. Kecamatan Waway Karya;
 18. Kecamatan Way Bungur; dan
 19. Kecamatan Way Jepara.
- kawasan sekitar danau/waduk, terdapat di sekitar Danau Way Jepara dan Danau Beringin Indah dengan luas kurang lebih 358 hektar.
- kawasan sekitar mata air, terdapat di sekitar sumber-sumber mata air meliputi Sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung, dan Danau Way Jepara dengan luas kurang lebih 3.413 hektar dengan radius 100 meter dari mata air.
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan, yang meliputi :



- a. RTH publik berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan luas kurang lebih 45.149 hektar atau kurang lebih 25 persen dari seluruh perkotaan;
- b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 18.060 hektar atau kurang lebih 10 persen dari luas seluruh perkotaan;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, yang meliputi :
 - Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut berupa kawasan perlindungan penyu yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas dan Pulau Segama dengan spesies Penyu Hijau (*Chelonia midas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*).
 - Kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan luas kurang lebih 3.203 hektar.
 - Kawasan taman nasional dan taman nasional laut berupa Taman Nasional Way Kambas memiliki luas kawasan seluas kurang lebih 125.621,3 hektar.
 - Kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut, yang meliputi:
 1. Taman Wisata Swadaya di Kecamatan Pekalongan
 2. Danau Jepara di Kecamatan Way Jepara
 3. Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana
 4. Danau Kemuning di Kecamatan Bandar Sribhawono
 5. Kawasan wisata Way Curup di Kecamatan Mataram Baru
 6. Kawasan wisata Pantai Mangrove Centre di Kecamatan Labuhan Maringgai.
 - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 1. Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo
 2. Museum Budaya di Kecamatan Sukadana
 3. Bangunan Adat Sesat Agung Kecamatan Sukadana
 4. Desa Tradisional Wana di Kecamatan Melinting
 5. Rumah tradisional Gedong Wani di Kecamatan Marga Tiga
 6. Rumah tradisional warisan Keratuan Melinting
 7. Rumah tradisional warisan Keratuan Pugung di Kecamatan Sekampung Udik.
- e. kawasan rawan bencana alam, meliputi:
 - Kawasan rawan tanah longsor dengan luas kurang lebih 7.333 hektar terdapat di:
 1. Kecamatan Sekampung Udik
 2. Kecamatan Marga Sekampung



3. Kecamatan Waway Karya
 4. Kecamatan Jabung
 5. Kecamatan Pasir Sakti
- Kawasan rawan abrasi dengan luas kurang lebih 1.949 hektar terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai.
 - Kawasan rawan banjir dengan luas kurang lebih 15.983 hektar terdapat di:
 1. Kecamatan Bandar Sribhawono
 2. Kecamatan Braja Sebah
 3. Kecamatan Sekampung
 4. Kecamatan Mataram Baru
 5. Kecamatan Melinting
 6. Kecamatan Sekampung Udik
 7. Kecamatan Waway Karya
 8. Kecamatan Labuhan Maringgai
 9. Kecamatan Raman Utara
 - Kawasan rawan kebakaran hutan dengan luas kurang lebih 123.621 hektar terdapat di Taman Nasional Way Kambas.
 - Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di:
 1. Kecamatan Sukadana
 2. Kecamatan Pasir Sakti
 3. Kecamatan Pekalongan
 4. Kecamatan Sekampung
 5. Kecamatan Purbolinggo
 - Kawasan rawan gelombang tinggi dengan luas kurang lebih 7.879 hektar terdapat di:
 1. Kecamatan Labuhan Maringgai
 2. pulau-pulau kecil meliputi Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Gosong Sekopong, Pulau Batang Besar, Pulau Batang Kecil.
- f. kawasan peruntukan hutan produksi;
1. Way Kibang (Register 37) dengan luas kurang lebih 6.538 hektar;
 2. Gedong Wani (Register 40) dengan luas kurang lebih 6.637 hektar.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri atas:



- a. kawasan peruntukan pertanian, yang meliputi :
- Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi:
 - a. tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 58.321 hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan sentra produksi di Kecamatan Purbolinggo, Batanghari, dan Way Jepara.
 - b. tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 189.430 hektar terdapat di Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, Marga Tiga, Sekampung Udik, Jabung, dan Labuhan Maringgai, dengan sentra produksi di Kecamatan Sukadana.
 - c. kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 50.553 hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Batanghari seluas kurang lebih 4.262 hektar
 - 2. Kecamatan Sekampung seluas kurang lebih 3.789 hektar
 - 3. Kecamatan Sekampung Udik seluas kurang lebih 2.695 hektar
 - 4. Kecamatan Jabung seluas kurang lebih 6.006 hektar
 - 5. Kecamatan Pasir Sakti seluas kurang lebih 4.100 hektar
 - 6. Kecamatan Waway Karya seluas kurang lebih 2.825 hektar
 - 7. Kecamatan Labuhan Maringgai seluas kurang lebih 2.886 hektar
 - 8. Kecamatan Way Jepara seluas kurang lebih 3.115 hektar
 - 9. Kecamatan Braja Sebah seluas kurang lebih 2.741 hektar
 - 10. Kecamatan Mataram Baru seluas kurang lebih 1.738 hektar
 - 11. Kecamatan Pekalongan seluas kurang lebih 2.642 hektar
 - 12. Kecamatan Batanghari Nuban seluas kurang lebih 3.155 hektar
 - 13. Kecamatan Raman Utara seluas kurang lebih 5.213 hektar
 - 14. Kecamatan Purbolinggo seluas kurang lebih 3.026 hektar
 - 15. Kecamatan Way Bungur seluas kurang lebih 2.360 hektar.
 - d. Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 2.225 hektar meliputi :
 - 1. komoditas unggulan cabai tersebar di Kecamatan Metro Kibang
 - 2. komoditas unggulan terung tersebar di Kecamatan Marga Tiga
 - 3. komoditas unggulan tomat tersebar di Kecamatan Batanghari
 - 4. komoditas unggulan buncis tersebar di Kecamatan Pekalongan
 - 5. komoditas unggulan mentimun tersebar di Kecamatan Batanghari
 - 6. komoditas unggulan kangkung tersebar di Kecamatan Batanghari
 - 7. komoditas unggulan bayam tersebar di kecamatan Labuhan Ratu



8. komoditas unggulan durian tersebar di Kecamatan Melinting, Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Marga Sekampung
 9. komoditas unggulan lengkung tersebar di Kecamatan Sekampung
 10. komoditas unggulan pepaya tersebar di Kecamatan Marga Sekampung
 11. komoditas unggulan pisang tersebar di Kecamatan Bandar Sribhawono
 12. komoditas unggulan tanaman hias tersebar di Kecamatan Pekalongan.
- e. Kawasan perkebunan memiliki luas kurang lebih 40.599 hektar meliputi:
1. komoditas unggulan kakao tersebar di Kecamatan Way Jepara, Labuhan Ratu, Bandar Sribhawono dan Mataram Baru
 2. komoditas unggulan kelapa tersebar di Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Marga Tiga
 3. komoditas unggulan kelapa sawit tersebar di Kecamatan Waway Karya
 4. komoditas unggulan karet tersebar di Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Marga Sekampung
 5. komoditas unggulan lada tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Melinting dan Kecamatan Gunung Pelindung.
- f. Pengembangan kawasan peternakan meliputi:
1. ternak besar, meliputi
 - komoditas peternakan sapi terdapat di Kecamatan Way Jepara
 - komoditas peternakan kerbau terdapat di Kecamatan Batanghari.
 2. ternak kecil.
 - komoditas unggulan peternakan kambing terdapat di Kecamatan Batanghari Nuban
 - komoditas unggulan peternakan domba terdapat di Kecamatan Pekalongan
 - komoditas unggulan peternakan babi terdapat di Kecamatan Raman Utara
 - komoditas unggulan peternakan ayam buras terdapat di Kecamatan Batanghari
 - komoditas unggulan peternakan ayam ras pedaging terdapat di Kecamatan Metro Kibang
 - komoditas unggulan peternakan ayam ras petelor terdapat di Kecamatan Purbolinggo



- komoditas unggulan peternakan itik terdapat di Kecamatan Way Jepara.
- b. kawasan peruntukan perikanan
 1. kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri dari laut, perairan umum, sungai, rawa dan waduk
 2. kawasan peruntukan perikanan budidaya, meliputi:
 - Kawasan perikanan budidaya air payau meliputi komoditas ikan bandeng di Kecamatan Pasir Sakti
 - Kawasan perikanan budidaya air laut dengan komoditas unggulan udang di Kecamatan Labuhan Maringgai
 - Kawasan perikanan budidaya air tawar berada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.
 3. kawasan pengolahan ikan, berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 - Pelabuhan Labuhan Maringgai
 - Pelabuhan Way Penet
 - Pelabuhan Way Sekampung
 - Pelabuhan Kuala Seputih.
 4. kawasan Minapolitan, meliputi:
 - potensi udang dan bandeng yang terdapat di:
 1. Kawasan Labuhan Maringgai
 2. Kawasan Way Penet
 3. Kawasan Kuala Seputih.
 - potensi ikan layang dan ikan kembung terdapat di Kawasan Kuala Seputih.
 - potensi teri nasi yang terdapat di kawasan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.
- c. kawasan peruntukan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki potensi bahan tambang batuan, bahan mineral bukan logam, mineral logam, batubara, minyak bumi dan gas.
- d. kawasan peruntukan industri
 1. kawasan peruntukan industri besar, berupa pengendalian dan pembatasan kegiatan industri besar diarahkan di Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik



2. kawasan peruntukan industri menengah, terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik.
 3. kawasan peruntukan industri kecil, berupa pengolahan hasil pertanian terdapat di Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Marga Sekampung, dan Kecamatan Waway Karya
- e. kawasan peruntukan pariwisata, terdiri dari:
- kawasan peruntukan wisata budaya, terdiri atas:
 1. Taman Purbakala Pugung Raharjo yang merupakan peninggalan zaman Megalitik berlokasi di Kecamatan Sekampung Udik dengan luas kurang lebih 30 hektar
 2. Desa Tradisional Wana berlokasi di Desa Wana Kecamatan Melinting dengan luas kurang lebih 37 hektar
 3. Museum Budaya yang merupakan pusat sanggar kesenian berlokasi di Kecamatan Sukadana dengan luas kurang lebih 4 hektar.
 - kawasan peruntukan wisata alam,
 1. Taman Nasional Way Kambas berlokasi di Kecamatan Labuhan Ratu dengan luas kurang lebih 125.621,30 hektar;
 2. Danau Beringin Indah berlokasi di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana dengan luas kurang lebih 3 hektar
 3. Wisata Pantai Mangrove Centre berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti dengan luas kurang lebih 126 hektar
 4. Pesanggrahan Way Curup berlokasi di Kecamatan Mataram Baru dengan luas kurang lebih 3 hektar.
 5. Danau Way Jepara berlokasi di Kecamatan Way Jepara dengan luas kurang lebih 50 hektar.
 - kawasan peruntukan wisata buatan, terdiri atas :
 1. Wisata Agro Balai Benih Induk berlokasi di Kecamatan Pekalongan dengan luas kurang lebih 25 hektar; dan
 2. Agrowisata Pisang, Nanas, Jambu dan Durian berlokasi di Kecamatan Labuhan Ratu dengan luas kurang lebih 3.700 hektar.
- f. kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas :
- kawasan peruntukan permukiman perkotaan, meliputi:



1. kawasan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Labuhan Maringgai
 2. kawasan permukiman berkepadatan sedang diarahkan di Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Purbolinggo.
- kawasan peruntukan permukiman perdesaan, berupa kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan di Kecamatan Sekampung, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Melinting, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Labuan Ratu, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Braja Selebah dan Kecamatan Way Bungur
- g. kawasan peruntukan lainnya.
- kawasan pertahanan dan keamanan,
1. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) terletak di Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur
 2. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) terletak di semua kecamatan di Kabupaten Lampung Timur
 3. Kepolisian Sub Sektor (POLSUBSEKTOR) dapat dibentuk sesuai kebutuhan di daerah-daerah rawan konflik di Kabupaten Lampung Timur
 4. Komplek markas komando Subden Kompi Brigade Mobil (Brimob) terletak di Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur
 5. Markas Kepolisian Unit Pol Air di Labuhan Maringgai
 6. Komando Rayon Militer (Koramil) terletak di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur
 7. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Labuhan Maringgai.
- kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:
1. wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti
 2. pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. Pulau Segama Besar



- b. Pulau Segama Kecil
- c. Pulau Gosong Sekopong
- d. Pulau Batang Besar
- e. Pulau Batang Kecil.



BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tat Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 219 ayat (1), urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintah Pilihan, yang terdiri dari :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri dari :
- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :



1. Misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- 1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (P2JIRJP)
 - g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - h. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
 - i. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - j. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - l. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
 - m. Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan
 - n. Program Perencanaan Tata Ruang
 - o. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 - 2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
 - 3. Urusan Perhubungan**
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 2. Misi Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal**

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- 1. Urusan Pangan**
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- 2. Urusan Koperasi dan UMKM**
 - a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif



- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 3. Urusan Penanaman Modal**
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
- 4. Urusan Perikanan**
- a. Program Pengembangan budidaya perikanan
 - b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 5. Urusan Pariwisata**
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- 6. Urusan Kebudayaan**
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 7. Urusan Pertanian**
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
 - e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
 - g. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 8. Urusan Perdagangan**
- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - c. Program Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
 - d. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Pasar dan TPA
 - e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



- f. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri

9. Urusan Perindustrian

- a. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3. Misi Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

2. Urusan Sosial

- a. Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan

3. Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

4. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- e. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut
- f. Program Pengelolaan RTH
- g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

6. Urusan Kebudayaan

- d. Program Pengembangan Nilai Budaya
- e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



f. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- c. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- d. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Desa
- f. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa

9. Urusan Transmigrasi

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- b. Program Transmigrasi Regional

4. Misi Mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat

Program untuk mendukung misi ini adalah :

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- e. Program Analisis Konflik
- f. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- g. Program Kemitraan dengan Lembaga Penegak Hukum

5. Misi Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Urusan Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Non Formal
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Urusan Kesehatan

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- l. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- n. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
- o. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- r. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- s. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan

3. Urusan Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program Keluarga Berencana
- b. Program Kesehatan Reproduksi
- c. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri



- d. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
 - e. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - f. Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu dan PAUD
 - g. Program Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang Berbasis Masyarakat.
- 6. Misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)**

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Urusan Pertanahan

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- c. Program Pelayanan Administrasi Pertanahan

2. Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil

3. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- c. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
- d. Program Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Pembangunan
- e. Program Peningkatan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika

4. Urusan Kearsipan

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Perbaikan/Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan
- c. Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

5. Perencanaan Pembangunan

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
- b. Program Kerjasama Pembangunan
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- e. Program Perencanaan Sosial Budaya
- f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

6. Keuangan

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

7. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- b. Program Pendidikan Kedinasan
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- e. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

8. Pemerintahan Umum

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Program Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi/Kelembagaan dan Tata Laksana
- e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- f. Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Daerah
- g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- i. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

Misi 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	Terwujudnya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan yang mantap, berkualitas dan merata	meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan terbangun (km)	km	N/A	750,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
jembatan terbangun (unit)					unit	5,00	29,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani	
				Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	persen	42,58	75,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
					Proporsi panjang jembatan dalam Kondisi mantap (%)	persen	60,00	87,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	cakupan rehabilitasi dalam kondisi tanggap darurat (%)	persen	80,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	alat berat berfungsi dengan baik (%)	persen	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program inspeksi jalan dan jembatan	cakupan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	persen	70,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	tarup/talud/bronjong terbangun (m/tahun)	meter	N/A	5000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Usaha jasa konstruksi yang terbina (%)	persen	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan	tugu batas wilayah yang tertangani (%)	persen	50,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
			pembangunan infrastruktur wilayah terisolir/tertinggal	Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan	panjang jalan desa terbangun (km)	km	N/A	1250,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
			pengembangan trotoar dan sistem drainase perkotaan	program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase/gorong-gorong terbangun (km)	km	20,00	80,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	panjang trotoar terbangun (m)	meter	2000,00	1000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
		membangun sarana dan prasarana aparatur	pembangunan/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	pembangunan gedung kantor (unit)	unit	1,00	26,00	Pemerintahan Umum	PD yang menangani
	terwujudnya sistem transportasi publik yang mantap dan merata	peningkatan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	menyediakan armada angkutan umum dan fasilitas kelengkapan jalan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	terminal darat beroperasi dengan baik (%)	unit	1,00	1,00	Perhubungan	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	cakupan FLLAJ yang berfungsi dengan baik (%)	persen	50,00	90,00	Perhubungan	PD yang menangani
					cakupan APILL yang berfungsi dengan baik (%)	persen	50,00	80,00	Perhubungan	PD yang menangani
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	terminal darat beroperasi dengan baik (%)	persen	50,00	50,00	Perhubungan	PD yang menangani
				Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas (kasus)	kasus	339,00	275,00	Perhubungan	PD yang menangani
				Program peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan angkutan umum lulus uji kir (%)	persen	100,00	100,00	Perhubungan	PD yang menangani
				Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Cakupan angkutan umum lulus uji kir (%)	persen	100,00	100,00	Perhubungan	PD yang menangani
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar permukiman	membangun titik PJU di jalan kewenangan kabupaten	pembangunan pengembangan dan pemeliharaan PJU	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Penerangan jalan umum (PJU) terbangun (unit)	unit	120,00	1080,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
		meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	pengembangan wilayah perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik/kreatif yang layak dan terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	program bantuan stimulan perumahan swadaya sesuai aturan (persen)	persen	100,00	100,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD yang menangani
				Program perbaikan perumahan akibat bencana alam	rumah akibat bencana alam yang ditangani (%)	persen	80,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan	cakupan penanganan kawasan kumuh kabupaten yang ditangani (ha)	hektar	114,00	350,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	RTH kreatif di setiap kecamatan (%)	persen	8,30	50,00	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
				Program Pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH kreatif yang dikelola dan dikembangkan (unit)	unit	2,00	17,00	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	RTH kreatif yang didukung penyediaan WIFI gratis (unit)	unit	0,00	17,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menangani
		meningkatkan sarana dan prasarana areal pemakaman	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	jumlah areal pemakaman yang ditangani (unit)	unit	17,00	127,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
		membangun sarana dan prasarana pos keamanan penegak hukum di seluruh wilayah kecamatan (makoramil/mapolsek/pos patroli keamanan, dll)	pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan wilayah	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah gedung sarana dan prasarana keamanan yang dibangun/tahun (unit)	unit	1,00	10,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
		mendorong pengelolaan sampah padat secara berkelanjutan	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	jumlah unit pengelolaan sampah oleh masyarakat (unit)	unit	N/A	69,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
			peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Pasar dan TPA	cakupan perkotaan kecamatan yang terlayani sistem persampahan TPA (kecamatan)	kecamatan	2,00	10,00	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
					cakupan pasar daerah yang terlayani sistem persampahan TPA (%)	persen	100,00	100,00	Lingkungan Hidup	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	bank sampah masyarakat yang terfasilitasi (%)	persen	N/A	100,00	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
		mengembangkan dan memelihara sumber air baku	mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	Program kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah pelanggan air minum (SSR)	SSR	2813,00	2998,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (%)	persen	50,00	70,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
	Terwujudnya pengembangan wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten	meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	penyusunan instrumen perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	tersedianya dokumen acuan penataan ruang (dok)	dokumen	2,00	5,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Pemanfaatan Ruang	pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW dan RTBL (%)	persen	N/A	80,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW dan RTBL (%)	persen	N/A	80,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
		mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	menyusun pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (dok)	dokumen	N/A	5,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lainnya	peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air	meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	cakupan rehabilitasi jaringan irigasi (%)	persen	30,00	50,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	tertatanya kawasan sempadan sungai (m)	meter	N/A	3500,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani

Tabel 7.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	revitalisasi dan percepatan peningkatan produksi pertanian dan perikanan	meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, dan kemandirian petani menuju pertanian	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	tersedianya data harga pangan (%)	persen	70,00	100,00	Pangan	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	produktivitas padi (kw/ha)	kw/ha	53,64	55,70	Pertanian	PD yang menangani
					produktivitas jagung (kw/ha)	kw/ha	52,15	62,50	Pertanian	PD yang menangani
					produktivitas ubi kayu (kw/ha)	kw/ha	211,44	213,44	Pertanian	PD yang menangani
					Produksi daging (ton)	ton	4.701,82	24.805,18	Pertanian	PD yang menangani
					produksi telur (ton)	ton	11.754,29	60.558,28	Pertanian	PD yang menangani
					produksi tembakau (ton)	ton	158,22	1.062,54	Pertanian	PD yang menangani
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	even promosi pertanian yang dilaksanakan/diikuti (even)	even	2,00	10,00	Pertanian	PD yang menangani
					even promosi perkebunan yang dilaksanakan/diikuti (even)	even	2,00	14,00	Pertanian	PD yang menangani
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi padi (ton)	ton	507.010,00	702.095,81	Pertanian	PD yang menangani
					produksi jagung (ton)	ton	432.208,00	540.563,00	Pertanian	PD yang menangani
					produksi ubi kayu (ton)	ton	902.959,00	1.011.314,00	Pertanian	PD yang menangani
					Produksi kakao (ton)	ton	5.138,00	6.557,53	Pertanian	PD yang menangani
					produksi kelapa (ton)	ton	15.084,00	16.653,95	Pertanian	PD yang menangani
					produksi kelapa sawit (ton)	ton	8.958,00	9.047,94	Pertanian	PD yang menangani
					produksi lada (ton)	ton	1.958,00	3.153,38	Pertanian	PD yang menangani
					produksi karet (ton)	ton	N/A	6.877,88	Pertanian	PD yang menangani
					produksi tembakau (ton)	ton	158,22	254,81	Pertanian	PD yang menangani
					jumlah kelompok tani swasembada benih (klp)	kelompok	N/A	24,00	Pertanian	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					jumlah kelompok tani swasembada pupuk (klp)	kelompok	N/A	24,00	Pertanian	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	peningkatan produksi padi/tahun (%)	persen	3,80	≥2	Pertanian	PD yang menanggapi
					peningkatan produksi jagung/tahun (%)	persen	5,00	3,00	Pertanian	PD yang menanggapi
					peningkatan produksi ubi kayu/tahun (%)	persen	2,80	3,00	Pertanian	PD yang menanggapi
					peningkatan produksi kakao/tahun (%)	persen	0,01	1,00	Pertanian	PD yang menanggapi
					peningkatan produksi kelapa/tahun (%)	persen	2,00	2,00	Pertanian	PD yang menanggapi
					produksi kelapa sawit/tahun (%)	persen	0,20	0,20	Pertanian	PD yang menanggapi
					peningkatan produksi lada/tahun (%)	persen	10,00	10,00	Pertanian	PD yang menanggapi
					peningkatan produksi karet/tahun (%)	persen	5,00	5,00	Pertanian	PD yang menanggapi
					peningkatan produksi tembakau/tahun (%)	persen	10,00	10,00	Pertanian	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Produksi daging (ton)	ton	4.701,82	24.805,18	Pertanian	PD yang menanggapi
					produksi telur (ton)	ton	11.754,29	60.558,28	Pertanian	PD yang menanggapi
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	persentase kejadian penyakit menular ternak yang tertangani (%)	persen	≥70	≥70	Pertanian	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	peningkatan populasi ternak (%)	persen	2,00	2,6-2,9	Pertanian	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	persen	4,34	4,45	Pertanian	PD yang menanggapi
		meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya (ton)	ton	13.698,68	99.486,43	Perikanan	PD yang menanggapi
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap (ton)	ton	40.183,10	287.500,00	Perikanan	PD yang menanggapi
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	konsumsi ikan perkapita (kg perkapita)	kg/kapita	21,00	28,00	Perikanan	PD yang menanggapi
				Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	ketersediaan data dan informasi perikanan (%)	persen	100,00	100,00	Perikanan	PD yang menanggapi
		meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian guna mendorong peningkatan produksi pertanian dan perikanan		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	cakupan penyuluh ahli (%)	orang	65,00	85,00	Pertanian	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	BP3K yang ditangani (unit)	unit	N/A	50,00	Pertanian	PD yang menanggapi

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan perkapita masyarakat	mengembangkan keanekaragaman pangan, keamanan pangan, ketersediaan cadangan pangan, akses pangan, distribusi pangan dan penanganan daerah rawan pangan	meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	cakupan usaha kecil yang dikembangkan (%)	persen	N/A	90	Pangan	PD yang menanggapi
				Program Distribusi dan Harga Pangan	cakupan pembinaan distribusi dan harga pangan (%)	persen	N/A	20	Pangan	PD yang menanggapi
				Program Mutu dan Keamanan Pangan	dewan ketahanan pangan berfungsi dengan baik (%)	persen	N/A	90	Pangan	PD yang menanggapi
				Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	daerah rawan pangan yang tertangani (%)	persen	N/A	95	Pangan	PD yang menanggapi
					jumlah lumbung pangan (unit)	unit	50	60	Pangan	PD yang menanggapi
	meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan dan industri	mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat dan produk unggulan daerah	pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	masyarakat dapat mengakses sarana informasi perindustrian (%)	persen	100,00	100,00	Perindustrian	PD yang menanggapi
			pengembangan produk unggulan daerah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	sentra UMKM yang difasilitasi (unit)	unit	N/A	280,00	Koperasi dan UKM	PD yang menanggapi
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	koperasi yang dibina (unit)	unit	N/A	725,00	Koperasi dan UKM	PD yang menanggapi
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah UMKM yang dibina dan dikembangkan (unit)	unit	N/A	210,00	Koperasi dan UKM	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	cakupan IKM yang dibina (%)	persen	N/A	100,00	Perindustrian	PD yang menanggapi
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	jumlah IKM yang dibina (unit)	unit	N/A	250,00	Perindustrian	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	UMKM dan IKM yang terfasilitasi HAKI (unit)	unit	N/A	100,00	Perindustrian	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	even promosi produk yang diikuti/diselenggarakan (even)	even	4,00	20,00	Perdagangan	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	nilai total ekspor daerah (Rp.)	rupiah	N/A		Perdagangan	PD yang menanggapi
		pengawasan kemitrologian dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien	meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	inflasi daerah (%)	persen	4,17	4,2-5,1	Perdagangan	PD yang menanggapi
					cakupan pengawasan kemitrologian pasar daerah (%)	persen	N/A	50,00	Perdagangan	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	pasar yang diberdayakan (unit)	unit	N/A	22,00	Perdagangan	PD yang menanggapi
					penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan (%)	persen	N/A	100,00	Perdagangan	PD yang menanggapi

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	pasar daerah yang tertata dengan baik (unit)	persen	N/A	9,00	Perdagangan	PD yang menangani
				Program Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah	aset pasar daerah tertata dengan baik (%)	persen	50,00	100,00	Perdagangan	PD yang menangani
				Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Pasar	aset pasar terjaga dengan baik (%)	persen	50,00	100,00	Perdagangan	PD yang menangani
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	cakupan pasar daerah yang tertangani sistem persampahan TPA (%)	persen	100,00	100,00	Perdagangan	PD yang menangani
				Program Pembinaan Pedagang Pasar	kenaikan retribusi pasar/tahun (%)	rupiah	30,00	30,00	Perdagangan	PD yang menangani
	meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	penumbuhan dan penguatan koperasi dan UMKM	meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan pemadatan bagi UMKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	sentra UMKM yang difasilitasi (unit)	unit	N/A	280,00	Koperasi dan UKM	PD yang menangani
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	koperasi dan UMKM yang dibina (unit)	unit	N/A	725,00	Koperasi dan UKM	PD yang menangani
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah UMKM yang dibina dan dikembangkan (unit)	unit	N/A	210,00	Koperasi dan UKM	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	jumlah KSP yang sehat (unit)	unit	N/A	210,00	Koperasi dan UKM	PD yang menangani
				Program Peningkatan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah	cakupan industri rumah tangga & IKM yang terfasilitasi (%)	persen	N/A	3,00	Koperasi dan UKM	PD yang menangani
	meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah	peningkatan daya saing investasi daerah	menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	jumlah industri (unit)	unit	7.239,00	9.594,00	Penanaman Modal	PD yang menangani
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	jumlah industri (unit)	unit	7.239,00	9.594,00	Penanaman Modal	PD yang menangani
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	hari kerja	14,00	7,00	Pemerintahan Umum	PD yang menangani
	meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah	mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat yang berakar pada alam dan budaya daerah	meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Program Pengembangan Nilai Budaya	kelompok adat budaya masyarakat yang dibina dan difasilitasi (kelompok)	kelompok	292,00	2602,00	Kebudayaan	PD yang menangani
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	ketersediaan data dan informasi budaya daerah (%)	persen	100,00	100,00	Kebudayaan	PD yang menangani
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	pentas seni yang diikuti/diselenggarakan setahun (even)	even	17,00	90,00	Kebudayaan	PD yang menangani
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	kelompok pelestari budaya yang terfasilitasi (kelompok)	kelompok	1,00	10,00	Kebudayaan	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kualitas Penyajian Jenis Makanan dan Variasinya	festival kuliner makanan tradisional terselenggara (%)	persen	N/A	100,00	Kebudayaan	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	even yang digelar/tahun (even)	even	4,00	37,00	Pariwisata	PD yang menangani
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	objek wisata yang ditangani (lokasi)	lokasi	10,00	55,00	Pariwisata	PD yang menangani
				Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	kelompok/saka pariwisata yang difasilitasi (klp)	kelompok	0,00	17,00	Pariwisata	PD yang menangani

Tabel 7.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	Menurunkan jumlah penduduk miskin kabupaten	Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya dokumen/buku profil kemiskinan daerah secara akurat (%)	persen	100	100	Perencanaan	PD yang menangani
			meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Program Perencanaan Sosial Budaya	persentase kesenjangan pencapaian sasaran kemiskinan dengan realisasi tahunan (%)	persen	≤30	≤30	Perencanaan	PD yang menangani
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	tersedianya data kemiskinan secara akurat (%)	persen	N/A	100	Perencanaan	PD yang menangani
			pelayanan/bantuan bagi masyarakat miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan	keluarga miskin yang dibina (keluarga)	keluarga	N/A	1249	Sosial	PD yang menangani
					keluarga miskin yang mendapat bantuan/modal usaha (keluarga)	keluarga	N/A		Sosial	PD yang menangani
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	persen	55	59	Kesehatan	PD yang menangani
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	TPKD berjalan dengan baik (%)	persen	N/A	100	Pemberdayaan Masyarakat dan	PD yang menangani
				Program Keluarga Berencana	keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan bantuan alat kontrasepsi (keluarga)	keluarga	N/A		Pengendalian Penduduk & KB	PD yang menangani
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS Lainnya)	keluarga miskin yang dibina/dilatih (keluarga)	keluarga	N/A	1250	Sosial	PD yang menangani
					fakir miskin dan anak yatim yang difasilitasi (orang)	orang	300	1900	Sosial	PD yang menangani
	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kompetensi aparatur desa	peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan peningkatan kompetensi aparatur dan masyarakat desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	penggunaan dana desa sesuai aturan (%)	persen	100	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
					panjang jalan desa terbangun (meter)	km	54.002	270.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
					Jumlah Desa Yang Menggunakan E-Budgeting (E-Village Budgeting) (desa)	desa	0	10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
					Jumlah Posyantekdes Yang Terbentuk (unit)	desa	0	25	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
					Jumlah Posyantek Yang Terbentuk (unit)	kecamatan	2	10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	jumlah BUMDES (unit)	unit	11	39	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah desa yang memiliki DOKRENDES (desa)	desa	264	264	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
					ketersediaan data dan informasi pembangunan infrastruktur desa/tahun (%)	persen	100	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
					desa berprestasi (desa)	desa	1	5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
					kader posyandu yang dibina (orang)	orang	72	500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	cakupan kepala desa yang lulus pelatihan kepemimpinan (orang)	orang	264	264	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	APBDes sesuai aturan (%)	persen	100	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
				Program Peningkatan Perempuan Pedesaan	KSP yang terbina (kelompok)	kelompok	N/A	500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
				Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Desa	pemilihan kepala desa sesuai aturan (%)	persen	100	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
				Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa	BPD berfungsi sesuai aturan (%)	persen	100	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
					penatausahaan keuangan desa sesuai aturan (%)	persen	100	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD yang menangani
	meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran	menerapkan anggaran responsif gender	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	kader GSI, ibu hamil dan anak yang dibina (orang)	orang	N/A	500	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD yang menangani
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	cakupan perempuan dan anak tindak kekerasan yang ditangani (orang)	orang	N/A	500	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD yang menangani
				Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	keluarga pra sejahtera (%)	persen	7,8	7,2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD yang menangani
			meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	cakupan perempuan dan anak tindak kekerasan yang ditangani (orang)	orang	N/A	500	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD yang menangani
				Program Fasilitas Lembaga/Organisasi Kewanitaan	Lembaga/Organisasi Kewanitaan yang terfasilitasi (lembaga)	lembaga	N/A	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Perencanaan Sosial Budaya	Indeks Pembangunan Gender		N/A	70-70,5	Perencanaan	PD yang menangani
	meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial masyarakat	memberikan pelayanan perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	cakupan perempuan dan anak tindak kekerasan yang ditangani (orang)	orang	N/A	500,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD yang menangani
				Program Perencanaan Sosial Budaya	Indeks Pembangunan Gender		N/A	70-70,5	Perencanaan	PD yang menangani
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat (%)	persen	N/A	50,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD yang menangani
		memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	cakupan PMKS yang difasilitasi (persen)	persen	5	10,00	Sosial	PD yang menangani
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	korban bencana yang terbantu (orang)	orang	N/A	250,00	Sosial	PD yang menangani
				Program Pembinaan Anak Terlantar	anak terlantar/jalanan yang difasilitasi (orang)	persen	N/A	250,00	Sosial	PD yang menangani
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	penyandang cacat dan trauma yang difasilitasi (orang)	orang	N/A	250,00	Sosial	PD yang menangani
				Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Eks Penyandang Penyakit Sosial yang difasilitasi (orang)	orang	40	200,00	Sosial	PD yang menangani
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Keluarga Pra Sejahtera (%)	persen	7,8	7,20	Sosial	PD yang menangani
				Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	forum keagamaan yang difasilitasi (kelompok)	kelompok	N/A	100,00	Sosial	PD yang menangani
	meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja	meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan	meningkatkan daya saing tenaga kerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	perusahaan yang menerapkan K3 (%)	persen	N/A	100,00	Tenaga Kerja	PD yang menangani
					kasus perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (%)	persen	NA	90,00	Tenaga Kerja	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	rasio pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan (%)	persen	N/A	20,00	Tenaga Kerja	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	persen	67,8	70,0-71,6	Tenaga Kerja	PD yang menangani
	meningkatnya kualitas kehidupan beragama	meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	meningkatkan kualitas kerukunan hidup sesama	Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	forum keagamaan berjalan dengan baik (%)	kelompok	N/A	100	Sosial	PD yang menangani
					masyarakat yang dibina (orang)	orang	N/A	2500	Sosial	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					pemuda/pelajar yang dibina (orang)	orang	N/A	2500	Sosial	PD yang menangani
					rumah ibadah yang ditangani (unit)	unit	N/A	150	Sosial	PD yang menangani
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	kejadian kasus SARA (kasus)	kasus	0	0	Ketentruman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	forum kebangsaan berjalan dengan baik (%)	persen	N/A	100	Ketentruman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	kasus SARA (kasus)	kasus	0	0	Pemerintahan Umum	PD yang menangani
	penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA	pengendalian pencemaran air, udara dan tanah	penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	ketersediaan dokumen perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup (dokumen)	dokumen	N/A	2	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	jumlah pohon yang ditanam (buah)	buah			Lingkungan Hidup	PD yang menangani
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sungai yang memenuhi baku mutu level B (%)	persen	30	65	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	cakupan sumber daya air yang terjaga kualitasnya (%)	persen	N/A	≥60	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	cakupan ketersediaan data dan informasi pengendalian sumber daya alam dan LH (%)	persen	90	100	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	buku laporan status lingkungan hidup daerah tersedia (%)	persen	100	100	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
				Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	mangrove center berfungsi dengan baik (%)	persen	100	100	Lingkungan Hidup	PD yang menangani
	peningkatan pelayanan publik dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana	peningkatan upaya kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bencana	kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	cakupan rumah akibat bencana alam/sosial yang ditangani (unit)	unit	50	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam)	jam	3	1	Sosial	PD yang menangani
					ketersediaan data dan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	persen	100	100	Sosial	PD yang menangani
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	peningkatan kualitas SDM TAGANA (%)	rupiah	N/A	100	Sosial	PD yang menangani
				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	cakupan korban bencana alam yang tertangani (%)	persen	N/A	100	Sosial	PD yang menangani

Tabel 7.4

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

Misi 4 : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	peningkatan peran serta masyarakat dalam penurunan angka kriminalitas	meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	peningkatan peran serta dan kesadaran hukum masyarakat	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Siskamling berjalan dengan baik di seluruh tingkatan administrasi wilayah (%)	persen	N/A	99,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
					jumlah LINMAS per desa (orang)	orang	31,00	31,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
					ketersediaan laporan bulanan kondisi kamtibmas kecamatan (%)	persen	100,00	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
					terdeteksi dan tertanganinya potensi gangguan kamtibmas (%)	persen	100,00	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
					jumlah anggota Poldes yang terlatih (orang)	orang	0,00	264,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
					patroli wilayah kecamatan oleh anggota Pol PP terlaksana secara berkala (%)	persen	0,00	30,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk		0,73	0,45	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
					Siskamling berjalan dengan baik di seluruh tingkatan administrasi wilayah (%)	persen	N/A	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk		0,73	0,45	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
					terpantaunya keberadaan warga negara asing di wilayah Lam Tim (%)	persen	100,00	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	kerukunan antar warga terjaga (%)	persen	100,00	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
					forum pembauran kebangsaan kecamatan terlaksana secara berkala (%)	persen	N/A	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	forum diskusi peningkatan wawasan kebangsaan terlaksana secara berkala di setiap kecamatan (%)	persen	N/A	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	masyarakat yang dibina (orang)	orang	N/A	1.320,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	persen	60,89	70,01	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program Analisis Konflik	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk		0,73	0,45	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
			meningkatkan upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Program Pemerintahan kantiemas dan Pencegahan Tindak Kriminal	tingkat keamanan pelaksanaan pilleg dan pilkada (%)		100,00	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program Perencanaan Kepamong Prajaan	ketersediaan data dan informasi kepomongprajaan (%)	persen	100,00	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani
				Program Kemitraan dengan Lembaga Penegak Hukum	terfasilitasinya kemitraan antar lembaga (%)	persen	100,00	100,00	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PD yang menangani

Tabel 7.5
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

Misi 5 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	meningkatnya angka melek huruf	perluasan pendidikan non formal	menurunkan persentase buta aksara melalui pendidikan non formal	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (%)	persen	95,07	98,00	Pendidikan	PD yang menangani
	mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau	peningkatan tata kelola pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	- APK PAUD	tahun	96,31	97-97,5	Pendidikan	PD yang menangani
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (%)	persen	99,70	100,00	Pendidikan	PD yang menangani
					- APK SD/MI/Paket A	tahun	112,91	117,00	Pendidikan	PD yang menangani
					- APM SD/MI/Paket A	tahun	98,81	99,50	Pendidikan	PD yang menangani
					Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun (%)	tahun	95,97	98,50	Pendidikan	PD yang menangani
					- APK SMP/MTs/Paket B	tahun	82,53	97,00	Pendidikan	PD yang menangani
					- APM SMP/MTs/Paket B	tahun	72,00	77,00	Pendidikan	PD yang menangani
					Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	persen	7,16	7,30	Pendidikan	PD yang menangani
		meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik	peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat sertifikasi tenaga pendidik (%)	persen	56,00	75,00	Pendidikan	PD yang menangani
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	tahun	7,16	7,30	Pendidikan	PD yang
	meningkatkan pemberdayaan & peran pemuda dalam pembangunan	meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	mewujudkan pemuda yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejujuran	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	ketersediaan data & informasi potensi kepemudaan (%)	persen	N/A	100,00	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	pemuda penggerak desa yang dibina (orang)	orang	N/A	350,00	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
					forum komunikasi dan pembinaan pemuda berfungsi dengan baik (%)	persen	N/A	100,00	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
				Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	pemuda yang dilatih (orang)	orang	N/A	350,00	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
				Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	terbangunnya sarana dan prasarana kepemudaan/olahraga (persen)	orang	N/A	100,00	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
			meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	pemuda yang dibina (orang)	orang	N/A	1000,00	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	meningkatkan prestasi dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	perkuatan pembinaan atlet	terbinanya dan berkembangnya prestasi atlet	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	guru olahraga (seluruh jenjang pendidikan) yang tersertifikasi (orang)	orang	N/A	120,00	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	jumlah atlet yang berprestasi di tingkat daerah/nasional (orang)	orang	N/A	19,00	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
			terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah gedung olahraga (unit)	unit	0	2	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
					sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara (unit)	unit	N/A	2	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
					peralatan olahraga yang didistribusikan (set)	set	N/A	500	Kepemudaan dan Olah Raga	PD yang menangani
	meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau	meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	persen	75,50	100,00	Kesehatan	PD yang menangani
			meningkatkan upaya kesehatan	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase kunjungan rawat jalan puskesmas	%	23,5	50	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	N/A	100,00	Kesehatan	PD yang menangani
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	% jajanan Anak Sekolah (JAS) yang memenuhi syarat	%	77,7	85	Kesehatan	PD yang menangani
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	persen	80	91	Kesehatan	PD yang menangani
				Program pengembangan lingkungan sehat	persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) (%)	persen	71,16	100	Kesehatan	PD yang menangani
				program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	penemuan penderita baru (CNR) TB per 100.000 penduduk (%)	per 100.000 pddk	96,00	150	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase kasus TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					insiden rate kasus demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 pddk	26,40	<41	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat ARV	persen	100,00	100,00	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase penatalaksanaan kasus kronis Filariasis	persen	100,00	100,00	Kesehatan	PD yang menangani
					persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (%)	persen	91,00	94	Kesehatan	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi (%)	unit	9,00	100	Kesehatan	PD yang menangani
				program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan	rasio puskesmas per 100.000 penduduk	per 100.000	3,40	4	Kesehatan	PD yang menangani
				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
				Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat (%)	persen	63,46	90	Kesehatan	PD yang menangani
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	persen	87,00	97	Kesehatan	PD yang menangani
					cakupan kunjungan neonatal pertama (KN I) (persen)	persen	93,00	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	prevalensi hipertensi (%)	persen	N/A	22,8	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
					Persentase orang dengan jiwa (ODGI) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	N/A	100	Kesehatan	PD yang menangani
			menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang	program pengembangan sumber daya manusia kesehatan	rasio dokter per 100.000 penduduk	per 100.000	8,00	14,00	Kesehatan	PD yang menangani
	meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi dan pemberdayaan masyarakat	penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan melalui kampanye hidup sehat	meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	persentase desa siaga aktif dengan strata purnama mandiri (%)	persen	5,00	30,00	Kesehatan	PD yang menangani
			menjamin pembiayaan kesehatan	program pelayanan kesehatan penduduk miskin	persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah (%)	persen	100	100	Kesehatan	PD yang menangani
				program jaminan kesehatan masyarakat	persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	persen	49	72	Kesehatan	PD yang menangani
				program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	cakupan alat kesehatan dan bangunan rumah sakit sesuai standar (%)	tahun	69,33	70,34	Kesehatan	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	pelayanan sesuai standarisasi (%)	%	0	100	Kesehatan	PD yang menangani
				program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit	cakupan sarana dan prasarana rumah sakit yang layak digunakan (%)	tahun	69,33	70,34	Kesehatan	PD yang menangani
			menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas	program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	pelayanan sesuai standarisasi (%)	tahun	69,33	70,34	Kesehatan	PD yang menangani
				program peningkatan dan pengembangan pelayanan keperawatan	pelayanan keperawatan sesuai standar (%)	tahun	69,33	70,34	Kesehatan	PD yang menangani
	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	peningkatan jumlah akseptor KB	penguatan kelembagaan dan pemberdayaan program keluarga berencana	Program Keluarga Berencana	alat dan obat kontrasepsi tersedia di fasilitas kesehatan/klinik KB (%)	persen	N/A	100,00	Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
				Program Kesehatan Reproduksi	cakupan sekolah yang dibina (sekolah)	sekolah			Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
				Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	UPPKS (klp)	klp			Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
				Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	BKB yang dibina (klp)	klp			Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Masyarakat, Pokja PKK, Kader KB dan kader kesehatan yang dibina (orang)	orang			Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
				Program Pelayanan Kontrasepsi	cakupan pelayanan kontrasepsi (%)	persen	N/A	5,00	Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
				Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu dan PAUD	kader pengelola bina keluarga berkompentensi (orang)	orang			Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
				Program Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang Berbasis Masyarakat	ketersediaan data dan informasi keluarga dan individu dalam keluarga (%)	persen	100,00	100,00	Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
					KIE program KB berjalan sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani
					cakupan ketersediaan sarana dan prasarana PLKB (%)	persen	100,00	100,00	Pengendalian Penduduk dan KB	PD yang menangani

Tabel 7.6
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Timur

Misi 6 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
	terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	meningkatkan kualitas pelayanan publik	meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	konflik pertanahan yang terselesaikan (persen)	persen	N/A	100,00	Pertanahan	PD yang menanggapi
					pengadaan tanah untuk pembangunan tersedia sesuai aturan (%)	persen	N/A	100,00	Pertanahan	PD yang menanggapi
				Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Cakil	kepemilikan KTP elektronik(%)	persen	75,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Cakil	PD yang menanggapi
					Kepemilikan akta kelahiran (%)	persen	75,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Cakil	PD yang menanggapi
					Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	persen	0,00	100,00	Administrasi Kependudukan dan Cakil	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan	koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	judul	17.112,00	40.000,00	Perpustakaan	PD yang menanggapi
					koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	eksemplar	33.673,00	80.000,00	Perpustakaan	PD yang menanggapi
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	pengunjung perpustakaan/rasio minat baca		0,25	0,32	Perpustakaan	PD yang menanggapi
					perpustakaan desa aktif (%)	persen	27,00	30,00	Perpustakaan	PD yang menanggapi
				Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	indeks kepuasan masyarakat layanan perpustakaan (nilai mutu)		N/A	75,00	Perpustakaan	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	persen	3,00	50,00	Kearsipan	PD yang menanggapi
				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	retrival arsip (menit)	menit	N/A	20,00	Kearsipan	PD yang menanggapi
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah	jumlah arsip yang dikelola (arsip)	arsip	7.000,00	18.000,00	Kearsipan	PD yang menanggapi
				Program Arsip Masuk Desa	jumlah desa sadar arsip (desa)	desa	N/A	264,00	Kearsipan	PD yang menanggapi
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	terfasilitasinya pemekaran desa (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
				Program Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan	buku data informasi dan laporan kegiatan pembangunan (dok)	dokumen	1,00	1,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)	persen	60,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Kapasitas Organisasi/Kelembagaan dan Tata Laksana	penataan kelembagaan dan tata laksana organisasi sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					penetapan kinerja SKPD tersedia (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					road map reformasi birokrasi (dokumen)	dokumen	0,00	1,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					analisis jabatan/analisis beban kerja perangkat daerah tersedia (%)	persen	N/A	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					SOP ketatalaksanaan, sistem kerja dan budaya kerja perangkat daerah tersedia (%)	persen	N/A	101,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Daerah	tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12,00	12,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	perencanaan dan penganggaran sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
	meningkatnya kinerja dan pelayanan tugas dan fungsi DPRD		terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	ketercapaian pelaksanaan prolegda (%)	persen	6,10	80	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
	meningkatnya kinerja dan pelayanan tugas dan fungsi kepala daerah		terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah efektif, efisien dan akuntabel	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dengan instansi terkait (%)	persen	90,00	100	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
	pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program pembangunan		membuka layanan partisipatif, aspiratif dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan pengaduan yang ditangani (%)	persen	N/A	100,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menanggapi
					e-Gov berfungsi dengan baik (%)	persen	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menanggapi
					Layanan pengaduan masyarakat on line berfungsi dengan baik (%)	persen	0,00	100,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menanggapi
					Stasiun Radio Pemkab berfungsi dengan baik (%)	persen	0,00	100,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menanggapi

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	kelompok informasi masyarakat dibidang komunikasi dan informasi yang dibina/tahun (klp)	kelompok	N/A	24,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menangani
				Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (Skala 1-10)		6,10	7,4-7,6	Komunikasi dan Informatika	PD yang menangani
				Program Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Pembangunan	buku data dan informasi rencana dan hasil pembangunan daerah kepada publik (dokumen)	dokumen	N/A	1,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menangani
				Program Peningkatan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	ketersediaan data dan informasi menara telekomunikasi (%)	persen	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menangani
					menara telekomunikasi yang berizin (%)	persen	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika	PD yang menangani
		mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aspiratif dan responsif	Program Pengembangan Data/Informasi	cakupan ketersediaan kebutuhan data dan informasi perencanaan pembangunan (%)	persen	80,00	100,00	Perencanaan	PD yang menangani
				Program Kerjasama Pembangunan	persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (%)	persen	100,00	100,00	Perencanaan	PD yang menangani
				Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (%)	persen	100,00	100,00	Perencanaan	PD yang menangani
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan (%)	persen	≤30	≤30	Perencanaan	PD yang menangani
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang perekonomian (%)	persen	≤30	≤30	Perencanaan	PD yang menangani
				Program Perencanaan Sosial Budaya	persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya (%)	persen	≤30	≤30	Perencanaan	PD yang menangani
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang praswil dan SDA (%)	persen	≤30	≤30	Perencanaan	PD yang menangani
		meningkatkan upaya kerjasama antar pihak terkait dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	pengembangan wilayah transmigrasi dan transmigrasi regional	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigran yang terfasilitasi (KK)	orang	N/A	100	Transmigrasi	PD yang menangani
				Program Transmigrasi Regional	masyarakat transmigrasi yang termonitor (%)	persen	N/A	100	Transmigrasi	PD yang menangani
		memantapkan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi bagi aparatur	peningkatan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi bagi aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	cakupan pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan (%)	persen	80,00	100	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PD yang menangani
					cakupan ASN yang mengikuti diklat/pelatihan (%)	persen	30,00	45,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PD yang menangani

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Urusan	PD Pelaksana
						Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				Program Pendidikan Kedinasan	ASN yang terfasilitasi (orang)	orang	N/A	20,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PD yang menanggapi
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan ASN yang terfasilitasi (persen)	persen	N/A	80,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PD yang menanggapi
				Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	administrasi pindah/purna tugas sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	aparatur taat aturan (%)	persen	N/A	100	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	PD yang menanggapi
	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	mewujudkan opini BPK : WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah sesuai aturan (%)	persen	70,00	100,00	Keuangan	PD yang menanggapi
					Pertumbuhan PAD (%)	persen	5-8	10	Keuangan	PD yang menanggapi
					administrasi keuangan daerah sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Keuangan	PD yang menanggapi
					Terbayarnya PJU (%)	persen	100,00	100,00	Keuangan	PD yang menanggapi
					penyaluran bansos dan hibah sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Keuangan	PD yang menanggapi
					terbayarnya gaji aparatur sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Keuangan	PD yang menanggapi
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Penganggaran daerah sesuai aturan (%)	persen	100,00	100,00	Keuangan	PD yang menanggapi
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	ketersediaan data dan informasi tanah (%)	persen	N/A	100,00	Pertanahan	PD yang menanggapi
					cakupan tanah milik pemda yang bersertifikat (%)	persen	N/A	100,00	Pertanahan	PD yang menanggapi
			peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah & mewujudkan opini WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	persentase temuan pengelolaan keuangan oleh BPK/BPKP/Irjen yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					persentase pengaduan yang tertangani (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
					tersedianya review laporan keuangan daerah (%)	persen	100,00	100,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	SDM APIP yang bersertifikat (orang)	orang	10,00	20,00	Pemerintahan Umum	PD yang menanggapi



BAB VIII **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI** **KEBUTUHAN PENDANAANNYA**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dihubungkan dengan SKPD terkait yang bertanggung jawab mengelola alokasi pendanaan yang direncanakan, sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikasi rencana program baik prioritas maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan pada Tabel 8.1.

Setiap program prioritas telah ditetapkan indikator kinerjanya dan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yaitu Tahun 2021, yang akan dibandingkan dengan pencapaian indikator perencanaan yaitu Tahun 2014 dan 2015. Perbandingan kedua indikator tersebut akan menjadi bahan evaluasi pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016-2021.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

Misi 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan terbangun (km)	N/A	150	120.000,00	162	129.600,00	157	132.979,00	150	120.000,00	150	124.200,00	150	131.289,00	757	628.468,00	PD yang menangani
	jembatan terbangun (unit)	5,00	5	4.500,00	5	4.500,00	5	4.950,00	6	5.445,00	6	5.989,50	7	6.588,45	29	27.472,95	PD yang menangani
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	42,58	45	50.000,00	45	50.809,00	53	65.380,00	59	76.988,00	63	85.000,00	75	95.000,00	75	372.368,00	PD yang menangani
	Proporsi panjang jembatan dalam Kondisi mantap (%)	60,00	50	2.000,00	50	2.000,00	60	2.200,00	70	2.420,00	80	2.662,00	87	2.928,20	87	12.210,20	PD yang menangani
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	panjang jalan perdesaan terbangun (km)	N/A	100	30.100,00	100	30.100,00	250	33.110,00	250	36.421,00	300	40.063,10	350	44.069,41	1.250	183.763,51	PD yang menangani
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	cakupan rehabilitasi dalam kondisi tanggap darurat (%)	80,00	80	5.000,00	80	5.000,00	80	5.500,00	100	6.050,00	100	6.655,00	100	7.320,50	100	30.525,50	PD yang menangani
Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	alat berat berfungsi dengan baik (%)	100,00	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100	1.221,02	PD yang menangani
Program inspeksi jalan dan jembatan	cakupan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	70,00	100	300,00	100	300,00	100	330,00	100	363,00	100	399,30	100	439,23	100	1.831,53	PD yang menangani
program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase/gorong-gorong terbangun (km)	20,00	20	11.000,00	20	11.000,00	10	12.100,00	10	13.310,00	20	14.641,00	20	16.105,10	80	67.156,10	PD yang menangani
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	turap/talud/bronjong terbangun (meter/tahun)	N/A	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.100,00	1.000	1.210,00	1.000	1.331,00	1.000	1.464,10	5.000	6.105,10	PD yang menangani
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	usaha jasa konstruksi yang terbina (%)	100,00	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100	1.221,02	PD yang menangani
Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan	tugu batas wilayah yang tertangani (%)	N/A	50	300,00	50	300,00	50	330,00	80	363,00	90	399,30	100	439,23	100	1.831,53	PD yang menangani
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	panjang trotoar terbangun (m)	2.000,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00	2.000	1.210,00	2.000	1.331,00	2.000	1.464,10	2.000	1.610,51	10.000	6.715,61	PD yang menangani
	tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (dok)	N/A	2,00	500,00	2,00	500,00	3	200,00	4	220,00	5	242,00	5	266,20	5	1.428,20	PD yang menangani
Program keterpaduan pembangunan bidang kecipikaryaan	cakupan penanganan kawasan kumuh kabupaten yang ditangani (ha)	114,00	0	3.220,00	50	3.220,00	60	3.542,00	70	3.896,20	80	4.285,82	90	4.714,40	300	19.658,42	PD yang menangani
Program kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah pelanggan air minum (SSR)	2813,00	2.841	8.200,00	8.282	8.200,00	2.884	9.020,00	2.915	9.922,00	2.968	10.914,20	2.998	12.005,62	2.998	50.061,82	PD yang menangani
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	rehabilitasi jaringan irigasi (lokasi)	30,00	50	20.000,00	50	20.000,00	30	22.000,00	30	24.200,00	40	26.620,00	40	29.282,00	190	122.102,00	PD yang menangani
	jaringan irigasi baru terbangun (lokasi)	10,00	50	4.000,00	50	4.000,00	20	4.400,00	30	4.840,00	40	5.324,00	50	5.856,40	190	24.420,40	PD yang menangani
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	tertatanya kawasan sempadan sungai (m)	N/A	500	250,00	500	250,00	500	275,00	500	302,50	1.000	332,75	1.000	366,03	3.500	1.526,28	PD yang menangani
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (%)	50,00	50	250,00	50	250,00	50	275,00	60	302,50	60	332,75	70	366,03	70	1.526,28	PD yang menangani
Program Perencanaan Tata Ruang	tersedianya dokumen acuan penataan ruang (dok)	2,00	2	200,00	2	200,00	3	220,00	4	242,00	5	266,20	5	292,82	5	1.221,02	PD yang menangani
Program Pemanfaatan Ruang	pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW dan RTBL (%)	N/A	50	200,00	50	200,00	50	220,00	60	242,00	60	266,20	80	292,82	80	1.221,02	PD yang menangani
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan RTRW dan RTBL (%)	N/A	50	150,00	50	150,00	50	165,00	60	181,50	60	199,65	80	219,62	80	915,77	PD yang menangani
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Penerangan jalan umum (PJU) terbangun (unit)	120,00	120	350,00	120	350,00	240	385,00	240	423,50	240	465,85	240	512,44	1.080	2.136,79	PD yang menangani
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
Program Pengembangan Perumahan	program bantuan stimulan perumahan swadaya sesuai aturan (persen)	100,00	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100	1.221,02	PD yang menangani
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam	rumah akibat bencana alam yang ditangani (%)	80,00	70	350,00	70	350,00	80	385,00	80	423,50	90	465,85	100	512,44	100	2.136,79	PD yang menangani
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	jumlah areal pemakaman yang ditangani (unit)	17,00	17	1.709,00	17	1.709,00	20	1.879,90	25	2.067,89	30	2.274,68	35	2.502,15	127	10.433,62	PD yang menangani
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	jumlah unit pengelolaan sampah oleh masyarakat (unit)	N/A	10	200,00	10	200,00	12	220,00	12	242,00	15	266,20	20	292,82	69	1.221,02	PD yang menangani
LINGKUNGAN HIDUP																	

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja														PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	RTH kreatif di setiap kecamatan (%)	8,30	10	400,00	10	400,00	20	480,00	30	576,00	40	691,20	50	829,44	50	2.976,64	PD yang menangani
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	bank sampah masyarakat yang terfasilitasi (%)	N/A	100	250,00	100	250,00	100	275,00	100	302,50	100	332,75	100	366,03	100	1.526,28	PD yang menangani
PERHUBUNGAN																	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	terminal darat beroperasi dengan baik (unit)	1,00	1	160,00	1	160,00	1	176,00	1	193,60	1	212,96	1	234,26	1	976,82	PD yang menangani
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	cakupan FLLAJ yang berfungsi dengan baik (%)	50,00	50	400,00	50	400,00	60	440,00	70	484,00	80	532,40	90	585,64	90	2.442,04	PD yang menangani
	cakupan APILL yang berfungsi dengan baik (%)	50,00	50		50		70		70		80		80		80		PD yang menangani
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas (kasus)	339,00	340	200,00	340	200,00	330	220,00	300	242,00	290	266,20	275	292,82	275	1.221,02	PD yang menangani
Program peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan angkutan umum lulus uji kir (%)	100,00	100	275,00	100	275,00	100	302,50	100	332,75	100	366,03	100	402,63	100	1.678,90	PD yang menangani
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Cakupan angkutan umum lulus uji kir (%)	100,00	100	300,00	100	200,00	100	330,00	100	363,00	100	399,30	100	439,23	100	1.831,53	PD yang menangani
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	RTH kreatif yang didukung penyediaan WIFI gratis (unit)	0,00	2	300,00	2	200,00	3	330,00	5	363,00	5	399,30	2	439,23	17	1.831,53	PD yang menangani
ADMINISTRASI UMUM																	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	pembangunan gedung kantor (unit)	1,00	1	2.000,00	1	300,00	2	2.200,00	5	2.420,00	8	2.662,00	10	2.928,20	26	12.210,20	PD yang menangani
	jumlah gedung sarana dan prasarana keamanan terbangun (unit)	1,00	2	2.000,00	2	300,00	2	2.200,00	2	2.420,00	2	2.662,00	2	2.928,20	10	12.210,20	PD yang menangani
JUMLAH				271.764,00		278.573,00		309.989,40		319.829,44		344.383,18		375.059,62		1.621.025,65	

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja														PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
PANGAN																	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	tersedianya data harga pangan (%)	70	80	2.067,66	80	2.274,43	85	2.274,43	90	2.501,87	95	2.752,06	100	3.027,26	100,00	12.623,28	PD yang menangani
Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	cakupan usaha kecil yang dikembangkan (%)	N/A	50	270,00	60	297,00	70	297,00	80	326,70	90	359,37	90	395,31	90,00	1.648,38	PD yang menangani
Program Distribusi dan Harga Pangan	cakupan pembinaan distribusi dan harga pangan (%)	N/A	20	275,00	20	302,50	20	302,50	20	332,75	20	366,03	20	402,63	20,00	1.678,90	PD yang menangani
Program Mutu dan Keamanan Pangan	dewan ketahanan pangan berfungsi dengan baik (%)	N/A	70	208,00	70	228,80	70	228,80	80	251,68	80	276,85	90	304,53	90,00	1.269,86	PD yang menangani
Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	daerah rawan pangan yang tertangani (%)	N/A	60	885,00	60	973,50	70	973,50	80	1.070,85	80	1.177,94	95	1.295,73	95,00	5.403,01	PD yang menangani
	jumlah lumbung pangan (unit)	50	52		52		54		56		58		60		60,00	0,00	PD yang menangani
PERTANIAN																	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	produktivitas padi (kw/ha)	53,64	52,46	200,00	55,58	220,00	55,58	214,00	55,60	235,40	55,64	258,94	55,70	284,83	55,70	1.193,17	PD yang menangani
	produktivitas jagung (kw/ha)	52,15	56,87		56,87		59,67		60,68		61,62		62,50		62,50		PD yang menangani
	produktivitas ubi kayu (kw/ha)	266,67	218,82		214,53		214,37		214,13		213,82		213,44		213,44		PD yang menangani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produksi tembakau (ton)	400,00	366,37	550,00	366,37	605,00	366,73	605,00	367,10	665,50	367,47	732,05	367,83	805,26	1.835,50	3.357,81	PD yang menangani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produksi daging (ton)	4.701,82	4.748,84	200,00	4.748,84	220,00	4.796,33	220,00	5.036,14	242,00	5.086,50	266,20	5.137,37	292,82	24.805,18	1.221,02	PD yang menangani
	produksi telur (ton)	11.754,29	11.871,83		11.871,83		11.990,55		12.110,46		12.231,56		12.353,88		60.558,28		PD yang menangani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	even promosi pertanian yang dilaksanakan/diikuti (even)	2,00	2,00	110,00	2,00	121,00	2,00	121,00	2,00	133,10	2,00	146,41	2,00	161,05	10,00	671,56	PD yang menangani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	even promosi pertanian yang dilaksanakan/diikuti (even)	2,00	2,00	200,00	2,00	220,00	2,00	220,00	2,00	242,00	2,00	266,20	2,00	292,82	10,00	1.221,02	PD yang menangani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	even promosi pertanian yang dilaksanakan/diikuti (even)	2,00	2,00	200,00	2,00	220,00	2,00	220,00	2,00	242,00	2,00	266,20	2,00	292,82	10,00	1.221,02	PD yang menangani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	even promosi perkebunan yang dilaksanakan/diikuti (even)	2,00	2,00	450,00	2,00	495,00	3,00	495,00	3,00	544,50	3,00	598,95	3,00	658,85	14,00	2.747,30	PD yang menangani
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi padi (ton)	507.010,00	600.000,00	400,00	648.628,00	440,00	661.600,56	440,00	674.832,57	484,00	688.329,22	532,40	702.095,81	585,64	3.326.858,16	2.442,04	PD yang menangani
	produksi jagung (ton)	432.208,00	463.326,00		463.326,00		486.386,00		504.445,00		522.504,00		540.563,00		2.517.224,00		PD yang menangani
	produksi ubi kayu (ton)	902.959,00	939.077,00		939.077,00		957.137,00		975.196,00		993.255,00		1.011.314,00		4.875.979,00		PD yang menangani
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi kakao (ton)	5.138,00	5.394,90	462,00	5.394,90	508,20	5.664,65	508,20	5.974,88	559,02	6.245,27	614,92	6.557,53	676,41	29.837,23	2.820,56	PD yang menangani
	produksi kelapa (ton)	15.084,00	15.385,68		15.385,68		15.693,39		16.007,26		16.327,41		16.653,95		80.067,69		PD yang menangani
	produksi kelapa sawit (ton)	8.958,00	8.975,92		8.975,92		8.993,87		9.011,86		9.029,88		9.047,94		45.059,47		PD yang menangani
	produksi lada (ton)	1.958,00	2.153,80		2.153,80		2.369,18		2.606,09		2.866,71		3.153,38		13.149,16		PD yang menangani
	Produksi karet (ton)	N/A	5.658,45		5.658,45		5.941,37		6.238,44		6.550,36		6.877,88		31.266,50		PD yang menangani
	produksi tembakau (ton)	158,22	174,04		174,04		191,45		210,59		231,65		254,81		1.062,54		PD yang menangani

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja														PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	jumlah kelompok tani swasembada benih (kjp)	N/A	5,00	200,00	5,00	220,00	10,00	220,00	15,00	242,00	20,00	266,20	24,00	292,82	24,00	1.221,02	PD yang menangani
	jumlah kelompok tani swasembada pupuk (kjp)	N/A	5,00	200,00	5,00	220,00	10,00	220,00	15,00	242,00	20,00	266,20	24,00	292,82	24,00	1.221,02	PD yang menangani
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	produksi tembakau (ton)	366,00	366,37	200,00	366,37	220,00	366,73	220,00	367,10	242,00	367,47	266,20	367,83	292,82	1.835,50	1.221,02	PD yang menangani
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	peningkatan produksi padi/tahun (%)	3,80	≥	49.466,00	≥	54.412,60	≥	54.412,60	≥	59.853,86	≥	65.839,25	≥	72.423,17	≥	301.994,88	PD yang menangani
	peningkatan produksi jagung/tahun (%)	5,00	2,50		2,50		2,50		2,70		2,70		3,00		3,00		PD yang menangani
	peningkatan produksi ubi kayu/tahun (%)	2,80	2,80		2,80		2,80		2,80		2,80		3,00		3,00		PD yang menangani
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produksi kakao/tahun (%)	0,01	0,01	980,00	0,01	1.078,00	0,50	1.078,00	0,50	1.185,80	0,70	1.304,38	1,00	1.434,82	1,00	5.983,00	PD yang menangani
	peningkatan produksi kelapa/tahun (%)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		PD yang menangani
	produksi kelapa sawit/tahun (%)	0,20	0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		PD yang menangani
	peningkatan produksi lada/tahun (%)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		PD yang menangani
	peningkatan produksi karet/tahun (%)	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		PD yang menangani
	peningkatan produksi tembakau/tahun (%)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		PD yang menangani
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Produksi daging (ton)	4.701,82	4.748,84	200,00	4.748,84	220,00	4.796,33	220,00	5.036,14	242,00	5.086,50	266,20	5.137,37	292,82	24.805,18	1.221,02	PD yang menangani
	produksi telur (ton)	11.754,29	11.871,83		11.871,83		11.990,55		12.110,46		12.231,56		12.353,88		60.558,28	0,00	PD yang menangani
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	persentase kejadian penyakit menular ternak yang tertangani (%)	≥70	≥70	1.394,34	≥70	1.533,77	≥70	1.533,77	≥70	1.687,15	≥70	1.855,86	≥70	2.041,45	≥70	8.512,56	PD yang menangani
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	peningkatan populasi ternak (%)	2,00	2	550,03	2-2,2	605,03	2,1-2,3	605,03	2,2-2,4	665,53	2,5-2,8	732,09	2,6-2,9	805,29	2,6-2,9	3.357,97	PD yang menangani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	4,34	4,34	200,00	4,34	220,00	4,37	220,00	4,39	242,00	4,45	266,20	4,45	292,82	4,45	1.221,02	PD yang menangani
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	cakupan penyuluh ahli (%)	65,00	70	381,54	70	419,69	75	419,69	80	461,66	85	507,83	85,00	558,61	85,00	2.329,33	PD yang menangani
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	BP3K yang ditangani (unit)	N/A	10	1.271,79	10	1.398,96	10	1.398,96	10	1.538,86	10	1.692,75	10,00	1.862,02	50,00	7.764,38	PD yang menangani
PERIKANAN																	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya (ton)	13.698,68	17.732,17	3.250,00	17.732,17	3.575,00	19.370,36	3.575,00	21.197,04	3.932,50	19.989,82	4.325,75	21.197,04	4.758,33	99.486,43	19.841,58	PD yang menangani
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap (ton)	40.183,10	46.500,00	1.540,00	46.500,00	1.694,00	52.000,00	1.694,00	57.500,00	1.863,40	63.000,00	2.049,74	68.500,00	2.254,71	287.500,00	9.401,85	PD yang menangani
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	konsumsi ikan perkapita (kg perkapita)	21,00	21	450,00	21	495,00	22	495,00	24	544,50	26	598,95	28	658,85	28,00	2.747,30	PD yang menangani
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	ketersediaan data dan informasi perikanan (%)	100,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100,00	1.221,02	PD yang menangani
KOPERASI DAN UKM																	
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	sentra UMKM yang difasilitasi (unit)	N/A	56,00	200,00	56,00	220,00	56,00	220,00	56,00	242,00	56,00	266,20	56,00	292,82	280,00	1.221,02	PD yang menangani
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	sentra UMKM yang difasilitasi (unit)	N/A	24,00	400,00	24,00	440,00	24,00	440,00	24,00	484,00	24,00	532,40	24,00	585,64	120,00	2.442,04	PD yang menangani
Program Pengembangan Keunggulan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	koperasi dan UMKM yang dibina (unit)	N/A	145	350,00	145	385,00	145	385,00	145	423,50	145	465,85	145,00	512,44	725,00	2.136,79	PD yang menangani
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah UMKM yang dibina dan dikembangkan (unit)	N/A	42	300,00	42	330,00	42	330,00	42	363,00	42	399,30	42,00	439,23	210,00	1.831,53	PD yang menangani
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	jumlah koperasi yang dikembangkan (unit)	N/A	210,00	450,00	210,00	495,00	210,00	495,00	210,00	544,50	210,00	598,95	210,00	658,85	210,00	2.747,30	PD yang menangani
PENANAMAN MODAL																	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	jumlah industri (unit)	7.239,00	7.601	572,42	7.601	629,67	7.981	629,67	8.500	692,63	9.137	761,90	9.594	838,09	9.594,11	3.494,71	PD yang menangani
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	jumlah industri (unit)	7.239,00	7.601	200,00	7.601	220,00	7.981	220,00	8.500	242,00	9.137	266,20	9.594	292,82	9.594,11	1.221,02	PD yang menangani
ADMINISTRASI UMUM																	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	162,67	12	178,93	10	178,93	7	196,82	7	216,51	7	238,16	7,00	993,09	PD yang menangani
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Metro Kibang
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Batanghari
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Sekampung
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Pekalongan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Raman Utara
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Way

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja														Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Sukadana	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Marga Tiga	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Sekampung Udik	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	170,00	Kecamatan Labuhan Ratu	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Way Jepara	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Braja Selebah	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Mataram Baru	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Jabung	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Gunung Pelindung	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Marga Sekampung	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Melinting	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Waway Karya	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Bandar Sribhawono	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Labuhan Maringgai	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Batanghari Nuban	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14,00	14	50,00	12	55,00	10	55,00	7	60,50	7	66,55	7	73,21	7	305,26	Kecamatan Pasir Sakti	
KEBUDAYAAN																		
Program Pengembangan Nilai Budaya	kelompok adat budaya masyarakat yang dibina dan difasilitasi (kelompok)	292,00	350,00	200,00	350,00	220,00	420,00	220,00	504,00	242,00	604,00	266,20	724,00	292,82	2.602,00	1.221,02	PD yang menangani	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	ketersediaan data dan informasi budaya daerah (%)	100,00	100,00	190,00	100,00	209,00	100,00	209,00	100,00	229,90	100,00	252,89	100,00	278,18	100,00	1.159,97	PD yang menangani	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	pentas seni yang diikuti/diselenggarakan pertahun (even)	17,00	18,00	810,00	18,00	891,00	18,00	891,00	18,00	980,10	18,00	1.078,11	18,00	1.185,92	90,00	4.945,13	PD yang menangani	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	kelompok pelestari budaya yang terfasilitasi (kelompok)	1,00	2,00	200,00	2,00	220,00	2,00	220,00	2,00	242,00	2,00	266,20	2,00	292,82	10,00	1.221,02	PD yang menangani	
Program Peningkatan Kualitas Penyajian Jenis Makanan dan Variasinya	festival kuliner makanan tradisional terselenggara (%)	N/A	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00			
PARIWISATA																		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	even yang digelar/tahun (even)	4,00	5,00	2.000,00	5,00	2.200,00	8,00	2.200,00	8,00	2.420,00	8,00	2.662,00	8,00	2.928,20	37,00	12.210,20	PD yang menangani	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	objek wisata yang ditangani (lokasi)	10,00	11,00	5.000,00	11,00	5.500,00	11,00	5.500,00	11,00	6.050,00	11,00	6.655,00	11,00	7.320,50	55,00	30.525,50	PD yang menangani	
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	kelompok/saka pariwisata yang difasilitasi (kjp)	0,00	3,00	200,00	3,00	220,00	3,00	220,00	3,00	242,00	4,00	266,20	4,00	292,82	17,00	1.221,02	PD yang menangani	
PERINDUSTRIAN																		
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	masyarakat dapat mengakses sarana informasi perindustrian (%)	100,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100,00	1.221,02	PD yang menangani	
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	cakupan IKM yang dibina (%)	N/A	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100,00	1.221,02	PD yang menangani	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	jumlah IKM yang dibina (unit)	N/A	50	400,00	50	440,00	50	440,00	50	484,00	50	532,40	50,00	585,64	250,00	2.442,04	PD yang menangani	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	UMKM dan IKM yang terfasilitasi HAKI (unit)	N/A	100,00	300,00	100,00	330,00	100,00	330,00	100,00	363,00	100,00	399,30	100,00	439,23	100,00	1.831,53	PD yang menangani	
PERDAGANGAN																		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	pasar yang diberdayakan (unit)	N/A	2,00	200,00	2,00	220,00	5,00	220,00	5,00	242,00	5,00	266,20	5,00	292,82	22,00	1.221,02	PD yang menangani	
	penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	110,00	100,00	110,00	100,00	121,00	100,00	133,10	100,00	146,41	100,00	610,51	PD yang menangani	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	inflasi daerah (%)	4,17	4,5-5	435,00	4,5-5	478,50	4,5-5	478,50	4,5-5	526,35	4,5-5	578,99	4,5-5	636,88	4,5-5	2.655,72	PD yang menangani	
	cakupan pengawasan kemitraan pasar daerah (%)	N/A	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00	0,00	PD yang menangani	
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	even promosi produk yang diikuti/diselenggarakan (even)	4,00	4,00	200,00	4,00	220,00	4,00	220,00	4,00	242,00	4,00	266,20	4,00	292,82	20,00	1.221,02	PD yang menangani	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	N/A	0-0,5	200,00	0-0,5	220,00	0,5-1	220,00	0,5-1	242,00	1-1,5	266,20	1,5-2	292,82	1,5-2	1.221,02	PD yang menangani	
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	pasar daerah yang tertata dengan baik (unit)	N/A	2,00	1.076,00	2,00	1.183,60	4,00	1.183,60	6,00	1.301,96	8,00	1.432,16	8,00	1.575,37	8,00	6.569,09	PD yang menangani	

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja														PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
Program Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah	aset pasar daerah tertata dengan baik (%)	50,00	60,00	846,68	60,00	931,34	80,00	931,34	100,00	1.024,48	100,00	1.126,93	100,00	1.239,62	100,00	5.169,05	PD yang menangani
Program Peningkatan Keamanan dan Kertertiban Pasar	aset pasar terjaga dengan baik (%)	50,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100,00	1.221,02	PD yang menangani
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	cakupan pasar daerah yang tertangani sistem persampahan TPA (unit)	20,00	20,00	200,00	20,00	220,00	30,00	220,00	40,00	242,00	50,00	266,20	50,00	292,82	50,00	1.221,02	PD yang menangani
Program Pembinaan Pedagang Pasar	kenaikan retribusi pasar/tahun (%)	N/A	30,00	200,00	30,00	220,00	30,00	220,00	30,00	242,00	30,00	266,20	30,00	292,82	30,00	1.221,02	PD yang menangani
JUMLAH				84.154,11		92.569,53		92.563,53		101.819,88		112.001,87		123.202,05		513.606,18	

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja Akhir		PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	penggunaan dana desa sesuai aturan (%)	100	100	1.000,00	100	750,00	100	1.100,00	100	1.210,00	100	1.331,00	100	1.464,10	100,00	6105,10	PD yang menangani
	panjang jalan desa terbangun (m)	54.002	54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000		270.000		PD yang menangani
	Jumlah Desa Yang Menggunakan E-Budgeting (E-Village Budgeting) (desa)	0	2		2		2		2		2		2		10		PD yang menangani
	Jumlah Posyantekdes Yang Terbentuk (unit)	0	5		5		5		5		5		5		25		PD yang menangani
	Jumlah Posyantek Yang Terbentuk (unit)	2	2		2		2		2		2		2		10		PD yang menangani
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	jumlah BUMDES (unit)	11	16	500,00	16	200,00	21	550,00	28	605,00	38	665,50	40	732,05	40	3052,55	PD yang menangani
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah desa yang memiliki DOKRENDES (desa)	264	264	829,17	264	829,17	264	912,09	264	1.003,30	264	1.103,63	264	1.213,99	264	5062,17	PD yang menangani
	ketersediaan data dan informasi pembangunan infrastruktur desa/tahun desa berprestasi (desa)	100	100		100		100		100		100		100		100,00		PD yang menangani
	kader posyandu yang dibina (orang)	72	100		100		100		100		100		100		500		PD yang menangani
	TPKD berjalan dengan baik (%)	N/A	100	500,00	100	200,00	100	550,00	100	605,00	100	665,50	100	732,05	100,00	3052,55	PD yang menangani
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	cakupan kepala desa yang lulus pelatihan kepemimpinan (orang)	264	264	500,00	264	200,00	264	550,00	264	605,00	264	665,50	264	732,05	264,00	3052,55	PD yang menangani
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	APBDes sesuai aturan (%)	100	100	500,00	100	200,00	100	550,00	100	605,00	100	665,50	100	732,05	100,00	3052,55	PD yang menangani
Program Peningkatan Perempuan Pedesaan	KSP yang terbina (kelompok)	N/A	100	500,00	100	200,00	100	550,00	100	605,00	100	665,50	100	732,05	500	3052,55	PD yang menangani
Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Desa	pemilihan kepala desa sesuai aturan (%)	100	100	500,00	100	200,00	100	550,00	100	605,00	100	665,50	100	732,05	100,00	3052,55	PD yang menangani
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa	BPD berfungsi sesuai aturan (%)	100	100	400,00	100	175,00	100	440,00	100	484,00	100	532,40	100	585,64	100,00	2442,04	PD yang menangani
	penatausahaan keuangan desa sesuai aturan (%)	100	100		100		100		100		100		100		100,00		PD yang menangani
TENAGA KERJA																	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	perusahaan yang menerapkan K3 (%)	N/A	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	385,00	100,00	423,50	100,00	465,85	100,00	512,44	100,00	2136,79	PD yang menangani
	kasus perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (%)	NA	50,00		50,00		60-70		70-75		75-80		90,00		90,00		PD yang menangani
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	rasio pencari kerja terdaftar yang mendapat pelatihan (%)	N/A	10,00	150,00	10,00	150,00	15,00	165,00	15,00	181,50	20,00	199,65	20,00	219,62	20,00	915,77	PD yang menangani
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,8	67,8-68	150,00	67,8-68	150,00	68,4-69	165,00	68,5-69,6	181,50	68,7-70,2	199,65	70,0-71,6	219,62	70,0-71,6	915,77	PD yang menangani
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	cakupan perempuan dan anak tidak kekerasan yang ditangani (orang)	N/A	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	500,00	1221,02	PD yang menangani
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	kader GSI, ibu hamil dan anak yang dibina (orang)	N/A	100	364,95	100	364,95	100	401,45	100	441,59	100	485,75	100	534,32	500,00	2228,06	PD yang menangani
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	cakupan perempuan dan anak tidak kekerasan yang ditangani (orang)	N/A	100	127,30	100	127,30	100	140,03	100	154,03	100	169,44	100	186,38	500,00	777,18	PD yang menangani
Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	keluarga pra sejahtera (%)	7,8	7,80	200,00	7,80	200,00	7,60	220,00	7,50	242,00	7,30	266,20	7,20	292,82	7,20	1221,02	PD yang menangani
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	cakupan perempuan dan anak tidak kekerasan yang ditangani (orang)	N/A	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	500,00	1221,02	PD yang menangani
Program Fasilitasi Lembaga/Organisasi Kewanitaan	Lembaga/Organisasi Kewanitaan yang terfasilitasi (lembaga)	N/A	20	200,00	20	200,00	20	220,00	20	242,00	20	266,20	20	292,82	100,00	1221,02	PD yang menangani
Program Perencanaan Sosial Budaya	Indeks Pembangunan Gender	N/A	65-66	250,00	65-66	250,00	66-68	275,00	68-69	302,50	69-70	332,75	70-70,5	366,03	70-70,5	1526,28	PD yang menangani
SOSIAL																	

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja														PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir		
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat (%)	N/A	20,00	370,00	20,00	370,00	30,00	407,00	40,00	447,70	45,00	492,47	50,00	541,72	50,00	2258,89	PD yang menanggapi
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat (%)	N/A	20,00	294,98	20,00	294,98	30,00	324,48	40,00	356,92	45,00	392,62	50,00	431,88	50,00	1800,87	PD yang menanggapi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	cakupan PMKS yang difasilitasi (persen)	5	5,00	450,00	5,00	450,00	5,00	495,00	8,00	544,50	10,00	598,95	10,00	658,85	38,00	2747,30	PD yang menanggapi
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	korban bencana yang terbantu (orang)	N/A	50,00	200,00	50,00	200,00	50,00	220,00	50,00	242,00	50,00	266,20	50,00	292,82	250,00	1221,02	PD yang menanggapi
Program Pembinaan Anak Terlantar	anak terlantar/jalanan yang difasilitasi (anak)	N/A	50,00	300,00	50,00	300,00	50,00	330,00	50,00	363,00	50,00	399,30	50,00	439,23	250,00	1831,53	PD yang menanggapi
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	penyandang cacat dan trauma yang difasilitasi (orang)	N/A	50,00	300,00	50,00	300,00	50,00	330,00	50,00	363,00	50,00	399,30	50,00	439,23	250,00	1831,53	PD yang menanggapi
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Eks Penyandang Penyakit Sosial yang difasilitasi (orang)	40	40,00	200,00	40,00	200,00	40,00	220,00	40,00	242,00	40,00	266,20	40,00	292,82	200,00	1221,02	PD yang menanggapi
Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	forum keagamaan berjalan dengan baik (%)	N/A	100,00	1.455,00	100,00	1.455,00	100,00	1.600,50	100,00	1.760,55	100,00	1.936,61	100,00	2.130,27	100,00	8882,92	PD yang menanggapi
	masyarakat yang dibina (orang)	N/A	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00	330,00	500,00	363,00	500,00	399,30	500,00	439,23	2500,00	1831,53	PD yang menanggapi
	pemuda/pelajar yang dibina (orang)	N/A	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		2500,00	0,00	PD yang menanggapi
	rumah ibadah yang ditangani (unit)	N/A	10,00	100,00	10,00	100,00	20,00	150,00	30,00	200,00	40,00	250,00	50,00	300,00	150,00	1000,00	PD yang menanggapi
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	keluarga pra sejahtera (%)	7,8	7,80	500,00	7,80	500,00	7,60	550,00	7,50	605,00	7,30	665,50	7,20	732,05	7,20	3052,55	PD yang menanggapi
Program Penanggulangan Kemiskinan (%)	Kemiskinan (%)	17,05	16,85-16,95	200,00	16,85-16,95	200,00	16,7-16,5	220,00	15,4-15,8	242,00	14,2-14,7	266,20	12,5-13,0	292,82	12,5-13,0	1221,02	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WМК)	N/A	3,00	200,00	3,00	200,00	3,00	220,00	3,00	242,00	2,00	266,20	1	292,82	1,00	1221,02	PD yang menanggapi
	ketersediaan data dan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		100,00	0,00	PD yang menanggapi
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	cakupan korban bencana alam yang tertangani (%)	N/A	100,00	679,39	100,00	679,39	100,00	747,33	100,00	822,06	100,00	904,27	100	994,69	100,00	4147,74	PD yang menanggapi
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN LINGKARAN																	PD yang menanggapi
Program pengembangan wawasan kebangsaan	kejadian kasus SARA (kasus)	0	0	284,50	0	284,50	0	312,95	0	344,25	0	378,67	0	416,54	0	1736,90	PD yang menanggapi
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	forum kebangsaan berjalan dengan baik (%)	N/A	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100,00	1221,02	PD yang menanggapi
LINGKUNGAN HIDUP																	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	jumlah pohon yang ditanam (buah)		200,00		200,00		220,00		242,00		266,20		292,82		1221,02		PD yang menanggapi
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sungai yang memenuhi baku mutu level B (%)	30	30	600,00	30	600,00	40	660,00	50	726,00	60	798,60	65	878,46	65,00	3663,06	PD yang menanggapi
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	cakupan sumber daya air yang terjaga kualitasnya (%)	N/A	≥30	2.133,82	≥30	2.133,82	≥40	2.347,20	≥50	2.581,92	≥50	2.840,11	≥60	3.124,13	≥60	13027,18	PD yang menanggapi
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	cakupan ketersediaan data dan informasi pengendalian sumber daya alam dan LH	90	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100,00	1221,02	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	buku laporan status lingkungan hidup daerah tersedia (%)	100	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100,00	1221,02	PD yang menanggapi
Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem nesisir dan laut	mangrove center berfungsi dengan baik (%)	100	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100,00	1221,02	PD yang menanggapi
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	cakupan rumah akibat bencana alam/sosial yang ditangani (unit)	50	100	200,00	100	200,00	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	500	1221,02	PD yang menanggapi
KESEHATAN																	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	55	55	3.882,49	55	3.882,49	56	4.270,73	57	4.697,81	58	5.167,59	59	5.684,35	59,00	23702,96	PD yang menanggapi
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB																	
Program Keluarga Berencana	keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan bantuan alat kontrasepsi (keluarga)	N/A						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	PD yang menanggapi
ADMINISTRASI UMUM																	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	kasus SARA (kasus)	0	0	200,00	0	200,00	0	220,00	0	242,00	0	266,20	0	292,82	0,00	1221,02	PD yang menanggapi
PERENCANAAN																	
Program Perencanaan Sosial Budaya	persentase kesenjangan pencapaian sasaran kemiskinan dengan realisasi tahunan (%)	N/A	≤30	200,00	≤30	200,00	≤30	220,00	≤30	242,00	≤30	266,20	≤30	292,82	≤30	1221,02	PD yang menanggapi

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja Akhir	PD Penanggung Jawab	
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	tersedianya data kemiskinan secara akurat (%)	N/A	50	200,00	80	200,00	90	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100,00	1221,02	PD yang menangani
JUMLAH				21.671,59		19.396,59		23.878,75		26.301,63		28.961,79		31.882,97		132.696,73	

Tabel 8.4
Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

Misi 4 : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja												Kondisi Kinerja Akhir	PD Penanggung Jawab	
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN LINMAS																	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah LINMAS per desa (orang)	0,72	0,72	665,00	0,72	665,00	0,70	731,50	0,60	804,65	0,55	885,12	0,45	973,63	0,45	4.059,89	PD yang menanggapi
	ketersediaan laporan bulanan kondisi kamtibmas kecamatan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		PD yang menanggapi
	terdeteksi dan tertanganinya potensi gangguan kamtibmas (%)	30,00	50,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		PD yang menanggapi
	jumlah anggota Poldes yang terlatih (orang)	0,00	264,00		264,00		264,00		264,00		264,00		264,00				PD yang menanggapi
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Siskamling berjalan dengan baik di seluruh tingkatan administrasi wilayah (%)	0,72	0,72	300,00	0,72	300,00	0,70	330,00	0,60	363,00	0,55	399,30	0,45	439,23	0,45	1.831,53	PD yang menanggapi
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	patroli wilayah kecamatan oleh anggota Pol PP terlaksana secara berkala (%)	30,00	30,00	200,00	30,00	200,00	30,00	220,00	30,00	242,00	30,00	266,20	30,00	292,82	30,00	1.221,02	PD yang menanggapi
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	terpantaunya keberadaan warga negara asing di wilayah Lam Tim (%)	0,72	0,72	200,00	0,72	200,00	0,70	220,00	0,60	242,00	0,55	266,20	0,45	292,82	0,45	1.221,02	PD yang menanggapi
Program pengembangan wawasan kebangsaan	kerukunan antar warga terjaga (%)	100,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	550,00	100,00	605,00	100,00	665,50	100,00	732,05	100,00	3.052,55	PD yang menanggapi
	forum pembauran kebangsaan kecamatan terlaksana secara berkala (%)	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	PD yang menanggapi
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	forum diskusi peningkatan wawasan kebangsaan terlaksana secara berkala di setiap kecamatan (%)	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100,00	1.221,02	PD yang menanggapi
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	forum diskusi peningkatan wawasan kebangsaan terlaksana secara berkala di setiap kecamatan (%)	100,00	100,00	240,00	100,00	240,00	100,00	264,00	100,00	290,40	100,00	319,44	100,00	351,38	100,00	1.465,22	PD yang menanggapi
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	masyarakat yang dibina (orang)	264,00	264,00	200,00	264,00	200,00	264,00	220,00	264,00	242,00	264,00	266,20	264,00	292,82	1.320,00	1.221,02	PD yang menanggapi
Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	61,89	61,89	575,00	61,89	575,00	63,89	632,50	65,89	695,75	66,89	765,33	70,1	841,86	70,10	3.510,43	PD yang menanggapi
Program Analisis Konflik	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk	0,72	0,72	152,40	0,72	152,40	0,70	167,64	0,60	184,40	0,55	202,84	0,45	223,13	0,45	930,42	PD yang menanggapi
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	tingkat keamanan pelaksanaan pileg dan pilkada (%)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	414,00	100,00	455,40	100,00	0,00	100,00	869,40	PD yang menanggapi
Program Perencanaan Kepamong Prajaan	ketersediaan data dan informasi kepomongprajaan (%)	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100,00	1.221,02	PD yang menanggapi
Program Kemitraan dengan Lembaga Penegak Hukum	terfasilitasinya kemitraan antar lembaga (%)	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100,00	1.221,02	PD yang menanggapi
JUMLAH					3.632,40		3.632,40		3.995,64		4.809,20		5.290,12		5.318,20		23.045,57

Tabel 8.5
Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

Misi 5 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab		
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja Akhir	
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
PENDIDIKAN																	
Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (%)	95,07	95,3	600,00	95,3	600,00	95,5	660,00	96	726,00	96,5	798,60	98	878,46	98,00	3.663,06	PD yang menangani
Program Pendidikan Anak Usia Dini	- APK PAUD	96,31	96,5-97	3.763,50	96,5-97	3.763,50	96,5-97	4.139,85	96,5-97,1	4.553,84	97-97,4	5.009,22	97-97,5	5.510,14	97-97,5	22.976,54	PD yang menangani
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (%)	99,70	99,9	21.269,35	99,9	21.269,35	100	23.396,29	100	25.735,91	100	28.309,50	100	31.140,46	100,00	129.851,51	PD yang menangani
	- APK SD/MI/Paket A	112,91	113		113		114		115		116		117		117,00	0,00	PD yang menangani
	- APM SD/MI	98,81	99,5		99,5		100		100		100		100		100,00	0,00	PD yang menangani
	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun (%)	95,97	96,5		96,5		97		97,5		98		98,5		98,50	0,00	PD yang menangani
	- APK SMP/MTs/Paket B	82,53	84		84		86		88		90		94		94,00	0,00	PD yang menangani
	- APM SMP/MTs	72,00	75		75		78		81		84		86		86,00	0,00	PD yang menangani
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,16	7,19		7,19		7,22		7,25		7,28		7,3		7,30	0,00	PD yang menangani
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat sertifikasi tenaga pendidik (%)	56,00	57,00	8.148,46	57,00	8.148,46	60,00	8.963,31	65,00	9.859,64	70,00	10.845,60	75,00	11.930,16	75,00	49.747,16	PD yang menangani
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,16	7,19	1.825,00	7,19	1.825,00	7,22	2.007,50	7,25	2.208,25	7,28	2.429,08	7,3	2.671,98	7,30	11.141,81	PD yang menangani
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	ketersediaan data & informasi potensi kepemudaan (%)	N/A	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100,00	1221,02	PD yang menangani
Program peningkatan peran serta kepemudaan	pemuda penggerak desa yang dibina (orang)	N/A	50,00	1.193,00	50,00	1.193,00	50,00	1.312,30	50,00	1.443,53	100,00	1.587,88	100,00	1.746,67	350	7283,38	PD yang menangani
Program peningkatan peran serta kepemudaan	forum komunikasi dan pembinaan pemuda berfungsi dengan baik (%)	100	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100	1221,02	PD yang menangani
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	pemuda yang dilatih (orang)	N/A	50,00	239,00	50,00	239,00	50,00	262,90	50,00	289,19	100,00	318,11	100,00	349,92	350	1459,12	PD yang menangani
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	pemuda yang dibina (orang)	N/A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	220,00	200,00	242,00	200,00	266,20	200,00	292,82	1.000	1221,02	PD yang menangani
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	guru olahraga (seluruh jenjang pendidikan) yang tersertifikasi (orang)	N/A	24,00	215,00	24,00	215,00	24,00	236,50	24,00	260,15	24,00	286,17	24,00	314,78	120	1312,60	PD yang menangani
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	jumlah atlet yang berprestasi di tingkat daerah/nasional (orang)	N/A	2,00	1.287,00	2,00	1.287,00	2,00	1.415,70	5,00	1.557,27	5,00	1.713,00	5,00	1.884,30	19	7857,26	PD yang menangani
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	senam kesegaran jasmani terselenggara secara berkala (%)	100	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	165,00	100,00	181,50	100,00	199,65	100,00	219,62	500	915,77	PD yang menangani
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah gedung olahraga (unit)	0	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.155,00	1,00	1.270,50	1,00	1.397,55	2,00	1.537,31	2	6410,36	PD yang menangani
	sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara (unit)	N/A	0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		2,00		2	0,00	PD yang menangani
	peralatan olahraga yang didistribusikan (set)	N/A	100		100		100		100		100		100		500	0,00	PD yang menangani
KESEHATAN																	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	75,5	100,00	7.155,65	100,00	7.370,00	100,00	9.145,00	100,00	8.320,00	100,00	8.795,00	100,00	9.370,00	100,00	50.155,65	PD yang menangani
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase kunjungan rawat jalan puskesmas	23,5	25,00	19.422,35	30,00	21.273,10	35,00	22.412,25	40,00	23.384,25	45,00	23.924,25	50,00	24.659,25	50,00	135.075,45	PD yang menangani
	Persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/A	0	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
Program Pengawasan Obat dan Makanan	% Jajanan Anak Sekolah (JAS) yang memenuhi syarat	77,70%	80,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	95,00	PD yang menangani
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	80,00	80,00	614,04	81,00	1.256,30	82,00	1.520,12	85,00	1.672,14	88,00	1.839,35	91,00	2.023,28	91,00	8.925,23	PD yang menangani
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk dengan akses	71,16	73,00	150,00	75,00	725,00	80,00	925,00	90,00	1.100,00	100,00	1.250,00	100,00	1.400,00	100,00	5.550,00	PD yang menangani
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan penderita baru (CNR) TB per 100.000 penduduk	96,00	105,00	2.047,36	110,00	2.250,00	120,00	2.585,00	130,00	2.850,00	140,00	3.075,00	150,00	3.325,00	150,00	16.132,36	PD yang menangani
	Persentase kasus TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	N/A	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Insiden rate kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	26,40	< 51		< 49		< 46		< 44		< 41		< 41		< 41	0,00	PD yang menangani

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab				
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja Akhir			
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)		
	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat ARV	100	100		100		100		100		100		100		100		100	PD yang menangani	
	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	N/A	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase penatalaksanaan kasus kronis Filariasis	100	100		100		100		100		100		100		100		100	PD yang menangani	
	Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,00	91,5		92,00		92,5		93,00		93,5		94,00		94,00		94,00	0,00	PD yang menangani
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	0,00	9,00	1.908,99	29,00	2.933,02	70,00	2.899,43	100,00	1.995,00	100,00	2.115,00	100,00	1.850,00	100,00	13.701,44	100,00	13.701,44	PD yang menangani
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,4	3,5	13.305,45	3,6	28.430,00	3,7	24.870,00	3,8	26.970,00	3,9	24.470,00	4,00	23.420,00	4,00	141.465,45	141.465,45	PD yang menangani	
	Persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/A	100	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82,00	82,00	PD yang menangani	
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat	63,46	75,00	100,00	85,00	200,00	90,00	300,00	90,00	400,00	90,00	450,00	90,00	550,00	90,00	2.000,00	2.000,00	PD yang menangani	
	% Jajanan Anak Sekolah (JAS) yang memenuhi syarat	77,70%	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	PD yang menangani
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	87,00	92,00	6.345,14	93,00	6.394,60	94,00	6.466,60	95,00	6.830,00	96,00	7.224,00	97,00	7.520,00	97,00	40.780,34	40.780,34	PD yang menangani	
	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN I)	93,00	96,00		97,00		98,00		99,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase warga Kabupaten Lampung Timur usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Prevalensi Hipertensi	N/A	24,3	153,12	24,28	330,00	23,79	430,00	23,38	530,00	23,10	600,00	22,80	700,00	22,80	2.743,12	2.743,12	PD yang menangani	
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
	Persentase orang dengan jiwa (ODGI) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	8,00	9,00	0,00	10,00	2.010,16	11,00	2.550,00	12,00	3.100,00	13,00	3.655,00	14,00	4.210,00	14,00	15.525,16	15.525,16	PD yang menangani	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	5,00	5,00	422,18	10,00	700,00	15,00	800,00	20,00	900,00	25,00	1.000,00	30,00	1.100,00	30,00	4.922,18	4.922,18	PD yang menangani	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah	100,00	100,00	4.596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.596,01	4.596,01	PD yang menangani	
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	49,00	52,00	32.458,07	55,00	39.500,00	58,00	42.724,00	59,00	52.530,00	63,00	59.230,00	72,00	69.000,00	72,00	295.442,07	295.442,07	PD yang menangani	
	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	PD yang menangani
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	cakupan alat kesehatan dan bangunan rumah sakit sesuai standar (%)	70	70	868,09	70	868,09	80	954,90	80	1.050,39	90	1.155,43	90	1.270,97	90,00	5.299,79	5.299,79	PD yang menangani	
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	cakupan sarana dan prasarana rumah sakit yang layak digunakan (%)	70	70	335,73	70	335,73	80	369,30	80	406,23	90	446,85	90	491,54	90,00	2.049,64	2.049,64	PD yang menangani	

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja												PD Penanggung Jawab		
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja Akhir	
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		Target	Rp. (juta)
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	pelayanan sesuai standarisasi (%)	80	80	1.013,95	80	1.013,95	90	1.115,34	90	1.226,88	100	1.349,56	100	1.484,52	100,00	6.190,25	PD yang menangani
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan	pelayanan keperawatan sesuai standar (%)	80	80	93,98	80	93,98	90	103,38	90	113,72	100	125,09	100	137,60	100,00	573,76	PD yang menangani
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB																	
Program Keluarga Berencana	alat dan obat kontrasepsi tersedia di fasilitas kesehatan/klinik KB (%)	N/A	100,00	337,80	100,00	337,80	100,00	371,58	100,00	408,74	100,00	449,61	100,00	494,57	100,00	2.062,30	PD yang menangani
Program Kesehatan Reproduksi	cakupan sekolah yang dibina (sekolah)			120,00		120,00		132,00		145,20		159,72		175,69	0,00	732,61	PD yang menangani
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	UPPKS (klip)			98,30		98,30		108,13		118,94		130,84		143,92	0,00	600,13	PD yang menangani
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	BKB yang dibina (klip)			124,88		124,88		137,37		151,10		166,22		182,84	0,00	762,40	PD yang menangani
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Masyarakat, Pokja PKK, Kader KB dan kader kesehatan yang dibina (orang)			153,00		153,00		168,30		185,13		203,64		224,00	0,00	934,06	PD yang menangani
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu dan PAUD	kader pengelola bina keluarga berkompetensi (orang)			139,32		139,32		153,25		168,57		185,43		203,97	0,00	850,53	PD yang menangani
Program Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang Berbasis Masyarakat	ketersediaan data dan informasi keluarga dan individu dalam keluarga (%)	100,00	100,00	139,32	100,00	139,32	100,00	153,25	100,00	168,57	100,00	185,43	100,00	203,97	100,00	850,53	PD yang menangani
	KIE program KB berjalan sesuai aturan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	PD yang menangani
	cakupan ketersediaan sarana dan prasarana PLKB (%)	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	PD yang menangani
JUMLAH				132.620,02		157.136,84		165.768,53		183.536,63		195.878,36		213.203,37		1.004.379,10	

Tabel 8.6
Indikasi Rencana Program RPJMD

Misi 6 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja														PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir		
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
PERTANAHAN																	
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	konflik pertanahan yang terselesaikan (persen)	N/A	50,00	215,00	50,00	215,00	60,00	236,50	60,00	258,97	60,00	284,86	60,00	310,50	60	1.305,83	PD yang menanggapi
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	pengadaan tanah untuk pembangunan tersedia sesuai aturan (%)	100,00	50,00	2.000,00	60,00	2.000,00	70,00	2.200,00	80,00	2.409,00	90,00	2.649,90	90,00	2.773,54	90	12.032,44	PD yang menanggapi
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	ketersediaan data dan informasi tanah (%)	N/A	70,00	260,40	100,00	260,40	100,00	286,44	100,00	313,65	100,00	345,02	100,00	376,07	100	1.581,58	PD yang menanggapi
	cakupan tanah milik pemda yang bersertifikat (%)	N/A	70,00		80,00		90,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100		PD yang menanggapi
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																	
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil	kepemilikan KTP elektronik(%)	75,00	85	2.000,00	85	2.000,00	95	2.200,00	100	2.409,00	100	2.649,90	100	2.888,39	100	12.147,29	PD yang menanggapi
	Kepemilikan akta kelahiran (%)	75,00	85		85		95		100		100		100		100		PD yang menanggapi
	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0,00	20		20		50		75		85		100		100		PD yang menanggapi
PERPUSTAKAAN																	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan	koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	17.112,00	17.112,00	200,00	20.000,00	200,00	25.000,00	200,00	30.000,00	200,00	35.000,00	200,00	40.000,00	200,00	147112	800,00	PD yang menanggapi
	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	33.673,00	33.673,00		41.000,00		50.000,00		60.000,00		70.000,00		80.000,00		80000		PD yang menanggapi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	pengunjung perpustakaan/minat baca (rasio minat baca)	0,25	0,26	100,00	0,27	100,00	0,28	150,00	0,29	202,25	0,32	200,00	0,32	200,00	0,32	752,25	PD yang menanggapi
	perpustakaan desa aktif (%)	27,00	27,00		27,00		28,00		29,00		30,00		30,00		30,00		PD yang menanggapi
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	indeks kepuasan masyarakat layanan perpuustakaan (nilai mutu)	N/A	60,00	200,00	60,00	200,00	65,00	200,00	67,00	200,00	70,00	262,48	75,00	322,10	75,00	984,58	PD yang menanggapi
KEARSIPAN																	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	3,00	3,00	200,00	6,00	200,00	8,00	220,00	16,00	240,90	24,00	264,99	50,00	288,84	50	1.014,73	PD yang menanggapi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Retriwal arsip (menit)	N/A	60,00	100,00	60,00	100,00	50,00	110,00	40,00	120,45	30,00	132,50	20,00	144,42	20	507,37	PD yang menanggapi
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah	jumlah arsip yang dikelola (arsip)	7.000,00	7.100,00	250,00	8.000,00	250,00	10.000,00	285,00	12.500,00	321,58	15.000,00	363,73	18.000,00	405,47	18000	1.375,78	PD yang menanggapi
Program Arsip Masuk Desa	jumlah desa sadar arsip (desa)	N/A	0,00	100,00	12,00	100,00	24,00	100,00	48,00	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	150	400,00	PD yang menanggapi
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan pengaduan yang ditangani (%)	N/A	N/A	584,00	30,00	584,00	40,00	642,40	50,00	703,43	60,00	773,77	70,00	843,41	70	3.547,01	PD yang menanggapi
	e-Gov berfungsi dengan baik (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		PD yang menanggapi
	Layanan pengaduan masyarakat on line berfungsi dengan baik (%)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		PD yang menanggapi
	Stasiun Radio Pemkab berfungsi dengan baik (%)	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		PD yang menanggapi
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	kelompok informasi masyarakat dibidang komunikasi dan informasi yang dibina/tahun (klip)	N/A	24,00	140,00	24,00	140,00	24,00	154,00	24,00	168,63	24,00	185,49	24,00	202,19	120	850,31	PD yang menanggapi
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (Skala 1-10)	6,10	6,2	850,00	6,2	850,00	6,3	935,00	6,8	1.023,83	6,9-7,3	1.126,21	7,4-7,6	1.227,57	7,4-7,6	5.162,60	PD yang menanggapi
Program Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Pembangunan	buku data dan informasi rencana dan hasil pembangunan daerah kepada publik (dokumen)	N/A	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	220,00	1,00	240,90	1,00	264,99	1,00	288,84	5	1.214,73	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	ketersediaan data dan informasi menara telekomunikasi (%)	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	240,90	100,00	264,99	100,00	288,84	100	1.214,73	PD yang menanggapi
	menara telekomunikasi yang berizin (%)	100,00	70,00		80,00		90,00		100,00		100,00	0,00	100,00		100	0,00	PD yang menanggapi
PERENCANAAN																	

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja													PD Penanggung Jawab	
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir		
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target		Rp. (juta)
Program Pengembangan Data/Informasi	cakupan ketersediaan kebutuhan data dan informasi perencanaan pembangunan (%)	80,00	80,00	560,00	100,00	560,00	100,00	616,00	100,00	674,52	100,00	741,97	100,00	808,75	100	3.401,24	PD yang menanggapi
Program Kerjasama Pembangunan	persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (%)	80,00	80,00	315,00	80,00	315,00	100,00	346,50	100,00	379,42	100,00	417,36	100,00	454,92	100	1.913,20	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (%)	100,00	80,00	200,00	80,00	200,00	100,00	220,00	100,00	240,90	100,00	264,99	100,00	288,84	100	1.329,73	PD yang menanggapi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan (%)	N/A	≤30	2.006,40	≤30	2.006,40	≤30	2.207,04	≤30	2.416,71	≤30	2.658,38	≤30	2.897,63	≤30	12.186,16	PD yang menanggapi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang perekonomian (%)	N/A	≤30	803,00	≤30	803,00	≤30	883,30	≤30	967,21	≤30	1.063,93	≤30	1.159,69	≤30	4.877,14	PD yang menanggapi
Program Perencanaan Sosial Budaya	persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya (%)	N/A	≤30	250,00	≤30	250,00	≤30	275,00	≤30	301,13	≤30	331,24	≤30	361,05	≤30	1.518,41	PD yang menanggapi
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang prasarana dan SDA (%)	N/A	≤30	1.108,00	≤30	1.108,00	≤30	1.218,80	≤30	1.334,59	≤30	1.468,04	≤30	1.600,17	≤30	6.729,60	PD yang menanggapi
TRANSMIGRASI																	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigran yang terfasilitasi (KK)	N/A	25	25	25	25	220,00	25	242,00	25	266,20	25	292,82	125	1221,02	400,00	PD yang menanggapi
Program Transmigrasi Regional	masyarakat transmigrasi yang termonitor (%)	N/A	100	100	100	100	220,00	100	242,00	100	266,20	100	292,82	100,00	1221,02	600,00	PD yang menanggapi
ADMINISTRASI UMUM																	
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai aturan (%)	100,00	100	991,90	100	991,90	100	1.091,09	100	1.194,74	100	1.314,22	100	1.432,50	100	6.024,45	PD yang menanggapi
	Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (Skala 1-10)	6,10	6,1	500,00	6,2	500,00	6,3	550,00	6,4	602,25	6,5	662,48	6,6	722,10	6,6	3.036,82	PD yang menanggapi
Program Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan	buku data informasi dan laporan kegiatan pembangunan (dok)	1,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1,00	1.100,00	1,00	1.204,50	1,00	1.324,95	1,00	1.444,20	5	5.573,65	PD yang menanggapi
	persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)	60,00	≥70		≥70		100,00		100,00		100,00	0,00	100,00		100	0,00	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Kapasitas Organisasi/Kelembagaan dan Tata Laksana	penataan kelembagaan dan tata laksana organisasi sesuai aturan (%)	100,00	100,00	450,00	100,00	450,00	100,00	495,00	100,00	542,03	100,00	596,23	100,00	649,89	100	2.733,14	PD yang menanggapi
	penetapan kinerja SKPD tersedia (%)	80,00	80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		PD yang menanggapi
	ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM (%)	80,00	80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		PD yang menanggapi
	road map reformasi birokrasi (dokumen)	N/A	0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1		PD yang menanggapi
	analisis jabatan/analisis beban kerja perangkat daerah tersedia (%)	N/A	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		PD yang menanggapi
	SOP ketatalaksanaan, sistem kerja dan budaya kerja perangkat daerah tersedia (%)	N/A	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		PD yang menanggapi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12		PD yang menanggapi
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	terfasilitasinya pemekaran desa (%)	N/A	N/A	200,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	242,00	100,00	266,20	100,00	292,82	100	322,10	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Daerah	tertib administrasi dan kinerja pmda sesuai aturan (%)	100,00	100,00	43.947,08	100,00	48.341,79	100,00	48.341,79	100,00	49.792,04	100,00	54.771,25	100,00	59.700,66	100,0	212.943,33	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)	100,00	100,00	34.749,31	100,00	38.224,24	100,00	38.224,24	100,00	41.855,54	100,00	46.041,09	100,00	50.184,79	100	176.520,66	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	ketercapaian pelaksanaan prolegda (%)	70,00	70	8.970,67	70	8.970,67	70	9.867,73	80	10.805,17	80	11.885,68	80	12.955,40	80	54.484,65	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dengan instansi terkait (%)	90,00	90,00	1.162,25	100	1.162,25	100	1.278,47	100	1.399,93	100	1.539,92	100	1.678,51	100	7.059,08	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	persentase temuan pengelolaan keuangan oleh BPK/BKPP/trjen yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00	100,00	2.837,44	100,00	2.837,44	100,00	3.121,18	100,00	3.417,70	100,00	3.759,47	100,00	4.097,82	100	17.233,60	PD yang menanggapi

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja														PD Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir		
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	
	persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100		PD yang menanggapi	
	persentase pengaduan yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100		PD yang menanggapi	
	tersedianya review laporan keuangan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100		PD yang menanggapi	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	SDM APIP yang bersertifikat (orang)	10,00	5,00	200,00	5,00	200,00	8,00	220,00	10,00	240,90	15,00	264,99	20,00	288,84	20	1.214,73	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu (%)	100,00	100,00	3.667,16	100,00	4.033,87	100,00	4.033,87	100,00	4.417,09	100,00	4.858,80	100,00	5.296,09	100	18.705,85	PD yang menanggapi
KEUANGAN																	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah sesuai aturan (%)	70,00	100,00	13.193,16	100,00	13.193,16	100,00	14.512,48	100,00	15.891,16	100,00	17.480,28	100,00	19.053,50	100	80.130,57	PD yang menanggapi
	Pertumbuhan PAD (%)	5-8	10		10		10	0,00	10		10	0,00	10		10		PD yang menanggapi
	administrasi keuangan daerah sesuai aturan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100		PD yang menanggapi
	Terbayarnya PJU (%)	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100		PD yang menanggapi
	penyaluran bansos dan hibah sesuai aturan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100		PD yang menanggapi
	terbayarnya gaji aparatur sesuai aturan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100		PD yang menanggapi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Penganggaran daerah sesuai aturan (%)	100,00	100,00	1.169,03	100,00	1.169,03	100,00	1.285,93	100,00	1.408,10	100,00	1.548,91	100,00	1.688,31	100	7.100,27	PD yang menanggapi
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	cakupan pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan (%)	80,00	80	2.507,30	80	2.758,03	90	2.758,03	90	3.020,05	90	3.322,05	100	3.621,04	100	12.821,17	PD yang menanggapi
	cakupan ASN yang mengikuti diklat/pelatihan (%)	4,00	4		5		5		5		5		5		5		PD yang menanggapi
	terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (%)	90,00	90		90		90		90		90		90		90		PD yang menanggapi
Program Pendidikan Kedisiplinan	ASN yang terfasilitasi (orang)	N/A	10	500,00	10		10		15		15		20		20		PD yang menanggapi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan ASN yang terfasilitasi (persen)	N/A	60	500,00	65		70		75		80		85		85		PD yang menanggapi
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	administrasi pindah tugas dan pensiun sesuai aturan (%)	100,00	100,00	500,00	100,00	238,80	100,00	550,00	100,00	602,25	100,00	662,48	100,00	722,10	100	2.775,62	PD yang menanggapi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	aparatur taat aturan (%)	100,00	100,00	500,00	100,00		100,00	500,00	100,00		100,00	600,00	100,00		100	1.100,00	PD yang menanggapi
JUMLAH				130.512,09		137.237,97		142.400,80		152.228,39		168.038,73		182.484,77		708.999,46	

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan Tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada:

1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan RPJMN 2014-2019; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
2. Tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
3. Penyelarasan IPM (metode baru) berdasarkan capaian beberapa waktu tahun terakhir, untuk proyeksi 2016-2021.

Tabel 9.1

Perkembangan IPM dan Komponennya di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2015

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Daya Beli	IPM
2012	68.94	11.78	7.01	8,542	65.10
2013	69.01	12.26	7.15	8,756	66.07
2014	69.33	12.38	7.16	8,814	66.42

Sumber: IPM Kabupaten Lampung Timur, 2015

Berdasarkan nilai hasil perhitungan, nilai IPM Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2014 adalah 66,42. Bila dibandingkan dengan nilai IPM tiga tahun sebelumnya (2011) nilai yang tercatat adalah 64,10, maka nilai tersebut memperlihatkan adanya peningkatan,



meskipun tidak terlalu besar. Peningkatan tersebut dicapai akibat adanya kenaikan di semua nilai indeks/indikator, yaitu Indikator Kesehatan, Indikator Pengetahuan, dan Indikator Daya Beli.

Selanjutnya, sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Lampung Timur diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Timur. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
A	Pertumbuhan PDRB/LPE (%)	5,32	4-4,5	5,0-5,5	5,0-5,5	5,0-5,5	5,3-5,8
B	PDRB per kapita (Rp.juta) (berlaku)	21	21,0-21,5	21,0-21,5	21,5-21,8	21,9-22,3	22,2-23,5
C	Kemiskinan (%)	17,05	16,95-16,85	16,85-16,75	16,5-16,2	15,8-15,4	14,7-14,2
D	Tingkat Inflasi (%)	7,46	7-8	4-4,5	4-4,5	4-4,5	4-4,5
E	Indeks Gini	N/A	0,4-0,45	0,39-0,43	0,39-0,43	0,38-0,42	0,38-0,42
2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
2.1	Pendidikan						
A	Angka Melek Huruf (%)	95,07	95,15	95,3	95,5	96	96,5
B	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,16	7,18	7,19	7,22	7,25	7,28
C	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	- APM SD/MI	98,81	98,83	98,85	99	99,2	99,3
	- APM SMP/MTs	72	72,5	73	74	75	76
D	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	- APK PAUD	96,31	96,5-96,8	96,8-97	96,5-97	96,5-97,1	97-97,4
	- APK SD/MI/Paket A	112,91	113	113,5	114	115	116
	- APK SMP/MTs/Paket B	82,53	83,5	85	88	92	95
2.2	Kesehatan						
A	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,33	69,4	69,5	69,75	70	70,25
B	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	32	30	28	26	24	22
C	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	359	329	299	269	239	209
D	Prevalensi Balita kurang gizi (%)	18,8	18	17,6	17,2	16,8	16,4
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Fokus Layanan Urusan Wajib						
1.1	Pendidikan Dasar						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun (%)	99,7	99,8	99,9	100	100	100
B	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun (%)	95,97	96	96,5	97	97,5	98
C	Ruang kelas SD dalam kondisi baik (%)	50,25	53-55	55-60	60-65	65-70	70-75
D	Ruang kelas SMP dalam kondisi baik (%)	73,76	73-75	75-78	78-83	83-85	83-85
E	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100
F	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
1.2 Kesehatan							
A	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
B	Puskesmas terakreditasi (%)	0,0	9,00	29,00	70,00	100,00	100,00
C	Rumah Sakit Terakreditasi (unit)	0,0	0	1,00	1,00	1,00	1,00
D	Rasio dokter per 100.000 penduduk	8,0	9	10,00	11,00	12,00	13,00
E	Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	49	52	55	56	56	56,5
F	Penemuan penderita baru (CNR) TB per 100.000 penduduk	96	105	120	130	130	140
G	Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat ARV	100	100	100	100	100	100
H	Insiden rate kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	26,4	< 51	< 49	< 46	< 44	< 41
I	Persentase penatalaksanaan kasus kronis Filariasis (%)	100	100	100	100	100	100
J	Prevalensi Hipertensi	N/A	24,77 %	24,28	23,79	23,38	23,10
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
A	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	42,58	43-44	45	53	59	63
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
A	RT pengguna sumber air minum bersih (%)	74,86	75	77	78	80	82
B	RT berfasilitas tempat BAB (%)	98,60	98,78	98,80	98,85	98,90	99,00
C	Rata-rata luas lantai (m2)	83,90	83,90	83,90	83,95	83,95	83,95
1.5 Lingkungan Hidup							
A	Sungai yang memenuhi baku mutu level B (%)	30	30	30	40	50	60
B	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)	N/A	≥20	≥25	≥30	≥30	≥35

Tabel 9.1 - 2

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	Sosial						
	Cakupan PMKS yang difasilitasi (%)	N/A	5	5	5	8	10
1.8	Pangan						
	Skor Pola Pangan Harapan (%)	N/A	85,0-90,2	85,0-90,3	87,1-92,6	89,4-93,5	90,1-93,6
1.9	Tenaga Kerja						
A	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,8	67,8	67,8-68	68,4-69	68,5-69,6	68,7-70,2
B	Balai Latihan Kerja (BLK)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada
1.10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
A	Koperasi aktif (%)	61,54	61,54-6,65	62-63	64-65	65-66	66-67
B	Jumlah UMKM (unit)	41.104	41.104	41.305	41.508	41.711	41.908
1.11	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas						
	Cakupan penegakan perda & perbup (%)	≤50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
1.12	Perpustakaan						
	jumlah perpustakaan desa (unit)	N/A	5	5	10	15	20
1.13	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Desa Ramah Anak (desa)	0	1	5	10	15	20
1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
A	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93
B	Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (%)	68,01	68,44	68,80	68,80	69,20	69,60
C	<i>Unmeet Need</i>	20,06	20,06	20,05	20,00	19,80	19,70
1.15	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
A	panjang jalan desa terbangun (m)	540	540	540	540	540	540
B	jumlah BUMDES (unit)	11	13	15	18	20	23
C	Jumlah desa mandiri gotong royong (desa)	0	0	0	0	1	2
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
2.1	Pertanian						
	Pertanian TPH						
	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	35,60	35-36	35,6-36,2	35,6-36,2	35,7-36,6	35,6-36,2
	Perkebunan						

Tabel 9.1 - 3

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kontribusi sub Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	6,05	6,05	6,06	6,08	6,11	6,13
	Peternakan						
	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	4,34	4,34	4,34	4,37	4,39	4,45
	Perikanan dan Kelautan						
	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	6,65	6,66	6,67	6,67	6,70	6,75
	Konsumsi ikan perkapita (kg perkapita)	21	21	21	22	24	26
2.2	Pariwisata						
A	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun (orang)	63.530	80.000	100.000	250.000	300.000	400.000
B	Kontribusi Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) terhadap PDRB	0,86	0,86	0,89	0,94	0,945	0,95
2.3	Perdagangan						
A	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,07	8,07-8,10	8,0-8,27	8,0-8,3	8,2-8,67	8,4-8,81
B	Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	N/A	0-0,5	0-0,5	0,5-1	0,5-1	1-1,5
2.4	Perindustrian						
	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	6,42	6,42	6,5-6,7	6,7-7,2	7,1-7,6	7,8-8,8
3	Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Persandian						
A	Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (Skala 1-10)	6,1	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
B	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
C	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (jam)	3	3	3	3-2,5	2,5-2	2-1,5
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,						
	Pertumbuhan PAD (%)	1,64	5-8	10	10	10	10
2	Fokus Iklim Berinvestasi						
	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum						
A	Rasio Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk	0,73	0,73	0,72	0,70	0,60	0,55

Tabel 9.1 - 4

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	60,89	60,89	61,89	10	65,89	66,89
C	Lama Proses Perizinan (hari kerja)	14	14	14	12	10	7
3	Fokus Sumber Daya Manusia						
A	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,42	67,00	68,40	69,06	69,72	70,38
B	Indeks Pembangunan Gender	N/A	65-65	65-66	66-68	68-69	69-70
C	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00	5,00	5,00	4,95	4,92	4,89

ing Timur

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2021	
9	10
5,3-5,8	5,3-5,8
24,0-24,6	24,0-24,6
13,0-12,5	13,0-12,5
4-4,5	4-4,5
0,37-0,41	0,37-0,41
98	98
7,3	7,30
99,5	100
77	77
97-97,5	97-97,5
117	117
97	97
70,34	70,34
20	20,00
179	179,00
16	16,00

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2021	
9	10
100	100
98,5	98,50
75-80	75-80
85-87	85-87
100	100
100	100
4,0	4,00
100,00	100,00
1,00	1,00
14,00	14,00
57	57,00
150	150,00
100	100,00
<41	<41
100	100
22,80	22,80
75	75
85	85
99,30	99,30
84,00	84,00
65	65
≥35	≥35

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2021	
9	10
10	10
94,0-96,2	94,0-96,2
70,0-71,6	70,0-71,6
ada	ada
67-70	67-70
42.119	42.119
≥50	≥50
24	24
25	25
0,92	0,92
69,60	69,60
19,65	19,65
540	3.240,00
25	25,00
2	2,00
35,6-36,1	35,6-36,1

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2021	
9	10
6,14	6,14
4,45	4,45
6,75	6,75
28	28
500.000	1.630.000
0,96	0,96
8,5-8,89	8,5-8,89
1,5-2	1,5-2
8,8-10,7	8,8-10,7
6,6	6,6
WTP	WTP
≤1	≤1
10	10
0,45	0,45

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2021	
<i>9</i>	<i>10</i>
70,1	70,1
7	7
71,04	71,04
70-70,5	70-70,5
4,9	4,9

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJM Nasional. Selain itu, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

10.1 Pedoman Transisi

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. PD serta seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program di RPJMD ini dengan sebaik-baiknya;



2. sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. penjabaran lebih lanjut RPJMD untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Lampung Timur yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
4. perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD ini, Bappeda Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
6. penjabaran lebih lanjut RPJMD untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Lampung Timur yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Bappeda;
7. penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
8. dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan review untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021.
9. guna menjamin pelaksanaan program, maka Organisasi Pemerintah Daerah Penanggung Jawab Program adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi urusan sesuai kewenangannya masing-masing.



BAB XI PENUTUP

Demikianlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 ini dibuat sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Lampung Timur, disusun dengan pendekatan teknokratik, *top-down bottom-up*, pendekatan partisipatif, serta pendekatan politis, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh stake holder pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Timur aman, mandiri, sejahtera, berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian berbasis agribisnis/pertanian berkelanjutan dan kualitas sumber daya manusia yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA